

Testriono, Ismatu Ropi, Aldi Nur Fadil Auliya,
Dedy Ibmar, Savran Billahi, Tati Rohayati

Gerakan **GREEN ISLAM** **DI INDONESIA**

Aktor, Strategi, dan Jaringan

“Buku yang ditulis oleh para peneliti PPIM UIN Jakarta ini memberi wawasan luas dan menawarkan kajian komprehensif tentang "Green Islam" sebagai gerakan sosial yang dinamis di Indonesia. Buku ini mengeksplorasi bagaimana berbagai kelompok, agensi, dan jaringan utama membentuk pendekatan inovatif terhadap Islam dan lingkungan, dan mengapa gerakan ini telah memperoleh daya tarik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan berfokus pada peran organisasi dan struktur nasional, aktivisme lokal, dan kekuatan pesan keagamaan, studi ini mengacu pada penelitian empiris ekstensif yang dilakukan pada tahun 2023-2024 untuk menjelaskan kebangkitan luar biasa "Green Islam" di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Buku ini adalah bacaan penting bagi mereka yang tertarik pada lingkungan hidup Muslim global, gender dan lingkungan, pemikiran dan praktik lingkungan di *Global South*, dan cara-cara unik berbagai organisasi dan kelompok keagamaan mempengaruhi aktivisme lingkungan.”

– Prof. Anna M. Gade, Ph.D.

Vilas Distinguished Achievement Professor, Nelson Institute for Environmental Studies, University of Wisconsin, Amerika Serikat; penulis buku *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations* (Columbia University Press, 2019)

Buku *Gerakan Green Islam di Indonesia* ini karya yang signifikan karena belum pernah ada identifikasi dan *mapping* yang komprehensif mengenai *whose doing what* di Indonesia dalam ruang lingkup Islam dan lingkungan hidup. Buku ini menawarkan perspektif yang luas mengenai keterkaitan agama dan lingkungan hidup serta memaparkan beragam gerakan sosial yang dijalankan oleh komunitas lingkungan yang berbasis Islam. Data riset yang dikumpulkan sangat kaya dan jelas akan memberikan kontribusi besar dalam membangun kesadaran dan pandangan teoretis maupun praktis mengenai Islam dan lingkungan hidup. Saya yakin buku ini dapat menginspirasi banyak kaum Muslim, maupun dari agama lain, untuk menghadapi krisis ekologi yang sedang berlangsung ini.

– Dicky Sofjan

ICRS-UGM; Vice President of Globethics;
dan CEO Nglanggeran Eco-Village

"Buku *Gerakan Green Islam di Indonesia* ini memotret respons komunitas Muslim terhadap perubahan lingkungan. Buku ini menjadi salah satu kajian terbaik yang mendiskusikan peta dan posisi gerakan lingkungan Muslim yang merepresentasikan kalangan masyarakat madani Green Islam. Aksi-aksi kolektif yang dilakukan oleh kelompok Green Islam di Indonesia ini menegaskan bagaimana Muslim Indonesia turut bertindak dan mengambil tanggung jawab dalam menjaga bumi."

- Fachruddin M. Mangunjaya

Ketua Pusat Pengajian Islam, Universitas Nasional;
Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian, Universitas Nasional

"Buku *Gerakan Green Islam di Indonesia: Aktor, Strategi, dan Jaringan* hadir di tengah situasi lingkungan global yang kian genting, menawarkan harapan melalui lensa keislaman. Di saat degradasi lingkungan menjadi ancaman nyata, buku ini memotret tumbuhnya inisiatif berbasis nilai-nilai Islam yang memperjuangkan keberlanjutan. Hasil riset yang mendalam ini tidak hanya relevan sebagai rujukan ilmiah, tetapi juga sebagai inspirasi bagi komunitas Muslim untuk berperan aktif menghadapi krisis lingkungan dengan semangat keadilan dan keberlanjutan."

- Hening Parlan

Aktivis Lingkungan Perempuan; Koordinator Nasional GreenFaith Indonesia;
dan penerima penghargaan "Planet Award" dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

GERAKAN GREEN ISLAM DI INDONESIA:

AKTOR, STRATEGI, DAN JARINGAN

©2024

All Rights Reserved

Penulis: Testriono, Ismatu Ropi, Aldi Nur Fadil Auliya, Dedy Ibmar,
Savran Billahi, Tati Rohayati

Editor: Testriono, Aldi Nur Fadil Auliya

Penyelia Bahasa: M. Yaufi Nur Mutiullah

Desain Sampul dan Tata Letak: Khafid Roziki

Cetakan I : Desember, 2024

ISBN : 978-602-346-154-7

e-ISBN : 978-602-346-155-4

Ukuran : 15,5 x 23 cm

Halaman : xx+306 hlm

Diterbitkan oleh:

UIN Jakarta Press bekerjasama dengan PPIM UIN Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Kec. Ciputat Timur,

Kota Tangerang Selatan, Banten 15412

Surel: puslitpen.uinjkt@gmail.com

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Testriono, Ismatu Ropi, Aldi Nur Fadil Auliya,
Dedy Ibmar, Savran Billahi, Tati Rohayati

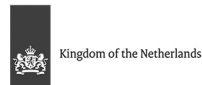
Gerakan **GREEN ISLAM DI INDONESIA**

Aktor, Strategi, dan Jaringan

Gerakan **GREEN ISLAM DI INDONESIA**

Aktor, Strategi, dan Jaringan

Diterbitkan atas kerjasama:



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
KATA PENGANTAR PENERBIT.....	XIII
KATA PENGANTAR.....	XIV
GLOSARIUM.....	XVIII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gerakan Green Islam di Indonesia: Konsep dan Definisi.....	5
1.2.1 Aktor	8
1.2.2 Strategi.....	9
1.2.3 Jaringan.....	10
1.3 Tinjauan Pustaka.....	11
1.3.1 Kemunculan Gerakan Lingkungan Berbasis Agama	11
1.3.2 Identitas Agama dalam Jejaring, Strategi, dan Program Gerakan Lingkungan Religius di Indonesia.....	16
1.4 Argumen	19
1.5 Metodologi.....	23
1.5.1 Metode	23
1.5.2 Studi Kasus	24
1.5.3 Pemilihan Kasus.....	24
1.6 Metode Pengumpulan Data.....	26
1.6.1 Desk Research.....	26
1.6.2 Focus Group Discussion (FGD)	27
1.6.3 Wawancara Mendalam.....	28
1.6.4 Observasi.....	29
1.7 Analisis Data.....	29
1.8 Signifikansi Penelitian.....	31
1.9 Rencana Isi.....	32

BAB 2 GERAKAN LINGKUNGAN DAN AGAMA: KASUS INDONESIA...	35
2.1 Tren Global Gerakan Lingkungan dan Agama	36
2.2 Gerakan Lingkungan dan Agama di Indonesia.....	39
2.3 Perkembangan Green Islam di Indonesia	42
2.4 Tiga Pola Pembentukan Green Islam di Indonesia.....	50
2.5 Kesimpulan	57
BAB 3 GREEN ISLAM SEBAGAI GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA	59
3.1 Struktur Kesempatan Politik Green Islam	60
3.2 Sumber Daya Mobilisasi Green Islam	65
3.3 Pembimbingan Aktivisme Green Islam.....	72
3.4 Perluasan Isu Aktivisme Green Islam	79
3.5 Kesimpulan	83
BAB 4 PETA DAN JARINGAN SOSIAL GREEN ISLAM DI INDONESIA. 85	85
4.1 Peta Green Islam.....	86
4.1.1 Sebaran Gerakan Green Islam	86
4.1.2 Afiliasi Struktural Kelompok Green Islam.....	87
4.1.3 Lingkup Kerja Gerakan Green Islam	90
4.1.4 Jenis Gerakan Green Islam	91
4.1.5 Tipologi Gerakan Green Islam	93
4.1.6 Keanggotaan Organisasi atau Komunitas Green Islam ..	95
4.1.7 Kepemimpinan Organisasi atau Komunitas Green Islam berdasarkan Gender.....	97
4.2 Struktur Jaringan Sosial Gerakan Green Islam.....	98
4.2.1 Aktor Dominan dalam Aktivisme Green Islam	101
4.2.2 Klaster dalam Jaringan Aktivisme Green Islam.....	105
4.3 Kesimpulan	109
BAB 5 IDENTITAS AGAMA DAN STRATEGI GREEN ISLAM DI INDONESIA.....	111
5.1 Sasaran Strategi Gerakan Green Islam di Indonesia.....	112
5.2 Strategi Aktivisme Green Islam di Indonesia.....	115
5.2.1 Penggunaan Istilah Berkonotasi Islam	115
5.2.2 Pemberdayaan Pemuka Agama	116
5.2.3 Pemberdayaan Ulama Perempuan	121
5.2.4 Pemanfaatan Momen-Momen Penting dalam Kalender Islam	125
5.2.5 Aksi Lingkungan Berdasarkan Ajaran Islam	126
5.3 Integrasi Ajaran Islam dalam Aktivisme Green Islam Lainnya.	128

5.3.1 Pelatihan Masyarakat	128
5.3.2 Mobilisasi Masyarakat Terdampak	130
5.3.3 Perluasan dan Pendalaman Jaringan Daring	133
5.4 Kesimpulan	136
BAB 6 IDENTITAS AGAMA DAN JARINGAN GREEN ISLAM DI INDONESIA	138
6.1 Jaringan Tokoh Agama dalam Aktivisme Green Islam	140
6.2 Jaringan Tokoh Akademisi Muslim dalam Aktivisme Green Islam	142
6.3 Jaringan Ormas Islam dalam Aktivisme Green Islam	144
6.4 Jaringan Lembaga Pendidikan Islam dalam Aktivisme Green Islam	146
6.5 Jaringan Lainnya dalam Aktivisme Green Islam	150
6.5.1 Jaringan Pemerintah dalam Aktivisme Green Islam	150
6.5.2 Jaringan Internasional dalam Aktivisme Green Islam	152
6.5.3 Jaringan Lintas Keagamaan dalam Aktivisme Green Islam	154
6.5.4 Jaringan Aktivis Non-agama dalam Aktivisme Green Islam	155
6.5.5 Jaringan Korporasi dalam Aktivisme Green Islam	157
6.6 Kesimpulan	158
BAB 7 PRAKTIK GREEN ISLAM DI INDONESIA: STUDI KASUS.....	160
7.1 Corak Program Aktivisme Green Islam di Indonesia	161
7.2. Program Terpilih Organisasi atau Komunitas Lingkungan Berbasis Islam di Indonesia	162
7.2.1 Manajemen Sampah dan Limbah	164
7.2.2 Dakwah Satwa Langka di Masyarakat	166
7.2.3 Perempuan dalam Program-Program Green Islam	169
7.2.4 Kampanye Lingkungan Berbasis Islam di Media Sosial	174
7.2.5 Membangun Energi Baru Terbarukan	177
7.2.6 Komunitas Adat Penjaga Hutan Terbaik Dunia	180
7.3 Analisis Faktor Keberhasilan	183
7.3.1 Identitas Agama dan Ajaran	183
7.3.2 Pelibatan Tokoh Agama	185
7.3.3 Pendanaan	187
7.3.4 Inovasi	188
7.3.5 Kolaborasi	189
7.3.6 Pelibatan Perempuan	191
7.4 Kesimpulan	194

BAB 8 KEKUATAN DAN PELUANG PERKEMBANGAN GREEN ISLAM DI INDONESIA	196
8.1 Kekuatan Green Islam di Indonesia.....	197
8.1.1 Kerangka Etika.....	197
8.1.2 Gerakan dengan Struktur dari Pusat ke Daerah	204
8.1.3 Konstituen Loyal	206
8.1.4 Kemampuan Adaptasi dan Inovasi	207
8.2 Peluang Perkembangan Green Islam di Indonesia.....	210
8.2.1 Jaringan yang Luas	210
8.2.2 Kapasitas Personal Aktivis.....	213
8.2.3 Fenomena Pergeseran Ekologis.....	217
8.3 Kesimpulan	220
BAB 9 TANTANGAN PERKEMBANGAN GREEN ISLAM DI INDONESIA.....	221
9.1 Potensi Gerakan Green Islam di Indonesia.....	221
9.2 Tantangan Gerakan Green Islam di Indonesia	223
9.2.1 Kelompok Green Islam Masih Tersegmentasi	223
9.2.2 Sebagian Kelompok Green Islam Hanya Merespons Problem Lokal.....	226
9.2.3 Ketidakmampuan Mengoptimalkan Sumber Daya Organisasi.....	229
9.2.4 Kesenjangan Pengetahuan antara Aktivis dan Konstituen	233
9.2.5 Pelibatan Perempuan Belum Maksimal.....	238
9.3 Kesimpulan	240
BAB 10 PENUTUP	242
10.1 Kesimpulan	242
10.2 Green Islam sebagai Gerakan Sosial di Indonesia.....	243
10.3 Refleksi dan Rekomendasi.....	248
10.3.1 Memperluas Kolaborasi untuk Pelestarian Lingkungan..	248
10.3.2 Wakaf sebagai <i>Endowment Fund</i>	251
10.3.3 Memperkuat Peran Perempuan dalam Isu Lingkungan...	253
10.3.4 Integrasi Green Islam dalam Arah Kebijakan Kementerian Agama.....	254
APENDIKS.....	257
CATATAN AKHIR.....	278
DAFTAR PUSTAKA	281
PROFIL PENULIS	303

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Degree Centrality.....	102
Tabel 2	Fatwa MUI tentang Lingkungan dan Perubahan Iklim.....	104
Tabel 3	Program Terpilih Green Islam	259

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sebaran kelompok lingkungan berbasis Islam	87
Gambar 2	Afiliasi struktural kelompok Green Islam	88
Gambar 3	Afiliasi struktural Green Islam dengan organisasi Islam yang sudah ada.....	89
Gambar 4	Lingkup kerja kelompok lingkungan berbasis Islam...	91
Gambar 5	Variasi jenis kelompok lingkungan berbasis Islam	92
Gambar 6	Tipologi kelompok lingkungan berbasis Islam	94
Gambar 7	Karakteristik Kelompok Lingkungan berbasis Islam ..	96
Gambar 8	Kepemimpinan kelompok lingkungan berbasis Islam berdasarkan gender	97
Gambar 9	Visualisasi jaringan aktivisme Green Islam di Indonesia	101
Gambar 10	Komponen struktur sosial dalam Analisis Jaringan Sosial (SNA)	257

KATA PENGANTAR PENERBIT

UIN Jakarta Press mempersembahkan buku ini kepada para pembaca, sebagai bagian dari komitmen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui publikasi karya-karya akademis yang berkualitas.

Buku ini merupakan salah satu wujud nyata dari dedikasi para penulis dalam menggali gerakan lingkungan berbasis Islam dengan pendekatan ilmu sosial. Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi studi-studi gerakan sosial lingkungan di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penerbitan buku ini, mulai dari penulis, editor, hingga tim produksi. Kerja keras dan kerja sama dari berbagai pihak merupakan kunci utama terwujudnya publikasi ini.

Kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan publikasi kami di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi salah satu sarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menambah wawasan serta pengetahuan di Indonesia.

Dr. Siti Ummi Masruroh, M. Sc.

UIN Jakarta Press

KATA PENGANTAR

Gerakan Green Islam dalam dua dekade terakhir ini tumbuh di berbagai komunitas Muslim di Indonesia. Meski belum menjadi fenomena yang berkembang secara masif, gerakan Green Islam terus tumbuh, tidak hanya di kalangan Muslim urban tetapi juga di kalangan Muslim akar rumput yang jauh dari perkotaan. Buku *Gerakan Green Islam di Indonesia: Aktor, Strategi, dan Jaringan* ini berusaha memotret fenomena gerakan Green Islam di Indonesia yang terus tumbuh dan meluas itu.

Buku ini merupakan hasil riset kerja sama Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dengan pemerintah Belanda melalui Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat berkontribusi bagi studi gerakan Green Islam di Indonesia dengan menyediakan data dan analisis bagi perumusan kebijakan berbasis bukti, referensi bagi para sarjana gerakan sosial lingkungan dan pengkaji hubungan Islam dan lingkungan, serta pengetahuan bagi masyarakat luas tentang gerakan Green Islam di Indonesia.

Buku ini berdasarkan riset yang berlangsung sejak November 2023 hingga Juli 2024, yang merupakan bagian dari proyek *Religious Environmentalism Action (REACT)* yang sepenuhnya didukung oleh Kerajaan Belanda. Dukungan itu memungkinkan tim penulis melakukan serangkaian tahapan dalam studi ini. Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada sejumlah ahli yang memberi masukan berharga bagi desain dan substansi penelitian dalam buku ini. Para ahli itu meliputi pengajar dan ahli studi gerakan sosial Universitas Atma Jaya Muhammad Fajar, antropolog Universitas Indonesia dan aktivis lingkungan Suraya Afiff,

dosen Universitas Gadjah Mada dan praktisi Green Islam Dicky Sofjan, serta dosen UIN Walisongo Semarang Ibnu Fikri.

Dalam proses pengumpulan data, tim penulis melibatkan 50 pemimpin organisasi atau komunitas lingkungan berbasis agama dari berbagai daerah di Indonesia melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Jakarta dan Surabaya. Pada FGD pertama di Jakarta, kami melibatkan organisasi atau komunitas lingkungan meliputi Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, Riau; Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA); Clean The City (CTC) Ahmadiyah; Pemerhati Peduli Lingkungan Hidup (Pepulih); Dewan Masjid Indonesia (DMI); Humanitarian Forum Indonesia (HFI); Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH SDA MUI); Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC); Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah, PP Muhammadiyah; Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI NU); Catholic Relief Services Indonesia; Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI); Yayasan Buddha Tzu Chi; Eco Bhinneka Muhammadiyah (EBM); Aliansi Interfaith Rainforest (IRI); Caritas Indonesia; Green Faith Indonesia; Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII); Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN); Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS); Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI); EcoDeen; Ummah for Earth (Greenpeace Indonesia); Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI); Konferensi Waligereja Indonesia (KWI); Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI); Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDI); Dewan Pengurus Nasional Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (DPP PAKIN); Salam Institute, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP 'Aisyiyah.

Dalam FGD di Surabaya, kami melibatkan organisasi maupun komunitas yang meliputi Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Pusat; Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Kota Malang; Bumi Langit Permaculture Institute; Muslim for Shared Action on Climate Impact (Mosaic); Parisada Hindu Dharma (PHDI) Bali; Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Komite Yogyakarta; Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Yogyakarta; LDII DIY; LDII Jawa Timur; Yayasan Bina Bhakti Lingkungan; Jaringan Pemuda Kristen Hijau; Adat Musi; Masyarakat Adat Dayak Iban Rumah Betang Sungai Utik; Klasis Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT); AgriQuran; Komunitas Adat Ammatoa Kajang; Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM); Yayasan Hadji Kalla; Komunitas Save Aka Gaale; dan Sanggar Hijau Indonesia

Selain itu, tim penulis melakukan wawancara mendalam kepada 53 informan, baik secara daring maupun luring. Informasi dan pandangan-pandangan yang didapatkan baik dari FGD dan wawancara mendalam menjadi bahan dasar penulisan buku ini. Tambahan lagi, tim penulis melakukan observasi terhadap program-program kerja gerakan Green Islam dari berbagai daerah di Indonesia untuk mendapatkan gambaran yang nyata dari gerakan Green Islam di Indonesia. Di antaranya kami mendatangi dan mengobservasi program lingkungan HAKA di Aceh, Salam Institute di Cirebon, LDII DIY, MDMC di Yogyakarta, Eco Bhinneka Muhammadiyah di Surakarta, dan Komunitas Adat Ammatoa Kajang di Bulukumba.

Tim penulis juga mendapatkan informasi berharga dari para tokoh dan aktivis Green Islam yang terlibat dalam berbagai forum nasional dan internasional, seperti Imam Besar Masjid Istiqlal (yang pada Oktober 2024 diangkat sebagai Menteri Agama) Nasaruddin Umar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2005-2010 dan 2010-2015) Din Syamsudin, Ketua Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS) Fachruddin M. Mangunjaya, Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLHSDA) MUI Hayu S. Prabowo, dan Koordinator Nasional Greenfaith Indonesia Hening Parlan.

Selain itu, para aktivis dan praktisi Green Islam yang hadir di Expert Meeting PPIM UIN Jakarta memberikan diskursus yang kaya tentang keberagaman aktivisme Green Islam di Indonesia. Para ahli dan praktisi yang berasal dari berbagai lembaga seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masjid Istiqlal, World Resource Institute, LPLHSDA MUI, PPI UNAS, Sajogyo Institute, Institute for Essential Services Reform, Kementerian Agama, Eco Bhinneka Muhammadiyah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Greenpeace Indonesia, Greenfaith Indonesia, dan Pesantren Misykatul Anwar. Tim penulis juga mengapresiasi masukan berharga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (yang pada Oktober 2024 diangkat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah) Abdul Mu'ti, dan aktivis Greenpeace Indonesia Khalisah Khalid. PPIM UIN Jakarta juga berterima kasih kepada jurnalis media cetak dan *online* yang telah membantu menyebarkan hasil penulisan ini.

Last but not least, tim penulis menyampaikan terima kasih kepada segenap peneliti dan staf PPIM UIN Jakarta, termasuk Jamhari Makruf, Didin Syafruddin, Saiful Umam, Fuad Jabali, Oman Fathurahman, Dadi

Darmadi, Iim Halimatusa'diyah, Arief Subhan, Herda Maulida, Narsi, Miftahuzzahro, Fikri Fahrul Faiz, M Yaufi Nur Mutiullah, Emanuel Handra, Firda Amalia, Citra Dwikasari, dan M Arif Rahman, yang telah membantu mempersiapkan segala hal terkait penelitian dan penulisan buku ini. Akhirnya, semoga buku ini dapat menjadi rujukan berharga bagi kajian lanjutan mengenai Green Islam di Indonesia dan memberi kontribusi bagi penguatan gerakan Green Islam di Indonesia sehingga gerakan itu dapat memberi dampak bagi masyarakat secara lebih besar dan luas.

Ciputat, 27 Agustus 2024

Tim Penulis

Testriono, Ismatu Ropi, Aldi N.F. Auliya, Dedy Ibmar, Savran Billahi, Tati Rohayati

GLOSARIUM

- ▶ ABA - Aisyiyah Bustanul Athfal
- ▶ AMAN - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
- ▶ ARC - Alliance of Religions and Conservation
- ▶ BNPB - Badan Nasional Penanggulangan Bencana
- ▶ BPDAS - Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai
- ▶ BWI - Badan Wakaf Indonesia
- ▶ CBSRM - Community Based Disaster Research and Management
- ▶ CDCC - Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations
- ▶ CTC - Clean the City
- ▶ DMI - Dewan Masjid Indonesia
- ▶ DPW - Dewan Pimpinan Wilayah
- ▶ EBM - Eco Bhinneka Muhammadiyah
- ▶ ECSA - Ecoprint & Craft Sangurejo
- ▶ EEA - European Environment Agency
- ▶ EEN - Evangelical Environmental Network
- ▶ EMRDA - Ethiopian Muslims Relief and Development Association
- ▶ FGD - Focus Group Discussion
- ▶ FNKSDA - Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam
- ▶ FOKKALIS - Forum Kolaborasi Komunitas Peduli Sampah
- ▶ GNKLH - Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- ▶ HAKA - Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
- ▶ HFI - Humanitarian Forum Indonesia
- ▶ IFEES - Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences
- ▶ IGABA - Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal
- ▶ IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
- ▶ IRC - Inter Religious Council

- ▶ IRI Indonesia - Interfaith Rainforest Initiative
- ▶ JAI - Jemaat Ahmadiyah Indonesia
- ▶ JATAM - Jaringan Advokasi Tambang
- ▶ JISRA - Joint Initiative for Strategic Religious Action
- ▶ KDP - Kampung Daulat Pesisir
- ▶ KEHATI - Keanekaragaman Hayati
- ▶ KEL - Kawasan Ekosistem Leuser
- ▶ KELOMPENCAPIR - Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa
- ▶ KHM - Kader Hijau Muhammadiyah
- ▶ KNEKS - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- ▶ KWI - Konferensi Waligereja Indonesia
- ▶ KWT - Kelompok Wanita Tani
- ▶ LDII - Lembaga Dakwah Islam Indonesia
- ▶ LLHPB 'Aisyiyah - Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 'Aisyiyah
- ▶ LPBI NU - Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama
- ▶ LPLHSDA MUI - Lembaga Pemuliaan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia
- ▶ LRB - Lembaga Resiliensi Bencana
- ▶ LRB Muhammadiyah - Lembaga Resiliensi Bencana
- ▶ LSM - Lembaga Swadaya Masyarakat
- ▶ Matakini - Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia
- ▶ MDMC - Muhammadiyah Disaster Management Center
- ▶ MLH Muhammadiyah - Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah
- ▶ MOSAIC - Muslims for Shared Action on Climate Impact atau Kolaborasi Umat Muslim untuk Dampak Perubahan Iklim
- ▶ MPU Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama
- ▶ MUI - Majelis Ulama Indonesia
- ▶ NCA - Norwegian Church Aid
- ▶ NCC - National Council of Churches
- ▶ NDC - Nationally Determined Contribution
- ▶ NGO - Non Governmental Organization
- ▶ PBNU - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
- ▶ PEPULIH - Pemerhati Peduli Lingkungan Hidup
- ▶ PGI - Persekutuan Gereja Indonesia
- ▶ PHDI - Parisada Hindu Dharma Indonesia

- ▶ PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
- ▶ PPI UNAS - Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional
- ▶ PPSDA - Perempuan Pembela Sumber Daya Alam
- ▶ PKK - Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
- ▶ PRIMA - Perhimpunan Remaja Masjid
- ▶ RTL - Rencana Tindak Lanjut
- ▶ SIEJ - Society of Indonesia Environmental Journalist
- ▶ SNA - Social Network Analysis
- ▶ TPA - Tempat Pembuangan Akhir
- ▶ TSLP - Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- ▶ UNDP - United Nations Development Programme
- ▶ UNEP - United Nations Environment Programme
- ▶ UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change
- ▶ USAID - United States Agency for International Development
- ▶ WALHI - Wahana Lingkungan Hidup
- ▶ Walubi - Perwakilan Umat Buddha Indonesia
- ▶ WWF - World Wide Fund for Nature
- ▶ YAPEKA - Yayasan Pendidikan Pelestarian Alam
- ▶ YBBL - Yayasan Bina Bhakti Lingkungan
- ▶ YBBL Surabaya - Yayasan Bina Bhakti Lingkungan
- ▶ YHK - Yayasan Hadji Kalla
- ▶ YRII - Yayasan Relief Islami Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Buku ini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana gerakan Green Islam berkembang di Indonesia, siapa para aktornya dan bagaimana mereka berjejaring, serta bagaimana para aktivis Green Islam itu menggunakan identitas agama untuk membangun strategi dan program kerja mereka.

Ada sejumlah alasan yang mendasari pentingnya buku ini. Pertama, perubahan lingkungan¹ dan iklim² menjadi tantangan global yang semakin mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, sementara Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap dampaknya. Menurut World Risk Report 2022, Indonesia merupakan negara dengan risiko bencana tertinggi ketiga dari 193 negara di dunia (World Risk Report 2022). Sementara menurut Indeks Inisiatif Adaptasi Global Notre Dame (ND-GAIN) 2021, yang menilai kerentanan dan kesiapan suatu negara terhadap perubahan iklim, Indonesia berada di peringkat ke-103 untuk kerentanan (*vulnerability*) dari 185 negara dan peringkat ke-102 untuk kesiapan (*preparedness*) terhadap perubahan iklim dari 192 negara (di mana peringkat yang lebih tinggi berarti lebih baik) (University of Notre Dame, n.d.). Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagian besar bencana alam di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang disebabkan di antaranya karena perubahan iklim. Menurut catatan BNPB, dalam kurun waktu 2014–2023, terdapat setidaknya 27.775 bencana hidrometeorologi dalam berbagai jenisnya itu. Contoh ancaman perubahan iklim lainnya berasal dari peningkatan

suhu, perubahan pola curah hujan, dan musim hujan yang lebih pendek di beberapa daerah yang berdampak langsung pada pertanian dan berkontribusi pada peningkatan masalah kesehatan.

Selain makin menguatnya isu perubahan lingkungan dan iklim dalam aktivisme lingkungan, alasan kedua yang mendasari pentingnya penelitian dalam buku ini adalah meningkatnya kesadaran di kalangan ilmuwan, pemimpin politik dan pembuat kebijakan, tokoh agama, serta masyarakat pada umumnya bahwa kini dunia tengah menghadapi krisis lingkungan. Banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang terlibat dalam aktivisme untuk mengatasi persoalan-persoalan lingkungan yang kini tengah dihadapi dunia, di antaranya seperti polusi udara, krisis air bersih, deforestasi, berkurangnya keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim.

Alasan ketiga adalah banyak studi yang menyimpulkan bahwa manusialah yang paling bertanggung jawab dalam menyebabkan krisis lingkungan tersebut dan karenanya berkewajiban untuk memperbaikinya (Deta 2020). Beberapa penelitian menjelaskan bahwa akar masalah krisis lingkungan terletak pada pandangan dunia modern yang memisahkan manusia dari alam, sehingga menyebabkan manusia melihat alam sebagai objek yang dapat dieksploitasi, atau cara pandang yang disebut antroposentrisme. Antroposentrisme adalah pandangan yang berpendapat bahwa manusia terpisah dan lebih unggul dari alam, dan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai intrinsik, sementara entitas lain (termasuk hewan, tumbuhan, sumber daya mineral, dan sebagainya) adalah sumber daya yang dapat dieksploitasi demi kepentingan umat manusia (Boslaugh 2024). Dalam konteks inilah, banyak kalangan menilai bahwa agama merupakan salah satu pihak yang turut mengafirmasi pandangan dunia modern itu (White 2017).

Oleh karena itu, keempat, beberapa sarjana menyatakan bahwa upaya untuk mengatasi krisis lingkungan perlu melibatkan 'penemuan kembali' ajaran agama dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan (Deta 2020), sebagaimana misalnya revitalisasi Nasr atas pandangan tradisional Islam mengenai lingkungan (Nasr 1996). Dengan kata lain, para sarjana ini mengakui perlunya 'rekonstruksi', atau adaptasi kreatif ajaran agama dalam kaitannya dengan praktik lingkungan yang positif (Suteja 2009). Ini sekaligus menjelaskan mengapa organisasi berbasis agama mulai melihat lingkungan sebagai isu utama (Gade 2019, Tucker, Grim, dan Jenkins 2017: 5-8). Hal ini dapat dilihat dari program-program



lingkungan yang berupaya menyediakan sumber daya yang sejalan dengan ajaran atau tradisi agama tertentu (misalnya Interfaith Rainforest Initiative) (UNEP 2019). Pendeknya, para aktivis lingkungan berbasis agama memandang tata nilai universal agama dan kepercayaan sebagai sumber di mana pesan lingkungan etis-normatif dapat diambil (Gade 2019).

Lebih jauh, dalam dua dekade terakhir, gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh atau berasal dari kelompok-kelompok agama, baik yang dipimpin oleh para aktivis lingkungan maupun komunitas lokal, meningkat secara cepat di Indonesia (Smith 2018). Misalnya, Smith, Adam, dan Maarif (2024) menemukan bahwa dalam rentang tahun 1990 hingga 2022 terdapat 208 gerakan atau aksi-aksi sosial yang beroperasi di masyarakat lokal di Indonesia yang bekerja untuk merespons isu lingkungan dan perubahan iklim.

Sementara *desk research* yang dilakukan oleh tim penulis buku ini menemukan setidaknya 192 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis keagamaan dari berbagai agama (Database React), seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, juga agama lokal dan masyarakat adat, yang saat ini aktif bekerja dan melakukan program-program, termasuk kampanye publik, untuk merespons isu lingkungan dan perubahan iklim. Kelompok dan komunitas itu berupaya mengartikulasikan apa yang disebut sebagai “etika lingkungan yang religius” (Grossman 2019). Komitmen para tokoh agama dan masyarakat dapat menjadi kunci bagi suksesnya gerakan penyelamatan lingkungan dan upaya-upaya bersama untuk mengatasi perubahan iklim, yang menjadi salah satu alasan bagi pentingnya studi tentang peran agama dan aktivisme lingkungan.

Alasan terakhir yang mendasari pentingnya penulisan buku ini adalah bahwa Green Islam, sebagai gerakan yang berorientasi pelestarian alam yang menggunakan prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam dalam gerakannya (Millah 2021), menjadi salah satu tren dalam gerakan lingkungan berbasis keagamaan di Indonesia belakangan ini. Sebagaimana umumnya gerakan lingkungan (*green movement*), gerakan Green Islam juga dilakukan secara kolektif yang berorientasi pada penyelamatan bumi, serta mendukung pelestarian alam di mana manusia merupakan bagian darinya (Millah 2023).

Di Indonesia, gerakan Green Islam mulai bermunculan di tahun 2000-an, terutama setelah tsunami Aceh tahun 2004, dan menjadi

gerakan yang cukup aktif dan berpengaruh ditandai ketika Nahdlatul Ulama mendirikan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Muhammadiyah mendirikan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Majelis Lingkungan Hidup (MLH), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLHSDA), masing-masing pada tahun 2010. Keterlibatan langsung organisasi-organisasi besar Islam yang telah lama berdiri itu dalam aktivisme lingkungan memperkuat gerakan Green Islam di Indonesia.

Namun, meski gerakan lingkungan keagamaan terus meningkat di Indonesia, baik secara kuantitas organisasi maupun aksi-aksinya, upaya sistematis untuk menggali mengapa dan bagaimana aktivisme Green Islam ini muncul di Indonesia, juga upaya untuk memetakan siapa aktor-aktor utama yang berperan dalam gerakan itu, serta bagaimana satu lembaga berjejaring dan bekerja sama dengan yang lain, belum dieksplorasi lebih jauh. Selain itu, belum banyak pula studi yang berupaya melihat bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter mereka yang berbeda-beda untuk membangun strategi, jaringan, dan program kerja mereka. Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan di atas, studi ini hendak mengisi kekosongan dan memperkaya literatur terkait Green Islam atau aktivisme lingkungan berbasis Islam di Indonesia.

Secara lebih spesifik, buku ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut ini:

- 1) Mengapa dan bagaimana aktivisme Green Islam muncul dan berkembang di Indonesia?
- 2) Bagaimana peta aktivisme Green Islam di Indonesia, termasuk aktor-aktor dan jaringan-jaringan mereka?
- 3) Bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter mereka yang berbeda-beda untuk membangun strategi, jaringan, dan program kerja mereka?
- 4) Apa contoh praktik terpilih yang dilakukan oleh aktivis Green Islam dalam menjalankan aksi-aksi lingkungan di Indonesia?
- 5) Apa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh aktivisme Green Islam di Indonesia?



1.2 Gerakan Green Islam di Indonesia: Konsep dan Definisi

Buku ini fokus pada gerakan sosial lingkungan berbasis keagamaan (*religious environmentalism*), yang merupakan suatu aktivisme lingkungan yang menggunakan sumber daya agama. Untuk memperoleh pemahaman tentang apa itu gerakan Green Islam yang dimaksud dalam buku ini, bagian ini memaparkan sejumlah konsep kunci terkait diskusi gerakan Green Islam di Indonesia, termasuk yang dimaksud aktor, strategi, dan jaringan, dalam buku ini. Penjelasan tentang istilah-istilah tersebut dimaksudkan untuk menghindari misinterpretasi terhadap konsep-konsep kunci yang digunakan dalam buku ini. Selain itu, bagian konseptualisasi ini sekaligus untuk menunjukkan secara persis apa yang dimaksudkan, dan tidak dimaksudkan, dalam istilah-istilah yang digunakan dalam buku ini.

Beberapa sarjana menggunakan istilah yang beragam ketika membicarakan konsep Islam dan lingkungan. Foltz (2003), misalnya, mengajukan konsep *Islamic environmentalism*, yakni paham pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada sumber-sumber teks Islam (Alquran dan hadis). *Islamic environmentalism* ini memuat prinsip-prinsip etika lingkungan dalam Islam, seperti *tauhid*, *khalifah*, dan *fitrah*. Sementara Afrasiabi (2003) menawarkan konsep *Islamic ecotheology* yang mengandung pengertian upaya memahami persoalan ekologi berdasarkan pandangan Alquran dan hadis. Konsep ini berupaya merekonstruksi makna-makna kunci dalam teologi Islam yang terkait dengan alam, misalnya *tauhid*, *makhluk*, dan *ummah*. Serupa dengan Afrasiabi, Ouis (1998) juga menawarkan konsep *Islamic ecotheology*. Sedikit berbeda dari konsep Afrasiabi, Ouis lebih banyak berbicara tentang teks-teks Alquran sebagai landasan dalam membangun konsep *Islamic ecotheology*.

Anna Gade (2019) menggunakan konsep *Muslim environmentalism* ketika menjelaskan dasar-dasar sosial dan budaya lingkungan hidup dalam Islam untuk membongkar keberagaman model aktivisme lingkungan kelompok Muslim. Gade misalnya mencontohkan bahwa masyarakat Muslim Indonesia kerap menganggap praktik kepercayaan lokal, seperti ritual labuhan yang dipraktikkan oleh masyarakat Muslim di lereng Gunung Merapi, sebagai bagian dari Islam yang "tidak murni" karena mengandung sinkretisme. Sebaliknya, Gade melihat praktik tersebut sebagai bagian dari sejarah Islam yang menekankan

keseimbangan (*al-mizan*) hidup tanah, air, dan udara. Bagi Gade, esensi gagasan tentang 'lingkungan' adalah ide tentang etika. Istilah lain yang juga sering muncul ketika membicarakan Islam dan lingkungan adalah *eco-Islam*, yang merujuk pada seruan reformasi radikal atas gaya hidup, sistem tata kelola keuangan, ekonomi, sosial, atau politik (Schwencke 2012). Schwencke menyebutkan bahwa dalam praktiknya *eco-Islam* mempunyai kedekatan dengan gerakan ekologi radikal dan pemikiran anarkis, seperti masyarakat organik Bookchin, bioregionalisme, gerakan *eco-village*, dan lainnya.

Konsep-konsep Islam dan lingkungan yang ditawarkan oleh Foltz (2003), Afrasiabi (2003), Ouis (1998), dan Gade (2019) merupakan interpretasi dan hasil pembacaan para sarjana tersebut atas teks-teks keagamaan, seperti Alquran dan hadis, juga kitab-kitab Islam klasik. Karenanya, sebagian besar dari konsep-konsep tersebut lebih bersifat normatif doktrinal, serta tidak secara spesifik merujuk pada gerakan sosial lingkungan yang berbasis keagamaan, khususnya Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam buku ini.

Oleh karena itu, dalam menyebut gerakan lingkungan berbasis Islam, buku ini menggunakan istilah “Green Islam” yang diadopsi dari definisi Ibrahim Abdul-Matin (2010) dalam *Green Deen: What Islam Teaches about Protecting the Planet*, di mana kata “Deen” yang dimaksud di sini adalah agama Islam. “Green Islam” memiliki makna yang hampir sama dengan “Green Deen” sebagaimana dimaksud oleh Abdul-Matin (2010), di mana konsep Green Islam memiliki arti adanya pengamalan ajaran Islam yang menegaskan hubungan integral antara keimanan dan lingkungan atau alam semesta (Abdul-Matin 2010). Ahmad Sihabul Millah (2021) dalam *Green Islam sebagai Counter Discourse dalam Mempromosikan Gaya Hidup Ramah Lingkungan* juga menggunakan konsep yang sama ketika menggunakan istilah “Green Islam”. Gerakan Green Islam atau “Islam hijau” pada dasarnya memiliki kemiripan dengan gerakan hijau (*green movement*), yakni gerakan menjaga dan melestarikan lingkungan (Millah 2023). Sebagaimana gerakan hijau, gerakan Green Islam juga dilakukan secara kolektif yang berorientasi pada keselamatan bumi, serta mendukung pelestarian alam di mana manusia merupakan bagian darinya (Millah 2021). Perbedaannya dari gerakan hijau adalah Green Islam menggunakan prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam dalam setiap gerakannya (Millah 2023).



Mengacu pada diskusi di atas, Green Islam dalam buku ini merujuk pada upaya bersama dalam pengamalan ajaran Islam yang menegaskan hubungan integral antara keimanan dan pelestarian lingkungan atau, singkatnya, upaya kolektif yang menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam aksi-aksi pelestarian alam.

Selain itu, penelitian dalam buku ini memposisikan isu lingkungan sebagai isu sosial, di mana buku ini lebih berfokus pada aktivisme lingkungan dibandingkan pembahasan ilmiah atau akademis mengenai lingkungan. Karena itu, pembatasan studi dalam buku ini adalah pada ranah identitas agama dan aktivisme lingkungan. Buku ini tidak akan membatasi aktivisme tersebut pada suatu ruang lingkup lingkungan tertentu seperti yang lazim dilakukan pada penelitian-penelitian ekonomi maupun sains dan teknologi mengenai lingkungan, karena temuan awal penelitian dalam proses penulisan ini menemukan diversifikasi fokus dalam suatu gerakan lingkungan berbasis agama. Suatu gerakan bisa saja berfokus pada isu konservasi alam, perubahan iklim, hingga keberlanjutan sekaligus dalam aktivismenya.

Buku ini ingin menjelaskan secara ekstensif mengenai aktivisme lingkungan berbasis Islam, yang mencakup aktor, jaringan, dan strategi. Aktor atau para aktivis lingkungan berbasis Islam di Indonesia berjejaring satu dengan yang lain dalam menjalankan program-program dan aksi-aksi lingkungan. Aktor gerakan Green Islam di Indonesia meliputi ormas, komunitas, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau koalisi nirlaba yang menerapkan pendekatan berbasis Islam terhadap lingkungan. Dalam buku ini, organisasi merujuk pada organisasi yang memiliki struktur formal; LSM merujuk pada organisasi non-pemerintah atau yayasan yang bergerak di bidang lingkungan; komunitas merujuk pada sekelompok masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan yang dibentuk secara informal; dan koalisi sebagai gabungan organisasi baik formal maupun informal yang bergerak di bidang isu lingkungan.

Aktivisme lingkungan berbasis keagamaan memiliki jangkauan lokal, nasional, dan internasional. Jangkauan internasional berarti cabang atau anak organisasi dari gerakan internasional atau organisasi yang berbasis dan memiliki program di negara lain. Nasional berarti gerakan yang berdiri di Indonesia yang memiliki cabang atau program kerja di beberapa provinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia. Lokal berarti gerakan atau cabang gerakan yang berbasis di wilayah tertentu (provinsi, kabupaten atau kota).

1.2.1 Aktor

Buku ini memosisikan organisasi lingkungan sebagai aktor gerakan sosial, dalam hal ini gerakan Green Islam. Dalam gerakan sosial, organisasi dapat ditempatkan sebagai aktor, karena karakternya yang memiliki peran yang dikonstruksi di masyarakat, mengusung aktivitas kesukarelaan, dan memiliki peran keagenan (Bromley dan Meyer 2015). Buku ini juga menempatkan kerangka teoritis “organisasi lingkungan” yang dikonseptualisasikan oleh Clare Saunders (2013). Ia secara luas memahami “organisasi lingkungan” dengan memasukkan aliran gerakan sosial yang terlembaga (Turner dan Killian 1957; Smelser 1962; Doherty 2002) dan tidak terlembaga (Rawcliffe 1998; Princen 1994; Biliouri 1999; Rootes 2007; Saunders dan Andretta 2009) dengan meletakkan peran terhadap lingkungan hidup dan keterhubungan pada jaringan formal maupun informal dengan gerakan lain sebagai unsur penting dari definisi “organisasi lingkungan” (Saunders 2013).

Kerangka teoritis yang ditawarkan Saunders ini berbeda dengan definisi yang ditawarkan Doherty (2002) mengenai “Gerakan Hijau” yang hanya menekankan pada organisasi-organisasi lingkungan yang tidak terlembagakan dan lebih mengandalkan kesamaan identitas untuk membentuk aksi kolektif. Dalam pandangan non-institusionalis ini, jarak terhadap akses kekuasaan juga menjadi penting. Pandangan seperti ini tidak mengikutsertakan organisasi-organisasi formal yang terlembagakan dan mereka yang memiliki keterbukaan akses terhadap kekuasaan sebagai “organisasi lingkungan”. Buku ini tidak membuat pemisah antara pendekatan institusional dan non-institusional, seperti yang sudah dipaparkan beberapa sarjana (McCarthy dan Zald 1977; Diani 1992; Dalton 1994; della Porta dan Diani 1999; McAdam 2002, Burstein dan Linton 2002; Saunders 2013).

Buku ini menemukan bahwa gerakan Green Islam melibatkan organisasi-organisasi yang terlembagakan secara formal (institusional) dan organisasi-organisasi yang bergerak berdasarkan identitas kolektif dan tidak terlembaga secara formal (non-institusional). Organisasi-organisasi Green Islam yang terlembagakan secara formal sebagai objek penelitian dalam buku ini, di antaranya Majelis Lingkungan Hidup (MLH), Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) atau Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah, dan Eco Bhinneka yang



berada di organisasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah; Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) yang berada di Bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU); Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLHSDA) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI); Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS) yang memiliki beberapa program lingkungan, seperti eko-pesantren dan dai konservasionis; Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang memiliki program Green-Ramadan dan Eco-Pesantren.

Sementara organisasi-organisasi Green Islam yang lebih terhubung berdasarkan identitas kolektif pada buku ini, antara lain, Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) yang terpisah dari struktur resmi Muhammadiyah, namun terikat oleh identitas kolektif Muhammadiyah dan kesadaran lingkungan mereka; Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNSKDA) atau Salam Institute yang terhubung dengan identitas Nahdliyin dan permasalahan domestik mereka terkait kerusakan lingkungan; Save Ake Gaale di Ternate yang terikat oleh identitas komunal mereka dan permasalahan sumber daya air. Seperti yang diketengahkan oleh Saunders (2013), organisasi-organisasi tersebut memiliki peran terhadap masalah lingkungan dan saling terhubung, baik melalui jaringan formal maupun informal, dengan gerakan-gerakan lain.

1.2.2 Strategi

Strategi yang digunakan oleh organisasi dan komunitas Green Islam beragam, mulai dari pendekatan konfrontasi hingga pendekatan yang moderat, yang mementingkan dialog, pelatihan, hingga negosiasi dengan pemerintah (Young 1993). Buku ini melihat pola yang beragam itu sebagai bagian dari strategi organisasi dan komunitas lingkungan (Saunders 2013), dalam hal ini organisasi-organisasi Green Islam. Buku ini tidak hanya mendefinisikan strategi gerakan lingkungan dalam bentuk strategi yang radikal, seperti yang dikonseptualisasikan oleh beberapa sarjana (Purdue dkk 1997; McKay 1998). Dalam penelitian tentang gerakan lingkungan, adalah penting untuk melihat berbagai strategi mereka untuk menganalisis pola gerakan yang lebih luas (Saunders 2013).

Ditinjau dari target dan sasaran gerakan, terdapat setidaknya dua pola strategi yang digunakan oleh organisasi dan komunitas Green Islam

dalam memposisikan diri dan menysar target gerakan mereka. Pertama, strategi gerakan Green Islam yang bergerak dan mengampanyekan Islam dan lingkungan kepada masyarakat luas, terutama masyarakat yang belum teredukasi dengan baik dalam persoalan lingkungan, dengan tujuan untuk mengurangi dan mitigasi kerusakan-kerusakan lingkungan yang telah terjadi di tingkat akar rumput (*grass roots*). Pola strategi pertama ini cenderung mendekati persoalan dari bawah ke atas (*bottom-up*), sehingga relatif membuka diri untuk bekerja sama dengan pemerintah dan korporasi, seperti dengan melibatkan tokoh-tokoh agama atau memanfaatkan media sosial sebagai sarana kampanye.

Kedua, strategi Green Islam yang berfokus pada sesuatu yang mereka nilai memiliki otoritas atau bahkan bertanggung jawab dalam persoalan lingkungan hidup, terutama industri atau pemerintah. Strategi kedua ini lebih memahami masalah lingkungan sebagai masalah struktural, karena itu mereka mendekati persoalan dari atas ke bawah (*top down*), sehingga cenderung mengambil jarak dengan pemerintah dan korporasi, seperti dengan mengembangkan pelatihan dan edukasi rakyat, hingga mobilisasi massa. Benford dan Snow (2000) menjelaskan bahwa pemosisian sasaran dan target yang perlu dipersalahkan (*diagnostic framing*) ini sangat penting, agar suatu gerakan dapat menawarkan artikulasi solusi (*prognostic framing*). Dengan pandangan seperti itu, gerakan sosial dapat menyediakan panggilan untuk bergerak atau penjelasan rasional yang memungkinkan orang terlibat dalam suatu tindakan kolektif (Benford dan Snow 2000).

1.2.3 Jaringan

Dengan menggunakan konsepsi “jaringan”, buku ini berusaha menunjukkan gerakan Green Islam sebagai gerakan lingkungan yang plural, seperti yang dipotret oleh Bosso (1995) yang menempatkan konsepsi jaringan dalam mendefinisikan suatu gerakan sebagai gerakan lingkungan. Ini juga selaras dengan pendekatan Carter (2001) yang menyimpulkan bahwa dalam membentuk gerakan lingkungan terdapat kesatuan yang cukup karena kepedulian dan kesadaran bersama terhadap lingkungan. Seperti yang juga ditemukan (Saunders 2013), para aktivis lingkungan selalu memiliki kecenderungan untuk memperluas jaringannya, karena dalam banyak kasus mereka adalah aktivis hibrida, yang aktif menyerukan isu lingkungan pada tingkat global, nasional, maupun lokal sekaligus (Smith 2017). Meskipun beberapa sarjana



mendekati pembentukan jaringan lingkungan dengan pendekatan yang berbeda, seperti Pepper (1996) dan Purkiss (2000) yang menyatakan bahwa kelompok lingkungan terbentuk oleh gagasan anarkisme yang saling berjejaring karena kesamaan dalam gerakan anti-globalisasi (2001), atau beberapa sarjana yang menjelaskan jaringan lingkungan terbentuk karena hanya kesadaran pro-lingkungan yang lebih bersifat personal, seperti mengurangi konsumerisme, sikap daur ulang, dan konservasi energi (Almanzar 1998), namun pendekatan-pendekatan itu pada praktiknya saling berkelindan (Saunders 2013).

Buku ini menempatkan konsepsi “jaringan” pada kerangka teoritis yang luas itu. Karena, baik gerakan Green Islam yang bergerak berdasarkan sikap anti-kemapanan dan anti-industri ekstraktif, seperti Salam Institute, Bumi Langit Permaculture, Save Ake Gaale, FNKSDA, KHM, dan lainnya dapat saling berjejaring dengan organisasi-organisasi Green Islam yang mendorong pada perilaku pro-lingkungan yang lebih bersifat perubahan perilaku personal seperti LDII, MLH, Clean the City Ahmadiyah, Ummah for Earth, MDMC, Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, AgriQuran, EcoDeen, MOSAIC, dan sebagainya. Banyak juga di antara mereka yang menjadi aktivis hibrida, dalam artian aktif dalam gerakan maupun Green Islam di tingkat global, nasional, maupun lokal, seperti Fachruddin Mangunjaya (PPI UNAS), Hening Parlan (Muhammadiyah), Din Syamsuddin (Muhammadiyah), Nasarudin Umar (Masjid Istiqlal), David Efendi (KHM), dan lainnya.

1.3 Tinjauan Pustaka

1.3.1 Kemunculan Gerakan Lingkungan Berbasis Agama

Mengapa dan bagaimana aktivisme Green Islam muncul dan berkembang di Indonesia? Apa konteks yang melatarbelakanginya? Siapa aktor-aktor utamanya dan bagaimana mereka berjejaring satu dengan yang lain?

Gerakan Green Islam merupakan salah satu cabang yang muncul dalam aktivisme lingkungan hidup di Indonesia. Sebelumnya, sudah ada organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) atau Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) yang vokal dalam memprotes agenda pembangunan negara yang didasarkan pada ekstraksi sumber daya alam, bahan bakar fosil, penebangan hutan, dan penolakan terhadap hak-hak tanah adat.

Aktivisme lingkungan yang dilakukan oleh organisasi seperti WALHI memiliki dasar moral yang jelas dengan basis isu lingkungan yang nyata (Colombijn 1998), namun tidak dengan basis spiritual atau agama yang dapat memberikan kerangka umum pada perubahan sikap dan gaya hidup untuk bertanggung jawab terhadap alam (lihat Smith dan Pulver 2009).

Munculnya gerakan Green Islam di Indonesia dapat dikaitkan dengan peran organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi-organisasi Islam yang cukup awal mempromosikan kesadaran lingkungan. Pada tahun 2010, NU mendirikan LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama), sementara Muhammadiyah mendirikan MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center). Lantas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendirikan LPLHSDA MUI (Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia). Lahirnya badan-badan khusus tersebut membuktikan munculnya kesadaran di kalangan tokoh-tokoh gerakan Islam di Indonesia untuk terlibat aktif dalam aktivisme pro-lingkungan serta mempromosikan kesadaran lingkungan di antara komunitas mereka.

Meski demikian, sejauh ini belum terdapat studi yang secara khusus berfokus menelusuri kemunculan dan perkembangan gerakan Green Islam di Indonesia. Beberapa studi perihal gerakan lingkungan berbasis keagamaan yang ada memfokuskan pembahasannya hanya terbatas pada beberapa organisasi tanpa bergerak lebih jauh menelusuri mengapa dan bagaimana aktivisme lingkungan berbasis Islam berkembang di Indonesia. Misalnya, sebuah studi mendiskusikan profil dan kiprah LPBI NU dan MDMC Muhammadiyah dan bagaimana masing-masing mereka menyelenggarakan muktamar pada 2010 sebagai respons atas kerusakan lingkungan (Mardhiah, Aulia, dan Narulita 2014).

Secara historis, gerakan-gerakan lingkungan non-agama telah berkembang lebih dulu di Indonesia. Misalnya, saat WALHI berdiri pada tahun 1980 di mana Emil Salim sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada masa itu berperan cukup penting dalam mendorong berdirinya organisasi lingkungan di Indonesia. Di masa awalnya WALHI mendapat fasilitas oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (Sejarah WALHI n.d.). Dengan fasilitas tersebut, WALHI mendapatkan akses untuk melakukan kampanye-kampanye mengenai lingkungan. Seiring berjalannya waktu, WALHI mulai mengkampanyekan tentang



Reformasi Lingkungan Hidup yang berfokus pada advokasi kebijakan lingkungan dan kelembagaan lingkungan. Dalam melakukan advokasi, tidak jarang WALHI harus berhadapan dengan pemerintah Soeharto atau perusahaan besar seperti PT. Freeport Indonesia. Misalnya pada akhir tahun 1988, ketika pertama kalinya WALHI menggugat pemerintah, mereka memasukkan nama menteri lingkungan hidup dalam daftar para tergugat. Saat itu, George Aditjondro menyatakan bahwa hubungan baik Emil Salim dan LSM sudah berakhir (Sejarah WALHI n.d.). Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh WALHI karenanya tidak sebebas saat masa-masa awal pendiriannya. Terlebih setelah WALHI kerap berhadapan dengan pemerintah, mereka juga kerap mendapatkan intimidasi berupa ancaman, pembubaran saat diskusi, serta tindakan kekerasan (Ma'aarij 2020).

Di sisi lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dapat memperluas kampanye perihal pengakuan negara atas hak-hak masyarakat adat untuk melakukan aktivitas dari dalam aparatur negara (Afiff dan Rachman 2019). Hal ini dikarenakan adanya “aktivis institusional” dalam tubuh organisasinya, yaitu 'peserta gerakan sosial yang menduduki status formal di pemerintahan dan mengejar tujuan gerakan melalui jalur birokrasi konvensional' (Santoro dan McGuire 1997). Aktor-aktor ini adalah anggota gerakan sosial yang memanfaatkan akses politik, pengetahuan, dan sumber daya lain yang tersedia bagi mereka dari dalam pemerintahan, yang akhirnya memberi peluang gerakan dan program-program organisasinya untuk berkembang.

Dari kedua kasus tersebut dapat dilihat bahwa aktivisme institusional (pada AMAN) hanya mungkin terjadi pada kondisi politik tertentu yang memberikan pilihan bagi aktivis gerakan sosial untuk terlibat dalam hubungan yang tidak terlalu konfrontatif dengan negara (sebagaimana yang dilakukan WALHI). Diskusi di atas sekaligus memperlihatkan bahwa konvergensi kepentingan antara aktor-aktor utama pemerintah dan para aktivis merupakan faktor penting yang berkontribusi pada kemunculan dan perkembangan gerakan sosial, yang memperlihatkan struktur peluang politik dengan akses terbuka atau tertutup. Struktur peluang politik dengan akses terbuka mengacu pada situasi di mana aktor-aktor gerakan sosial dapat bekerja sama dan tidak mengambil jarak dengan pemerintah. Sementara struktur peluang politik dengan akses tertutup mengacu pada sebaliknya, di mana aktor-aktor

gerakan sosial tidak mau bekerja sama dan mengambil jarak dengan pemerintah (Afiff dan Rachman 2019).

Para pakar sosiologi agama telah mengidentifikasi sumber daya agama atau nilai-nilai dan atribut khas yang dimiliki oleh komunitas keagamaan yang terlibat dalam isu-isu sosial. Gardner (2013) fokus pada “aset” organisasi keagamaan yang mencakup sumber daya material dan kapasitas pembangunan komunitas. Stark dan Finke (2000) merujuk pada “modal agama” yang mereka definisikan sebagai kepemilikan dan keterikatan pada budaya agama tertentu. Sementara Smith (2014) membahas “aset keagamaan” seperti motivasi transenden, identitas bersama, dan legitimasi hak istimewa (lihat juga Baker dan Skinner 2006; Smidt 2003; Iannaccone 1990). Dapat disimpulkan, sumber daya keagamaan—serta simbol-simbol yang menyertainya—dapat menjadi sumber daya penting bagi kemunculan dan perkembangan gerakan-gerakan sosial.

Di Eropa, gerakan lingkungan berbasis keagamaan, misalnya dalam komunitas-komunitas Kristen di Inggris dan Skotlandia,³ muncul dan berkembang atas dasar sumber daya spiritual yang dimilikinya (Bomberg dan Hague 2018). Sumber daya spiritual komunitas-komunitas gereja mendorong dan memberi semacam narasi “transenden” yang kuat dan keharusan aksi-aksi keadilan iklim. Implikasi dari sumber daya mobilisasi tersebut adalah kerja sama dan kolaborasi, seperti aksi “Hentikan Kekacauan Iklim” di Skotlandia yang menyatukan berbagai kelompok dalam kampanye mereka seputar Undang-Undang Perubahan Iklim PBB di Paris pada tahun 2015. Sumber daya spiritual yang dalam hal ini merupakan bagian dari sumber daya budaya, mencakup nilai-nilai kelompok (Walder 2009; Canel 1997), rasa identitas bersama (Bomberg dan McEwen 2012; Gamson 1992) atau simbol budaya (gambar, kiasan) yang mewujudkan, mengarahkan, dan memfasilitasi pengalaman kelompok bersama (Edwards dan Kane 2014; Porta dan Diani 2009).

Meski demikian, ketimbang sumber daya budaya, dalam kasus yang lain, boleh jadi kemunculan organisasi lingkungan berbasis keagamaan lebih didominasi oleh faktor sumber daya material (seperti pendanaan, sumbangan, atau tanah). Termasuk dalam hal ini adalah sumber daya manusia (staf, keahlian, keterampilan kepemimpinan anggota) dan sumber daya organisasi (termasuk hubungan dan jaringan) (Zald dan McCarthy 1987).



Karena menyadari bahwa mobilisasi sosial yang efektif memerlukan kombinasi berbagai faktor (Piggot 2018), studi lain melihat kemunculan gerakan sosial pada sisi pembingkai kolektif yang turut berperan dalam menjembatani isu-isu agama dan lingkungan seiring dengan faktor kontekstual yang membentuk munculnya gerakan (Almeida dan Chase-Dunn 2018; Tremblay dkk. 2017). Pembingkai dalam kemunculan organisasi lingkungan berbasis agama yang cenderung liberal⁴ boleh jadi didasarkan pada gagasan inklusivitas dan pembentukan ikatan lintas batas agama. Sementara bagi kelompok yang lebih konservatif⁵ boleh jadi akan didasarkan pada pemeliharaan kekhasan teologis untuk menjaga konstituen agamanya (Ellingson, Woodley, dan Paik 2012). Dengan kata lain, ikatan aksi kolektif yang mengancam inti organisasi, seperti kerja sama gerakan lingkungan berbasis keagamaan yang tidak dianggap oleh konstituennya memiliki bingkai yang sama (seperti dalam kasus EEN dan NCC), biasanya akan dihindari (Ellingson, Woodley, dan Paik 2012). Dengan demikian, bingkai yang mengikat antar-organisasi, baik yang telah terjalin maupun yang baru akan terjalin, dapat membentuk ikatan-ikatan tertentu dengan mendefinisikan mitra tertentu sebagai mitra yang dapat diterima, dan dengan menawarkan peluang tetap untuk berkolaborasi (Meyer dan Corrigan-Brown 2006; Campbell 2005; Gulati dan Gargiulo 1999).

Dalam konteks komunitas lokal di Indonesia terdapat model konseptual yang menunjukkan bagaimana gerakan akar rumput menggunakan bingkai agama untuk menciptakan praktik lingkungan baru dan memotivasi perubahan perilaku lingkungan di beragam komunitas lokal (Smith, Adam, and Maarif 2024). Proses pembingkai tersebut acapkali bersifat hibridisasi konseptual, yang berarti bahwa gerakan-gerakan tersebut memadukan agama resmi, agama pribumi, serta pengetahuan dan tradisi lokal (sering disebut praktik budaya), dan juga memadukan aspek-aspek agama yang dihidupi dengan konsep ekonomi, hukum, dan ilmiah. Proses pembingkai juga bisa mengambil bentuk imajinasi kontekstual, yang berarti bahwa gerakan-gerakan sosial mengadopsi berbagai strategi keagamaan dan strategi lain untuk merespons konteks ekonomi, lingkungan, politik, dan agama-budaya lokal. Terakhir, proses pembingkai dapat berupa improvisasi yang didorong oleh kontestasi, yang berarti bahwa gerakan-gerakan sosial menghadapi pertentangan yang kuat, dan dinamika ini mendorong improvisasi dan meningkatkan kerentanan gerakan dan komunitas lokal

dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Oleh karena itu, melalui analisis pembentukan makna oleh konteks politik, ekonomi, lingkungan hidup, dan agama-budaya tertentu, studi gerakan-gerakan sosial cukup memberi gambaran mengapa gerakan lingkungan berbasis agama yang telah ada di Indonesia, menjadikan lingkungan sebagai isu gerakan.

Hal tersebut turut mengafirmasi studi-studi sebelumnya, bahwa agama dan budaya lokal turut berperan dalam aktivisme lingkungan (Safrilsyah dan Fitriani 2014; Ichwan 2012), bahwa terdapat kesadaran lingkungan hidup dari penganut kepercayaan lokal (Ichwan 2012), dan bahwa gerakan-gerakan yang sifatnya lokal dari komunitas agama lokal tersebut terhubung secara tidak langsung dengan gerakan lingkungan atau gerakan mengatasi perubahan iklim secara global (Smith 2018). Meski demikian, dibutuhkan studi lebih jauh apakah keterlibatan komunitas-komunitas agama lokal itu dalam melestarikan lingkungan (misalnya merawat pohon dan menjaga hutan) merupakan bentuk kesadaran terhadap lingkungan, dan karena itu merupakan bagian dari gerakan lingkungan secara luas, atau semata-mata karena panggilan ajaran agama. Juga, dibutuhkan studi mendalam apakah keterlibatan itu lebih disebabkan oleh proses pembingkaihan yang melatarbelakanginya, atau justru terdapat penyebab lain yang bisa jadi lebih dominan, seperti struktur peluang politik dan sumber daya mobilisasi.

1.3.2 Identitas Agama dalam Jejaring, Strategi, dan Program Gerakan Lingkungan Religius di Indonesia

Buku ini selanjutnya berupaya untuk menjawab pertanyaan bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter mereka yang berbeda-beda untuk membangun strategi, jaringan, dan program kerja mereka.

Sejauh ini, beberapa studi melihat aktivisme lingkungan berbasis keagamaan secara fundamental sama dengan gerakan-gerakan lingkungan non-agama (sekuler) (Nepstad 2004; Smith 1996). Atau jika tidak, beberapa studi melihat aktivisme lingkungan berbasis keagamaan sebagai bagian dari gerakan-gerakan yang lebih besar, dalam hal ini sebagai pemasok sumber daya (Smith 2014; Mirola 2003; Smith 1996; Morris 1984). Studi lainnya (Nepstad 2004; Smith 1996; Evans 1997) menunjukkan bahwa sumber daya, khususnya sumber daya budaya agama itulah, yang oleh kelompok-kelompok agama dipergunakan untuk

memobilisasi demonstrasi, protes, atau dukungan. Pendeknya, terlihat bahwa dalam hal gerakan, aktivisme lingkungan berbasis keagamaan masih dipandang sama dengan gerakan-gerakan lingkungan sekuler.

Meski demikian, penting dicatat bahwa organisasi lingkungan berbasis agama tidak hanya tertarik untuk mendorong perubahan sosial atau politik seperti aktivis-aktivis dalam organisasi lingkungan 'sekuler', namun mereka juga tertarik untuk melayani kebutuhan keagamaan konstituennya (Williams 2003: 328). Paul Gorman bahkan menyatakan bahwa *religious environmentalism* bukan sekadar sebuah gerakan dengan tujuan lingkungan hidup, namun juga merupakan sarana untuk membantu individu dan komunitas beragama menjadi lebih religius. Dengan kata lain, gerakan-gerakan keagamaan boleh jadi memiliki tujuan yang berbeda dan menganut nilai-nilai yang berbeda dengan gerakan lingkungan non-agama, serta menganut tujuan dan nilai-nilai yang penting yang bersumber dari struktur internal keagamaan (Ellingson, Woodley, dan Paik 2012).

Perbedaan identitas keagamaan itu, atau tepatnya perbedaan keyakinan, teologi, dan afiliasi keagamaan dari gerakan agama, boleh jadi tidak menghalangi gerakan lingkungan keagamaan dan sekuler untuk dapat melakukan aksi-aksi lingkungan bersama (Ellingson, Woodley, dan Paik 2012). Mereka tetap bisa membangun jaringan kerja sama dengan gerakan sosial lain tanpa harus mengorbankan atau mengkompromikan inti kesakralan ajaran agama mereka. Meski tentu saja, terdapat problem dilematis gerakan lingkungan keagamaan ketika berupaya memperluas jejaringnya. Jika mereka terlalu menekankan tujuan dan nilai-nilai keagamaan, resikonya dapat mengasingkan mitra-mitra sekuler mereka. Sementara jika mereka fokus pada politik pragmatis dan kepentingan isu, dengan mengorbankan nilai dan tujuan-tujuan keagamaan, dapat mengurangi dukungan di kalangan konstituen agamanya. Oleh karena itu, bisa jadi sejumlah gerakan keagamaan tertentu akan menghindari untuk bekerja sama dengan kelompok yang tidak memiliki afiliasi agama atau kerangka teologis yang sama (Ellingson, Woodley, dan Paik 2012).

Di Indonesia, sejumlah organisasi lingkungan berbasis keagamaan, meski berada dalam agama yang sama (misalnya, Islam), terafiliasi dalam satu payung organisasi yang sama. Misalnya, LPBI dan FNKSDA (Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) berada dalam payung NU, sementara MDMC, KHM (Kader Hijau Muhammadiyah), serta MLH (Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah) berada dalam payung

Muhammadiyah. Para pemimpin organisasi-organisasi itu mengakui memiliki hubungan dengan payung organisasi mereka, serta boleh jadi mendapat dukungan dari para pimpinan payung organisasi besarnya, khususnya kelompok yang secara keorganisasian menjadi bagian struktur formal organisasi intinya.

Pada saat yang sama, organisasi-organisasi tersebut sangat mungkin untuk mengklaim memiliki eko-teologi—baik identitas maupun gerakan—yang berbeda dengan posisi payung organisasinya, misalnya FNKSDA yang mengklaim memiliki eko-teologi yang berbeda dengan LPBI NU dan NU itu sendiri. Eko-teologi itu bisa jadi akan lebih berbeda lagi dengan organisasi yang secara formal berasal dari luar payung organisasinya. Misalnya, FNKSDA dengan beberapa komunitas lingkungan yang berbasis agama lokal. Lebih jauh, organisasi dan komunitas agama lokal itu boleh jadi tidak mempertimbangkan fatwa-fatwa MUI ketika berhadapan dengan konflik sosio-ekologis (Dewayanti dan Saat 2020).

Kemudian, identitas agama dan karakter yang berbeda dari aktivis Green Islam di Indonesia boleh jadi juga turut dapat mempengaruhi variasi jaringan, strategi dan program-program dari gerakan tersebut. Misalnya Islam Bergerak memperjuangkan wacana ekologi dengan perspektif agama, terlepas dari preferensi keislaman individu. KHM tetap memegang teguh nilai-nilai Muhammadiyah, meskipun operasionalisasi lingkungan hidup mereka terlihat berbeda dari payung organisasinya (Dewayanti dan Saat 2020). FNKSDA, sembari memegang nilai-nilai NU, mereka juga memasukkan unsur-unsur Marxisme dalam agenda-agenda lingkungannya (beberapa agendanya antara lain “Ngaji Hadist Lingkungan”, “Ngaji Agraria”, dan “Fikih dan Marxisme”). Perpaduan antara nilai-nilai NU dan unsur-unsur Marxisme tersebut merupakan basis dari perjuangan dan kepedulian mereka terhadap nasib lingkungan dan masyarakat tertindas (Asworo dan Akbar 2020). Oleh karena itu, kontribusi mereka dalam aksi-aksi lingkungan dinilai masih dibatasi oleh landasan teologis mereka sendiri (Dewayanti dan Saat 2020).

Dari studi-studi di atas, dapat dilihat bahwa para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter yang berbeda-beda untuk membangun strategi, jaringan, dan program kerja mereka untuk menjadi agen perubahan lingkungan di Indonesia. Namun belum ada studi sistematis yang menganalisis bagaimana aktivis Green Islam membangun mekanisme dan pola jaringan, strategi dan program kerja. Misalnya,

apakah perbedaan atau kesamaan identitas Islam dan pengetahuan lingkungan menjadi faktor penting dalam preferensi suatu kelompok Green Islam dalam membangun jaringan. Lebih jauh lagi, apakah identitas keagamaan dan pengetahuan lingkungan yang berbeda tersebut merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan atau menghambat ikatan jejaring antar-kelompok, baik sesama gerakan lingkungan keagamaan maupun gerakan lingkungan sekuler. Seperti apakah pengaruh identitas agama dalam perumusan strategi dan program kerja gerakan Green Islam. Studi dalam buku ini berupaya mengisi kekosongan itu. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu kita memahami bagaimana strategi, kerja sama, dan program kerja gerakan Green Islam mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang bersumber dari ajaran keagamaan untuk mempromosikan isu-isu lingkungan di Indonesia.

1.4 Argumen

Buku ini menekankan tiga argumen utama. Pertama, buku ini berargumen bahwa Green Islam merupakan ekspresi gerakan sosial yang dilakukan oleh organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam. Buku ini mengadopsi definisi gerakan sosial yang luas berfokus pada bagaimana sebuah gerakan bekerja dalam merespons peluang kontekstual tertentu. Gerakan sosial adalah aksi kolektif terorganisasi bertujuan mengadakan perubahan sosial, untuk mengadakan perubahan di dalam distribusi hal-hal apa pun yang bernilai secara sosial, dan memiliki karakter perseteruan (McCarthy dan Zald 1977; Tilly 1978; lihat juga Ali-Fauzi 2012). Beberapa elemen dari gerakan sosial meliputi (1) aksi bersama atau kolektif; (2) tujuan berorientasi perubahan; (3) memiliki organisasi; (4) terdapat keberlangsungan yang sifatnya temporal; dan (5) bersifat ekstra institusional (McAdam dan Snow, 1997).

Dalam teori gerakan sosial, terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi kemunculan dan perkembangan suatu gerakan sosial (McAdam, McCarthy, dan Zald 1996). Ketiga faktor tersebut adalah (1) peluang politik, yakni struktur peluang dan hambatan politik yang dihadapi suatu gerakan; (2) struktur mobilisasi, yakni bentuk-bentuk organisasi (formal maupun informal), yang tersedia bagi suatu organisasi; dan (3) proses pemingkanaan, yakni proses kolektif

interpretasi, atribusi, dan konstruksi sosial yang memediasi antara peluang dan tindakan (McAdam, McCarthy, dan Zald 1996).

Gerakan sosial boleh jadi memiliki jejaring, baik bersifat formal dan terstruktur maupun informal, yang secara fundamental beragam dan kompleks, dan boleh jadi menggunakan “strategi dan taktik non-institusional dalam kampanye berkelanjutan untuk mencapai perubahan sosial” (Almeida dan Chase-Dunn 2018). Karena itu, terkait aktivisme lingkungan, gerakan sosial bisa meliputi upaya-upaya mengubah perilaku komunitas atau individu lokal dalam menghadapi tantangan lingkungan (Villamayor-Thomas dan García-López 2018) dan gerakan-gerakan perjuangan keadilan lingkungan (Rodríguez-Labajos et al. 2019). Gerakan tersebut memiliki jaringan individu dan organisasi yang saling terlibat dalam tindakan kolektif, dalam hal ini untuk mencapai manfaat lingkungan (Rootes 1999).

Mengacu pada kerangka teori gerakan sosial itu, buku ini berargumen bahwa kemunculan dan perkembangan gerakan Green Islam di Indonesia tak lepas dari ketersediaan tiga faktor. Pertama, karena terdapat struktur peluang politik, di mana konvergensi kepentingan pemerintah dan aktor-aktor gerakan merupakan prasyarat utama kemunculan dan perkembangan gerakan sosial. Jika aktor-aktor tersebut dapat bekerja sama dan tidak mengambil jarak dengan pemerintah maka akan menghasilkan struktur peluang politik dengan akses terbuka. Jika sebaliknya, maka akan menghasilkan struktur peluang politik dengan akses tertutup. Kedua akses tersebut menentukan model gerakan, bahkan berperan besar pada keberlanjutan dan keberlanjutan suatu gerakan.

Kedua, kemunculan dan perkembangan gerakan Green Islam di Indonesia disebabkan karena adanya sumber daya mobilisasi, baik sumber daya material (pendanaan, tanah, staf, keahlian, keterampilan aktor, relasi jaringan), maupun sumber daya budaya (nilai-nilai kelompok, rasa identitas bersama, atau simbol budaya). Ketiga, kemunculan dan perkembangan gerakan Green Islam di Indonesia disebabkan karena proses pemingkakan yang mempengaruhi bagaimana gerakan sosial menciptakan makna untuk merangsang suatu tindakan kolektif.

Kedua, kami berargumentasi bahwa identitas agama dan karakter yang berbeda dari aktivisme Green Islam dapat mempengaruhi strategi, dengan siapa mereka bekerja sama, dan program kerja mereka dalam

melakukan aksi-aksi lingkungan di Indonesia. Beberapa studi mengidentifikasi bahwa sejumlah gerakan lingkungan berbasis agama muncul dengan karakteristik yang beragam, serta memosisikan gerakan tersebut sebagai bagian dari saling ketergantungan antara manusia dan lingkungan (Wijsen 2021; Fikri dan Colombijn 2021). Aktivis lingkungan berbasis keagamaan ini, selain mendorong perubahan sosial atau politik seperti aktivis-aktivis dalam organisasi lingkungan non-keagamaan, juga sekaligus melayani kebutuhan keagamaan konstituennya. Hal inilah yang membedakannya dengan organisasi lingkungan non-keagamaan (Williams 2003).

Buku ini menggunakan pendekatan fungsionalisme untuk memahami identitas keagamaan dalam kaitannya dengan aktivisme lingkungan. Menurut pendekatan ini, identitas agama dapat ditinjau melalui fungsi dan dampak empirisnya terhadap masyarakat. Dalam hal ini, selain membentuk identitas individu, agama juga membentuk identitas sosial dan kesetiaan kelompok (Durkheim 1912, 1995). Pendekatan fungsionalisme ini juga mempertimbangkan unsur fakta religius, seperti simbol, komunitas moral, dan institusi keagamaan, seperti masjid, gereja, candi, wihara, atau organisasi maupun komunitas berbasis keagamaan sebagai bagian penting dari identitas keagamaan. Pada saat yang sama, pendekatan fungsionalisme tetap menganggap penting pandangan esensialis yang menganggap penting unsur kesakralan agama yang bersifat individu (Coleman dan Collins 2017).

Lebih jauh, pendekatan fungsionalisme memandang bahwa identitas agama dapat menjadi sarana integrasi sosial, ekspresi kolektif, dan penguatan solidaritas. Sebagai sarana integrasi sosial, agama menyatukan anggota masyarakat dalam suatu komunitas moral yang memiliki sistem dan simbol-simbol kesakralan yang sama. Sebaliknya, agama juga dapat menciptakan perbedaan antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki sistem simbol-simbol kesakralan yang berbeda. Simbol-simbol tersebut dapat berupa dasar keyakinan, ritus keagamaan, hingga unsur bahasa yang menjadi medium penguatan identitas agama secara kolektif. Sebagai sarana integrasi sosial, agama membentuk identitas sosial dan kesetiaan kelompok, yaitu kemauan seseorang untuk terus-menerus mengidentifikasi diri dan merasa menjadi bagian dari kelompok tertentu dalam situasi apapun.

Sebagai ekspresi kolektif, agama merupakan cara bagi anggota masyarakat untuk mengekspresikan perasaan-perasaan mereka secara

bersama-sama. Agama juga merupakan cara bagi anggota masyarakat untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan norma-norma mereka secara simbolis. Dengan demikian, agama membentuk kesadaran kolektif dan konsensus sosial. Karena itu, sebagai penguatan solidaritas, agama merupakan sumber dari kekuatan moral dan emosional bagi anggota masyarakat dalam aksi-aksi pelestarian alam. Agama juga merupakan sumber dari kewajiban dan tanggung jawab bagi anggota masyarakat untuk melestarikan alam. Dengan demikian, agama juga berfungsi untuk membentuk ikatan-ikatan sosial dan kerja sama sosial untuk melestarikan alam.

Selain itu, studi ini juga menggunakan pendekatan *religious vernacular* untuk mengakomodasi pengertian agama yang lebih luas dan kontekstual, termasuk apa yang disebut sebagai “kepercayaan lokal” yang memiliki identitas keagamaan tersendiri (Alybina 2014; Bowman dan Valk 2012). Terdapat upaya untuk menundukkan ekspresi kepercayaan lokal pada agama yang sudah dilembagakan, dan menafsirkannya sebagai “penyimpangan” dari standar agama, atau sebagai peninggalan dari bentuk agama yang sudah ketinggalan zaman. Dengan menggunakan pendekatan *religious vernacular*, studi ini tidak didasarkan hanya pada “kebenaran” yang dilembagakan itu, tetapi juga pada kreativitas individu dan budaya, yang diekspresikan dalam berbagai konteks lokal dan pembentukan tradisi kepercayaan (Bowman dan Valk 2012).

Kontekstualisasi itu menghasilkan pemahaman terhadap fakta adanya identitas keagamaan yang beragam, baik yang tercermin melalui hal yang bersifat teologis, seperti ortodoksi keagamaan, hingga praksis yang bersifat materialis, seperti ritus keagamaan, cara berpakaian, arsitektur keagamaan, lembaga pendidikan, bahasa, dan lain sebagainya. Karena itu, memahami identitas keagamaan dalam kerangka *religious vernacular* ini akan menghasilkan pemahaman terhadap ranah kebudayaan agama (*cultural religious spheres*) (Azra 2020), di mana bahkan dalam tiap komunitas agama tertentu terdapat keragaman identitas sosial-budayanya masing-masing.

Ketiga, studi ini berargumentasi meski gerakan Green Islam ini mengacu pada ajaran-ajaran agama yang sama yang menjadi inspirasi dan motivasi bagi aksi-aksinya, terdapat variasi yang menjadi kecenderungan masing-masing organisasi atau komunitas Green Islam di Indonesia. Studi ini berpendapat bahwa kecenderungan gerakan

lingkungan berbasis Islam dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi utama (Suharko 1998; van der Heijden, Koopmans, dan Giugni 1992). Yang pertama adalah konservasionis, yaitu gerakan yang memiliki kepedulian utama pada perlindungan alam atau suatu area alam tertentu. Gerakan ini cenderung moderat dalam melakukan berbagai aktivitas lingkungan, di mana gerakan preservasionis juga dapat dimasukkan ke dalamnya.

Yang kedua adalah pengkampanye kebijakan, yaitu gerakan yang mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan lingkungan melalui saran, lobi, dan rekomendasi-rekomendasi. Gerakan ini juga cenderung moderat dan biasanya secara finansial didukung oleh para pemegang otoritas. Yang terakhir adalah mobilisator, yang merupakan gerakan yang aktivitas utamanya menggerakkan publik dalam suatu aksi lingkungan. Aksi ini biasanya ditujukan pada pemegang otoritas atau pelaku bisnis yang keputusan atau perilakunya dinilai membahayakan lingkungan (Suharko 1998; van der Heijden, Koopmans, dan Giugni 1992).

1.5 Metodologi

1.5.1 Metode

Para penulis menggunakan metode penelitian kualitatif (*small-N study*) untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fenomena dan karakteristik aktivisme Green Islam di Indonesia. Buku ini secara spesifik berfokus pada kelompok dan organisasi yang terutama terlibat dalam aksi lingkungan dan menjadikan landasan dan alasan spiritual, keyakinan, atau keagamaan Islam sebagai kerangka kerja mereka dalam melakukan aktivisme lingkungan.

Sejumlah metode, teknik pengumpulan data, dan analisis data buku ini digunakan untuk menjawab mengapa dan bagaimana aktivisme Green Islam muncul dan berkembang di Indonesia; bagaimana peta aktivisme Green Islam di Indonesia, termasuk aktor-aktor dan jaringan-jaringan mereka; bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter mereka yang berbeda-beda untuk membangun strategi, jaringan, dan program kerja; apa contoh program atau praktik dari upaya-upaya yang dilakukan oleh aktivis Green Islam; serta apa peluang dan tantangan yang mereka hadapi.

1.5.2 Studi Kasus

Selain itu, para penulis menggunakan metode studi kasus. Dalam hal ini, para penulis menggunakan definisi studi kasus sebagai "studi intensif tentang satu unit dengan tujuan untuk memahami kelas yang lebih besar dari unit-unit yang serupa" (Gerring 2004). Singkatnya, untuk memahami kemunculan aktivisme lingkungan berbasis keagamaan di Indonesia, para penulis dalam buku ini meneliti kelompok Green Islam di Indonesia, terutama yang teridentifikasi sebagai kelompok yang aktif dan memiliki program-program yang dapat diobservasi dalam peta gerakan lingkungan berbasis keagamaan di Indonesia.

Studi kasus ini memungkinkan para penulis buku ini untuk mengkaji beberapa organisasi Green Islam maupun komunitas Islam yang bergerak di isu lingkungan yang dianggap representatif untuk menjelaskan kemunculan aktivisme Green Islam di Indonesia serta untuk memetakan aktivisme Green Islam di Indonesia. Termasuk dalam hal ini adalah studi mendalam terkait karakteristik kelompok aktivisme Green Islam itu, strategi dan jaringannya, dalam menjalankan aksi-aksi penyelamatan lingkungan dan mempromosikan kesadaran isu-isu lingkungan di Indonesia.

1.5.3 Pemilihan Kasus

Pemilihan kasus dalam buku ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan variasi kelompok Green Islam di Indonesia. Pemilihan kasus secara purposif ini memastikan bahwa kasus utama yang relevan dengan pokok bahasan telah tercakup, serta untuk memastikan bahwa "di dalam setiap kriteria, beberapa keragaman disertakan, sehingga dampak dari karakteristik yang bersangkutan dapat dieksplorasi" (Ritchie, Lewis, dan Elam 2013). Lebih jelasnya, organisasi dan kelompok Green Islam di Indonesia yang termasuk dalam studi ini diidentifikasi berdasarkan beberapa kriteria pemilihan berikut ini.

Pertama, mereka berafiliasi atau bermitra dengan organisasi Islam, serta kelompok aliran atau kepercayaan yang secara tradisi keagamaan dekat dengan Islam di Indonesia. Kedua, kelompok tersebut memberikan alasan spiritual keagamaan dalam mempromosikan isu-isu lingkungan di masyarakat. Ketiga, mereka telah mengorganisasi diri setidaknya selama satu tahun terakhir dan secara berkelanjutan terlibat dalam aksi-aksi lingkungan di tingkat lokal atau nasional. Keempat, kelompok-kelompok



ini dapat berbentuk organisasi masyarakat agama, LSM, komunitas, maupun koalisi. Kelima, untuk mendapatkan kasus dari berbagai komunitas dan organisasi lingkungan berbasis agama yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia, studi ini mempertimbangkan keragaman lokasi asal atau domisili organisasi atau komunitas itu.

Kelompok Green Islam di Indonesia memiliki karakter berbeda-beda. Mereka pun bisa dikatakan memiliki strategi yang tidak seragam dalam melakukan aksi-aksi lingkungan. Studi ini mencakup kasus aktivisme Green Islam yang mengadvokasi isu lingkungan dengan pendekatan agenda politik atau kebijakan maupun mereka yang menggunakan strategi pendekatan etik, nilai-nilai atau moral keagamaan untuk aksi-aksi pelestarian lingkungan. Misalnya, seperti telah disinggung sebelumnya, kelompok ormas lingkungan berbasis Islam dan teridentifikasi muncul paling awal, seperti FNKSDA, mengklaim memiliki konsep eko-teologi dan karakter gerakan yang berbeda dalam merespons isu-isu lingkungan dari organisasi LPBI NU maupun organisasi NU itu sendiri yang menaungi kedua organisasi tersebut. Karakter yang berbeda ini boleh jadi dialami juga organisasi-organisasi lingkungan religius lainnya, seperti MDMC, KHM, dan MLH yang berada di bawah naungan Muhammadiyah.

Selain itu, ada banyak kelompok lingkungan lainnya yang mempromosikan isu lingkungan melalui berbagai jenis perkumpulan (NGO, komunitas, dan koalisi), seperti Muslims for Shared Action on Climate Impact (MOSAIC), Ummah for Earth, Yayasan Hadji Kalla, EcoDeen, Komunitas Adat Ammatoa Kajang, dan lain sebagainya. Meskipun kelompok-kelompok lingkungan tersebut sama-sama mengafiliasikan diri mereka dengan agama Islam, mereka memiliki karakter dan strategi yang berbeda-beda dalam merespons isu-isu lingkungan.

Dengan memasukkan variasi karakter dan kelompok organisasi lingkungan berbasis agama yang beragam dalam analisis, studi ini berharap dapat memperoleh pola umum yang menjelaskan latar belakang kemunculan kelompok-kelompok tersebut, serta dapat memetakan aktor dan jaringan mereka sekaligus strategi-strategi yang mereka gunakan.

1.6 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dalam buku ini, diikuti oleh penulisan laporan, berlangsung selama delapan bulan (November 2023 hingga Juli 2024). Sejumlah teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam buku ini adalah sebagai berikut.

1.6.1 Desk Research

Buku ini menggunakan *desk research* sebagai langkah awal yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dan tersedia di berbagai saluran, seperti penelitian-penelitian sebelumnya, kumpulan data yang dipublikasikan, laporan media cetak dan *online*, maupun dokumentasi lainnya mengenai aktivisme lingkungan berbasis agama di Indonesia. Data studi awal yang diperoleh dari berbagai sumber berguna untuk membuat *database* organisasi dan komunitas yang melakukan aktivisme lingkungan berbasis agama di Indonesia.

Pada tahap ini, kami mengumpulkan nama-nama dan mengategorisasikan kelompok-kelompok lingkungan berbasis agama di seluruh wilayah Indonesia. Sejauh ini, 192 kelompok lingkungan religius telah terdaftar di *database* kami, 142 adalah organisasi atau komunitas Green Islam. Tahap ini menjadi dasar untuk memahami informasi awal terkait berbagai latar belakang keterlibatan kelompok-kelompok lingkungan berbasis agama dalam mempromosikan isu-isu lingkungan, termasuk memahami para aktor dan pemimpinnya, domisili dan lingkup kerjanya, orientasi dan program kerja utama, serta informasi awal afiliasi dan jaringan kerjasama mereka.

Studi ini menggunakan statistik deskriptif dan visualisasi data untuk menginterpretasikan data dalam *database* kelompok-kelompok lingkungan berbasis agama di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, kami menggunakan perangkat lunak terbuka *Social Network Analysis* (SNA) Gephi, sebagai alat analisis dan visualisasi jaringan sosial untuk menghasilkan representasi grafis dari peta aktivisme atau jaringan sosial kelompok-kelompok lingkungan berbasis Islam di Indonesia. Dalam hal ini, setelah data terkumpul, kami memulai pembuatan *dataset* dan pembersihan data, mengimpor data ke Gephi, kemudian mengeksplorasi struktur dasar jaringan, sekaligus membuat visualisasi data dan grafis untuk mengidentifikasi pola atau relasi organisasi dan komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam tersebut.

1.6.2 Focus Group Discussion (FGD)

Kami menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah dalam pengumpulan data untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan dalam buku ini. FGD dilakukan dengan menggunakan instrumen wawancara semi terstruktur dengan para tokoh atau pemimpin dari kelompok lingkungan berbasis Islam dan agama-agama lain yang dipilih sebagai narasumber dalam penelitian dalam buku ini. Melalui penggalian data primer dalam FGD, kami dapat melengkapi temuan awal dari data sekunder yang bersumber dari *desk study*, terutama ketika terdapat kesenjangan data dan informasi yang kurang dipahami dalam mengkaji aktivisme lingkungan berbasis Islam. Selain itu, FGD ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari data sekunder terkonfirmasi melalui informasi yang diperoleh dari FGD. Dengan demikian, buku ini dapat melengkapi temuan-temuan yang sudah ada dan menyajikan informasi yang jelas dan kredibel.

Selain menggunakan instrumen wawancara semi terstruktur, dalam FGD kami juga menyebarkan kuesioner kepada para peserta FGD. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi dasar organisasi dan komunitas lingkungan berbasis Islam. Informasi tersebut digunakan untuk menganalisis jaringan sosial mereka dalam menjalankan aksi-aksi lingkungan di Indonesia. Di antara beberapa pertanyaan penting yang diajukan untuk kepentingan *dataset* dalam analisis jaringan sosial ini adalah informasi terkait program kerja utama, afiliasi, kerjasama, dan strategi.

Kami melakukan dua sesi FGD, masing-masing di Jakarta dan Surabaya dengan melibatkan 50 pemimpin organisasi atau komunitas lingkungan berbasis agama. Masing-masing sesi FGD difokuskan pada pengelompokan dua wilayah geografis dari lokasi aktivisme kelompok lingkungan berbasis keagamaan, yaitu mereka yang berbasis di wilayah Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Untuk FGD, sesi pertama dilakukan di Jakarta bersama para peserta dari Indonesia bagian Barat, meliputi area Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Jawa Barat, Yogyakarta, Aceh, dan Riau. Sementara itu, sesi FGD kedua dilakukan di Surabaya bersama para peserta dari kelompok terkait yang berbasis di Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Jawa Timur,

Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.

Terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa kami memilih wilayah-wilayah tersebut. Pertama, Indonesia memiliki keragaman tradisi dan praktik agama Islam di masing-masing wilayah. Perbedaan ini dapat mempengaruhi beragam cara para aktivis Muslim dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan agar mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, keragaman geografis yang memiliki keragaman budaya dan tradisi menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini.

Kedua, wilayah Indonesia memiliki perbedaan tantangan lingkungan antara yang satu dengan yang lain. Setiap wilayah akan sangat mungkin menghadapi isu-isu lingkungan yang berbeda. Daerah metropolitan Jakarta, misalnya, sangat mungkin menghadapi tantangan isu-isu lingkungan yang berbeda dengan wilayah yang lebih terpencil. Oleh karena itu, faktor perbedaan tantangan lingkungan berpengaruh pada pemilihan wilayah yang beragam di Indonesia.

Ketiga, kami juga mempertimbangkan fakta bahwa beberapa wilayah memilih tingkat religiusitas keagamaan yang berbeda dari wilayah lainnya. Beberapa wilayah mungkin memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, sehingga kelompok-kelompok lingkungan berbasis agama berperan lebih kuat. Sementara itu, di wilayah lain, faktor-faktor keagamaan boleh jadi memiliki pengaruh yang lebih rendah, membuat kelompok lingkungan berbasis religius tidak begitu memiliki peran signifikan dalam upaya-upaya pelestarian alam.

Dengan mengundang aktivis gerakan lingkungan berbasis Islam dari hampir semua provinsi di Indonesia untuk mengikuti FGD, para penulis buku ini dapat memperoleh informasi dengan representasi geografis yang lebih seimbang. Pertimbangan-pertimbangan ini juga dapat menghindari bias yang mungkin muncul jika studi ini hanya fokus pada satu atau dua wilayah tertentu.

1.6.3 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-dept interview*) dengan narasumber dari para aktor dan pemimpin kelompok lingkungan berbasis agama dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang aktivisme mereka dalam mempromosikan isu-isu lingkungan. Wawancara mendalam dilakukan dengan para informan yang memiliki informasi penting untuk digali lebih lanjut, terutama mereka yang

sebelumnya terlibat dalam FGD. Para penulis melakukan wawancara mendalam terhadap 53 informan, terdiri dari 28 laki-laki dan 25 perempuan, dari organisasi atau komunitas Green Islam. Melalui wawancara mendalam ini, informasi yang lebih elaboratif dapat dikumpulkan, termasuk konteks dari data-data lain (seperti hasil analisis dokumen dan FGD), serta gambaran yang lebih lengkap mengenai aktivisme Green Islam.

1.6.4 Observasi

Observasi digunakan sebagai metode pengumpulan data tambahan, khususnya untuk menjawab pertanyaan terkait program atau praktik terpilih dari upaya-upaya yang dilakukan oleh aktivis lingkungan berbasis Islam dalam mempromosikan kesadaran isu-isu lingkungan di Indonesia. Melalui observasi, para peneliti atau penulis buku dapat memperoleh informasi yang lebih akurat tentang kondisi dan situasi objek yang diteliti. Selain itu, observasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari wawancara semi terstruktur selama FGD yang mencerminkan pemikiran atau persepsi subjek tentang contoh program atau praktik terpilih yang mereka lakukan dapat terkonfirmasi secara lebih valid. Kami melakukan observasi di 28 lokasi kerja lingkungan dari 10 organisasi atau komunitas Green Islam di Indonesia.

1.7 Analisis Data

Analisis data dalam buku ini merupakan tahap proses mentransformasi sejumlah besar data yang dikumpulkan menjadi informasi yang dapat memberikan wawasan atau data empiris dalam penulisan buku ini. Ini melibatkan penerapan berbagai teknik dan metode analisis untuk memahami, mengidentifikasi pola, dan mengekstrak informasi yang terkandung dalam data. Dalam buku ini, kami menggunakan tiga teknik analisis data yang berbeda untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dalam buku ini.

Pertama, untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana aktivisme Green Islam berkembang di Indonesia dalam buku ini, kami menggunakan metode analisis historis kualitatif dan analisis naratif terhadap studi kasus yang dilakukan. Teknik ini penting digunakan karena dapat bermanfaat untuk mengungkap fenomena secara sistematis tentang mengapa dan bagaimana aktivisme Green Islam muncul di

Indonesia. Data penting yang ada untuk menjawab pertanyaan ini terutama berkaitan erat dengan peristiwa, proses, aktor, dan karakteristik yang unik dengan penjelasan analitis. Ini dapat bermanfaat untuk mengevaluasi dan mengungkap berbagai maksud, situasi, dan motivasi pelaku aktivisme Green Islam yang tidak diungkapkan secara eksplisit. Karena analisis historis kualitatif mampu mengungkap setiap aksi dan reaksi atau dampak potensial atas peristiwa yang terjadi secara masuk akal, analisis ini dapat mengarahkan penulis untuk mendapatkan penilaian atau kesimpulan yang terpercaya untuk mengkaji kemunculan aktivisme Green Islam di Indonesia (Gill, Gill, dan Roulet 2018; Thies 2002).

Kedua, kami menggunakan teknik analisis tematik untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter mereka yang berbeda-beda untuk membangun strategi, jaringan dan program kerja mereka. Analisis tematik biasa digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan memahami pola tematik yang muncul dari data kualitatif yang dianalisis (Boyatzis 1998). Kami mengidentifikasi dan menganalisis semua tema yang muncul dari FGD dan dokumen, memungkinkan kami untuk merinci simpul-simpul yang berkaitan dengan bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter mereka yang berbeda-beda untuk membangun strategi, jaringan, dan program kerja mereka untuk mempromosikan isu-isu lingkungan di Indonesia.

Ketiga, untuk memetakan aktivisme Green Islam di Indonesia, termasuk aktor-aktor dan jaringan-jaringan mereka, kami menggunakan analisis deskriptif. Hal ini dikarenakan jawaban dari pernyataan tersebut akan ditampilkan melalui data-data deskriptif dan visualisasi dari hasil pengujian oleh SNA Gephi. Visualisasi data sangat membantu untuk menyajikan interpretasi atas gambaran umum tentang karakteristik Green Islam di Indonesia. Kami juga menggunakan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi contoh praktik terpilih dari upaya-upaya yang dilakukan oleh aktivis Green Islam dalam mempromosikan kesadaran isu-isu lingkungan di Indonesia serta untuk mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi aktivisme Green Islam di Indonesia. Hasil dari analisis deskriptif ini memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh aktivis lingkungan berbasis Islam, serta menggambarkan tantangan yang perlu

diatasi dalam mempromosikan kesadaran isu-isu lingkungan melalui pendekatan keagamaan di Indonesia.

1.8 Signifikansi Penelitian

Analisis dan temuan-temuan dari penelitian dalam buku ini dapat mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada mengenai aktivisme Green Islam di Indonesia. Lebih jauh, studi tentang aktivisme Green Islam ini memiliki signifikansi baik dari aspek teoritis, empiris, dan sumbangan dalam pembuatan kebijakan.

Pertama, buku ini secara teoritis dapat memperkaya literatur tentang faktor-faktor dan situasi yang menjelaskan munculnya gerakan Green Islam di Indonesia. Selain itu, studi dalam buku ini juga berkontribusi pada teori hubungan antara identitas keagamaan dan gerakan lingkungan. Secara lebih spesifik, studi ini dapat memberikan kontribusi teoritis mengenai bagaimana Islam, sebagai sebuah identitas agama, menginspirasi, memotivasi, dan memfasilitasi tindakan sosial terkait lingkungan. Pembahasan mengenai identitas agama dan karakteristik unik aktivisme Green Islam ini kemudian dapat membuka ruang bagi perdebatan teoritis dan memberikan pemahaman mendalam tentang peran agama dalam membentuk sikap dan tindakan terhadap isu-isu lingkungan.

Kedua, secara empiris, studi ini menggali data dan informasi mengenai faktor-faktor penjas dan situasi yang memungkinkan munculnya gerakan Green Islam, juga motivasi di balik munculnya gerakan Green Islam di Indonesia. Tambahan lagi, temuan empiris studi ini dapat memberikan gambaran mengenai peta aktivisme Green Islam di Indonesia, termasuk karakteristiknya, aktor-aktornya, dan jaringannya. Selain itu, buku ini dapat memberikan pemahaman tentang dinamika dan perkembangan aktivisme Green Islam di Indonesia.

Ketiga, dengan adanya identifikasi dan pembahasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi kelompok-kelompok lingkungan berbasis agama di Indonesia, buku ini dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan. Temuan-temuan terkait tantangan dan peluang yang dihadapi kelompok-kelompok lingkungan berbasis Islam dapat digunakan untuk penyusunan kerangka kebijakan yang lebih efektif dan relevan terkait pelibatan kelompok aktivisme lingkungan berbasis Islam untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan. Selain itu, dengan mengidentifikasi praktik dan program terpilih yang dilakukan

oleh kelompok-kelompok lingkungan berbasis agama di Indonesia, hasil penelitian dalam buku ini nantinya juga dapat bermanfaat untuk memberikan inspirasi, contoh, maupun pedoman bagi kelompok-kelompok kepentingan terkait upaya-upaya mereka dalam mempromosikan isu-isu lingkungan.

1.9 Rencana Isi

Setelah pendahuluan, yang memuat pertanyaan penelitian, latar belakang, konsep dan definisi, tinjauan pustaka, argumen, metodologi dan data, bab dua akan mendiskusikan mengenai sejarah singkat perkembangan gerakan lingkungan dan agama di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini akan didahului oleh diskusi tentang tren global hubungan antara agama dan lingkungan dan bagaimana kemudian tren itu mempengaruhi perkembangan gerakan lingkungan di Indonesia. Selanjutnya, bab ini akan membahas bagaimana Green Islam tumbuh di Indonesia dan akan mendiskusikan tiga pola pembentukan Green Islam di Indonesia, yaitu gerakan Green Islam yang lahir dari rahim organisasi-organisasi Islam besar, gerakan Green Islam yang muncul dari organisasi lingkungan non-agama, dan gerakan Green Islam yang sejak berdirinya memang ditujukan untuk integrasi Islam dan lingkungan.

Bab tiga membahas mekanisme yang bekerja di balik perkembangan gerakan Green Islam. Secara garis besar, bab ini membahas beberapa faktor utama yang menyebabkan muncul dan berkembangnya gerakan lingkungan berbasis Islam ini di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah kesempatan politik yang terbuka, sumber daya yang telah terbentuk dan kemudian dimanfaatkan dalam isu lingkungan, dan nilai-nilai bersama yang membentuk pembingkai mengenai agama dan lingkungan. Ketiga konteks tersebut yang lantas direspons dan dimanfaatkan oleh aktor-aktor organisasi atau komunitas dalam gerakan Green Islam.

Bab empat memetakan dan mengidentifikasi jaringan sosial organisasi atau komunitas lingkungan yang menjadi bagian dalam gerakan Green Islam di Indonesia. Setelah memetakan aktivisme Green Islam di Indonesia, bab ini membahas tentang bagaimana struktur jaringan sosial aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan Green Islam di Indonesia. Setelah itu, bab ini menjelaskan tentang bagaimana struktur jaringan sosial tersebut membentuk hubungan antar-kelompok serta struktur relasi yang menggambarkan tentang orientasi utama dari masing-masing kelompok Green Islam.

Bab lima membahas mengenai bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter mereka yang berbeda-beda dalam membangun strategi mereka. Dalam hal strategi, bab ini akan membahas lima pola strategi yang sering digunakan oleh gerakan Green Islam di Indonesia meliputi penggunaan istilah berkonotasi Islam, pemberdayaan tokoh agama, pemberdayaan ulama perempuan, pemanfaatan momen-momen penting dalam kalender Islam, dan aksi-aksi berdasarkan ajaran Islam. Selain itu, bab ini akan membahas tiga pola strategi integrasi ajaran Islam dalam aktivisme Green Islam, yakni pelatihan masyarakat, mobilisasi masyarakat terdampak, dan perluasan dan pendalaman jaringan daring.

Bab enam mendiskusikan tentang bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter mereka yang berbeda-beda untuk membangun jaringan mereka. Organisasi atau komunitas Green Islam ini secara dinamis menggunakan identitas keislaman sebagai identitas kolektif, menyesuaikan dengan sumber daya jaringan yang mereka miliki. Lebih jauh, bab ini akan mendiskusikan bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas Islam untuk membangun jaringan dengan para tokoh agama, tokoh akademisi Muslim, ormas Islam, dan lembaga pendidikan Islam. Selain itu, bab ini membahas bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas Islam untuk memperluas jaringan mereka dengan pihak pemerintah, aktor dan institusi internasional, kelompok lintas agama, kelompok aktivis lingkungan non-agama, dan korporasi untuk memperluas dampak positif dari gerakan Green Islam di Indonesia.

Bab tujuh mengulas secara khusus praktik dan program terpilih Green Islam yang terdiri dari manajemen sampah dan limbah, dakwah satwa langka di masyarakat, kampanye lingkungan di media sosial, keterlibatan perempuan dalam aksi lingkungan, Kampung Hijau Energi yang didanai oleh zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dan konservasi hutan. Selanjutnya, bab ini menganalisis berbagai faktor yang mendorong keberhasilan program dan praktik Green Islam. Faktor-faktor tersebut meliputi kuatnya identitas dan ajaran Islam, pelibatan tokoh agama dalam aktivisme lingkungan, sumber pendanaan, kegiatan yang inovatif, dan kolaborasi dengan berbagai pihak, dan pelibatan perempuan.

Bab delapan menganalisis pola-pola umum kekuatan gerakan Green Islam di Indonesia. Secara garis besar, empat kekuatan itu berasal dari kerangka etik, sumber daya organisasi, pengikut loyal, dan kemampuan

kreatif untuk beradaptasi dan berinovasi. Selain itu, bab ini akan membahas juga beberapa peluang yang memungkinkan perluasan jaringan dan penguatan gerakan Green Islam di Indonesia.

Bab sembilan mendiskusikan mengenai tantangan-tantangan gerakan Green Islam Indonesia. Secara spesifik, bab ini akan menjelaskan beberapa faktor mengapa aktivisme Green Islam belum menjadi gerakan besar yang populer atau dikenal publik. Kemudian, bab ini akan diikuti oleh bab sepuluh, atau penutup, yang berisi tentang kesimpulan keseluruhan isi buku ini, berikut catatan rekomendasi.



BAB 2

GERAKAN LINGKUNGAN DAN AGAMA: KASUS INDONESIA

Meski sebagian besar gerakan Green Islam marak bermunculan pada dekade terakhir ini, namun gerakan lingkungan berbasis Islam telah muncul jauh sebelumnya. Terdapat setidaknya tiga periode utama perkembangan gerakan Green Islam di Indonesia. Yang pertama adalah fase awal yang bermula pada periode 1980-an, yaitu ketika MUI merumuskan Fatwa tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan pada 1983 dan keterlibatan komunitas pesantren dalam gerakan lingkungan. Ini berlangsung hingga periode 2000-an awal. Fase selanjutnya adalah periode pasca-tsunami, di mana gerakan kemanusiaan yang bersifat kebencanaan mendorong perkembangan gerakan Islam lebih dekat pada isu lingkungan. Yang berikutnya adalah fase pergeseran ekologi (*ecological turn*), yang merupakan fase pergeseran paradigma yang lebih memperhatikan aspek ekologi dan keberlanjutan di ranah kebijakan, khususnya sejak Islamic Declaration on Global Climate Change (Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global) di Istanbul, Turki, dan momentum Paris Agreement pada 2015 yang menengahkan isu lingkungan sebagai masalah utama yang harus dihadapi bersama secara global. Di fase ini, gerakan Green Islam relatif berkembang pesat.

Bab ini akan mendiskusikan mengenai sejarah perkembangan Green Islam di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini akan didahului oleh diskusi tentang tren global hubungan antara agama dan lingkungan dan

bagaimana kemudian tren itu mempengaruhi perkembangan gerakan lingkungan di komunitas Muslim di Indonesia. Selanjutnya, bab ini akan membahas bagaimana Green Islam tumbuh di Indonesia, ditandai tidak hanya oleh peningkatan kesadaran dari para aktivis Green Islam tetapi juga diikuti oleh peningkatan kesadaran simpatisan mereka. Berikutnya, bab ini akan mendiskusikan tiga pola pembentukan Green Islam di Indonesia, yaitu gerakan Green Islam yang lahir dari rahim organisasi-organisasi Islam besar, gerakan Green Islam yang muncul dari organisasi lingkungan non-agama, dan gerakan Green Islam organisasi yang sejak berdirinya memang ditujukan untuk integrasi Islam dan lingkungan.

2.1 Tren Global Gerakan Lingkungan dan Agama

Perdebatan tentang hubungan antara agama dan lingkungan dalam dunia kesarjanaan menjadi populer sejak Lynn White, Jr., sejarawan University of California, Los Angeles, dalam *The Historical Roots of Our Ecological Crisis* (1967), menyatakan bahwa agama-agama monoteis merupakan penyebab krisis lingkungan. Menurutny, ajaran agama-agama monoteis itu menyerukan manusia untuk memiliki kendali penuh atas alam. Dasarnya adalah cerita penciptaan agama-agama itu yang menempatkan manusia di puncak hierarki alam, sehingga membenarkan tindakan eksploitasi terhadap lingkungan. Satu tahun setelah karya kontroversi White, Jr. terbit, Seyyed Hossein Nasr menulis tentang konsep tasawuf mengenai kesatuan alam semesta yang menyoroti hubungan antara kerusakan lingkungan dan krisis spiritual di dunia modern. Gagasan Nasr ini menjadi akar bagi fase awal pembentukan Green Islam secara global.

Beberapa tahun setelahnya, kesadaran dan keterlibatan secara global kelompok agama dalam aksi lingkungan mulai bermunculan. Pada 1970, sebelum Hari Bumi Pertama diadakan, Dewan Gereja Dunia mendesak para pendeta untuk berkhotbah tentang lingkungan dalam Kebaktian Minggu mereka (Pew Research Center 2022). Saat itu, prioritas utama gerakan kelompok agama ini adalah pengendalian polusi dan populasi.

Di lingkungan Islam sendiri, diskursus terkait hubungan agama dan lingkungan yang diawali oleh Nasr pada 1968 itu semakin berkembang sejak tahun 1980-an, ditunjukkan dengan munculnya karya-karya dari para sarjana kontemporer Islam seperti Mawil Izzi Dien (1997, 2000, 2013) dan Fazlun Khalid (2002, 2005, 2010). Perlu dicatat bahwa



literatur tentang pemahaman lingkungan dalam Islam tidak membatasi diri pada batasan sektarian aliran teologi atau mazhab fikih dalam Islam, melainkan cenderung menekankan penyatuan dalam pemahaman lingkungan (Hancock 2018). Dalam kerangka itu, umat Islam dari berbagai aliran dapat mengidentifikasi diri mereka dengan pemahaman lingkungan, yang pada gilirannya dapat mendukung aksi-aksi lingkungan (Koehrsen 2021).

Sejak awal tahun 2000-an terjadi pergeseran isu, di mana kelompok agama mulai memberikan tempat khusus untuk isu perubahan iklim sebagai topik utama masalah lingkungan (Tucker, Grim, dan Jenkins 2017). Pergeseran itu juga memunculkan kembali diskursus tentang hubungan agama dan lingkungan. Pada 2003, Katz menulis sebuah karya yang menafsirkan ajaran Yahudi dan Kristen sebagai seruan untuk menjaga dan merawat alam, bukan untuk mengeksploitasi, menentang pandangan sarjana yang skeptis terhadap agama seperti White (1967). Sarjana lain, McDaniel (2003), juga mengutip Kitab Kejadian untuk menekankan bahwa kuasa manusia atas bumi seharusnya diartikan sebagai tanggung jawab untuk menjaganya.

Setelah Paris Agreement 2015, hampir semua komunitas agama terlibat dalam gerakan iklim. Pada 2016, ratusan pemuka agama menandatangani Interfaith Climate Change Statement to World Leaders yang mendesak para pemimpin global untuk mengatasi kenaikan panas bumi (Smith 2018). Hampir bersamaan dengan momentum Paris Agreement itu, Paus Fransiskus (2015) berupaya menafsirkan kembali ajaran Katolik dan menyatakan bahwa manusia memiliki kewajiban untuk merawat dan melindungi alam, bukan untuk menaklukkan dan mengeksploitasi secara liar (Paus Fransiskus 2015).

Apa yang disampaikan Paus Fransiskus memiliki argumen akademik dari para sarjana yang sebelumnya menulis berbagai karya tentang agama dan lingkungan, bahwa agama justru dapat memberi semangat moral yang kuat bagi aktivisme lingkungan (Wilson 2006). Tony Waitling (2008) menyebutnya dengan *ecotopias*, yakni penggambaran imajinasi agama terhadap alam dan manusia dengan imajinasi keharmonisan, kearifan, kesakralan, bahkan hubungan alam dalam perspektif teologi agama-agama dunia. Di samping itu, sejak tahun 2000 Center for World Religion, Harvard University, telah mempublikasi berbagai seri studi tentang Agama dan Ekologi, termasuk di antaranya seri mengenai Islam dan Ekologi (Foltz, Denny, dan Baharudding 2003).

Di tingkatan kerja sama internasional, PBB mulai mengakui organisasi-organisasi berbasis keagamaan (*faith-based organizations*) sebagai pemain kunci dalam pelestarian lingkungan. United Nation Environment Programme (UNEP), sebagai otoritas global dalam agenda lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di bawah PBB, menyatakan bahwa semua agama berkomitmen untuk menjaga lingkungan, dan kemudian memperkenalkan program Faith for Earth. UNEP mengungkapkan bahwa lebih dari 190 organisasi lingkungan berbasis agama berkomitmen untuk bekerja dalam mengatasi berbagai isu lingkungan, seperti perubahan iklim, konservasi energi, pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, dan reboisasi, baik di tingkat internasional, nasional, maupun lokal (United Nations Environment Programme 2018).

Dalam wacana hubungan agama dan lingkungan, upaya integrasi ajaran Islam dengan konsep lingkungan tak lepas dari sejumlah kritik (Gade 2019; Hancock 2018). Kritik ini menyoroti kemungkinan adanya pembacaan selektif dan penafsiran kembali teks-teks suci tradisional (Gade 2019; Hancock 2018). Para pengkritik wacana hubungan agama dan lingkungan itu melihat adanya indikasi bahwa aktivis lingkungan, baik Muslim maupun non-Muslim, sering kali menggunakan ayat-ayat tertentu dari Alquran dan mengaitkannya dengan konsep lingkungan hidup Barat, tanpa mempertimbangkan konteks yang lebih luas dan penafsiran alternatif yang mungkin lebih sesuai. Jens Koehrsen (2021) mengkhawatirkan bahwa pendekatan seperti ini mungkin tidak diterima secara luas oleh komunitas Muslim global karena tidak selaras dengan pemahaman umum tentang Islam (Koehrsen 2021). Di saat yang sama, dampak yang lebih luas dari paham lingkungan hidup Islam juga masih menjadi perdebatan (Ali 2016, Arnez 2014).

Selain itu, Brockopp (2012) mengamati bahwa gerakan hijau dalam Islam bukanlah sekadar respons terhadap isu-isu kontemporer, melainkan merupakan perubahan mendasar dalam cara Islam dipahami dan diajarkan (Brockopp 2012). Meski demikian, Bagir dan Martiam (2016) berpendapat bahwa tema lingkungan tidak mendapatkan perhatian yang signifikan dalam pemikiran Islam karena fokus yang lebih kuat pada isu-isu seperti radikalisme, terorisme, demokrasi, dan hak asasi manusia (Bagir dan Martiam 2016). Oleh karena itu, aktivis lingkungan Muslim masih merupakan minoritas dalam komunitas Muslim global (Koehrsen 2021).

2.2 Gerakan Lingkungan dan Agama di Indonesia

Dalam dua dekade terakhir, gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh kelompok-kelompok agama, baik yang dipimpin oleh para aktivis lingkungan maupun komunitas lokal, meningkat secara cepat di Indonesia (Smith 2018). Temuan penelitian dalam buku ini, misalnya, menunjukkan bahwa sekurangnya terdapat 192 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis keagamaan dari berbagai agama (Database React), seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, juga agama lokal dan masyarakat adat. Organisasi atau komunitas lingkungan ini aktif bekerja dalam merespons isu lingkungan dan perubahan iklim dengan mengartikulasikan etika lingkungan yang religius (Grossman 2019).

Setidaknya terdapat dua perspektif agama dalam memandang lingkungan, yaitu *green religion* dan *dark green religion* (Taylor 2010). Perspektif pertama, *green religion*, lebih dekat dengan apa yang disebut tradisi “agama langit,” yang menganggap perilaku pro-lingkungan sebagai tanggung jawab manusia sesuai ajaran agama. Sementara perspektif kedua, *dark green religion* meyakini bahwa alam memiliki nilai intrinsik dan suci yang harus dijaga dan dilestarikan. Taylor mengidentifikasi *dark green religion* sebagai “agama bumi” dan contohnya adalah kepercayaan lokal. Menurut Taylor, “agama-agama langit” percaya bahwa kesucian itu berada jauh di luar bumi (*beyond earth*), sementara agama-agama bumi percaya sebaliknya, kesucian itu justru berada di bumi (Taylor 2010, Amri 2012). Meski demikian, dua paradigma tersebut bertemu pada satu nilai yang sama, yakni pelestarian lingkungan.

Dua perspektif tersebut dapat terlihat dalam studi ini. Perspektif pertama, yakni perspektif *green religion* misalnya, tampak pada pandangan LDII. Dalam pandangan Agus Yudianto (LDII Surabaya, FGD, 6-8 Maret 2024), manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan hubungan dengan sesama sebagai bagian dari tugas manusia dalam dakwah. Serupa dengan pandangan tersebut, Natsir Zubaidi dari DMI juga menyatakan bahwa pelestarian lingkungan merupakan mandat atau perintah yang datang dari kitab suci, dan karena itu manusia harus melaksanakan perintah tersebut (Natsir Zubaidi, Mustasyar DMI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Contoh lainnya adalah pandangan Jhon Victor Kainama dari Sinode Gereja Protestan Maluku. Ia menyampaikan hal yang serupa, bahwa merawat dan menjaga lingkungan adalah bagian dari tugas pokok yang terdapat dalam ajaran agamanya (Jhon Victor Kainama, Sinode Gereja Protestan Maluku, FGD, 20-22 Februari 2024). Sehubungan dengan hal tersebut, studi ini memperlihatkan bahwa pandangan dengan pokok utama menjaga dan melestarikan alam, yang diungkapkan dengan istilah-istilah yang beragam seperti tugas, kewajiban, atau perintah agama, cenderung datang dari agama-agama seperti Islam, Katolik, dan Kristen.

Sementara itu, perspektif kedua yakni *dark religion* tampak pada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) yang menyatakan bahwa nilai-nilai ajaran dari leluhur, termasuk melestarikan lingkungan, adalah untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan di dunia. Harmonisasi ini berarti kebahagiaan bersama bagi semua makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Endang Retno Lastani menyatakan bahwa para penghayat sejatinya meyakini ajaran lingkungan leluhur. Dalam perspektif MLKI, mereka telah memiliki kearifan lokal yang turun-temurun dari nenek moyang mereka, seperti cara bercocok tanam yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Tradisi turun-temurun yang biasanya diimplementasikan dalam bentuk ritual-ritual inilah yang menurut Retno merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan (Endang Retno Lastani, MLKI FGD, 20-22 Februari 2024).

Contoh lain, Ramlah dari komunitas Adat Ammatoa Kajang (FGD, 6-8 Maret 2024), menyatakan bahwa masyarakat adat Kajang ia nilai cukup berhasil melestarikan hutan dikarenakan mereka masih menjalankan hukum adat dan tradisi dengan ketat. Mereka memiliki wilayah yang tidak terpengaruh oleh modernisasi, di mana alat-alat modern tidak diperbolehkan masuk. Melanggar aturan ini berakibat pada denda yang besar, atau bahkan diusir dari wilayah adat. Dan karenanya, Ramlah menyatakan, dalam konteks adat-istiadat lokal, tradisi menjaga lingkungan khususnya hutan merupakan bagian dari budaya dan ajaran nenek moyang yang dipertahankan secara turun-temurun (Ramlah, Komunitas Adat Ammatoa Kajang FGD, 6-8 Maret 2024).

Para pakar sosiologi agama mengidentifikasi sumber daya agama atau nilai-nilai dan atribut khas yang dimiliki oleh komunitas keagamaan yang terlibat dalam isu-isu sosial. Gardner (2013) fokus pada “aset” organisasi keagamaan yang mencakup sumber daya material dan kapasitas pembangunan komunitas. Stark dan Finke (2000) merujuk

pada “modal agama” yang mereka definisikan sebagai penguasaan dan keterikatan pada budaya agama tertentu. Sementara Smith (2014) membahas “aset keagamaan” seperti motivasi transenden, identitas bersama, dan legitimasi hak istimewa (lihat juga Baker dan Skinner 2006; Smith 2003; Iannaccone 1990). Penggunaan sumber daya agama atau nilai-nilai tersebut tampak pada komunitas-komunitas agama di Indonesia sebagai acuan normatif terhadap lingkungan.

Sebagai perbandingan, gerakan lingkungan berbasis keagamaan di komunitas-komunitas Kristen di Inggris dan Skotlandia juga berkembang atas dasar sumber daya budaya yang intrinsik dalam agamanya (Bomberg dan Hague 2018). Sumber daya budaya dari komunitas gereja mendorong dan memberikan narasi “transenden” yang kuat dan memperkuat keharusan aksi-aksi keadilan iklim. Implikasi dari sumber daya mobilisasi tersebut adalah kerja sama dan kolaborasi, seperti dalam aksi “Hentikan Kekacauan Iklim” di Skotlandia yang menyatukan berbagai kelompok dalam kampanye mereka terkait Undang-undang Perubahan Iklim atau Paris Agreement PBB di Paris pada tahun 2015. Sumber daya agama mencakup nilai-nilai kelompok (Walder 2009), identitas bersama (Bomberg dan McEwen 2012, Gamson 1992), atau simbol budaya (gambar, kiasan) yang memfasilitasi pengalaman bersama kelompok (Edwards dan Kane 2014, Porta dan Diani 2009).

Karena pentingnya ajaran-ajaran normatif dari agama atas alam tersebut, kini beberapa agama telah mengkodifikasinya secara khusus dan menjadi sumber normatif gerakan lingkungan. Dalam Katolik, misalnya, ajaran normatif Katolik mengenai alam dan lingkungan tertuang dalam teks yang disebut *Laudato Si*, sebuah naskah yang telah menjadi rujukan gerakan umat Katolik se-dunia (Maria Ratnaningsih, KWI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Laudato Si merupakan sebuah terobosan dalam agama Katolik mengenai perubahan iklim, degradasi lingkungan, kemiskinan, dan tanggung jawab manusia ke tingkat refleksi teologis yang baru dan sikap kritis terhadap permasalahan masyarakat secara umum (Teresa Messias 2024). Dengan kata lain, Surat Ensiklik ini tidak hanya ditulis atau ditujukan secara eksklusif kepada umat Katolik. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk “berdialog dengan semua orang tentang rumah bersama kita” (Paus Fransiskus 2015), termasuk penganut agama apapun maupun non-penganut agama, dengan demikian memiliki cakupan antaragama, ekumenis, trans-religius, dan non-agama seperti yang ditekankan dalam

beberapa penelitian (Stewart-Kroeker 2019, Steffen 2019, Goncalves Brito 2020). Pusat perhatiannya adalah pada masalah-masalah ekologi yang ada, yang mempengaruhi seluruh manusia dan kesejahteraan mereka yang terkait dengan lingkungan.

Meskipun berakar dalam keyakinan agama, tujuan *Laudato Si* adalah untuk melampaui batas kepercayaan. Ini merupakan sumbangan untuk meningkatkan kesadaran, mengusulkan prioritas alternatif dalam hal antropologi, ekonomi, dan politik, mengubah pola pikir, menyarankan tindakan konkret, dan menggerakkan semua sektor masyarakat agar memahami pentingnya perubahan ekologi yang diperlukan secara pragmatis (Messias 2024). Karenanya, beberapa peneliti bahkan menyarankan agar pendekatan institusional seperti ini mesti diikuti oleh agama-agama besar lainnya, dan ini akan menjadi langkah penting untuk menjelaskan hubungan spiritual antara manusia dan alam (Abumoghli 2023).

Dalam konteks Indonesia, meski dengan pendekatan yang beragam, banyak kelompok agama dari rumpun tradisi yang berbeda-beda memiliki nilai-nilai yang serupa dengan pandangan Katolik di atas, bahwa kerusakan ekologis dapat menembus batas-batas agama, dan karenanya penting bagi setiap agama untuk bekerja sama dalam melindungi lingkungan dan memerangi krisis iklim. Suherman Widjaja (Permabudhi), Syatori (Salam Institute), Ahsan Jamet (Eco Bhinneka Muhammadiyah), serta tokoh-tokoh agama dan lingkungan lainnya, menyatakan bahwa kerusakan lingkungan yang diikuti dengan bencana alam merupakan permasalahan bagi seluruh manusia, tanpa mengenal agama.

2.3 Perkembangan Green Islam di Indonesia

Gerakan Green Islam di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan gerakan lingkungan secara umum di Indonesia. Studi ini menemukan setidaknya tiga periode utama perkembangan gerakan Green Islam di Indonesia. Pertama adalah fase awal yang mulai tampak pada periode 1980-an. Isu lingkungan di Indonesia mulai menjadi perbincangan luas pada tahun 1970-an akhir, ketika Presiden Soeharto menunjuk Emil Salim menjadi Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) (lihat *Tempo* 1979, *Kompas* 1982).

Pada 1983, MUI merumuskan Fatwa tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan yang memasukkan masalah lingkungan

sebagai aspek penting. Fatwa itu mempertimbangkan Garis-Garis Besar Haluan Negara di bidang lingkungan hidup dan penetapan peraturan pelaksanaan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan hidup. Fatwa tersebut menganjurkan perlu adanya program antar-departemen secara terarah dan terpadu serta pengawasan yang seksama terhadap lingkungan, baik program yang bersifat nasional, regional, maupun sektoral. Fatwa itu juga menitikberatkan pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk masa depan dan keselamatan hidup umat manusia.

Menteri Negara PPLH Emil Salim juga relatif aktif menyebarkan pemahaman lingkungan di kalangan pesantren. Misalnya, pada 5 November 1980, Emil Salim memberikan ceramah di depan para kiai dan para santri Pondok Pesantren Pabelan di Muntilan, Jawa Tengah, tentang lingkungan. Pada tahun itu, Pondok Pesantren Pabelan juga mendapat penghargaan internasional Aga Khan karena berhasil dalam pelestarian air dan pemugaran rumah-rumah penduduk sekitarnya. Pondok Pesantren Pabelan mendapat hadiah The Agha Khan Award for Architecture sebesar 78 ribu dolar (*Kompas* 1980). Penghargaan The Agha Khan Award for Architecture merupakan hadiah untuk isu lingkungan dari sebuah lembaga sosial dunia milik imam sekte Syiah Ismailiyah yang berkantor di Jenewa. Selanjutnya, pada tahun 1982, Pabelan mendapatkan penghargaan lingkungan dari pemerintah, Kalpataru, karena berhasil mengajak santri menanam pohon. Pada tahun itu pula Musyawarah Nasional ke-2 MUI sudah membicarakan masalah lingkungan, meskipun fatwa tentang itu baru dirumuskan pada 1983.

Pada tahun 1980-an inisiatif gerakan lingkungan yang didorong para pemuka agama di pesantren memang relatif memberikan pengaruh. Di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, K.H. Imam Rofi'i, pemimpin Pondok Pesantren Darul Ittihad membentuk Kelompok Tani Pesantren. Secara konsisten, ia mengelola paguyuban itu hingga dipercaya menjadi Ketua Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa (Kelompencapir) Jawa Timur dan mampu mengangkat Bangkalan menerima penghargaan Kalpataru pada akhir 1980-an (Billahi dan Thaha 2018). Kelompencapir merupakan kelompok penyampaian informasi dan pengetahuan kepada petani tentang praktik pertanian, teknologi baru, keadaan pasar, serta perubahan kebijakan tentang pertanian yang dibentuk pemerintahan Soeharto untuk mendukung program Revolusi Hijau pemerintahannya. Sembari mengelola pesantren, K.H. Imam Rofi'i mampu mendorong inisiatif penanaman pohon pada lahan-lahan kritis dan gersang (Antara

2017). Pada 2017 ia mengembangkan usaha Kaliandra (*wood pellets*) yang memberdayakan masyarakat setempat. Dalam mengembangkan usahanya itu, ia menjalin hubungan dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Direktorat Jenderal BPDAS-PS Kementerian Kehutanan.

Ketua Umum PBNU Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih pada Mukhtar NU 1984 tercatat pernah menolak wacana pemerintah Soeharto untuk mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria. Pada 1994, ketika Soeharto menyetujui hasil studi kelayakan PLTN di Muria, Gus Dur terlibat aktif dalam aksi-aksi membela rakyat kecil dari kerusakan lingkungan. Meski hubungan NU dengan pemerintah Soeharto relatif dekat (Nasrullah 2011), Gus Dur menolak wacana itu karena mayoritas masyarakat yang berdiam di daerah tersebut adalah warga NU, yang berpotensi terdampak radiasi nuklir (Hutari 2021). Secara eksplisit, Gus Dur mengungkapkan bahwa potensi dampak kerusakan dari pembangunan PLTN tersebut lebih besar dibanding potensi kebermanfaatannya (FOSS Climate Talk-Roundtable Discussion Agama, Ideologi, dan Lingkungan 2024).

Untuk menghadang proyek PLTN yang juga didorong Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Gus Dur sampai bersikap akan puasa di lokasi proyek itu bila pemerintah melaksanakan proyek itu (*Tempo* 1994; *Kompas* 1994). George Junus Aditjondro (1996) mengungkapkan bahwa, bukan hanya masyarakat sekitar reaktor yang berpotensi menjadi korban radiasi nuklir dari PLTN di Semenanjung Muria, melainkan juga masyarakat umum yang berkunjung di tempat ziarah Islam, seperti masjid dan makam Sunan Muria, makam Sunan Kalijaga, Masjid Demak (Aditjondro 1996). Pihak internasional, terutama Australia juga khawatir jika Indonesia membangun PLTN Gunung Muria. Sebab, angin dari lokasi reaktor nuklir itu akan sampai ke Australia dan bisa turun hujan di sana yang dapat membawa radiasi nuklir (*Kompas* 1994). Pada masa itu, memang ada beberapa kasus konflik tanah yang melibatkan pemerintah dan rakyat, di antaranya, Kedungombo, Badega, Cimacan Kacapiring, Pulau Panggung, Blangguan, Tuban, Parangtritis, Cilacap, dan rencana pembangunan PLTN di Muria (*Bernas* 1992). Keterlibatan Gus Dur dalam aksi menentang proyek pembangunan PLTN di Muria itu merupakan bagian dari komitmennya terhadap sikap seharusnya NU kepada masyarakat. Menurutnya, NU tidak boleh terjebak pada tatanan masyarakat feodalistis, karena akan membawa umat Islam Indonesia ikut



bersikap feodal. Ia juga menyerukan NU untuk tidak masuk ke dalam tatanan masyarakat borjuis-kapitalis, karena umat Islam akan ikut bersikap seperti itu (Bernas 1994).

Pada fase awal ini pula tokoh NU, KH. Ali Yafie dan KH. Sahal Mahfudz, menyusun konsep fikih lingkungan untuk pertama kalinya (Yafie 1994). Pada tahun 1990-an, melalui *bahtsul masail*, NU juga kerap mendiskusikan tema-tema tentang pelestarian lingkungan hidup, seperti peran dan tanggung jawab negara dalam menjaga lingkungan (Yafie 1994). Pada tahun 1994, Mukhtamar NU di Cipasung merumuskan Jihad Lingkungan. Pada tahap ini, gerakan lingkungan berbasis Islam untuk pertama kalinya berusaha juga mengambil peran dalam menjaga jarak dengan pemerintah dan industri yang merusak lingkungan. Dalam hal ini, NU sudah melihat masalah lingkungan sebagai masalah yang bersifat struktural. Pada tahun-tahun itu, para aktivis sangat aktif menyuarakan masalah korupsi dan otoritarianisme Orde Baru. Tokoh-tokoh agama, seperti Quraish Shihab dan Frans Magnis, juga turut secara khusus mendiskusikan peran agama pada lingkungan (Kompas 1994). Pada 1996, Menteri Agama H. Tarmizi Taher bersama Menteri-KLH Sarwono Kusumaatmadja, Kassospol ABRI Letjen TNI Syarwan Hamid mengadakan Temu Wicara Lingkungan Hidup MUI di Masjid Istiqlal. Menurut Menag Taher kecenderungan konsumerisme dan hedonisme akan menghabiskan bahan bakar, menghancurkan hutan dan gunung, yang semuanya untuk menopang industri. Menurutnya, agama-agama memberikan ajaran etis mengenai lingkungan hidup, bahkan Islam menggariskan dosa bagi para pelaku perusak lingkungan (Berita Yudha 1996). Pada 1999, juga telah muncul kebijakan 'one student one tree' di beberapa pesantren Indonesia (Alliance of Religions and Conservation 2019).

Fase awal ini setidaknya dapat ditelusuri hingga awal tahun 2000-an, atau pasca-Reformasi 1998 yang menandai periode demokratisasi di Indonesia, ketika buku-buku tentang lingkungan dan agama mulai disebarkan, seperti *Agama Ramah Lingkungan Perspektif Al-Quran* karya Mujiyono serta lembaga-lembaga lingkungan non-agama semakin mendekatkan diri pada kelompok agamawan. Pada 2003, Conservation International Indonesia memulai upaya dalam melestarikan hutan di daerah Sungai Batang Gadis Sumatera Utara, dengan melibatkan sumber daya agama. Conservation International Indonesia menyadari bahwa mereka memerlukan mitra lokal dan melakukan pendekatan kepada

aktor-aktor berpengaruh di daerah tersebut, salah satunya tokoh agama Islam. Upaya ini berhasil dan di akhir tahun 2003, lebih dari 13.000 santri dan ulama bersama masyarakat berkumpul untuk mendeklarasikan Taman Nasional Batang Gadis yang luasnya mencapai sekitar 108.000 hektar atau lebih dari 25 persen dari total hutan di kabupaten tersebut. Upaya ini membuat Sungai Batang Gadis terlindungi dari industri penebangan kayu dan pertambangan (Alliance of Religions and Conservation 2019).

Pada fase selanjutnya, gerakan lingkungan semakin berkembang, terutama setelah tsunami Aceh tahun 2004. Pada masa itu, perspektif terhadap bencana cenderung menyoroti jumlah korban, kerugian materi, dan ketidakmampuan pemerintah dalam merespons bencana. Kesiapsiagaan bencana sering kali dipandang dari sudut pandang agama dan bukan dari pengetahuan ilmiah atau bagaimana memberikan respons yang lebih baik di masa depan.

Sebagai tanggapan, pemerintah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2008, yang terbentuk sebagai hasil dari perkembangan penanggulangan bencana di Aceh (BNPB N.D.). Pada tahun yang sama, berdirilah aliansi antar-iman (*interfaith*) pertama di Indonesia, yang terdiri dari tujuh organisasi: Muhammadiyah Disaster Management Centre, Yayasan Tanggul Bencana Indonesia, YAKKUM Emergency Unit, Dompot Dhuafa, KARINA, Wahana Visi Indonesia, dan Perkumpulan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (Hening Parlan, Wawancara 29 April 2024). Aliansi ini mendirikan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), yang menjadi ruang dialog antar pemangku kepentingan, terutama masyarakat sipil, yang lahir dari kesadaran yang meningkat setelah Tsunami Aceh dan gempa tektonik di Yogyakarta (Humanitarian Forum Indonesia 2006). Singkatnya, “Tsunami Aceh kemudian disusul gempa Yogyakarta. Dari situ muncul lembaga-lembaga penanggulangan bencana dari agama-agama, termasuk MDMC.” (Din Syamsuddin, Wawancara 27 Maret 2024).

Gerakan Green Islam kemudian secara resmi terlembagakan dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pada tahun 2010, NU mendirikan LPBI NU (Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama), sementara Muhammadiyah mendirikan MDMC (Muhammadiyah Disaster Management Center). Lantas, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mendirikan LPLHSDA MUI (Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup

dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia). Lahirnya badan-badan khusus tersebut menunjukkan kesadaran di kalangan tokoh-tokoh gerakan Islam untuk terlibat aktif dalam aktivisme pro-lingkungan serta mempromosikan kesadaran lingkungan di antara komunitas mereka.

MDMC adalah nama lain dari Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Muhammadiyah, sebelumnya dikenal sebagai Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB). MDMC melakukan berbagai kegiatan terkait manajemen bencana, mulai dari mitigasi, pemantauan kekuatan bangunan, hingga penanganan psikologis, persiapan tenaga medis, dan penyediaan logistik seperti dapur umum (Budi Setiawan, MDMC, 20-22 Februari 2024). Sebagai dasar, Muhammadiyah memiliki panduan berupa Fikih Kebencanaan yang dirumuskan oleh MDMC dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam panduan tersebut, Muhammadiyah menguraikan konsep kebencanaan dalam konteks Islam dan memberikan panduan tentang cara beribadah saat terjadi bencana. Sebagai contoh, Muhammadiyah menyusun daftar setidaknya 10 istilah bencana dalam konteks Islam, termasuk *musibah*, *bala*, *fitnah*, *azab*, *fasad*, *halak*, *tadmir*, *tamziq*, *iqab*, dan *nazilah*.

Serupa dengan MDMC, LPBI NU juga muncul dengan mekanisme yang serupa. Beny Syaaf Jafar menjelaskan bahwa sebelum Tsunami Aceh PBNU belum memiliki badan khusus mengenai lingkungan. Pembentukan LPBI NU merupakan respons atas bencana yang sering terjadi di Indonesia pada muktamar NU ke 32 tahun 2010 (Beny Syaaf Jafar, LPBI NU, FGD, 20-22 Februari 2024). Dalam konteks kebencanaan, penerapan pendekatan agama dalam upaya bantuan pasca-bencana dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan dari upaya pemulihan (Pratama 2023). Selain itu, pendekatan tersebut juga dapat memberikan dukungan psikologis bagi korban bencana (Rahiem, Abdullah, dan Krauss, 2004).

Pada tahun 2012, Fachruddin Mangunjaya menginisiasi *The Green Guide to Hajj (Haji Ramah Lingkungan*, versi Bahasa Indonesia) diterbitkan dalam bentuk cetak dan unduhan. Edisi pertama sebanyak 1.000 eksemplar didistribusikan melalui pameran keliling yang diluncurkan di Binjai, Sumatera Utara, pada bulan September 2012, tepat ketika rombongan besar Muslim Indonesia yang berjumlah 263 orang akan memulai umrah mereka. Setiap jemaah haji diberikan salinan *Haji Ramah Lingkungan* oleh Walikota Binjai. Banyak dari mereka yang mengisi kuesioner yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran

mengenai hal-hal penting yang membahayakan lingkungan seperti menggunakan dan membuang botol dan kantong plastik saat mereka berjalan. Pameran tersebut kemudian dipajang di Masjid Majelis Zikir Az-Zikra, Bogor, Jawa Barat yang diperkirakan dihadiri 10.000 orang dalam 24 jam. Inisiatif ini dipimpin oleh Mangunjaya dan didukung oleh *Alliance of Religions and Conservation* (ARC) (Mangunjaya 2022).

Perkembangan lain dalam Green Islam di Indonesia adalah berdirinya FNKSDA yang dideklarasikan pada tahun 2013, seiring dengan meningkatnya konflik agraria di Jawa Timur. Deklarasi ini menyoroti perlunya perlindungan terhadap sumber daya alam yang terkait erat dengan isu-isu sosial dan agama (Ayu Rikza, FNKSDA, FGD, 7 Maret 2024). Berbeda dengan LPBI NU yang dibentuk berdasarkan Mukhtar PBNU, FNKSDA dibentuk oleh individu-individu dengan latar belakang NU, terutama kaum muda progresif NU sebagai respons terhadap konflik Sumber Daya Alam (SDA) yang sering menimpa konstituen NU di tingkat akar rumput. Beberapa aktivis muda NU yang ikut serta mendirikan FNKSDA, seperti Bosman Batubara, Ubaidillah, dan Hairus Salim, merasa PBNU kurang memberikan perhatian atas persoalan ini. Menurut mereka, tidak adanya badan khusus dalam struktur resmi PBNU yang menangani masalah ini menunjukkan kurangnya respons NU terhadap isu kedaulatan SDA dan pelestarian lingkungan (Murtadho 2019).

Setahun setelah FNKSDA dideklarasikan, MUI mengeluarkan fatwa tentang satwa liar. Fachruddin Mangunjaya bersama ARC memfasilitasi dialog antara kelompok konservasi, termasuk WWF Indonesia, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI kemudian mengeluarkan fatwa yang mewajibkan 200 juta umat Islam di Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam melindungi spesies terancam termasuk harimau, badak, gajah, dan orangutan (Fachruddin Mangunjaya 2022). Fatwa tersebut disertai dengan program pendidikan untuk membantu para ulama dan masyarakat dalam mempraktikkan perlindungan satwa. Pada tahun yang sama, Ahmadiyah juga turut masuk dalam isu lingkungan dengan mendirikan CTC dengan fokus “kampanye kesadaran dan kepedulian memelihara dan membuang sampah pada tempatnya” (Ganny Setiawan, CTC, FGD, 20-22 Februari 2024).

Fase berikutnya dalam perkembangan Green Islam adalah fase pergeseran ekologi (*ecological turn*) atau fase pergeseran wacana lingkungan pada ranah kebijakan, yang ditandai momentum Islamic

Declaration on Global Climate Change dan Paris Agreement pada 2015, yang menekankan bahwa isu lingkungan, khususnya perubahan iklim, merupakan masalah utama yang harus dihadapi bersama secara global. Secara bertahap, gerakan Green Islam berkembang pesat pasca-Paris Agreement ini. Gerakan Green Islam semakin mendapatkan momentumnya ketika sejumlah ilmuwan, aktivis lingkungan, dan iklim, bersama-sama dengan ulama terkemuka dari dunia Islam mengeluarkan Islamic Declaration on Global Climate Change (Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global) pada 17-18 Agustus di Istanbul, Turki. Deklarasi ini, yang berisi tiga poin dengan beberapa sub-poin (lihat Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global 2015), bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam dan umat Muslim dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan krisis iklim. Fazlun Khalid, Direktur dan Pendiri Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES), yang menjadi penggagas deklarasi bersama enam konseptor lainnya (salah satunya adalah Fachruddin Mangunjaya), berharap bahwa deklarasi ini setidaknya akan menjadi panduan bagi umat Islam agar dapat berpartisipasi bersama dalam mengatasi krisis iklim (Mangunjaya 2022).

Di Indonesia, berdiri Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi (SIAGA BUMI) yang dideklarasikan bertepatan pada peringatan Hari Perdamaian Dunia 21 September 2015. SIAGA BUMI terdiri dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin), Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) Indonesia, Inter Religious Council (IRC) Indonesia, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (UNAS), Society of Indonesia Environmental Journalist (SIEJ), dan WWF Indonesia. Selaku Ketua Tim Pengarah SIAGA BUMI adalah Din Syamsuddin yang ketika itu juga merupakan ketua MUI dan CDCC (Din Syamsuddin, Wawancara, 27 Maret 2024).

Pada tahun 2016, setelah Paris Agreement diberlakukan di Indonesia, MUI mengeluarkan fatwa pelarangan pembakaran hutan dan lahan gambut dengan sengaja, menindaklanjuti permintaan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Indonesia. Kemudian dua tahun setelahnya, LDII terlibat dalam isu lingkungan setelah Munas 2018, dengan menetapkan program pengabdian untuk bangsa, di mana tema

pelestarian lingkungan, termasuk dalam program mereka (FGD, 6-8 Maret 2024). Kader Hijau Muhammadiyah dan AgriQuran berdiri juga di tahun yang sama, meski melalui cara yang cenderung tidak bersifat institusional sebagaimana LDII (FGD, 6-8 Maret 2024).

Pada tahun 2020, Greenpeace yang semula merupakan organisasi non-agama, terlibat dalam Green Islam melalui Ummah for Earth Indonesia. Hal ini mereka lakukan sebagai upaya melibatkan masyarakat Islam Indonesia ke dalam agenda lingkungan Greenpeace (Maftuchah Nugrahaini, Ummah for Earth, FGD, 20 Februari, 2024). IRI, atas inisiatif UNEP di tahun yang sama berdiri dengan tujuan untuk membangun kerja sama antar-agama dalam menjaga lingkungan hidup (Jimmy Marcos Immanuel Sormin, Interfaith Rainforest Initiative, FGD, 6-8 Maret 2024).

Menyadari pentingnya agama dalam pelestarian lingkungan, aktor-aktor seperti Nana Firman, aktivis Green Faith Internasional dan Hening Parlan aktivis Muhammadiyah, mendirikan Green Faith Indonesia, yang memiliki fokus agenda agama dan lingkungan (Nita Rosita, Green Faith Indonesia, wawancara, 27 Maret 2024). Green Faith Indonesia menjadi salah satu bagian dari Green Faith Internasional, sebuah organisasi internasional yang sejak 1992 telah aktif melakukan kampanye-kampanye lingkungan. Pada tahun 2022 itu juga, HAKA mulai terlibat dalam gerakan Green Islam. Mereka terlibat dalam mendorong Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menerbitkan fatwa MPU mengenai Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perspektif Syariat Islam. Mengingat kondisi masyarakat Aceh yang cenderung patuh terhadap ulama, HAKA kemudian melibatkan Teungku Inong dalam gerakan Green Islam mereka (Munira Rezkina, legal officer Yayasan HAKA, wawancara, 24 April 2024).

2.4 Tiga Pola Pembentukan Green Islam di Indonesia

Berdasarkan tilikan historis di atas, setidaknya terdapat tiga pola pembentukan gerakan Green Islam di Indonesia. Pertama, gerakan Green Islam yang muncul dari rahim organisasi-organisasi Islam besar, seperti NU, Muhammadiyah, MUI, LDII, DMI, Masjid Istiqlal, dan Ahmadiyah. Aktivisme lingkungan dari organisasi maupun komunitas semacam ini, baik yang berbentuk seruan etik, institusionalisasi nilai dalam organisasi, maupun praktik langsung di masyarakat, merupakan lanjutan dari sejarah dan nilai organisasi induk mereka. Ini membuat pijakan aktivisme mereka memiliki legitimasi historis yang relatif kokoh.

Misalnya, pada Muhammadiyah, landasan moral Al-Ma'un yang diserukan oleh KH. Ahmad Dahlan dalam organisasi menjadi kerangka moral yang kuat pada organisasi-organisasi badan lingkungan dalam struktur maupun lingkungan kultural Muhammadiyah (Dede Haris Sumarno, Bendahara MDMC, wawancara, 26 April 2024).

Kemunculan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) pada Mukhtamar Muhammadiyah tahun 2001 diakui oleh pengurus MLH Djihadul Mubarak cukup kuat didorong oleh semangat ini (Djihadul Mubarak, MLH, FGD, 20-22 Februari 2024). Ia menjelaskan, visi lingkungan sudah dibawa oleh organisasi sejak pendiriannya secara luas, dan pada masa ini, isu lingkungan yang luas itu tersegmentasi pada isu lingkungan hidup, perubahan iklim, hingga kebencanaan. Struktur keyakinan itu terlembagakan secara menyeluruh pada cabang-cabang di daerah, baik dari tingkat provinsi hingga ranting desa. Dalam tubuh Muhammadiyah, nomenklatur "majelis" dapat memperluas wewenang para pengurusnya untuk membuat turunan organisasi hingga ranting desa. Secara bertahap, struktur kepengurusan MLH telah menyeluruh ada pada setiap provinsi di Indonesia, termasuk di Papua dan Aceh. Hingga saat ini, MLH terus mendorong pengarusutamaan isu pengelolaan sampah, energi terbarukan, dan perubahan iklim.

Selain MLH, landasan historis yang disebarluaskan oleh KH. Ahmad Dahlan dalam struktur Muhammadiyah juga menyebar kepada badan yang sudah berdiri sebelum MLH, seperti Aisyiyah. Pada Mukhtamar tahun 2015 di Makassar, dibentuk Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) pada gerakan perempuan Muhammadiyah, Aisyiyah. Pendirian LLHPB 'Aisyiyah merupakan bagian dari dukungan Aisyiyah terhadap pengarusutamaan isu lingkungan yang sebelumnya sudah dijalankan oleh MLH. Pengurus LLHPB 'Aisyiyah Suria Dwi Wahyu menjelaskan bahwa pendirian LLHPB 'Aisyiyah tidak lain untuk saling mendukung MLH dan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) Muhammadiyah saat itu yang sudah terbentuk. Saat ini, LLHPB memiliki program sekolah hijau (*green school*) di tingkat Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA), yang dalam satu wilayah saja jumlahnya mencapai hingga 800-an (Surria Dwiwahyu, LLHPB 'Aisyiyah, FGD, 20-22 Februari 2024).

Kekuatan sejarah yang melembaga dalam tubuh Muhammadiyah juga dapat ditemukan pada Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Muhammadiyah atau yang dikenal sebagai Muhammadiyah Disaster

Management Center (MDMC) dan program Eco Bhinneka. Dengan menyandarkan pada kesadaran bencana KH. Ahmad Dahlan ketika membantu korban bencana Gunung Merapi, MDMC didirikan pada 2004 untuk merespons bencana tsunami Aceh (Budi Setiawan, Ketua MDMC 20-22 Februari 2024; Dede Haris Sumarno, Bendahara MDMC, wawancara, 26 April 2024). Sebelumnya, LRB bernama Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB). Perubahan paradigma yang mendalam tentang bencana membuat pemahaman Muhammadiyah tentang bencana bukan hanya masalah penanggulangan, melainkan resiliensi atau ketahanan. Perubahan paradigma dan nama ini juga menunjukkan faktor historis yang bekerja dalam tubuh Muhammadiyah.

Dengan akar historis yang kuat itu, tidak sulit untuk Muhammadiyah membentuk program-program khusus mengenai lingkungan, seperti Eco Bhinneka. Dengan mengadaptasi nilai-nilai *wasathiyah* Muhammadiyah, program Eco Bhinneka dibentuk untuk mengarusutamakan nilai-nilai toleransi dan lingkungan sekaligus dengan tema “Merawat Lingkungan Melestarikan Kerukunan”. Hingga tahun 2024, program ini memiliki empat wilayah kerja, yaitu di Surakarta, Banyuwangi, Pontianak, dan Ternate (Ahsan Jamet, Eco Bhinneka, FGD, 20-22 Februari 2024; Uswatun Hasanah, Koordinator Eco Bhinneka Surakarta, wawancara, 27 April 2024). Dalam program ini, para anggota aktifnya bukan hanya berasal dari kalangan Muhammadiyah, namun lintas organisasi intra-agama dan antar-agama. Untuk melanjutkan program ini, para pengurus Eco Bhinneka membentuk komunitas, seperti Sedhere’ Eco Bhinneka di Surakarta (Uswatun Hasanah, Koordinator Eco Bhinneka Surakarta, wawancara, 27 April 2024; Damai, Ketua Sedhere’ Eco Bhinneka Surakarta, wawancara, 27 April 2024). Di luar struktur Muhammadiyah, beberapa kader Muhammadiyah mendirikan organisasi kultural Kader Hijau Muhammadiyah (KHM), yang memiliki beberapa cabang di daerah, seperti di Surabaya, Malang, dan Yogyakarta. Para kader Muhammadiyah yang aktif dalam advokasi isu lingkungan mengakui pertautan Muhammadiyah dalam nama komunitas mereka memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bergerak (David Efendi, Ketua KHM, FGD, 6-8 Maret 2024). Kelembagaan yang terus berkembang ini menjadi indikator bahwa faktor historis dan kultural bekerja dan menjadi kekuatan aktivisme lingkungan di kalangan Muhammadiyah.

Selain Muhammadiyah, faktor historis yang bergerak untuk isu lingkungan dari organisasi-organisasi Islam besar juga ditemukan pada

NU, MUI, LDII, DMI, dan Ahmadiyah. Di NU, pada Mukhtamar tahun 2010 dibentuk Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) NU. Lembaga ini juga hadir dari keberlanjutan sejarah organisasi NU. Sebelumnya, pada 2005 NU mendirikan Community Base Disaster Research and Management (CBDRM), untuk merespons bencana tsunami Aceh pada 2004. Saat itu, CBSRM masih di bawah Lembaga Kesehatan NU (LKNU). Unit di bawah LKNU ini yang kemudian berkembang, menyentuh isu pemanasan global, dan akhirnya pada Mukhtamar tahun 2010 dibentuk LPBI NU sebagai kelanjutan dari CBSRM (Beny Syaaf Jafar, LPBI NU, 20-22 Februari 2024).

Kesadaran historis mengenai isu lingkungan pada tubuh NU sudah muncul sejak pendiriannya dengan pesan melindungi dan menjaga kelestarian alam, dan itu dianggap sebagai manifestasi dari kecintaan terhadap tanah air. Isu lingkungan dalam komunitas NU lebih berkembang pada tahun 1980-an, dan secara jelas terlihat pada Mukhtamar tahun 1994 di Cipasung dengan munculnya fatwa ekologis. Pada 2007, PBNU mendirikan Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNKLH), yang kemudian dilanjutkan LPBI. Kesadaran yang melekat ini juga tampak pada beberapa *bahtsul masail* dan Konferensi Besar (Konbes) NU, seperti pada 2021 yang memasukkan secara khusus tema lingkungan. Di antara isu yang dibahas pada tema lingkungan itu adalah perpajakan dan perdagangan karbon (PBNU 2021). Kajian lingkungan pada Konbes tahun 2021 itu ditindaklanjuti pada Mukhtamar ke-34 di Lampung. Komisi Qanuniah Bahtsul Masail membahas reformasi agraria dan perubahan iklim (PBNU 2021). Kesadaran historis tentang lingkungan di kalangan NU juga menyebar pada kader-kadernya yang tidak dalam struktur kepengurusan resmi organisasi. Beberapa dari mereka mendirikan lembaga atau komunitas lingkungan yang bernafaskan nilai-nilai NU, seperti FNKSDA (Ayu Rikza, FGD 2024) dan Salam Institute di Cirebon (Syator, FGD 2024).

Organisasi Islam lain yang memiliki pola sejenis dapat ditemukan di LDII. Di dalam tubuh organisasi LDII, sejak Munas pada 2018 terdapat pengarusutamaan isu lingkungan. Pada Munas 2018 itu, para pengurus LDII mengetengahkan delapan klaster program kerja utama, yaitu kebangsaan, pendidikan, ekonomi syariah, kesehatan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, teknologi digital, dan energi terbarukan. Sejak saat itu, LDII di cabang-cabang cukup giat mengarusutamakan isu lingkungan. Di Jawa Timur, misalnya, para pengurusnya aktif dalam beberapa program

lingkungan, di antaranya penghijauan, pengelolaan bibit, pemanfaatan teknologi pangan, hingga pembangunan panel surya di pesantren-pesantren. LDII yang secara historis memiliki hubungan erat dengan pemerintah relatif mudah bekerja sama. LDII Jawa Timur sering kali bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Pemerintah Kota Surabaya, serta para camat, lurah, dan kepala desa (Agus Yudianto, LDII Jawa Timur, FGD, 6-8 Maret 2024).

Di Yogyakarta, LDII aktif dalam pengelolaan sampah, khususnya untuk merespons Jogja Darurat Sampah. LDII Yogyakarta juga memiliki program pengajian dua kali seminggu, termasuk mengetengahkan ayat-ayat tentang sampah. Pengarusutamaan isu lingkungan dalam tubuh organisasi, selain merespons isu-isu global, juga merupakan kelanjutan dari gerakan organisasi yang berfokus pada bidang dakwah (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, FGD, 6-8 Maret 2024). Sejak tahun 1980-an, sudah terdapat gerakan awal lingkungan melalui komunitas pecinta alam LDII. Saat itu, bentuknya seperti gerakan kepanduan yang memiliki program mendekatkan diri kepada alam. Semangat awal ini mengendap dalam tubuh organisasi dan berkembang melalui momentum yang tepat untuk mengarusutamakan isu lingkungan (Agus Yudianto, LDII Jawa Timur, FGD, 6-8 Maret 2024).

Serupa dengan pergerakan LDII, Ahmadiyah yang sering kali dianggap kontroversi oleh masyarakat juga memiliki perhatian pada isu lingkungan. Dengan sejarah yang panjang, Ahmadiyah memiliki jaringan yang luas, hingga saat ini terdapat 400 titik cabang Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang tersebar di lebih 50 kabupaten atau kota. Perhatian utama Ahmadiyah terhadap isu lingkungan berfokus pada masalah kebersihan kota melalui gerakan Clean The City (CTC). Gerakan ini diawali oleh keresahan sebagian kader Ahmadiyah terhadap kebersihan kota pada momentum pergantian tahun (Abdul Ghani, Sekretaris Umr Ammah PB JAI, FGD, 20-22 Februari 2024). Gerakan ini kemudian berkembang melalui gerakan pemuda Ahmadiyah. Dalam pergerakannya, anggota atau peserta CTC bukan hanya berasal dari kader Ahmadiyah, melainkan juga masyarakat umum. Pengalaman pahit yang dialami Ahmadiyah, seperti persekusi, menjadi salah satu landasan untuk menggerakkan CTC sebagai media dakwah dan komunikasi baru untuk mengenalkan Ahmadiyah secara lebih positif kepada masyarakat.

Selain pada organisasi masyarakat, isu lingkungan juga menjadi nilai yang berkembang di organisasi-organisasi Muslim seperti MUI, MPU

Aceh, DMI, dan PPI UNAS. Meski baru belakangan isu lingkungan mulai diarustumkan, ia berkembang dari nilai-nilai sebelumnya yang sudah ada. Misalnya fatwa satwa liar, daur ulang air, dan perubahan iklim yang dirumuskan MUI, berkembang dari berbagai masalah serta konflik kepentingan ekonomi dan sosial yang kemudian menjadi pijakan fatwa-fatwa MUI. Hal itu bisa dilihat dari poin-poin pertimbangan yang menjadi rujukan fatwa itu.

Hal serupa juga ditemukan di MPU Aceh. Meskipun belum menjadi qanun, namun fatwa tentang pemeliharaan lingkungan hidup merupakan hasil dari refleksi berbagai qanun yang ada, dalam hal ini terdapat sembilan qanun yang menjadi rujukan, di samping undang-undang, peraturan menteri, dan keputusan Gubernur Aceh (MPU Aceh 2019). Di DMI, meskipun butuh dorongan, namun program eko-masjid merupakan lanjutan dari semangat pro-lingkungan yang sebelumnya sudah menjadi nilai utama. Di PPI UNAS, pengarusutamaan isu lingkungan juga muncul belakangan setelah keterlibatan aktif Fachruddin Mangunjaya.

Pola kedua dalam pembentukan Green Islam di Indonesia adalah munculnya gerakan Green Islam yang bermula dari keterlibatan organisasi-organisasi lingkungan non-agama yang selama ini telah menjalankan aksi-aksi lingkungannya di Indonesia, ke dalam aksi-aksi lingkungan dengan identitas Islam. Masuknya organisasi-organisasi lingkungan non-agama ke dalam aksi-aksi lingkungan berbasis Islam tidak terlepas dari pembacaan mereka tentang masyarakat di masing-masing area kerja mereka yang cenderung religius. Beberapa organisasi lingkungan non-agama yang kemudian terlibat dalam aksi-aksi Green Islam adalah Greenpeace Indonesia, Save Ake Gaale di Ternate, dan HAKA di Aceh.

Save Ake Gaale berdiri pada 2001 untuk mengawal isu keberlangsungan sumber air di Kota Ternate. Nama komunitas mereka juga terinspirasi dari masalah itu: *Ake* yang berarti air, dan *Gaale* yang merupakan siput endemik yang hidup di Ternate. Save Ake Gaale berkali-kali dihadapkan dengan masalah air yang menjadi salah satu isu utama di Ternate, seperti intrusi air laut pada 2015. Secara aktif mereka melakukan advokasi dan pendidikan kepada pemerintah dan masyarakat untuk memberikan intervensi terhadap intrusi air laut. Di antara contohnya adalah program injeksi air tawar dengan membangun kolam retensi air atau program 1000 sumur resapan dan lubang biopori. Konsistensi Save Ake Gaale pada isu air memperkuat pergerakan mereka, sehingga berhasil mempengaruhi lahirnya beberapa Peraturan Daerah

(Perda), seperti Perda tentang Sumur Resapan dan Perda tentang Pengelolaan Kualitas Air di Ternate (Alwan Arif, pendiri Save Ake Gaale, FGD, 6-8 Maret 2024).

Kemudian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Alwan Arif (pendiri Save Ake Gaale, FGD, 6-8 Maret 2024), karena menyadari kuatnya pengaruh agama dan kearifan lokal bagi konstituen mereka di Kota Ternate, Save Ake Gaale dalam area Green Islam melalui ritual-ritual agama serta melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat dalam program-program pelestarian lingkungan. Contohnya adalah ritual *sigofi ake*. Ritual ini merupakan pembacaan doa pada Tuhan dan para leluhur yang melindungi sumber air di Ternate. Alwan Arif mengatakan bahwa pesan-pesan lingkungan melalui agama dan tradisi semacam ini lebih dapat diterima oleh masyarakat Ternate dibanding misalnya seruan-seruan formal pelestarian lingkungan (Alwan Arief, Ketua Komunitas Save Ake Gaale, FGD, 6-8 Maret 2024).

Gerakan sejenis juga ditemukan pada Greenpeace Indonesia. Greenpeace merupakan jaringan global yang fokus mengkampanyekan perubahan iklim, penggundulan hutan, penangkapan ikan secara berlebihan, hingga isu-isu lingkungan lainnya. Di Indonesia, dalam mendukung kampanye-kampanye tersebut, mereka relatif sering menggunakan identitas Islam melalui aliansi antar-organisasi yang dikenal sebagai Ummah for Earth. Dalam Ummah for Earth, Greenpeace Indonesia kerap melakukan kampanye lingkungan yang berisi ceramah-ceramah dengan tema pelestarian lingkungan, melalui unggahan di media sosial mereka (Maftuchah Nugrahaini, Ummah for Earth, FGD, 20 Februari, 2024). Maftuchah Nugrahaini menyebutkan bahwa hal tersebut penting mereka lakukan, mengingat Islam adalah agama mayoritas di Indonesia (Maftuchah Nugrahaini, Ummah for Earth, FGD, 20 Februari, 2024).

Contoh lainnya adalah HAKA di Aceh. Meski bukan organisasi Islam, HAKA relatif sering menggunakan identitas Islam dalam mengkampanyekan isu lingkungan. Misalnya, mereka bekerja sama dengan Teungku Inong Aceh untuk menyebarkan nilai-nilai pelestarian lingkungan dalam ceramah-ceramah agama. Keterlibatan HAKA dalam Green Islam terlihat ketika mereka memberi dukungan atas fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perspektif Syariat Islam. Serupa dengan Save Ake Gaale di Ternate dan Greenpeace Indonesia, faktor utama yang membuat HAKA menggunakan identitas Islam dalam aksi-aksi lingkungannya adalah

faktor masyarakat lokal Aceh yang cenderung dapat menerima pesan-pesan lingkungan melalui agama (Munira Rezkina, legal officer Yayasan HAKA, Wawancara, 24 April 2024).

Pola ketiga pembentukan Green Islam di Indonesia adalah pendirian organisasi atau komunitas yang memang pendiriannya ditujukan sebagai gerakan yang mengintegrasikan Islam dan lingkungan. Dalam sejarahnya, tahun 2013 merupakan tahun di mana FNKSDA dideklarasikan. Kemunculan FNKSDA sekaligus menandai lahirnya organisasi-organisasi yang didirikan sebagai organisasi Green Islam. FNKSDA didirikan oleh para aktivis muda NU yang menginginkan PBNU untuk mengambil sikap atas persoalan lingkungan terutama keberpihakan mereka kepada masyarakat yang terlibat dalam konflik agraria. FNKSDA menganggap bahwa masyarakat NU kerap menjadi korban dari konflik sumber daya alam akibat industri ekstraktif, seperti Lumpur Lapindo di Porong, konflik dengan perusahaan migas di Sumenep, konflik air dengan PT Aqua Danone di Klaten, konflik dengan tentara dan perusahaan tambang di Kebumen, serta konflik dengan perusahaan semen di Pegunungan Kendeng (Murtadho 2019).

Artinya, berbeda dengan NU, Muhammadiyah, LDII yang tumbuh dari organisasi keagamaan, atau HAKA dan Save Ake Gaale yang tumbuh dari organisasi lingkungan non-agama, FNKSDA sejak pendiriannya merupakan organisasi lingkungan berbasis Islam. Setelah FNKSDA, organisasi yang didesain dengan konsep Green Islam sejak pendiriannya marak bermunculan di Indonesia. AgriQuran, Bumi Langit Permaculture, EcoDeen, dan KHM, merupakan beberapa organisasi yang termasuk dalam pola serupa, dengan karakter organisasi yang berbeda-beda.

Contoh-contoh di atas memberikan ilustrasi bagaimana tiga pola pembentukan itu memberikan jalan bagi muncul dan berkembangnya Green Islam di Indonesia. Baik mereka yang secara historis memiliki pengalaman panjang dalam organisasi Islam dan mereka yang terbentuk dari organisasi-organisasi lingkungan non-agama, maupun yang sejak berdirinya memang ditujukan untuk integrasi Islam dan lingkungan, telah mewarnai perkembangan gerakan Green Islam belakangan ini. Kehadiran organisasi atau kelompok Green Islam itu telah membentuk sejarah aktivisme Green Islam di Indonesia.

2.5 Kesimpulan

Bab ini mendiskusikan mengenai munculnya diskursus agama dan lingkungan dan sejumlah faktor historis yang berpengaruh pada

pembentukan Green Islam di Indonesia. Berdasarkan penelusuran historis, wacana agama dan lingkungan dapat terlacak jauh ke tahun 1960-an, ketika White (1967) menuliskan peran ajaran agama dalam krisis lingkungan. Tak lama setelahnya, Nasr (1968) memperkenalkan gagasan sufistik mengenai kesatuan alam semesta, di mana manusia menjadi bagian di dalamnya. Pada tahun-tahun berikutnya, diskursus agama dan lingkungan secara bertahap terus menguat. Salah satu contohnya adalah munculnya konseptualisasi *green religion* dan *dark green religion* (Taylor 2010). Perspektif pertama, *green religion*, lebih dekat dengan apa yang disebut tradisi “agama langit,” yang menganggap perilaku pro-lingkungan sebagai tanggung jawab manusia sesuai ajaran agama. Sementara perspektif kedua, *dark green religion*, yang disebut pula sebagai “agama-agama bumi” seperti contohnya kepercayaan lokal, meyakini bahwa alam memiliki nilai intrinsik dan suci yang harus dijaga dan dilestarikan.

Di Indonesia, gerakan Green Islam dapat ditelusuri ke tahun 1980-an ketika MUI merumuskan Fatwa tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan pada 1983. Lalu juga ada keterlibatan tokoh-tokoh pesantren dalam aktivisme lingkungan serta mendialogkan agama dan lingkungan. Secara bertahap, gerakan Green Islam makin meluas pasca-tsunami Aceh 2004, di mana muncul kesadaran di kalangan tokoh dan aktivis Islam untuk terlibat dalam upaya-upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam. Gerakan Green Islam makin mendapatkan momentumnya pasca-Islamic Declaration on Global Climate Change (Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global) di Istanbul, Turki, dan Paris Agreement 2015. Khususnya setelah deklarasi di Istanbul itu, hampir semua komunitas agama terlibat dalam aksi-aksi iklim. Deklarasi itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa Islam dan umat Muslim dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan krisis lingkungan dan iklim.

Terakhir, penelitian dalam buku ini menemukan tiga pola pembentukan Green Islam di Indonesia, yaitu gerakan Green Islam yang muncul dari rahim organisasi-organisasi Islam besar, gerakan Green Islam yang muncul dari organisasi-organisasi lingkungan non-agama, dan gerakan Green Islam organisasi yang sejak berdirinya memang ditujukan untuk integrasi Islam dan lingkungan.

BAB 3

GREEN ISLAM SEBAGAI GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA

Studi mengenai agama, khususnya Islam, dan lingkungan masih didominasi oleh wacana yang melihat hubungan sistem normatif Islam dengan lingkungan (*ecotheology*). Misalnya, Nasr (1968) menawarkan pemahaman kembali pada ajaran konsep kosmologi tradisional tasawuf atau memperluas kesadaran *syariah* mengenai perlakuan etis terhadap lingkungan (Nasr 1996, 1994). Sementara Afrasiabi (2003) menawarkan konsep eko-teologi Islam (*Islamic ecotheology*) sebagai solusi ajaran Islam atas persoalan kerusakan lingkungan. Eko-teologi Islam, penggabungan dua istilah ekologi dan teologi Islam, merupakan upaya melihat persoalan ekologi dengan sudut pandang teologi Islam yang berdasarkan pada teks-teks Alquran dan hadis (Afrasiabi 2003).

Sementara penelitian yang mengkaji Islam sebagai gerakan sosial lingkungan belum banyak dilakukan (Mangunjaya dan Mickey 2012). Bab ini berupaya melihat mekanisme yang bekerja di balik perkembangan gerakan lingkungan berbasis Islam. Secara garis besar, bab ini mendiskusikan beberapa faktor yang berinteraksi yang menyebabkan muncul dan berkembangnya Green Islam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah kesempatan politik yang terbuka, sumber daya seperti struktur organisasi yang telah terbentuk namun belum banyak dimanfaatkan dalam isu lingkungan, dan nilai-nilai bersama yang membentuk pembiasaan mengenai agama dan lingkungan. Ketiga

faktor tersebutlah yang lantas direspons oleh aktor-aktor organisasi atau komunitas yang menjadi lokomotif gerakan Green Islam di Indonesia.

3.1 Struktur Kesempatan Politik Green Islam

Green Islam di Indonesia lahir sebagai respons atas perubahan-perubahan eksternal situasional yang memungkinkan munculnya gerakan. Mengikuti konsep struktur kesempatan politik Glenn Robinson (2012), analisis struktur kesempatan politik mesti memperlihatkan bagaimana perubahan spesifik dalam lingkungan eksternal memicu perubahan spesifik dalam kesempatan yang tersedia bagi gerakan sosial (Robinson 2012). Dalam menelusuri perubahan spesifik eksternal tersebut, studi ini memperlihatkan setidaknya dua perubahan eksternal yang dialami organisasi-organisasi Green Islam: perubahan paradigma pasca-tsunami Aceh tahun 2004 dan gempa Yogyakarta tahun 2006 (struktur domestik) dan pengaruh isu perubahan iklim global 2015 (struktur internasional).

Perubahan mencolok pertama dalam struktur kesempatan politik yang memungkinkan munculnya gerakan Green Islam di Indonesia adalah perubahan paradigma pemerintah dan organisasi-organisasi besar Islam mengenai bencana setelah tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta, dari paradigma cepat tanggap bencana menjadi paradigma resiliensi dan mitigasi risiko bencana. Melalui perubahan ini, NU, Muhammadiyah, dan MUI sebagai organisasi besar Islam yang memulai gerakan Green Islam dapat memanfaatkan peluang terutama peluang kerja sama dengan mitra internasional. Hasilnya adalah organisasi tersebut mendirikan badan-badan khusus di bawah struktur lembaganya masing-masing, sebagaimana LPBI dalam tubuh NU, MDMC dan MLH dalam tubuh Muhammadiyah, dan LPLHSDA dalam struktur lembaga MUI.

Sebelum bencana tsunami, mayoritas masyarakat bahkan pemerintah menganggap bencana alam sebagai peristiwa yang terjadi di luar kendali manusia atau tiba-tiba tanpa peringatan, sehingga upaya-upaya mitigasi resiko belum banyak dilakukan. Pandangan ini dipengaruhi oleh pandangan konvensional yang melihat bencana sebagai bagian alami dari kehidupan dan terjadi sebagai akibat kecelakaan. Bencana alam dianggap tidak dapat diprediksi, tidak dapat dihindari, dan tidak dapat dikendalikan (Triutomo 2007). Selain itu, ada keyakinan bahwa bencana adalah kehendak Tuhan, di mana manusia tidak memiliki

kendali atas kejadian tersebut, dan mungkin merupakan bentuk peringatan, cobaan, atau kutukan (Lindell 2006). Akibatnya, manusia dianggap tidak memiliki daya atau kemampuan untuk mempersiapkan diri menghadapi bencana.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memberi tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengelola dan menangani persoalan kebencanaan, termasuk dalam hal mitigasi risiko. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah dari tahap pra-bencana (mitigasi), bencana (tanggap darurat), hingga pasca-bencana (bantuan). Tahap awal dari upaya ini melibatkan pemahaman dari semua pihak terkait, terutama institusi terkait, tentang konsep perkembangan dan perubahan paradigma politik (Tarrow 1988) dalam mitigasi bencana. Dengan demikian, pandangan yang lebih progresif, yang menganggap bencana sebagai bagian dari proses pembangunan dan sebagai masalah yang berkelanjutan, menjadi paradigma yang umum di segala lini masyarakat.

Beny Syaaf Jafar, aktivis LPBI NU, mengatakan bahwa di dalam organisasinya, perubahan paradigma mengenai kebencanaan muncul utamanya pasca-tsunami Aceh. Bencana tidak lagi dipandang sebagai semata-mata karena ketetapan alam, melainkan juga terdapat unsur manusia yang dapat mempercepat atau memitigasi risiko bencana. Karena perubahan paradigma akan kebencanaan inilah, PBNU mendirikan Community Base Disaster Research and Management (CBSRM) (Benny, LPBI NU, FGD, 20-22 Februari 2024). CBSRM mulanya merupakan unit di bawah Lembaga Kesehatan NU (LKNU) yang kemudian berkembang menanggapi persoalan lingkungan yang lebih luas, menyentuh isu pemanasan global. Pada Mukhtamar tahun 2010, PBNU secara resmi membentuk LPBI NU sebagai kelanjutan dari CBSRM (Beny Syaaf Jafar, LPBI NU, 20-22 Februari 2024).

Sejalan dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, melalui Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008, pemerintah Indonesia mengganti Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB 2019). Dari BNPB, muncul peraturan kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar. Aturan tersebut mengatur prosedur distribusi bantuan bencana dari lembaga internasional, di mana salah satu pasalnya menyebutkan

bahwa metode distribusi harus melalui konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat dan melibatkan mitra-mitra organisasi domestik Indonesia. Aturan ini membuat NU, Muhammadiyah, dan MUI, sebagai organisasi besar Islam mendapatkan keuntungan.

Din Syamsuddin, misalnya, menyebutkan bahwa terjadi peningkatan permohonan kerja sama dari organisasi atau lembaga donor internasional kepada organisasi yang dipimpinnya, yakni Muhammadiyah pada era setelah tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta ini. Ia mengatakan: “Sejak stunami Aceh itu, banyak pihak luar negeri yang mau bekerja sama dengan Muhammadiyah. Mereka, harus daftar di Bappenas dan harus mencantumkan mitra lokal. Sama seperti ketika gempa di Yogyakarta. Saat itu juga banyak permohonan kerja sama dari luar negeri, termasuk Australia” (Din Syamsuddin Wawancara 27 Maret 2024).

Din Syamsuddin bahkan mengakui bahwa Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), sebagai badan organisasi Muhammadiyah yang khusus menangani persoalan bencana, didirikan salah satunya untuk mengakomodir kesempatan kerja sama internasional ini: “Itu (kerja sama) berlanjut dan ditangani oleh organisasi Muhammadiyah. Saat saya terpilih kedua kalinya di Muhammadiyah pada tahun 2010, itu mulai ada MDMC (secara resmi), bahasa inggris digunakan karena ada keperluan kerja sama secara internasional” (Din Syamsuddin, Wawancara, 27 Maret 2024).

Secara domestik, perubahan dalam struktur kesempatan politik, yakni perubahan paradigma perihal bencana yang berlaku dalam organisasi-organisasi besar Islam dan pemerintah serta aturan-aturan baru yang mengikutinya, berdampak pada meningkatnya akses kerja sama dan merapatnya mitra-mitra berpengaruh. Wiktorowicz menjelaskan bahwa situasi semacam ini berpengaruh pada percepatan pembentukan aksi kolektif (Wiktorowicz 2012). Sementara Tarrow (1988) secara spesifik bahkan menyatakan bahwa peningkatan akses (*increasing acces*) dan mitra berpengaruh (*influential allies*) merupakan beberapa komponen penting dalam terbukanya struktur kesempatan politik (Tarrow 1988). Dalam konteks ini, NU menjalin kerja sama dengan World Wildlife Fund (WWF), Muhammadiyah dengan Conservation International, MUI dan PPI UNAS dengan WWF dan Alliance of Religions and Conservation (ARC) (Mangunjaya 2015). Di sisi lain, negara-negara asing seperti Amerika Serikat melalui United States Agency for

International Development, Australia melalui Australia Agency for International Development, dan European Union juga telah terlibat dalam kerja sama secara khusus dengan NU dan Muhammadiyah (Amri 2012).

Kolaborasi-kolaborasi internasional semacam ini turut mempengaruhi gerakan aksi kolektif organisasi Green Islam. Misalnya, kolaborasi WWF dan ARC dengan MUI berperan besar dalam lahirnya fatwa MUI yang mewajibkan seluruh umat Islam di Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam melindungi spesies terancam seperti harimau, badak, gajah dan orang utan. Fatwa tersebut merupakan fatwa pertama di dunia tentang perlindungan satwa dan disertai dengan program pendidikan untuk membantu para ulama dan masyarakat dalam mempraktikkannya (Alliance of Religions and Conservation, 2019).

Perubahan kedua dalam struktur kesempatan politik bagi munculnya gerakan Green Islam di Indonesia adalah adanya norma-norma baru internasional yang berpengaruh tentang perubahan iklim. Perubahan dalam struktur kesempatan politik, sebagaimana yang dikatakan Glenn E. Robinson (2012), tidak hanya datang dari perubahan struktur domestik, melainkan juga dapat datang dari perubahan struktur internasional. Terdapat dua peristiwa khusus internasional yang memiliki dampak yang sangat kuat bagi gerakan Green Islam, yakni Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global (Agustus 2015) di Istanbul dan Paris Agreement (Desember 2015).

Deklarasi Iklim umat Islam di Istanbul menunjukkan komitmen kaum Muslim global untuk bersatu dalam menangani persoalan iklim. Komitmen ini meluas ke seluruh dunia, khususnya negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam seperti Indonesia. Satu bulan setelah Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global (21 September 2015), di Indonesia berdiri organisasi Bergerak Menyelamatkan Bumi (SIAGA BUMI) sebagai respons atas norma-norma baru dunia, termasuk isu perubahan iklim. Din Syamsuddin dan Fachruddin Mangunjaya yang merupakan salah satu utusan Indonesia dalam Deklarasi Iklim umat Islam di Istanbul merupakan aktor-aktor yang menginisiasi deklarasi ini (Din Syamsuddin, Wawancara, 27 Maret 2024).

Pemberlakuan Paris Agreement di Indonesia, juga turut membuat struktur kesempatan politik bagi Green Islam semakin terbuka untuk berkembang. Kesepakatan Paris menetapkan kewajiban bagi negara-negara maju untuk memberikan bantuan kepada negara-negara yang

masih berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan tujuan Paris Agreement. Bantuan ini dapat berupa dukungan ekonomi, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas (Artikel 9 Paris Agreement).

Paris Agreement menekankan pentingnya bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang. Pendanaan iklim menjadi sangat penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan untuk mengadaptasi diri terhadap dampak negatif perubahan iklim. Ini diperlukan investasi besar terutama bagi negara-negara yang masih berkembang dan rentan terhadap dampak dari kerusakan lingkungan hidup. Bantuan keuangan ini juga dimaksudkan untuk mendorong kontribusi sukarela dari berbagai pihak. Secara teknis, Paris Agreement menetapkan bahwa negara-negara maju harus memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara berkembang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas mereka, terutama bagi negara-negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Bantuan dari negara maju ini akan disampaikan dalam 2 tahun sekali secara kuantitatif dan kualitatif lewat “Kontribusi Yang Ditentukan Secara Nasional” (*Nationally Determined Contribution, NDC*). Selain itu, pihak lain yang ingin membantu negara-negara berkembang dapat memberikan bantuan secara sukarela dalam rangka mencapai tujuan Paris Agreement (Baroleh, Massie, dan Lengkong 2023).

Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kesepakatan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim pada tanggal 25 Oktober 2016 yang berfokus pada pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. NU, Muhammadiyah dan MUI, yang menawarkan jalur jaringan khusus untuk menjangkau masyarakat lokal seperti jaringan sekolah, pesantren dan masjid, telah menjadi mitra strategis dalam rencana pengurangan emisi karbon oleh pemerintah. Organisasi-organisasi besar Islam ini telah menjadi kolaborator pemerintah terutama dalam hal kampanye publik dan sosialisasi. Misalnya, NU, Muhammadiyah dan MUI telah menerbitkan pernyataan yang mendukung pemerintah untuk bertindak melawan degradasi lingkungan dan tetap berpegang pada tujuan iklim internasional (Amri 2014). Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat, para pemimpin agama Islam dari tiga organisasi itu mengkampanyekan eko-dakwah, yaitu pesan-pesan publik yang

menghubungkan perlindungan lingkungan dengan gagasan-gagasan tradisional dalam arus utama Islam dan budaya Indonesia (Gade 2012).

Dalam perkembangannya, LDII pada tahun 2018 adalah salah satu organisasi Islam yang juga memanfaatkan peluang domestik ini. Atus Syahbuddin menjelaskan bahwa LDII berfokus pada komunitas iklim dan mengikuti indikator program pemerintah, yang sebelumnya dikenal sebagai Kampung Iklim (ProKlim) (Atus Syahbuddin, LDII Yogyakarta, FGD, 6-8 Maret 2024). Program ProKlim merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya mitigasi untuk meminimalisir dampak perubahan iklim, setelah Paris Agreement diberlakukan di Indonesia (Hudaya, 2021).

Din Syamsuddin mengatakan bahwa adaptasi norma-norma baru internasional perihal perubahan iklim sangat penting bagi Indonesia (Din Syamsuddin, Wawancara, 27 Maret 2024), mengingat letak geografis Indonesia yang rentan terhadap berbagai dampak kerusakan iklim, termasuk kekeringan, tingginya curah hujan, banjir, erosi tanah, dan kenaikan permukaan laut (Frömming & Reichel 2012; Mangunjaya 2010). Selain itu, pada saat yang sama, Indonesia juga merupakan negara berkembang dengan aktivitas yang signifikan pada sektor penebangan kayu dan pertanian yang membuat kurangnya kapasitas hutan sebagai penyerap karbon (Amri 2014, Mangunjaya dan McKay 2012). Perubahan struktur domestik dan internasional memperlihatkan bahwa Green Islam sebagai sebuah gerakan kolektif tidak terjadi di ruang yang hampa, melainkan bergantung pada bagaimana rangkaian struktur kesempatan politik menentukan pembentukan gerakan Green Islam di Indonesia.

3.2 Sumber Daya Mobilisasi Green Islam

Sebagaimana telah disinggung, situasi domestik pasca-bencana dan norma-norma baru internasional membuka jendela kesempatan bagi gerakan Green Islam untuk lahir dan berkembang. Namun demikian, ketergantungan pada kesempatan politik saja tidak akan mampu melahirkan gerakan Green Islam, tanpa adanya infrastruktur organisasi yang memadai. Dalam studi gerakan sosial, sekurangnya terdapat tiga infrastruktur yang sangat penting, yaitu basis konstituen, pemimpin, dan jejaring komunikasi (McAdam dan Snow 1997). Oleh karena itu, organisasi-organisasi Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI yang telah memenuhi infrastruktur tersebut, meski tidak diperuntukkan untuk tujuan lingkungan, dapat memulai gerakan Green Islam. Organisasi

ini, dengan infrastruktur organisasi yang sebelumnya ditujukan untuk gerakan sosial-keagamaan, bertransformasi menjadi organisasi Green Islam, melalui badan-badan otonom masing-masing organisasinya. LPBI dalam tubuh NU, MDMC dalam tubuh Muhammadiyah, dan LPLHSDA dalam tubuh MUI.

Gerakan keagamaan yang bertransformasi menjadi gerakan lingkungan berbasis agama bukanlah sesuatu yang baru dalam gerakan sosial. McAdam pada tahun 1982 bahkan telah menyatakan bahwa kelompok agama seperti gereja “dapat menyediakan interaksi sosial dan jaringan komunikasi yang diperlukan untuk mobilisasi” (McAdam 1982). Oleh karena itu, mengikuti Bomberg dan Hague (2018), organisasi agama seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI, yang sebelumnya tidak spesifik berfokus pada persoalan lingkungan, merupakan organisasi “*pre-formed*” (yang terbentuk sebelumnya) dengan akses ke relawan dan konstituen agama yang belum banyak dimanfaatkan dalam isu lingkungan.

Sebelum bertransformasi menjadi organisasi Green Islam, MUI secara sumber daya organisasi merupakan entitas sentral yang mengkoordinasikan ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia dari berbagai aliran pemikiran. Tujuan utama pendirian MUI adalah untuk menghasilkan penafsiran hukum Islam yang sah secara resmi (Jamil 2021). Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi Muslim terbesar dan tertua di Indonesia, dan keduanya memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat Muslim (Amri 2014; Arnez 2014). Keduanya bahkan telah memiliki struktur organisasi dari tingkat ranting di daerah-daerah hingga tingkat pusat secara nasional. Karena besarnya kekuatan infrastruktur NU, Muhammadiyah, dan MUI, sebagian akademisi melihat mereka sebagai pilar utama dalam gerakan Green Islam di Indonesia (lihat Arnez 2014; Millah 2023).

Secara sumber daya manusia, yang erat kaitannya dengan keahlian, keterampilan, tenaga kerja, kepemimpinan, atau pengalaman anggota (Bomberg dan Hague 2018), NU, Muhammadiyah, dan MUI, memiliki tokoh-tokoh yang telah memiliki rekam jejak dan latar belakang dalam integrasi Islam dan lingkungan. Dalam tubuh NU terdapat Ali Yafie, Sahal Mahfudz, dan Nasaruddin Umar. Muhammadiyah memiliki Din Syamsuddin dan Hening Parlan. Sementara MUI memiliki Hayu S. Prabowo (juga termasuk Din Syamsuddin). Mereka semua merupakan tokoh-tokoh Green Islam, yakni agen-agen yang secara aktif terlibat memproduksi dan memelihara makna dalam diskursus agama dan

lingkungan bagi konstituen mereka (Snow 2004; Benford dan Snow 2000), bahkan sebelum NU, Muhammadiyah, dan MUI mendirikan organisasi-organisasi lingkungan mereka.

Meski demikian, bukan persoalan yang mudah bagi organisasi besar Islam ini untuk memanfaatkan infrastruktur-infrastruktur yang selama ini belum ditujukan bagi pemanfaatan isu lingkungan. Ketika LPBI dalam tubuh NU, MDMC dalam tubuh Muhammadiyah, dan LPLHSDA dalam tubuh MUI muncul di masa-masa awal pembentukannya, terdapat kompleksitas dinamika internal yang terjadi, salah satunya dalam hal sistem manajemen organisasi. NU dan Muhammadiyah, yang meski memiliki sistem terpusat, dengan ketua umum bertanggung jawab atas seluruh program kerja organisasi, tetap memungkinkan badan-badan otonom di bawahnya, seperti LPBI NU dan MDMC, untuk bergerak secara otonom membuat program-program sesuai dengan permasalahan dan kondisi sosial mereka. Misalnya, program-program mereka mengenai mitigasi risiko bencana merupakan inisiatif internal mereka sendiri setelah melihat kondisi Indonesia yang rentan terdampak bencana. Bukan hanya pada badan otonom, NU dan Muhammadiyah juga memungkinkan komunitas atau instansi di bawahnya untuk bergerak secara otonom menyelesaikan persoalan lingkungan. Di luar konteks organisasi Green Islam, otonomi ini juga berlaku untuk lembaga-lembaga lain di bawah payung besar organisasi mereka. Pesantren Al-Wasilah Garut yang berada di bawah afiliasi NU misalnya, melakukan gerakan aforestasi (gerakan penghijauan dengan penanaman pohon di daerah atau lahan yang bukan hutan) dengan inisiatif sendiri setelah melihat laju deforestasi yang begitu cepat di kabupaten tersebut. Begitupun dalam Muhammadiyah, Pondok Pesantren Darul Ulum di Bantul misalnya, berinisiatif menjalin kerja sama dengan universitas luar negeri tanpa perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah (Amri 2012). Meskipun demikian, setiap lembaga tetap berpegang teguh pada ideologi organisasi induknya. Artinya, komunitas-komunitas tersebut memiliki kebebasan untuk berkreasi selama tidak bertentangan dengan ideologi organisasi yang menaunginya (Amri 2012).

Meski badan-badan otonom Green Islam ini secara mandiri dapat melakukan gerakan secara otonom, namun mereka relatif belum dapat menunjukkan kemandirian dalam hal finansial (Amri 2012). Pengurus LPBI NU Beny Syaaf Jafar, misalnya, menyatakan bahwa pendanaan

semua lembaga di tubuh NU terpusat pada satu pintu, yaitu badan pengurus harian (BPH) PBNU. Meski ini bertujuan agar pintu finansial terpusat pada “satu pintu”, namun kondisi ini membuat LPBI NU tidak leluasa dalam bergerak. Di samping PBNU sebagai induk organisasinya, LPBI NU juga beberapa kali mendapatkan bantuan lembaga lain dalam tubuh NU, yakni Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) (Beny Syaaf Jafar, LPBI NU, 20-22 Februari 2024).

LPBI NU juga kerap mendapat bantuan teknis dari pemerintah dalam hal kebencanaan. Salah satu faktornya, seperti yang dikatakan oleh Beny Syaaf Jafar, karena mereka memiliki aktivis yang juga terlibat dalam pemerintahan, yakni Ace Hasan Syadzili. Karenanya, LPBI NU dapat mengakses bantuan pemerintah secara langsung dalam rangka mendukung agenda-agenda lingkungan mereka. Oleh karena itu, “dukungan finansial khususnya dalam program kebencanaan LPBI NU sudah relatif baik” (Beny Syaaf Jafar, LPBI NU, 20-22 Februari 2024).

Dalam konteks ini, Amri (2012) menyatakan bahwa gerakan lingkungan berbasis agama yang kerap mendapatkan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun lembaga tertentu menunjukkan bahwa gerakan tersebut belum mandiri secara finansial. Meski demikian, ini juga menunjukkan bahwa gerakan tersebut sebenarnya sangat adaptif dan terbuka terhadap kerja sama antar-lembaga, sebagaimana yang telah diperlihatkan dalam konteks LPBI NU di atas.

Dinamika finansial beserta keterbukaan kerja sama organisasi juga terlihat pada organisasi Green Islam lainnya, misalnya pada LLHPB ‘Aisyiyah. Surria Dwiwahyu, dalam wawancara mendalam, menyatakan bahwa alokasi anggaran dari PP Muhammadiyah disesuaikan dengan pengajuan program masing-masing lembaga. Singkatnya, “tidak ada patokan” untuk alokasi anggaran program (Surria Dwiwahyu, LLHPB ‘Aisyiyah, FGD, 20-22 Februari 2024). Ia menyatakan bahwa selama ini LLHPB ‘Aisyiyah banyak melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah (PTM/A) dalam agenda-agenda lingkungan. Spesifik pada isu kebencanaan, Aisyiyah juga sesekali melakukan kerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu). Meski demikian, mereka belum menetapkan sistem honorarium bagi anggota-anggota yang terlibat dalam aksi-aksi lingkungan Aisyiyah (Surria Dwiwahyu, LLHPB ‘Aisyiyah, FGD, 20-22 Februari 2024).

Keterbukaan untuk menjalin kerja sama dalam isu lingkungan, juga dapat ditemukan pada organisasi induk dari masing-masing organisasi di atas, yakni NU dan Muhammadiyah. Sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan struktur kesempatan politik sebelumnya, NU dan Muhammadiyah, utamanya setelah tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta, kerap menyetujui beberapa skema kerja sama dengan pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa instansi pemerintah yang terlibat dalam kerja sama ini termasuk Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup⁶ dan Dewan Nasional Perubahan Iklim⁷. Di sisi lain, negara-negara asing seperti Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development, Australia melalui Australia Agency for International Development, dan European Union juga telah terlibat dalam kerja sama dengan kedua organisasi ini. Sementara itu, dalam ranah lembaga swadaya masyarakat, NU telah berkolaborasi dengan World Wide Fund for Nature dan Muhammadiyah dengan Conservation International (Amri 2012).

Dalam gerakan sosial, dinamika kerja sama antar organisasi, terutama organisasi yang memiliki ideologi yang berbeda, sering kali mengalami masalah dengan konstituen-konstituen organisasi mereka (Harris 1994; Elisha 2011). Di Amerika Serikat, misalnya, Evangelical Environmental Network (EEN) mengalami kesulitan berkolaborasi dengan kelompok National Council of Churches (NCC) karena perbedaan pandangan teologis. Sebagai contoh, dari sudut pandang EEN, NCC telah menyangkal doktrin kelahiran dari seorang perawan serta kebangkitan Yesus secara jasmani, namun masih mengklaim diri mereka sebagai Kristen. Hal ini menimbulkan kekhawatiran konstituen Evangelis, sehingga mereka merasa sulit untuk membangun kerja sama kolektif dengan NCC. Karenanya, kaum Evangelis cenderung akan membentuk aksi kolektifnya dengan organisasi yang sesuai dengan batas-batas teologisnya (Ellingson, Woodley, dan Paik 2012).

Di Indonesia, beberapa organisasi dengan tipologi pengkampanye kebijakan yang memiliki keterbukaan dalam kerja sama antar organisasi atau lembaga, sebagaimana NU dan Muhammadiyah di atas, juga mengalami masalah yang nyaris serupa. Organisasi-organisasi tersebut kerap dihadapkan dengan dilema antara memilih konstituen organisasi dan kerja sama antar lembaga. Ahsan Jamet dari Eco Bhinneka Muhammadiyah (FGD, 20-22 Februari 2024), misalnya, mengatakan:

“Yang sering ditanyakan (oleh konstituen) kalau agenda kita itu disponsori oleh lembaga donor, yang menggunakan jargon bahasa Inggris. Saya pusing juga ditanya-tanya, belakangnya ada siapa? Dan ini menguras energi. Dan menimbulkan tanda-tanya yang banyak sekali, kita lelah menjelaskan” (Ahsan J. Hamidi, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FGD, 20-22 Februari, 2024)

Kecurigaan terutama terhadap lembaga donor asing kerap kali muncul bukan hanya dari konstituen atau publik secara umum, melainkan juga dari anggota organisasi lingkungan Islam itu sendiri. Din Syamsuddin, misalnya, yang kerap berhubungan dan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional mengakui sering dipertanyakan dan dicurigai terutama oleh konstituen Muhammadiyah (Din Syamsuddin, Wawancara, 27 Maret, 2024).

Dalam konteks gerakan sosial di Indonesia, terdapat asumsi bahwa lembaga donor asing pasti memiliki kepentingan tertentu sehingga dapat mengganggu atau mengurangi nilai-nilai yang sedang diperjuangkan oleh suatu organisasi (Nafisatul Khoidah, FNKSDA, FGD, 6-8 Maret, 2024). Karenanya, beberapa organisasi terutama dengan kecenderungan tipologi mobilisator menolak untuk menerima dana dari lembaga-lembaga donor. Nafisah dari FNKSDA Yogyakarta, misalnya, menyatakan bahwa organisasinya bersifat mandiri dan swadaya, yang berarti mereka bergantung sepenuhnya pada sumber daya internal mereka sendiri dalam hal logistik dan upaya-upaya lainnya. Mereka menekankan bahwa mereka tidak mengandalkan bantuan donor atau dana dari luar untuk menjalankan kegiatan mereka. Nafisah menyebutkan bahwa menutup akses terhadap donor merupakan bagian dari idealisme para anggota FNKSDA: “itu prinsip dan nilai yang kita pegang, kita tidak mau mendapatkan donor karena kita masih berpegang teguh pada idealisme kita. Kalau dengan funding dan donor, kerja-kerja atau program-program yang kita kerjakan harus berdasarkan kepentingan donor, kita tidak mau seperti itu” (Nafisatul Khoidah, FNKSDA, FGD, 6-8 Maret, 2024).

Terlepas dari hal tersebut, persoalan dalam menggerakkan konstituen untuk gerakan kolektif lingkungan memang dinilai sulit dalam konteks masyarakat Indonesia. Din syamsuddin mengatakan: “...belum ada kesadaran bahwa hal itu (tentang kerusakan lingkungan) adalah momok, padahal sudah sering dikampanyekan, bahkan melalui mimbar dakwah” (Din Syamsuddin, Wawancara, 27 Maret, 2024).



Hal ini sesuai dengan penelitian Ulil Amri (2012) yang menyebutkan bahwa sebagian pengikut NU dan Muhammadiyah memperlihatkan komitmen setengah hati terhadap gerakan lingkungan yang telah dicanangkan oleh masing-masing organisasi. Ulil Amri menjelaskan bahwa komitmen setengah hati ini terlihat dari banyaknya organisasi, pesantren, dan sekolah di bawah naungan NU dan Muhammadiyah yang belum menerapkan praktik lingkungan sebagaimana yang telah digariskan dalam teologi dan hasil keputusan Muktamar kedua ormas itu (Amri 2012).

Keresahan Din Syamsuddin dan Ulil Amri mengenai sebagian besar masyarakat yang tidak tergerak untuk melakukan aksi-aksi lingkungan ini, dalam gerakan sosial disebut oleh Mancur Olson sebagai problem “penumpang gelap” (*free-rider*), yakni mereka yang menunggu untuk menerima manfaat tanpa memberi kontribusi pada gerakan (lihat Olson 1965). Berikut bagaimana J.P. Weismuller sebagaimana dikutip oleh Olson (1965) mengilustrasikan *free-rider* ini: “Dari pada mendapatkan akibat seperti mendapat intimidasi dan kehabisan energi untuk terlibat dalam gerakan kolektif, lebih rasional bagi individu yang berkepentingan untuk menahan diri dari gerakan kolektif dan menunggu untuk memetik hasil dari keterlibatan individu lainnya”.

Din Syamsuddin lebih lanjut menceritakan problem penumpang gelap yang ia temukan dalam pengalamannya mengkampanyekan Green Islam di Indonesia, terutama kepada masyarakat yang dekat dengan Muhammadiyah. Ia menuturkan bahwa sejatinya masyarakat terutama konstituen Muhammadiyah telah memiliki pengetahuan tentang lingkungan, atau dampak-dampak yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan, atau setidaknya ajaran-ajaran Islam mengenai pemeliharaan lingkungan. Ia menjelaskan bahwa sosialisasi mengenai Islam dan lingkungan, baik melalui ceramah atau khotbah tentang lingkungan, telah banyak dilakukan oleh organisasinya terutama di kalangan konstituen Muhammadiyah. Namun, menurutnya, penerimaan konstituen atau publik Islam masih relatif rendah. Singkatnya, hanya sebagian kecil dari luasnya konstituen Muhammadiyah yang tertarik untuk terlibat dalam gerakan-gerakan lingkungan Muhammadiyah (Din Syamsuddin, Wawancara, 27 Maret, 2024).

Nana Firman, Hening Parlan, Hayu S. Prabowo, Ahsan J. Hamidi, Gatot Supangkat, merupakan “sebagian kecil konstituen” yang dimaksud Din Syamsuddin ini. Berbeda dengan penumpang gelap, mereka adalah

aktivis-aktivis yang meski tidak mendapatkan manfaat dari berhasil atau tidaknya sebuah gerakan, akan tetap menyumbangkan sumber dayanya untuk gerakan sosial. Studi gerakan sosial menyebutnya sebagai konstituen yang tergerak (*conscience constituents*) (McCarthy dan Zald 1997). Konstituen yang tergerak dengan kesadaran altruistik inilah yang menopang terjadinya gerakan kolektif (McCarthy dan Zald 1997). Muhammadiyah dengan demikian, memiliki sumber daya mobilisasi yang memadai.

Melalui infrastruktur sumber daya organisasi-organisasi besar Islam, serta struktur kesempatan politik yang tersedia bagi pembentukan Green Islam, para aktivis Green Islam selanjutnya mesti berupaya menerjemahkannya dalam bentuk gerakan, dan karena itu proses pembingkai menjadi sangat penting.

3.3 Pembingkai Aktivisme Green Islam

Selain kesempatan politik dan sumber daya mobilisasi, gerakan sosial juga selalu berfokus pada mekanisme kognitif yang disebut sebagai pembingkai gerakan kolektif (Snow 1986). Para aktivis Green Islam di Indonesia membingkai gerakan lingkungan mereka dengan bingkai-bingkai keagamaan sebab dengan bingkai itu mereka dapat mengundang partisipasi publik. Pembingkai adalah upaya penafsiran yang “memungkinkan para pendukung gerakan sosial untuk bisa menerima atau menolak peristiwa-peristiwa gerakan” (Snow, Richford, Werden, dan Benford 1997), sementara publik merupakan “kumpulan sentimen” atau “klaster-klaster preferensi pendapat umum” yang belum termobilisasi (Snow 1986). Melalui pembingkai, para aktivis Green Islam di Indonesia berupaya mengarahkan publik untuk melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai masalah lingkungan semata, melainkan juga sebagai kewajiban moral Muslim untuk kepentingan generasi mendatang.

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kemunculan dan perkembangan Green Islam dapat ditandai dari mekanisme terbukanya struktur kesempatan politik pasca-tsunami Aceh dan juga kesiapan infrastruktur organisasi, terutama NU dan Muhammadiyah. Para aktivis NU dan Muhammadiyah merespons hal tersebut dengan memperluas isu gerakannya pada gerakan mitigasi resiko bencana. Buah dari respon itu, salah satunya berupa pembentukan LPBI NU dan MDMC dalam tubuh masing-masing organisasi. Mekanisme kognitif, yang dilakukan para

aktivis adalah menyebarkan informasi lingkungan dengan bingkai keislaman untuk mengajak partisipasi publik. Dalam disiplin gerakan sosial, proses ini dikenal dengan istilah proses penyelarasan bingkai atau *frame alignment process*, yakni keterhubungan seorang individu dengan arah interpretasi organisasi gerakan sosial. Sehingga seperangkat nilai, keyakinan dan kepentingan mereka (para individu) dengan ideologi, tujuan, dan kegiatan organisasi gerakan sosial berada dalam posisi yang sebangun, selaras, dan saling melengkapi (Snow, Richford, Werden, dan Benford 1997).

Identifikasi atas proses penyelarasan bingkai memiliki banyak variasi. Setidaknya tiga di antaranya yakni bingkai yang menjembatani (*frame bridging*), bingkai yang menguatkan (*frame amplification*), dan bingkai yang meluas (*frame extension*) (Snow, Richford, Werden, dan Benford 1997) relatif banyak digunakan oleh aktivis-aktivis Green Islam di Indonesia.

Dalam bingkai yang menjembatani, efektivitas sebuah gerakan kolektif untuk mampu merekrut “kelompok-kelompok sentimen yang belum termobilisasi” (McCarthy dan Zald 1997) sangat dipengaruhi oleh kepewawain mereka dalam mempergunakan berbagai medium. Green Islam di Indonesia cenderung menggunakan dakwah Islam sebagai medium dalam gerakan mereka.

Menurut Hayu S. Prabowo, sebagian besar masyarakat lebih merespons komunikasi yang menggunakan bahasa agama daripada bahasa yang digunakan oleh beberapa aktor pemerintah terkait undang-undang dan kebijakan. Ini karena masyarakat cenderung lebih memahami dan menerima pesan yang disampaikan dalam bahasa yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, karena bahasa agama dapat mempengaruhi emosi dan hati masyarakat Indonesia. Sebagai hasilnya, Hayu S. Prabowo menilai pesan yang disampaikan dengan bahasa-bahasa agama lebih efektif daripada bahasa-bahasa yang misalnya menggunakan ancaman hukum undang-undang: “90% orang itu masih mendengar bahasa agama” kata Hayu S. Prabowo (LPLHSDA MUI, FGD, 20-22 Februari 2024). Oleh karena itu, para pendakwah yang utamanya terafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah bertugas menyampaikan fatwa-fatwa MUI di masjid-masjid atau forum-forum dakwah lainnya ke masyarakat luas (Hayu S. Prabowo, LPLHSDA MUI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Aktivis Eco Bhineka Muhammadiyah, Ahsan J. Hamidi (FGD, 20-22 Februari 2024) mengafirmasi hal tersebut. Menurutnya, pendekatan agama terhadap lingkungan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Karenanya, dalam setiap gerakan organisasinya, ia cenderung memberdayakan para pemangku organisasi keagamaan untuk menyampaikan dalil-dalil keagamaan perihal pelestarian alam. Ahsan J. Hamidi menekankan bahwa itu penting untuk menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan dalam konteks gerakan lingkungan memiliki sandaran dalil dan argumentasi keagamaannya. Bahkan, merujuk pada pengalamannya sebagai aktivis lingkungan, ia menyebutkan bahwa aksi-aksi lingkungan di Indonesia “kalau tidak ada dalilnya sering kali dianggap tidak sah”. Oleh karena itu, medium dakwah menjadi sangat penting terutama untuk mendapatkan argumentasi keagamaan dalam agenda lingkungan (Ahsan J. Hamidi, FGD, 20-22 Februari 2024).

Medium lain yang juga digunakan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam dan lingkungan kepada masyarakat adalah melalui cabang dan ranting organisasi. Sebagaimana penjelasan mengenai sumber daya organisasi, terdapat beberapa organisasi yang telah memiliki struktur organisasi dari tingkat lokal hingga nasional, yang belum dimanfaatkan dalam isu lingkungan. Kemudian sumber daya inilah yang menjadi medium organisasi-organisasi tersebut dalam menyampaikan nilai-nilai Green Islam kepada masyarakat luas. Aisyiyah, misalnya, mereka memiliki anggota khusus yakni ibu-ibu Muhammadiyah dari tingkat lokal hingga nasional. Mereka menggerakkan infrastruktur organisasi dengan cara-cara yang terstruktur, dengan menggunakan surat instruksi tentang agenda lingkungan untuk kemudian diaplikasikan ke cabang/ranting masing-masing (Surria Dwiwahyu, LLHPB ‘Aisyiyah, FGD, 20-22 Februari 2024).

Selain itu, buku ini menemukan bahwa hampir semua organisasi lingkungan berbasis Islam juga menggunakan sosial media sebagai medium dalam menyampaikan nilai-nilai yang mereka anut. Beberapa di antaranya adalah EcoDeen dan AgriQuran. EcoDeen menggunakan media sosial untuk menyasar generasi Alpha dan Z untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan lingkungan (Rissa Ozalifia, EcoDeen ID, FGD, 21 Februari, 2024), sementara AgriQuran secara spesifik menggunakan medium seperti TikTok dan Instagram untuk menyampaikan edukasi seputar pertanian bervisi Alquran (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024). Tak hanya media sosial, studi ini juga mendapati beberapa



medium lain, seperti buku, baik atas nama personal seperti “Generasi Terakhir” karya Fachruddin Mangunjaya maupun atas nama lembaga seperti “Pengenalan Perlindungan Satwa Liar” dari Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA).

Dakwah lingkungan beserta instrumen-instrumennya tersebut merupakan bentuk bingkai yang menjembatani, yang mengacu pada “dua atau lebih bingkai yang secara ideologis selaras tetapi secara struktural tidak terhubung dan terkait dengan suatu isu atau masalah” (David A. Snow, dkk, 1986). Dengan kata lain, ia adalah penghubung para aktivis Green Islam kepada masyarakat luas dalam menyampaikan nilai-nilai Islam dan lingkungan.

Kemudian, bingkai yang menguatkan terbagi dua, yakni bingkai yang menguatkan nilai atau penguatan nilai (*value amplification*) dan bingkai yang menguatkan keyakinan atau penguatan keyakinan (*belief amplification*) orang lain untuk terlibat dalam gerakan. Nilai dalam hal ini ditafsirkan sebagai ‘*mode of conduct*’ atau kondisi yang patut diperjuangkan dan dilindungi (Snow 1986:469). Penguatan nilai adalah upaya identifikasi, idealisasi dan pengangkatan atas satu atau lebih nilai-nilai itu yang sebenarnya mendasar terhadap masa depan konstituen tetapi belum dapat mendorong gerakan kolektif (Snow 1986:469).

Para aktivis Green Islam menggunakan bahasa-bahasa yang berbeda ketika menyampaikan gagasan atau nilai-nilai yang mereka anut. Meski demikian, studi ini menemukan bahwa semua organisasi Green Islam memaksudkan “keselarasan Islam dengan lingkungan” dan “pelestarian lingkungan” secara umum sebagai tujuan dari perjuangannya. Dan sebagai landasan dari perjuangan tersebut, semua organisasi Green Islam mendasarkan perjuangannya pada dalil-dalil Alquran, salah satunya yang cukup populer adalah QS. Al-A’raf: 56: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A’raf: 56). Melalui dalil-dalil yang merujuk pada kitab suci semacam inilah implementasi pelestarian lingkungan kemudian diartikan sebagai “mandat perintah agama” (Natsir Zubaidi, Dewan Masjid Indonesia, FGD, 20-22 Februari 2024). Singkatnya, isu pelestarian lingkungan mendapat klarifikasi, penjelasan, atau penyegaran bingkai tafsir dari sudut pandang Islam. Dengan penguatan nilai seperti “mandat perintah agama” ini, isu

lingkungan yang semula tampak sederhana tafsiran keagamaannya dapat terbingkai secara lebih jelas, kuat, dan meyakinkan.

Meski demikian, keberhasilan penguatan nilai-nilai di atas sangat bergantung pada bagaimana mereka meyakinkan publik (penguatan keyakinan). Sebagaimana dikatakan David Snow “nilai-nilai (*values*) merujuk pada tujuan atau kondisi akhir yang ingin dicapai, keyakinan (*beliefs*) dapat dianggap sebagai elemen ideasional yang secara kognitif mendukung atau menghalangi tindakan mengejar nilai-nilai yang diinginkan” (Snow 1986).

Terdapat lima penguatan keyakinan. Penguatan keyakinan yang pertama adalah mengenai seriusnya isu, penderitaan atau masalah yang dipersoalkan. Penguatan ini mengandaikan para aktivis Green Islam berupaya mengartikulasikan peristiwa, isu, derajat atau masalah yang diusungnya sehingga sungguh-sungguh terlihat sebagai serius, mendesak, dan penting untuk diperjuangkan. Misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Fachruddin Mangunjaya, dalam buku *Generasi Terakhir*. Dalam buku tersebut ia memperlihatkan foto dokumentasi tanggul raksasa yang dibangun di Pluit Jakarta Utara, sebagai upaya untuk melindungi Jakarta dari Rob, dan banjir saat hujan, sembari menulis: “Apakah benar Jakarta akan perlahan tenggelam? Tanda tanya itu sekarang memang dapat dilihat faktanya. Pergilah ke Pantai Utara Jakarta, Anda akan menemukan beberapa dermaga sekarang dikelilingi oleh tembok raksasa. Tembok raksasa ini adalah tanggul untuk menahan rob yang akan masuk saat air pasang.” (Mangunjaya 2022).

Bingkai “Jakarta akan tenggelam” merupakan upaya artikulasi aktor Green Islam untuk menunjukkan situasi betapa gawatnya kerusakan lingkungan yang mereka perjuangkan. Contoh lainnya yang menunjukkan seriusnya kondisi lingkungan di Indonesia juga ditunjukkan dalam Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang hukum pembakaran hutan dan lahan serta pengendaliannya: “Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya, hukumnya adalah haram.”

Penguatan kedua merupakan keyakinan tentang lokus sebab-akibat atau kesalahan (*beliefs about the locus of causality or blame*) merujuk pada bagaimana para aktivis Green Islam mengartikulasikan dengan tegas dan jelas, juga meyakinkan tentang lokus sebab (kausalitas). Diagnosis para aktivis Green Islam atas rusak dan terabaikannya

lingkungan mengerucut pada perilaku manusia yang “merusak dan bertumpah darah” dan tidak peduli dengan persoalan alam dan lingkungan. Deteksi ini, selain menggunakan informasi dari Alquran, bahwa manusia pada dasarnya senantiasa merusak dan bertumpah darah, juga menggunakan berbagai informasi yang mereka temukan secara empirik, seperti saat bagaimana MDMC mengidentifikasi pelaku penggundulan hutan sebagai penyebab bencana hidrometeorologi atau bagaimana Salam Institute mengidentifikasi PLTU di kawasan Cirebon merusak lingkungan sekitar (FGD, 20-22 Februari 2024; FGD, 6-8 Maret 2024). Singkatnya, manusia dengan berbagai perilakunya atas lingkungan, cenderung menjadi tersangka yang berjasa dalam kerusakan lingkungan bagi aktivis Green Islam.

Penguatan ketiga merupakan keyakinan mengenai (siapa) yang dihadapi atau target-target pengaruh (*beliefs about antagonists or targets in influence*). Ini merujuk pada bagaimana gerakan mengartikulasikan dengan jelas siapa-siapa yang dilihat sebagai lawan (antagonis dari aksi kolektif) atau target yang mereka anggap bertanggung jawab (Benford dan Snow 1986). Meski mereka berbagi nilai, bahwa manusia merupakan lokus penyebab kerusakan lingkungan, namun secara spesifik terdapat interpretasi yang beragam tentang siapa “manusia-manusia yang merusak” tersebut. Singkatnya, para aktivis Green Islam cenderung berbeda pendapat mengenai individu-individu seperti apakah yang menjadi sumber kerusakan lingkungan, terutama dalam konteks Indonesia. Beberapa organisasi mobilisator seperti FNKSDA, Salam Institute, dan KHM mengungkapkan bahwa penyebab itu adalah para kapitalis dalam industri ekstraktif yang selalu mengeksploitasi alam dan kaum buruh, atau pemerintah yang abai atas persoalan lingkungan (FGD, 20-22 Februari 2024; FGD, 6-8 Maret 2024). Kemudian, beberapa organisasi pengkampanye kebijakan seperti LDII dan LLHPB ‘Aisyiyah menyiratkan bahwa hal itu disebabkan karena masih banyaknya individu-individu yang belum memiliki kesadaran lingkungan (FGD, 20-22 Februari 2024; FGD, 6-8 Maret 2024).

Penguatan keempat adalah keyakinan tentang kemungkinan perubahan atau efektivitas aksi kolektif. Efektivitas jenis amplifikasi keyakinan ini bergantung pada sejauh mana para aktivis Green Islam mampu meyakinkan calon pengikut bahwa tindakan mereka akan menghasilkan perubahan nyata. Menurut Snow (1986): “optimisme mengenai hasil dari aksi kolektif akan meningkatkan kemungkinan

partisipasi; pesimisme akan menguranginya.” Para aktivis Green Islam percaya dan meyakinkan publik bahwa gerakan mereka pasti akan membawa perubahan. Organisasi dengan tipologi mobilisator seperti FNKSDA, Salam Institute, dan KHM berupaya meyakinkan publik dengan mengkampanyekan bahwa perbaikan atas krisis lingkungan dapat terwujud bilamana industri ekstraktif dapat dikendalikan (FGD, 20-22 Februari 2024; FGD, 6-8 Maret 2024). Sementara itu, organisasi pengkampanye kebijakan seperti NU, Muhammadiyah, serta LDII, berupaya meyakinkan publik dengan mengkampanyekan bahwa perbaikan atas lingkungan dapat terwujud bilamana individu-individu telah memiliki kesadaran lingkungan yang baik, dan karenanya gerakan-gerakan mereka berorientasi pada masyarakat, dengan pendekatan edukasi mengenai lingkungan (FGD, 20-22 Februari 2024; FGD, 6-8 Maret 2024).

Amplifikasi keyakinan yang kelima adalah keyakinan mengenai kewajiban untuk “ambil bagian” (*beliefs about necessity and propriety of ‘standing up’*) (Snow, Rochford, Worden, dan Benford. 1986). Menurut Gamson dan Fireman (lihat Snow, Rochford, Worden, dan Benford. 1986), kewajiban untuk “ambil bagian” itu disebut juga sebagai panggilan loyalitas (kesediaan) dan rasa tanggung jawab. Dalam konteks ini, pembingkaian bekerja untuk meyakinkan publik bahwa pelestarian lingkungan yang ditawarkan oleh para aktivis Islam ini adalah kewajiban moral semua umat Islam, sehingga merangsang mereka tergerak untuk ikut andil dalam gerakan kolektif. Misalnya, Atus Syahbuddin, aktivis LDII Yogyakarta (FGD, 6-8 Maret 2024), mengatakan bahwa menjaga lingkungan dalam Islam merupakan “amal jariyah” (amal yang akan mengalir hingga akhir hayat). Merangsang masyarakat untuk ikut atau paling tidak mendukung gerakan kolektif lingkungan, dengan membingkainya sebagai sebuah “amal jariyah” bagi setiap yang menjalankannya, cukup sering ditemukan dalam studi ini. Selain LDII, beberapa di antaranya adalah HAKA, Teungku Inong Aceh, DMI, dan Bumi Langit Permaculture Institute juga melakukan pembingkaian semacam ini (FGD, 20-22 Februari 2024; FGD, 6-8 Maret 2024).

Apabila “amal jariyah” merupakan konsekuensi dari tugas dan kewajiban bagi mereka yang menjaga lingkungan, beberapa aktivis Green Islam juga menyebutkan bahwa terdapat konsekuensi bagi mereka yang melakukan kerusakan dan pengabaian atas lingkungan. Agus Yudianto, aktivis LDII Jawa Timur (FGD, 6-8 Maret 2024), misalnya menyatakan

konsekuensi lain dari bingkai kewajiban moral bilamana seseorang melakukan hal-hal yang dapat merusak lingkungan. Sebagaimana Agus Syahbuddin, Agus Yudianto setuju bahwa sebagai makhluk Allah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam dan melestarikan lingkungan. Perbedaannya, Agus Yudianto, lebih jauh menyebutkan bahwa “jika manusia melakukan kerusakan dan tidak bersyukur atas nikmat-Nya, pesan-pesan Alquran telah mengingatkan akan murka Tuhan sebagai konsekuensinya” (Agus Yudianto, LDII Jawa Timur, FGD, 6-8 Maret 2024). Dua bingkai konsekuensi atas bingkai kewajiban moral yang didasarkan atas tafsir kitab suci ini yang kemudian kerap menjadi konten-konten dakwah para ulama dalam mengkampanyekan Green Islam di Indonesia.

Keseluruhan dari proses pembingkai mulai dari strategi bingkai yang menjembatani, penguatan nilai dan keyakinan serta percabangannya sebagaimana dirumuskan oleh McAdam, McCharty, dan Zald (1996), cukup jelas memperlihatkan diseminasi dan pembentukan atau pengorganisasian gerakan Green Islam di Indonesia. Meskipun demikian, ketika muncul bingkai baru yang dianggap lebih relevan dalam mengundang pengikut potensial, maka aksi kolektif mesti memperluas batas-batas bingkai yang diperjuangkannya. Oleh karenanya, para aktivis Green Islam memerlukan strategi *frame extension* atau perluasan batas-batas bingkai yang memungkinkan tingkat keterlibatan dari partisipansi besar (Snow, Richford, Werden, dan Benford 1986).

3.4 Perluasan Isu Aktivisme Green Islam

Organisasi Green Islam dengan isu perubahan iklim relatif lebih banyak muncul setelah momentum tahun 2015, tepatnya setelah Paris Agreement dan Deklarasi Istanbul. Beberapa organisasi memilih memperluas isu mereka, misalnya dari kebencanaan ke perubahan iklim sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sementara yang lain mendirikan organisasi baru dengan fokus perubahan iklim, seperti Green Faith Indonesia. Dalam studi gerakan sosial, *frame extension* atau perluasan batas-batas bingkai semacam ini memungkinkan tingkat keterlibatan dari partisipansi besar (Snow, Richford, Werden, dan Benford 1997). Bingkai Green Islam yang semula spesifik pada persoalan domestik kebencanaan meluas ke persoalan transnasional lingkungan yang baru yakni perubahan iklim.

Sebagaimana disinggung dalam penjelasan sebelumnya, Green Islam di Indonesia muncul dan berkembang dalam konteks pasca-bencana besar. Organisasi Green Islam dengan tipologi pengkampanye kebijakan seperti NU dan Muhammadiyah dalam masa awal pembentukannya lebih banyak melakukan aksi-aksi kolektif yang semula spesifik pada isu kebencanaan. Aktivis MDMC, Budi Setiawan, misalnya, menyatakan bahwa MDMC sejak awal pendiriannya pada 2010 berfokus pada aspek kebencanaan untuk menanggulangi berbagai macam bencana di Indonesia (Budi Setiawan, MDMC, 20-22 Februari 2024). Hingga kini, MDMC bahkan menggunakan kata “bencana” pada nama organisasinya, dan masih turut terlibat dalam penanggulangan bencana dan mitigasi resiko bencana.

Pada tahun 2015, muncul kesempatan politik internasional bagi Green Islam yang ditandai dengan dua peristiwa. Pertama, 195 negara menyepakati rancangan Paris Agreement melalui Konferensi COP21 Paris di bawah naungan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Kedua, negara-negara Muslim menyepakati Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global di Istanbul yang menyerukan kepada negara-negara Muslim untuk terlibat dalam isu perubahan iklim. Dalam deklarasi tersebut, berkumpul ulama, cendekiawan, dan aktivis lingkungan yang menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk mengurangi emisi dan efek rumah kaca (Fachruddin Mangunjaya 2022). Gerakan transnasional ini terdiri dari aktivis-aktivis internasional dengan pandangan yang sama bahwa mereka menghadapi tantangan yang sama dalam masalah lingkungan global dan Islam dapat memainkan peran penting dalam upaya menanggulangi dampak dari masalah tersebut (Din Syamsuddin, wawancara, 27 Maret 2024). Mengikuti Tarrow (2005) bahwa aliansi kampanye aktivis transnasional seperti Deklarasi Istanbul ini umumnya dipicu oleh kosmopolitanisme yang berakar (*rooted cosmopolitan*). Kosmopolitanisme merupakan perasaan menjadi bagian dari dunia secara keseluruhan, tanpa dibatasi oleh kelompok atau wilayah tertentu (Tarrow 2005).

Dalam merespons situasi eksternal tersebut, para aktor gerakan Green Islam setidaknya melakukan dua hal. Pertama, para aktivis memperluas bingkai isu organisasinya ke dalam bingkai perubahan iklim ini. LDII misalnya bertransformasi menjadi organisasi Green Islam yang mengambil perubahan iklim sebagai salah satu isu utamanya. Kedua,

beberapa aktivis mencetuskan organisasi atau aliansi baru dengan salah satu fokus utamanya adalah isu pemanasan global dan perubahan iklim. Misalnya organisasi Green Faith Indonesia berfokus pada “Faith for Climate Justice” sebagai salah satu isu utamanya. Contoh lainnya adalah deklarasi Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi (SIAGA BUMI) yang terdiri dari aliansi NU, Muhammadiyah, MUI, DMI, PPI UNAS, PHDI, KWI, Matakin, dan lainnya, sebagai respon atas perubahan eksternal di kancah internasional (Din Syamsuddin, Wawancara, 27 Maret 2024).

Namun, tidak semua aktivis Green Islam di tingkat domestik Indonesia, mendapatkan manfaat dari peluang politik internasional tersebut. Tidak seperti isu domestik lingkungan seperti isu kebencanaan, perubahan iklim merupakan isu yang tumbuh di tingkat global. Karenanya, aktivis yang dapat menerima manfaat dari peluang ini adalah aktivis yang memiliki akar yang kuat dalam konteks nasional serta terlibat dalam aktivitas politik melalui jaringan transnasional. Tarrow menyebut aktivis semacam ini sebagai sebagai aktivis transnasional (Tarrow 2005).

Sebagai aktivis yang telah memiliki rekam jejak di konteks nasional dan internasional, Fachruddin Mangunjaya, Din Syamsuddin, dan Nana Firman, merupakan contoh aktivis transnasional ini. Ketiga aktivis ini juga merupakan perwakilan Indonesia saat Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global di Istanbul 2015 dilangsungkan. Fachruddin Mangunjaya bahkan menjadi salah satu tim perumus deklarasi tersebut.

Di tingkat domestik, Din Syamsuddin merupakan Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2015, Ketua Umum MUI 2014-2015, dan salah satu aktor di balik Deklarasi SIAGA BUMI. Selain itu, ia juga aktif di dunia aktivisme internasional, seperti di Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), World Islamic People's Leadership (WIPL), World Council of World Islamic Call Society (WCWICS), Asian Committee on Religions for Peace (ACRP), dan World Peace Forum (WPF). Dengan jejaring internasionalnya, Din Syamsuddin dapat bekerja sama dengan berbagai pihak luar negeri, seperti The Asia Foundation, Catholic Relief Services, dan lainnya.

Selain Din Syamsuddin, juga terdapat nama Fachruddin Mangunjaya. Di tingkat domestik, ia merupakan Direktur Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS), dan salah satu aktor yang menginisiasi Deklarasi SIAGA BUMI. Ia juga berperan sebagai penasihat Flight Foundation, Dewan Pembina Yayasan Kehati, serta Majelis Kehormatan

Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia. Di tingkat internasional, ia aktif pada forum-forum global, seperti anggota aktif kelompok penasihat Yale Forum on Religion and Ecology, penasihat Faith for Our Planet (FFOP), dan anggota IUCN-WCPA Specialist Group in Cultural and Spiritual Values of Protected Areas. Selain itu, ia merupakan perwakilan akademisi penyusun draf Al-Mizan Covenant for Earth. Dengan jejaring internasionalnya, Fachruddin Mangunjaya dapat bekerja sama dengan Templeton Foundation untuk program eko-pesantren.

Selain Din Syamsuddin dan Fachruddin Mangunjaya, juga terdapat nama Nana Firman. Di tingkat domestik, ia merupakan pendiri Green Faith Indonesia, sementara di tingkat internasional ia merupakan salah seorang pendiri Global Muslim Climate Network serta senior ambassador di Green Faith. Beberapa aktivis lain yang kerap terlibat dalam gerakan Green Islam di tingkat domestik dan internasional adalah Nasaruddin Umar, Hening Parlan, Hayu S. Prabowo, dan Dicky Sofjan. Para aktivis transnasional Green Islam seperti inilah yang, antara lain, membentuk pemahaman masyarakat Indonesia bahwa ajaran Islam mendukung keberlanjutan lingkungan, sehingga masyarakat nasional perlu berpartisipasi dalam upaya global umat Islam mengatasi tantangan lingkungan.

Meski demikian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Din Syamsuddin, bingkai perubahan iklim belum memberi dampak yang signifikan dalam mengundang partisipasi publik Islam untuk terlibat dalam gerakan Green Islam. Ia bahkan mengatakan bahwa masyarakat Indonesia lebih mudah tergerak oleh isu bencana dari pada isu global perubahan iklim. Din Syamsuddin mencontohkan bahwa, tidak seperti masyarakat Eropa yang secara langsung merasakan dampak dari kerusakan iklim seperti musim dingin ekstrem dan berkepanjangan, kondisi cuaca di Indonesia masih relatif menyenangkan bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, beberapa organisasi seperti Muhammadiyah, seraya memperluas bingkai ke perubahan iklim, juga tidak meninggalkan fokus domestik pada isu kebencanaan. Din Syamsuddin menyebutkan bahwa semua isu lingkungan, entah kebencanaan atau perubahan iklim, pada dasarnya sama: “sama-sama bahayanya, sama-sama mengancamnya” (Din Syamsuddin, Wawancara, 27 Maret, 2024).

3.5 Kesimpulan

Mengacu pada sintesis pendekatan gerakan sosial, studi ini menemukan bahwa faktor pertama yang membentuk Green Islam adalah terbukanya kesempatan politik. Green Islam di Indonesia lahir sebagai respons atas perubahan-perubahan eksternal situasional yang memungkinkan munculnya gerakan. Setelah tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta, terjadi perubahan paradigma mengenai kebencanaan, dari yang semula hanya berfokus pada tindakan cepat tanggap menjadi gerakan resiliensi dan mitigasi risiko bencana. Perubahan paradigma tersebut melahirkan aturan-aturan baru mengenai kebencanaan yang memungkinkan organisasi-organisasi besar Islam untuk melakukan gerakan dan mendapatkan mitra berpengaruh. LPBI dalam tubuh NU, MDMC dalam tubuh Muhammadiyah, serta LPLHSDA dalam tubuh MUI lahir dari situasi ini.

Faktor penting kedua dalam pembentukan Green Islam adalah kemampuan organisasi-organisasi dalam masa-masa awal tersebut memobilisasi sumber daya organisasinya. Pembentukan organisasi lingkungan di tubuh organisasi-organisasi besar Islam, pada masa kemunculan Green Islam, dapat dijelaskan melalui kapasitas organisasi-organisasi tersebut dalam mengembangkan potensi internal, seperti kepemimpinan, basis konstituen, jaringan dan sumber daya finansial. Sebelum mendirikan badan otonom lingkungan mereka, organisasi besar Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI, secara struktur organisasi telah memiliki pengurus-pengurus dari tingkat kecamatan hingga nasional. Mereka juga telah memiliki konstituen yang banyak dan loyal. Selain itu, mereka juga telah memiliki jejaring dari tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Bahkan, mereka juga telah memiliki tokoh-tokoh yang ahli dalam isu Islam dan lingkungan. Beberapa misalnya, dalam organisasi NU ada Ali Yafie, Sahal Mahfudz, dan Nasaruddin Umar, dalam Muhammadiyah ada Din Syamsuddin dan Hening Parlan, sementara dalam MUI ada Hayu S. Prabowo. LPBI dalam tubuh NU, MDMC dalam tubuh Muhammadiyah, serta LPLHSDA dalam tubuh MUI lahir dari peluang internal yang telah tersedia ini.

Faktor terakhir yang memungkinkan Green Islam berkembang di Indonesia adalah pembingkai aksi kolektif. Pembingkai dilakukan untuk mendapat dukungan, merebut simpati, dan memberi motivasi kepada konstituen atau konstituen potensial untuk terlibat dalam aksi

kolektif. Seiring dengan perkembangannya, para aktivis Green Islam juga melakukan upaya perluasan pembingkaiannya untuk menarik pengikut dalam jumlah yang lebih besar. Green Islam yang sebelumnya memiliki isu yang spesifik pada kebencanaan kemudian memperluas bingkainya ke isu perubahan iklim dan pemanasan global. Norma-norma baru internasional yang muncul belakangan, khususnya setelah Paris Agreement dan Deklarasi Istanbul 2015, memungkinkan aktor-aktor transnasional Green Islam di Indonesia memperluas bingkai organisasi lingkungan atau bahkan memunculkan organisasi lingkungan baru dengan fokus isu pada perubahan iklim.

BAB 4

PETA DAN JARINGAN SOSIAL GREEN ISLAM DI INDONESIA

Maraknya permasalahan terkait lingkungan hidup dan meningkatnya diskursus Islam untuk mengatasi masalah tersebut telah mendorong berbagai kalangan aktivis Muslim di Indonesia untuk mendirikan organisasi atau komunitas yang dalam studi ini dikategorikan sebagai gerakan “Green Islam.” Para aktivis Muslim di Indonesia itu ambil bagian dengan mendirikan organisasi atau komunitas yang ditujukan untuk mengekspresikan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Sebagian besar literatur yang membahas Green Islam berfokus pada wacana Islam yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan prospek kampanye dalam menghadapi krisis ekologi global (lihat Nilan 2021; Bagir dan Martiam 2016; Reuter 2015; Arnez 2014; Mangunjaya dan McKay 2012; Nasr 1990).

Meski demikian, belum diketahui bagaimana peta aktivisme Green Islam di Indonesia dan belum banyak studi yang membahas mengenai bagaimana aktor-aktor itu saling berjejaring. Oleh karena itu, bab ini berupaya mendiskusikan bagaimana peta aktivisme gerakan Green Islam di Indonesia, termasuk aktor-aktor dan jaringan-jaringan mereka. Selain itu, bab ini juga akan membahas pembentukan struktur jaringan sosial aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan Green Islam di Indonesia melalui analisis jaringan sosial (*Social Network Analysis, SNA*). Secara lebih spesifik, bab ini akan menunjukkan hubungan antar-kelompok dan struktur relasi yang menjelaskan siapa saja aktor yang paling populer dan

berpengaruh, serta klaster-klaster yang terbentuk dalam jaringan gerakan Green Islam di Indonesia.

4.1 Peta Green Islam

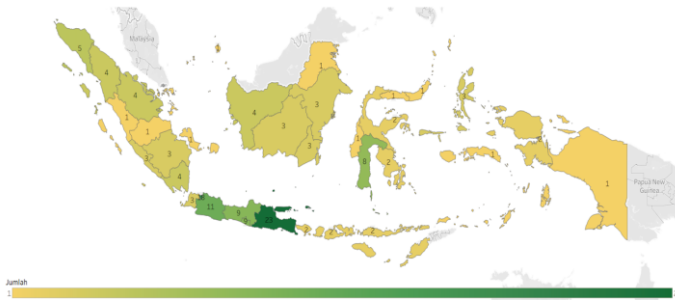
Untuk memetakan gerakan Green Islam di Indonesia, studi ini melakukan *desk research* melalui pengumpulan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber yang dipublikasikan, seperti laporan penelitian, artikel dan buku akademis, liputan media cetak dan *online*, maupun dokumentasi lainnya, terkait organisasi dan komunitas lingkungan berbasis agama. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dimasukkan ke dalam *database* organisasi dan komunitas lingkungan berbasis agama. Melalui *desk research* itu, studi ini menemukan setidaknya 192 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis keagamaan dari berbagai agama, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, juga agama lokal dan masyarakat adat, yang saat ini aktif bekerja dan melakukan program-program, termasuk kampanye publik, untuk merespons isu lingkungan dan perubahan iklim. Tahap *desk research* ini sangat berguna untuk memetakan gerakan Green Islam di Indonesia dan memberikan informasi awal mengenai jaringan kerja sama mereka.

4.1.1 Sebaran Gerakan Green Islam

Dari 192 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis keagamaan dari berbagai agama, terdapat 142 organisasi atau komunitas aktif yang menggunakan identitas Islam dalam melakukan aksi-aksi lingkungan di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan bahwa sebagian besar mereka tersebar di provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa, meliputi provinsi Banten, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dengan total 73 organisasi atau komunitas aktif. Secara rinci, Jawa Timur merupakan provinsi di mana organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam paling banyak didirikan, yaitu sejumlah 23 organisasi atau komunitas. Besaran jumlah itu diikuti oleh DKI Jakarta, yaitu sebanyak 18, kemudian Jawa Barat (11), Yogyakarta (9), Jawa Tengah (9), dan Banten (3).

Sementara itu, 69 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam lainnya tersebar di luar provinsi-provinsi yang ada di pulau Jawa. Di luar Jawa, kelompok Green Islam ini paling banyak berlokasi di

Sulawesi Selatan, dengan jumlah 8 organisasi atau komunitas, dan kemudian diikuti oleh Aceh, sebanyak 5 organisasi atau komunitas.



Gambar 1 Sebaran kelompok lingkungan berbasis Islam

Sementara di luar pulau Jawa, seperti Kalimantan Barat, Lampung, Riau, dan Sumatera Utara, terdapat 4 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam, dan hanya ada 3 kelompok yang tersebar di provinsi Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan. Sisanya, hanya terdapat 1 sampai 2 organisasi di provinsi lainnya. Di tiga provinsi baru yang ada di wilayah Papua, yaitu Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, tidak ditemukan organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam.

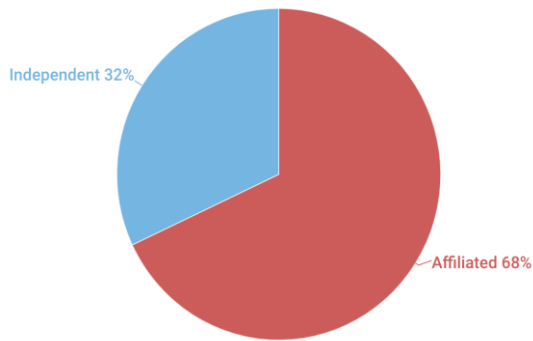
Selain itu, terdapat juga kelompok lingkungan lintas keagamaan, organisasi atau komunitas lingkungan yang terdiri dari perwakilan agama-agama yang ada di Indonesia, yang juga menggunakan wacana Green Islam sebagai salah satu instrumen pendekatan untuk mengarusutamakan isu-isu lingkungan. Dalam *database* penelitian, hanya terdapat 4 organisasi lingkungan lintas keagamaan di Indonesia, yang juga mempromosikan wacana keislaman dan lingkungan hidup, yaitu Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, Green Faith Indonesia, dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Semua organisasi tersebut terpusat di DKI Jakarta.

4.1.2 Afiliasi Struktural Kelompok Green Islam

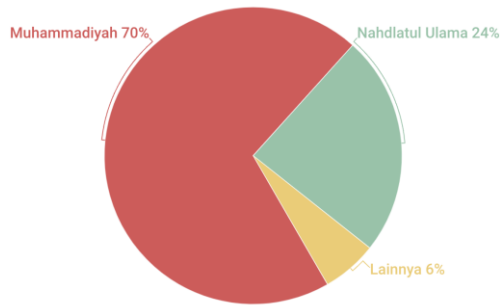
Para aktivis Muslim membentuk organisasi atau komunitas yang ditujukan untuk mengekspresikan kepedulian mereka terhadap lingkungan dengan strategi yang berbeda-beda. Sebagian kelompok yang

terlibat dalam gerakan Green Islam ini dibentuk di bawah afiliasi struktur organisasi Islam yang sudah ada sebelumnya, sementara sebagian lainnya didirikan secara independen untuk mengekspresikan kepedulian terhadap isu lingkungan. Organisasi seperti Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) dan Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah (MLH Muhammadiyah), misalnya, memiliki afiliasi struktural di bawah organisasi yang sudah ada sebelumnya, yaitu NU dan Muhammadiyah.

Berbeda dengan organisasi seperti Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) dan Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), meskipun mereka memiliki kesamaan nilai-nilai keislaman dengan Muhammadiyah dan NU, mereka berdiri secara independen dan tidak memiliki afiliasi struktural di bawah organisasi Muhammadiyah dan NU. Sifat independensi ini juga dimiliki oleh beberapa organisasi atau komunitas lainnya, khususnya mereka yang tidak memiliki kesamaan kultural dengan NU dan Muhammadiyah, seperti Bumi Langit Institute, EcoDeen, dan AgriQuran.



Gambar 2 Afiliasi struktural kelompok Green Islam



Gambar 3 Afiliasi struktural Green Islam dengan organisasi Islam yang sudah ada

Dari Gambar 2 terlihat bahwa dari total 142 kelompok lingkungan berbasis Islam di Indonesia, ada 45 atau 32% kelompok yang berdiri secara independen. Sementara itu, terdapat 97 atau 68% organisasi yang memiliki afiliasi struktural atau di bawah struktur kelembagaan organisasi yang sudah ada sebelumnya. Dari 97 kelompok yang memiliki afiliasi tersebut, sebagian besar dari mereka secara struktural di bawah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, organisasi massa Islam yang memiliki puluhan juta pengikut Muslim di Indonesia. Gambar 3 memperlihatkan para aktivis ormas Islam Muhammadiyah paling banyak mendirikan lembaga-lembaga yang terlibat dalam gerakan Green Islam, yaitu 68 atau mencakup 70% dari total lembaga aktif yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa lembaga yang terafiliasi dengan Muhammadiyah meliputi Majelis Lingkungan (MLH) Muhammadiyah, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisiyyah, Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Eco Bhinneka Muhammadiyah (EBM).

Jumlah kelompok yang terafiliasi struktural dengan Muhammadiyah terbilang lebih banyak dibandingkan dengan NU, yang hanya memiliki 23 atau 24% lembaga aktif yang mengarusutamakan isu-isu lingkungan, meski ormas tersebut memiliki jumlah pengikut Muslim Indonesia lebih banyak jika dibandingkan Muhammadiyah. NU hanya mendirikan satu lembaga, yaitu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), di bawah struktur kepengurusannya baik di tingkat pusat, wilayah, maupun cabang.

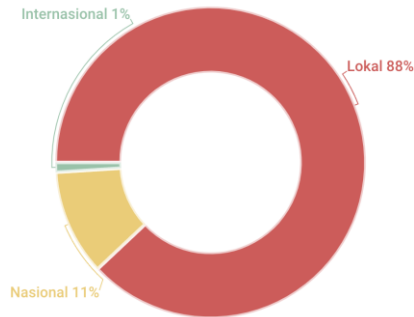
Selain itu, 6 atau 6% dari total organisasi atau komunitas sisanya memiliki afiliasi struktural selain dengan NU dan Muhammadiyah.

Keenam organisasi atau komunitas tersebut meliputi Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII), Clean The City (Ahmadiyah), Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLHSDA MUI), Ummah For Earth (Greenpeace), Persaudaraan Muslimah (PD Salimah) Klaten, dan Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS).

Lebih lanjut, terdapat jumlah yang sama dalam hal afiliasi maupun independen secara struktural di antara organisasi atau komunitas lingkungan lintas keagamaan yang menyertakan wacana Green Islam dalam aktivitas lingkungan mereka. Dalam hal ini, Green Faith Indonesia dan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia terafiliasi secara struktural dengan organisasi pusatnya yang didirikan secara internasional. Sementara itu, Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI) berdiri secara independen atau tidak memiliki afiliasi struktural.

4.1.3 Lingkup Kerja Gerakan Green Islam

Gambar 4 di bawah ini menunjukkan jangkauan wilayah program kerja organisasi atau komunitas lingkungan yang menggunakan identitas Islam. Jangkauan program kerja gerakan Green Islam ini kami kategorikan menjadi tiga lingkup kerja. Pertama adalah lokal, di mana kelompok ini merupakan organisasi atau komunitas atau bisa jadi merupakan cabang dari organisasi atau komunitas yang berdiri secara nasional dan menyelenggarakan program kerja di ruang lingkup desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, atau provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Kedua adalah lingkup kerja nasional, yang mana mereka merupakan organisasi atau komunitas yang berdiri di Indonesia dan memiliki cabang (biasanya, namun tidak selalu) atau program kerja secara nasional. Ketiga adalah lingkup kerja internasional. Organisasi atau komunitas yang termasuk ke dalam kategori ini, biasanya, merupakan cabang dari organisasi atau komunitas yang didirikan di Indonesia maupun di negara lain dan memiliki program kerja di berbagai wilayah di luar negeri, termasuk Indonesia.



Gambar 4 Lingkup kerja kelompok lingkungan berbasis Islam

Gambar 4 memperlihatkan bahwa dari total 142 organisasi atau komunitas yang berfokus dalam aktivisme Green Islam, mayoritas (125 organisasi atau 88%) di antaranya memiliki jangkauan wilayah kerja lokal. Sementara itu, 16 atau 11% lainnya memiliki jangkauan wilayah program kerja nasional, dan 1% atau 1 organisasi sisanya yang memiliki lingkup kerja internasional.

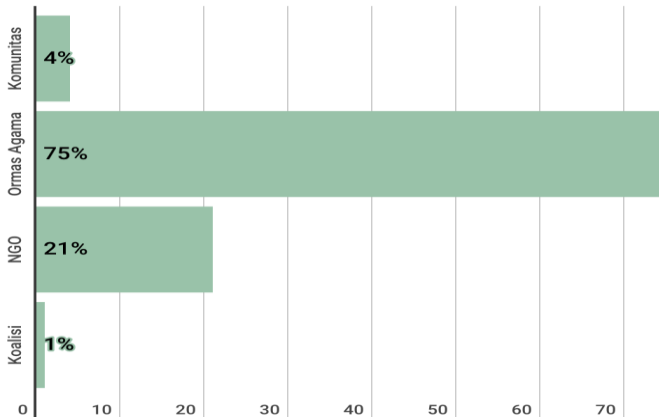
Tren yang terjadi dalam kelompok lingkungan berbasis Islam terlihat kontras jika dibandingkan dengan tren yang terjadi di kelompok lingkungan lintas keagamaan yang menggunakan wacana Green Islam sebagai salah satu instrumen pendekatan dalam mengarusutamakan isu-isu lingkungan. Tidak ada kelompok yang memiliki lingkup kerja secara lokal (sebagaimana tren yang terjadi di kelompok lingkungan berbasis Islam), di mana dari total 4 organisasi atau komunitas yang berlokasi di Jakarta (sebagaimana dijelaskan sebelumnya), 2 di antaranya menyelenggarakan program kerja secara nasional, sementara sisanya bekerja hingga lingkup internasional.

4.1.4 Jenis Gerakan Green Islam

Organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam di Indonesia memiliki empat variasi jenis yang terdiri dari komunitas, organisasi masyarakat (ormas) agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan koalisi. Pertama, mereka yang termasuk ke dalam jenis komunitas adalah kelompok masyarakat yang bergerak bersama untuk mengambil kepedulian terhadap permasalahan lingkungan dengan nilai-nilai Islam dan dibentuk secara informal, seperti AgriQuran, EcoDeen, Komunitas Save Ake Gaale, dan lainnya. Yang kedua adalah ormas agama, yaitu organisasi yang memiliki keterkaitan secara formal

dengan ormas yang berbasis Islam dan memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan, seperti LPBI NU, MDMC, LLHPB 'Aisyiyah, dan MLH Muhammadiyah.

Yang ketiga adalah LSM, merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk secara independen untuk bergerak di bidang lingkungan hidup dengan menggunakan wacana Islam. Organisasi seperti Salam Institute, FNKSDA, Yayasan Hadji Kalla, dan Green Faith Indonesia merupakan beberapa contoh kelompok yang termasuk dalam jenis ini. Yang keempat adalah koalisi, yang merupakan gabungan beberapa organisasi atau komunitas yang memiliki visi dan misi yang sama dalam kepedulian terhadap permasalahan lingkungan hidup berlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Beberapa kelompok yang termasuk dalam jenis ini di antaranya adalah Muslims for Shared Action on Climate Impact (MOSAIC) dan Interfaith Rainforest Initiative (IRI).



Gambar 5 Variasi jenis kelompok lingkungan berbasis Islam

Gambar 5 menunjukkan bahwa ormas agama paling mendominasi dari total jumlah keseluruhan dari empat variasi jenis kelompok lingkungan berbasis Islam yang ada, yaitu sebanyak 106 atau mencakup 75% dari total. Jumlah ini cukup berbeda jauh jika dibandingkan dengan tiga variasi jenis kelompok lainnya, di mana hanya terdapat 30 atau 21% lembaga dengan jenis NGO dan 5 kelompok atau 4% dengan jenis komunitas, serta 1 atau 1% dengan jenis koalisi.

Tren yang terjadi pada kelompok lingkungan berbasis Islam berbeda cukup signifikan apabila dibandingkan dengan data variasi jenis organisasi atau komunitas lingkungan lintas keagamaan yang

menyertakan wacana Green Islam. Mengacu pada *database* studi ini, tidak ada kelompok yang berjenis ormas agama. Kelompok lingkungan lintas keagamaan yang menggunakan wacana Green Islam paling banyak didominasi oleh jenis koalisi (3), yaitu Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Interfaith Rainforest Initiative (IRI), dan Humanitarian Forum Indonesia (HFI), diikuti oleh 1 lembaga dengan jenis LSM, Green Faith Indonesia.

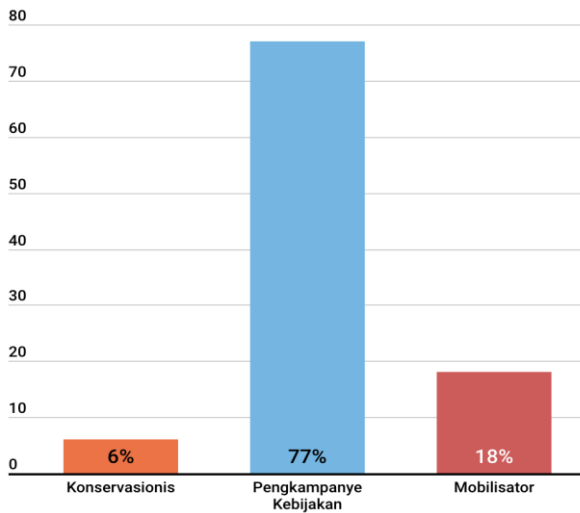
4.1.5 Tipologi Gerakan Green Islam

Untuk memetakan kecenderungan strategi utama gerakan Green Islam di Indonesia dalam mengadvokasi permasalahan lingkungan, studi ini meminjam kerangka model gerakan lingkungan sebagai gerakan instrumental yang dirumuskan oleh Heijden (1992), dan relevansi konsep tersebut pada kasus gerakan lingkungan di Indonesia (Suharko 1998). Mengacu pada klasifikasi Heijden (1992) dan Suharko (1998) tersebut, gerakan instrumental organisasi atau komunitas Green Islam di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga tipologi utama.⁸

Yang pertama adalah konservasionis, yaitu gerakan yang memiliki kepedulian utama pada perlindungan alam atau suatu area alam tertentu. Gerakan ini biasanya lebih cenderung moderat (cenderung tidak menantang agenda pemerintah yang masih didasarkan pada ekstraksi sumber daya alam dan bahan bakar fosil) dalam melakukan berbagai aktivitas lingkungan, di mana gerakan *preservationis* (pelestarian) juga dapat dimasukkan ke dalamnya. Kelompok lingkungan seperti Bumi Langit Institute dan Komunitas Adat Ammatoa Kajang, misalnya, merupakan contoh yang termasuk dalam tipologi ini.

Yang kedua adalah pengkampanye kebijakan, yaitu gerakan yang mencoba mempengaruhi pembuat kebijakan lingkungan melalui saran, lobi, dan rekomendasi-rekomendasi. Contoh dari kategori ini adalah Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS) dan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Muhammadiyah. Yang terakhir adalah mobilisator, yang merupakan kelompok gerakan lingkungan yang aktivitas utamanya cenderung menggerakkan publik atau memobilisasi massa dalam suatu aksi lingkungan. Contohnya adalah organisasi FNKSDA, KHM, dan Salam Institute. Aksi-aksi kelompok ini biasanya ditujukan pada pemegang otoritas atau pelaku bisnis yang keputusan atau perilakunya dinilai membahayakan lingkungan.

Meski demikian, perlu juga dicatat bahwa kami menggunakan tiga tipologi tersebut untuk melihat kecenderungan atau sebagian besar waktu yang dialokasikan oleh organisasi atau komunitas Green Islam dalam aktivisme lingkungan mereka. Sangat mungkin bagi suatu kelompok Green Islam menggunakan ketiga strategi sekaligus. Salam Institute, misalnya, meski memiliki kecenderungan mobilisator, mereka juga menggunakan strategi yang digunakan oleh kelompok yang masuk dalam tipologi konservasionis dan pengkampanye kebijakan. Hal yang sama juga berlaku bagi Komunitas Adat Ammatoa Kajang. Meski sebagian besar aktivisme lingkungan mereka cenderung dialokasikan untuk melindungi suatu area atau wilayah hutan adat tertentu sebagaimana konservasionis, mereka juga menggunakan strategi mobilisator ketika dihadapkan pada konflik sosio-ekologis seperti upaya mereka menantang perampasan hutan adat oleh pihak korporasi dengan izin pemerintah.



Gambar 6 Tipologi kelompok lingkungan berbasis Islam

Gambar 6 memperlihatkan jumlah organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam yang masing-masing tergolong dalam setiap variasi strategi pendekatan untuk merespons isu-isu lingkungan. Dari diagram tersebut, terdapat 8 atau 6% kelompok konservasionis yang berfokus pada pelestarian alam. Sementara itu, sebanyak 77% atau 109 organisasi yang tergolong dalam pengkampanye kebijakan, di mana

mereka melakukan aktivisme lingkungan dengan memengaruhi pembuat kebijakan melalui lobi, pemberian saran, dan rekomendasi. Selain itu, terdapat 25 atau 18% organisasi yang masuk dalam kategori mobilisator, yang strategi utamanya adalah menggerakkan massa untuk merespons permasalahan lingkungan yang terjadi.

Sementara itu, variasi tipologi dalam kelompok lingkungan lintas keagamaan yang terlibat dalam gerakan Green Islam menunjukkan bahwa terdapat 3 organisasi yang tergolong dalam tipologi pengkampanye kebijakan (menggunakan strategi seperti lobi, pemberian saran, dan rekomendasi), dan 1 organisasi sisanya sebagai konservasionis.

4.1.6 Keanggotaan Organisasi atau Komunitas Green Islam

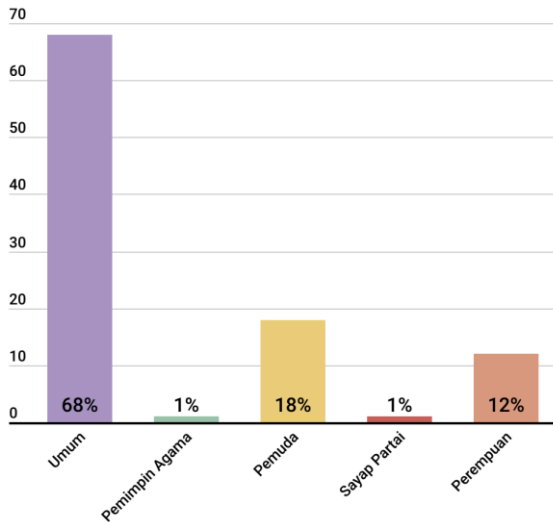
Organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam memiliki keanggotaan yang bervariasi. Kami mengidentifikasi lima karakter keanggotaan yang berbeda dari kelompok Green Islam di Indonesia, di antaranya dengan kategori umum, perempuan, pemuda, pemimpin agama, dan sayap partai.

Kategori umum merupakan kelompok yang tidak memiliki keanggotaan khusus atau membatasi keanggotaan mereka pada kelompok atau segmen tertentu. Dengan kata lain, umumnya, kelompok ini tidak mengacu pada kriteria tertentu berdasarkan demografi atau posisi tertentu dalam keanggotaan mereka. Contohnya adalah Yayasan Bina Bakti Lingkungan (YBBL), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan Muslim for Shared Action on Climate Impact (MOSAIC).

Yang kedua adalah kelompok lingkungan dengan keanggotaan perempuan seperti LLHPB 'Aisyiyah. Kelompok ini berfokus pada partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam gerakan lingkungan atau dalam proyek-proyek keberlanjutan. Ketiga, kelompok dengan keanggotaan pemuda, seperti KHM dan FNKSDA, di mana kelompok ini terdiri dari para pemuda yang memiliki keprihatinan pada persoalan lingkungan dengan wacana keislaman.

Keempat adalah kelompok lingkungan yang dikategorikan sebagai pemimpin agama. Kelompok ini merupakan organisasi atau komunitas Green Islam yang terdiri dari sekumpulan tokoh agama, seperti ulama, kiai, atau cendekiawan Muslim yang memiliki keprihatinan pada persoalan lingkungan di Indonesia. Organisasi seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan Majelis Ulama Indonesia

(MUI), misalnya, masuk dalam kategori ini. Terakhir adalah kelompok dengan keanggotaan sayap partai. Kelompok ini secara struktural menjadi bagian dari sayap partai politik, namun mereka fokus pada isu-isu lingkungan dengan perspektif Green Islam, seperti persaudaraan Muslimah yang berada di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PKS).



Gambar 7 Karakteristik Kelompok Lingkungan berbasis Islam

Gambar 7 menampilkan distribusi lima keanggotaan organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam. Dalam diagram tersebut terlihat bahwa kategori umum mendominasi daripada keanggotaan kelompok lainnya, dengan jumlah 97 kelompok, yang mencakup 68% dari total keseluruhan. Sementara kategori pemuda menempati posisi kedua, yaitu dengan jumlah 25 organisasi atau 18% dari total. Selain itu, organisasi perempuan juga memiliki representasi yang cukup besar dengan 17 organisasi atau 12% dari total. Sementara itu, sisanya, keanggotaan kelompok dengan kategori pemimpin agama dan sayap partai memiliki jumlah yang jauh lebih kecil. Dalam hal ini, hanya ada 2 organisasi yang termasuk dalam pemimpin agama, dan hanya terdapat 1 organisasi yang masuk dalam kategori keanggotaan sayap partai.

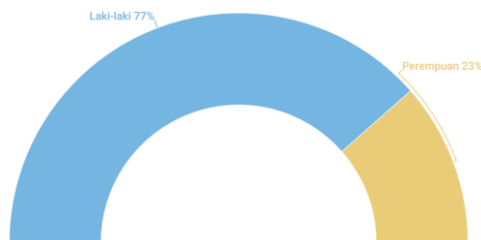
Selain itu, di antara organisasi atau komunitas lingkungan lintas keagamaan yang terlibat dalam gerakan Green Islam, hanya ada 1 dari total 4 organisasi yang masuk dalam kategori pemimpin agama, yaitu

Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), sisanya atau 3 organisasi lainnya, yakni Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, Green Faith Indonesia, dan Humanitarian Forum Indonesia, termasuk dalam kelompok lingkungan dengan karakter keanggotaan umum.

Secara keseluruhan, data yang ada mengilustrasikan bahwa meskipun organisasi umum paling mendominasi, terdapat karakter keanggotaan yang beragam dalam organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam. Contohnya adalah adanya organisasi yang anggotanya pemuda dan perempuan, pemimpin agama, dan sayap partai, meski dua yang terakhir jumlah organisasinya sangat sedikit.

4.1.7 Kepemimpinan Organisasi atau Komunitas Green Islam berdasarkan Gender

Kepemimpinan organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam berdasarkan gender penting disorot. Inklusivitas dan kesetaraan dalam sebuah kelompok merupakan norma global yang terus ditekankan belakangan ini. Dalam konteks Green Islam, norma itu menekankan pentingnya baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memimpin dan berkontribusi dalam berbagai inisiatif gerakan Green Islam di Indonesia.



Gambar 8 Kepemimpinan kelompok lingkungan berbasis Islam berdasarkan gender

Gambar 8 di atas menampilkan bahwa dari total 142 organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam, terdapat 32 kelompok atau 23% organisasi atau komunitas yang dipimpin oleh perempuan. Sementara itu, mayoritas organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam dipimpin oleh laki-

laki, yaitu 110 atau 77% dari total kelompok. Contoh organisasi yang dipimpin perempuan adalah LLHPB 'Aisyiyah dan Persaudaraan Muslimah (Salimah). Kedua organisasi ini memang secara khusus memiliki basis keanggotaan perempuan dan berada di bawah kepemimpinan perempuan.

Selain itu, dalam kelompok lingkungan lintas keagamaan yang menyertakan wacana Green Islam, seperti CDCC, IRI Indonesia, dan HFI, dipimpin oleh laki-laki. Sementara 1 organisasi sisanya, yakni Green Faith Indonesia, dipimpin oleh perempuan.

4.2 Struktur Jaringan Sosial Gerakan Green Islam

Setelah memetakan aktivisme Green Islam di Indonesia, studi ini berupaya menyelidiki bagaimana identitas Islam dan pemahaman lingkungan membentuk struktur jaringan aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan Green Islam di Indonesia. Sebagaimana yang dicatat oleh Diani (2003: 3), sarjana gerakan sosial perlu mengambil perhatian untuk menjelaskan “betapa pentingnya jaringan” untuk menangkap bentuk hubungan antar kelompok. Struktur relasi jaringan akan memberitahu kita tentang orientasi utama dari gerakan tertentu. Dalam hal ini, pertanyaan kunci yang muncul dalam struktur jaringan sosial adalah siapa aktor yang paling berpengaruh dalam aktivisme Green Islam dan bagaimana jaringan-jaringan antar aktor membentuk perbedaan orientasi organisasi atau kelompok yang terlibat dalam gerakan aktivisme lingkungan.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan metode analisis jaringan sosial (SNA, *Social Network Analysis*), sebuah metode penelitian untuk menjelaskan fenomena sosial dan memvisualisasikan data dengan menggunakan fitur struktural dan relasional dari jaringan aktor yang terlibat. Metode ini secara populer telah digunakan di bidang ilmu sosial untuk melihat dinamika jaringan yang menunjukkan pola-pola interaksi manusia atau entitas yang ada (lihat Wang 2013). Metode analisis jaringan sosial ini dapat bermanfaat untuk menghitung keterkaitan antar-aktor, terutama dalam hal pertukaran informasi dan sumber daya organisasi atau komunitas, serta dapat mengidentifikasi siapa saja yang diikutsertakan atau tidak dalam proses tersebut. Selain itu, SNA memiliki nilai tambah untuk mengkarakterisasi posisi dan kekuatan para pemain kunci, serta



menggambarkan peran yang dimainkan oleh aktor-aktor atau pemangku kepentingan dalam mempengaruhi aksi tertentu (lihat Wang 2013).

Dalam buku ini, kami menggunakan data primer dan data sekunder yang kami kumpulkan selama rentang waktu kurang lebih 6 bulan, yaitu dari 4 Desember 2023 sampai 15 Mei 2024 untuk membuat *dataset*. Data primer kami dapatkan dari Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah dengan 50 tokoh atau pemimpin dari kelompok lingkungan berbasis agama di Indonesia, serta wawancara mendalam. Selain dari FGD dan wawancara mendalam, kami juga mengumpulkan data primer melalui kuesioner yang disebarakan kepada para narasumber pada saat kegiatan FGD. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana para aktor tersebut berjejaring satu sama lain.

Sementara itu, untuk mengidentifikasi lebih jauh mengenai dengan siapa saja para aktor yang terlibat dalam gerakan Green Islam berjejaring, melakukan pertukaran informasi, berafiliasi, dan bekerja sama, kami juga melakukan *desk research* untuk mengumpulkan data sekunder yang kami dapatkan dari berbagai saluran seperti penelitian-penelitian sebelumnya, kumpulan data yang dipublikasikan, laporan, media cetak dan *online*, maupun dokumentasi lainnya. Penggunaan data primer dan data sekunder ini, selain digunakan untuk membuat *dataset*, juga bertujuan untuk menafsirkan keluaran data kuantitatif dan gambaran visual yang dihasilkan oleh analisis jaringan sosial.

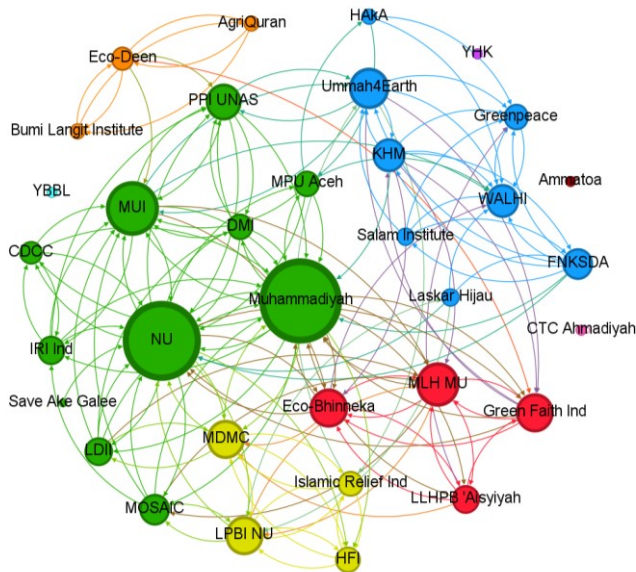
Dalam meneliti struktur jaringan gerakan Green Islam di Indonesia ini, kami menggunakan data 32 aktor atau kelompok lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam di Indonesia. Aktor-aktor tersebut meliputi organisasi atau komunitas yang menggunakan wacana Green Islam untuk mengarusutamakan isu-isu lingkungan. Mengingat organisasi atau komunitas yang terlibat dalam aktivisme Green Islam ini juga memiliki kepengurusan dari tingkat nasional dan regional, serta memiliki variasi jaringan aktor yang berbeda, kami menyatukannya dalam satu entitas untuk mempermudah dalam mengidentifikasi bagaimana mereka berjejaring satu sama lain.

Selain itu, kami mengikutsertakan dua aktor organisasi lingkungan terkemuka di Indonesia, yaitu WALHI dan Greenpeace, dalam analisis jaringan sosial ini. Terdapat beberapa alasan mengapa perlu mengikutsertakan dua organisasi tersebut. Pertama, banyak aktivis lingkungan yang lahir dari organisasi WALHI dan memiliki pengaruh signifikan bagi terbentuknya banyak lembaga yang terlibat dalam

gerakan Green Islam dan organisasi seperti Greenpeace menginisiasi proyek “Ummah for Earth” dalam mengarusutamakan isu lingkungan di Indonesia yang mayoritas. Kedua, banyak dari organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam menganggap penting untuk berjejaring dengan WALHI dan Greenpeace untuk bekerja sama dan bertukar informasi terkait isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Ketiga, dengan memasukkan organisasi seperti WALHI dan Greenpeace sebagai aktor, hal itu akan sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi apakah organisasi atau komunitas yang berjejaring dan bekerja sama dengan kedua organisasi tersebut memiliki karakter dan strategi yang berbeda secara signifikan dibandingkan organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Green Islam lainnya.

Setelah semua data terkumpul, kami membuat *dataset* dan melakukan pembersihan data, lalu mengimpor data ke aplikasi Social Network Analysis (SNA) Gephi. Kami menggunakan aplikasi Gephi versi 0.10.1. Aplikasi Gephi merupakan perangkat lunak terbuka SNA, sebagai alat analisis visual dan jaringan yang populer digunakan untuk menghasilkan representasi grafis dari jaringan sosial (Bastian, Heymann, dan Jacomy 2009). Aplikasi ini mampu mendeteksi aktor dengan hubungan interaksi kelompok-kelompok lingkungan yang terlibat dalam aktivisme Green Islam. Setelah mengimpor *dataset*, selanjutnya, kami mengeksplorasi struktur dasar jaringan, sekaligus membuat visualisasi data dan grafis untuk mengidentifikasi pola atau relasi organisasi dan komunitas lingkungan berbasis keagamaan tersebut. Dalam hal ini, kami menggunakan dua algoritma pengolahan data, yaitu *degree centrality* dan *modularity class*, untuk membantu dalam menganalisis (Lihat Apendiks 1 untuk penjelasan lebih rinci mengenai algoritma ini).

4.2.1 Aktor Dominan dalam Aktivisme Green Islam



Gambar 9 Visualisasi jaringan aktivisme Green Islam di Indonesia

Gambar 9 menampilkan visualisasi jaringan informasi, afiliasi, dan kerja sama gerakan sosial Green Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pengoperasian algoritma, ditemukan beberapa aktor dominan dan klaster dalam aktivisme Green Islam di Indonesia.

Dalam visualisasi jaringan aktivisme Green Islam yang ditampilkan pada gambar 9, kami menggunakan ukuran *nodes* yang divisualisasikan dengan pengaturan peringkat berdasarkan *weighted degree*. Pengaturan ini bermaksud untuk menggambarkan bahwa semakin besar *nodes*, semakin besar pula pengaruh yang dimiliki oleh aktor tertentu. Sebaliknya, semakin kecil *nodes*, semakin kecil pula pengaruh yang dimiliki. Besar dan kecilnya ukuran *nodes* ditentukan berdasarkan algoritma *degree centrality*.

Berdasarkan penjelasan ini, sebagaimana visualisasi pada gambar 9, terlihat bahwa Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), memiliki ukuran *nodes* lebih besar daripada *nodes* yang lain. Tabel 1 di bawah menampilkan jumlah koneksi, mulai dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit, yang dimiliki tiga aktor tersebut di antara struktur jaringan. Artinya, mereka memiliki

popularitas dan pengaruh paling besar dalam gerakan Green Islam di Indonesia. Dengan kata lain, narasi mereka sering didistribusikan, ditanggapi, dan digunakan oleh aktor-aktor dalam jaringan untuk mempromosikan wacana Green Islam. Hasil ini juga didukung oleh peran organisasi Muhammadiyah, NU, dan MUI yang memang merupakan organisasi yang mendominasi urusan agama Islam di Indonesia.

Tabel 1 Data Degree Centrality

No.	Aktor	Degree Centrality
1	Muhammadiyah	31
2	Nahdlatul Ulama	29
3	Majelis Ulama Indonesia	19
4	Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah	15
5	Ummah For Earth	13

Sebagaimana diketahui, organisasi massa Islam seperti Muhammadiyah dan NU memiliki puluhan juta pengikut Muslim di Indonesia. Beberapa sarjana seperti Gade (2012) dan Jamil (2022) telah menggambarkan bagaimana kedua organisasi tersebut memiliki peran signifikan bagi perkembangan “Islam lingkungan” di Indonesia. Peran signifikan tersebut tidak terlepas dari jangkauan mereka hingga sampai ke akar rumput atau komunitas lokal (Mangunjaya dan McKay 2012: 287-288), di mana hampir di setiap kabupaten atau kota, mereka memiliki struktur kepengurusan cabang organisasi, bahkan hingga tingkat kepengurusan kecamatan dan desa di Indonesia. Selain itu, NU dan Muhammadiyah juga memiliki jaringan luas lembaga pendidikan (mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi), pondok pesantren, masjid, dan ulama atau *kiai* terkemuka yang berafiliasi secara struktural dengan kedua organisasi. Salah satu tokoh atau ulama ahli fikih (yurisprudensi Islam) yang paling awal dan dikenal dengan karyanya mengenai fikih lingkungan adalah Ali Yafie, seorang tokoh terkemuka NU dan pernah menjabat sebagai Ketua MUI pusat periode 1990-2000 (lihat Yafie 1994).



Mengingat berbagai peran strategis yang dimiliki kedua organisasi ini, organisasi internasional seperti World Bank dan LSM internasional yang memiliki perhatian pada persoalan lingkungan hidup, telah mulai berkolaborasi dengan organisasi Islam ini (Mangunjaya et al. 2015; Gade 2012). Dengan sumber daya yang dimilikinya, mereka menjadi organisasi terdepan dalam mengarusutamakan perbaikan etika lingkungan di Indonesia dengan berbagai pendekatan seperti melalui deklarasi tokoh keagamaan, kampanye dan pesan publik, dakwah lingkungan, khotbah, diskusi-diskusi (Gade 2012; 2015), dan menerbitkan pernyataan kepada pemerintah untuk melakukan upaya dalam melawan krisis lingkungan sesuai dengan kesepakatan internasional untuk menangani perubahan iklim global (Amri 2013: 81-84).

Agar lebih fokus dalam memperhatikan persoalan lingkungan hidup, organisasi Muhammadiyah sejauh ini telah mendirikan beberapa lembaga khusus untuk mengarusutamakan isu-isu lingkungan, yaitu Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Muhammadiyah, LLHPB 'Aisyiyah, MDMC, dan Eco-Bhinneka Muhammadiyah. Sementara NU juga telah mendirikan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU).

Sementara itu, MUI merupakan organisasi Islam yang mewadahi dan mempertemukan para ulama dan intelektual Muslim Indonesia dari berbagai mazhab atau aliran Islam, termasuk para ulama yang berasal dari NU dan Muhammadiyah. Tujuan berdirinya organisasi Islam ini adalah untuk membakukan hukum Islam. Oleh karena itu, MUI diakui memiliki otoritas keagamaan tertinggi di Indonesia dalam hal mengeluarkan fatwa (pendapat hukum yang tidak mengikat) dan panduan keagamaan bagi ratusan juta pengikut Muslim di Indonesia (Jamil 2022). Fatwa-fatwa tersebut memiliki pengaruh terhadap cara pandang umat Islam dengan pendekatan syariah atau hukum Islam. Untuk menunjukkan fokus perhatiannya terkait permasalahan lingkungan dan perubahan iklim, pada 2011, MUI mendirikan lembaga khusus, yaitu Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLHSDA-MUI).

Tabel 2 Fatwa MUI tentang Lingkungan dan Perubahan Iklim

Nomor Fatwa	Nomenklatur Fatwa
No. 2 Tahun 2010	Fatwa tentang air daur ulang
No. 22 Tahun 2011	Pertambangan Ramah Lingkungan
No. 4 Tahun 2014	Fatwa tentang Spesies Terancam Punah untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem
No. 001/MUNASIX/MUI/2015	Fatwa tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Membangun Infrastruktur Sanitasi Masyarakat
No. 30 Tahun 2016	Fatwa tentang Pembakaran Hutan dan Lahan
No. 86 Tahun 2023.	Fatwa tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global

Tabel 2 memperlihatkan beberapa fatwa terkait lingkungan dan perubahan iklim yang telah dibuat oleh MUI, di antaranya Fatwa tentang Air Daur Ulang No. 2 Tahun 2010; Fatwa tentang Pertambangan Ramah Lingkungan No. 22 Tahun 2011; Fatwa tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan No. 47 Tahun 2014; Fatwa tentang Spesies Terancam Punah untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem No. 4 Tahun 2014; Fatwa tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Membangun Infrastruktur Sanitasi Masyarakat No. 001/MUNASIX/MUI/2015; Fatwa tentang Pembakaran Hutan dan Lahan No. 30/2016; dan Fatwa tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global No. 86/2023. Selain itu, MUI juga beberapa kali telah merilis naskah khotbah Jumat yang bertema lingkungan.

Perbaikan etika lingkungan berlandaskan Alquran dan hadis yang dipromosikan oleh organisasi Islam di atas tidak hanya dilakukan melalui deklarasi, kampanye dan pesan publik, khotbah, dan diskusi-diskusi semata. Mereka juga menyoroti pengetahuan ekologi Islam yang disertai dengan pengalaman dan contoh-contoh penerapan praktik baik yang



disesuaikan dengan tradisi Islam dan budaya Indonesia (Gade 2012). Praktik baik ini terlihat di beberapa lembaga yang diberi label sebagai eko-pesantren (pesantren ramah lingkungan), eko-masjid (masjid ramah lingkungan), pengelolaan sampah yang baik, praktik pertanian Islam, dan agenda-agenda peduli lingkungan lainnya (Fikri dan Colombijn 2021; McKay et al. 2014; Gade 2012).

Dikarenakan perannya sebagai ormas Islam terbesar, Muhammadiyah, NU, dan MUI menjadi aktor yang berpengaruh dan mereka cenderung mampu mempengaruhi sebagian besar narasi dan strategi yang digunakan oleh para aktor dalam jaringan. Gerakan Green Islam yang diarusutamakan dengan perbaikan etika melalui narasi-narasi yang ada dalam kepatuhan hukum Islam dan contoh yang baik di dalamnya ini cenderung banyak ditiru dan dilakukan oleh organisasi atau komunitas lingkungan lainnya yang terlibat dalam Green Islam. Bahkan, beberapa di antara mereka memiliki program kerja dan praktik lingkungan yang kreatif (sebagaimana yang akan dipaparkan lebih lanjut mengenai program dan praktik terpilih).

4.2.2 Klaster dalam Jaringan Aktivisme Green Islam

Perlu dicatat bahwa dari hasil analisis jaringan sosial yang ditampilkan Gambar 9, sembilan warna yang berbeda dalam visualisasi tersebut hanya mere-presentasikan *nodes* atau sembilan klaster dalam jaringan yang ditemukan algoritma *modularity class* (warna-warna tersebut bisa diubah). Berdasarkan data 32 organisasi atau komunitas yang terlibat dalam gerakan Green Islam, serta kuesioner dan data sekunder yang dikumpulkan, terdapat enam klaster utama dalam studi ini.

Pertama, klaster satu (hijau) cenderung didominasi oleh kelompok organisasi Islam, di antaranya seperti Muhammadiyah, NU, MUI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Beberapa organisasi dalam klaster ini juga terdapat organisasi aliansi seperti Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC), Interfaith Rainforest Initiative (IRI Ind), dan MOSAIC (Muslims for Shared Action on Climate Impact), yang keanggotaannya juga terdiri dari NU, Muhammadiyah, dan MUI. Sementara itu, Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI-UNAS) dan Komunitas Save Ake Gaale Ternate juga termasuk dalam klaster ini. Organisasi atau komunitas yang terlibat dalam aktivisme Green Islam pada klaster hijau ini biasanya melakukan aksinya dengan deklarasi tokoh-tokoh keagamaan, dialog lingkungan

lintas keagamaan, pengembangan program eko-pesantren, eko-dakwah, eko-masjid, eko-ramadan, penanaman pohon bersama (sedekah atau wakaf hutan), pengelolaan sampah, sedekah energi atau perubahan transisi energi, dan proyek-proyek sosio-ekologis lainnya.

Jika mengamati visualisasi SNA pada gambar 9, Save Ake Gaale, yang berfokus pada konservasi air tanah dan pemanfaatan air hujan, tidak memiliki jaringan selain dengan kelompok NU. Masuknya Save Ake Gaale dalam klaster hijau karena adanya peluang terkait tren tradisi Islam lingkungan yang berkembang di kelompok NU, seperti organisasi Muslimat NU di Ternate. Komunitas Save Ake Gaale kemudian menginisiasi kerja sama dengan mereka untuk berkampanye bersama-sama dalam menumbuhkan kesadaran dan tradisi lingkungan berdasarkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat, khususnya konstituen mayoritas Muslim di Ternate.

Kedua, organisasi atau komunitas yang ada dalam klaster dua (biru), terdiri dari organisasi yang memiliki kepadatan tautan dengan organisasi lingkungan terkemuka di Indonesia, WALHI dan Greenpeace. Organisasi atau komunitas yang berada dalam klaster biru ini terdiri dari FNKSDA, KHM, Ummah for Earth (Ummah4Earth), dan Salam Institute.

Meskipun Muhammadiyah, NU, dan MUI menjadi organisasi yang paling dominan dalam mengontrol narasi perkembangan Islam lingkungan di Indonesia melalui jaringan, afiliasi, dan kerja sama mereka, narasi mereka tidak sepenuhnya terkoneksi dengan organisasi atau komunitas dalam klaster ini. Organisasi KHM, misalnya, meskipun mendapat dukungan dari MLH Muhammadiyah yang secara struktural di bawah organisasi Muhammadiyah, mereka membedakan diri dengan MLH dan memilih berdiri dan bergerak secara independen. Bahkan mereka memiliki teologi lingkungan yang berbeda dengan posisi Muhammadiyah. Kondisi tersebut berlaku sama terhadap organisasi FNKSDA. Meskipun FNKSDA memiliki hubungan kultural dengan NU, mereka memiliki kerangka ide tentang Islam lingkungan yang berbeda dari posisi yang NU ambil.

Perbedaan utama dalam posisi teologi lingkungan tersebut tampak jelas ketika organisasi atau komunitas dalam klaster ini menangani konflik sosio-ekologis yang sensitif. Dalam hal ini, mereka mengambil peran sebagai mobilisator, sebagaimana yang dilakukan WALHI dan Greenpeace, yang mengedepankan prinsip solidaritas dengan aktivitas utamanya memobilisasi massa untuk menentang dampak industri yang

merusak lingkungan. Strategi yang mereka gunakan meliputi aksi demonstrasi untuk mewujudkan keadilan lingkungan dan iklim dan bekerja sama dengan gerakan masyarakat sipil lokal berbasis akar rumput.

Ketiga, klaster tiga (merah) didominasi oleh organisasi yang berafiliasi struktural dengan Muhammadiyah, seperti MLH Muhammadiyah, LLHPB 'Aisiyyah, dan Eco-Bhinneka. Meskipun demikian, tiga lembaga tersebut membentuk klaster secara terpisah dengan Muhammadiyah dan berada pada klaster tersendiri bersama Green Faith Indonesia. Data menunjukkan bahwa klaster ini tidak terlepas dari peran signifikan seorang aktivis lingkungan yang lahir dari organisasi WALHI, Hening Purwati Parlan, yang menduduki posisi-posisi strategis di empat organisasi tersebut sekaligus. Kesadaran pentingnya organisasi keagamaan untuk mendirikan lembaga yang khusus bergerak dalam isu-isu lingkungan telah banyak didorong oleh Hening, yang juga merupakan kader Muhammadiyah.

Selain itu, meski Hening merupakan aktivis yang lahir dari organisasi WALHI dan beberapa kelompok dalam klaster ini juga pernah berjejaring dengan WALHI dan Greenpeace. Organisasi yang termasuk dalam klaster ini menyatakan menolak bantuan pendanaan untuk program kerja mereka yang berasal dari lembaga atau perusahaan yang dianggap berkontribusi pada perusakan lingkungan atau yang mereka sebut sebagai dana "*greenwashing*."

Keempat (kuning), klaster yang terbentuk dari organisasi seperti Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), dan Islamic Relief Indonesia. Lembaga-lembaga yang termasuk dalam klaster ini memiliki kesamaan dalam merespons permasalahan lingkungan, di mana mereka lebih memiliki fokus untuk bergerak dengan menyediakan bantuan kemanusiaan pascabencana dan program-program mitigasi risiko bencana ekologis.

Klaster lima (oranye) terdiri dari tiga organisasi meliputi AgriQuran, EcoDeen, dan Bumi Langit Institute. Kelompok Green Islam ini fokus pada isu-isu seperti minimalisme (hidup yang tidak berlebih-lebihan), pentingnya kesalehan, dan pertanian berkelanjutan. Mereka menekankan narasi-narasi seperti bagaimana individu Muslim untuk keluar dari kehidupan yang berlebihan, mencemari lingkungan, dan mempraktikkan komitmen Islam yang ramah lingkungan. Dalam hal

kampanye lingkungan tersebut, mereka memiliki penekanan pada muatan identitas Islam modern yang mendalam untuk meningkatkan kesalehan individu Muslim. Tiga organisasi ini sering melibatkan masyarakat kelas menengah dan ke atas di lingkungan perkotaan. Sejauh ini, mereka telah berhasil menjangkau kelompok urban perkotaan yang melek media sosial.

Terakhir, empat organisasi atau komunitas yang terputus dari garis-garis (*edges*) yang mengkoneksikan sebagian besar aktor (*nodes*) yang terlibat dalam aktivisme Green Islam di Indonesia. Organisasi atau komunitas tersebut di antaranya adalah Clean The City (CTC Ahmadiyah), Yayasan Bina Bhakti Lingkungan (YBBL), Yayasan Hadji Kalla (YHK), dan Komunitas Adat Ammatoa Kajang. Dalam hal ini, mereka membentuk klaster masing-masing. Artinya, mereka tidak bekerja sama atau berjejaring dengan kelompok lain dalam struktur jaringan yang ada dan cenderung membangun jaringan dan melakukan program lingkungan mereka secara mandiri.

CTC, misalnya, adalah organisasi di bawah naungan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang berfokus pada gerakan kebersihan lingkungan. Keterpisahan CTC dengan organisasi atau komunitas lingkungan lainnya mungkin terjadi karena Ahmadiyah merupakan organisasi massa berbasis Islam yang pernah menghadapi diskriminasi dari kelompok Islam arus utama di Indonesia. Akibatnya, mereka cenderung kurang bekerja sama dengan kelompok lain yang ada di struktur jaringan untuk melakukan program kerja lingkungan mereka. Meski demikian, inisiasi gerakan kebersihan lingkungan oleh Ahmadiyah dianggap penting bagi eksistensi mereka untuk bisa kembali diterima masyarakat Muslim Indonesia secara luas.

Sementara itu, YBBL, juga memiliki narasi tersendiri untuk mengekspresikan kepedulian mereka terhadap pelestarian lingkungan. Organisasi ini lebih berfokus pada program kewirausahaan dan pemberian bantuan kesejahteraan kepada kaum miskin yang melakukan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Identitas agama, khususnya Islam, dianggap penting sebagai instrumen untuk mengkampanyekan program mereka. Perbedaan paling mencolok dengan organisasi lainnya adalah, dalam aktivitas pelestarian lingkungan, mereka membuka donasi seluas-luasnya bagi pihak mana pun yang mau berdonasi, dan mereka tidak memiliki teologi lingkungan yang mapan sebagaimana organisasi atau komunitas Green Islam pada umumnya.

Yayasan Haji Kalla (YHK) bergerak berlandaskan konsep-konsep Islam yang terkandung dalam konsep infak, sedekah, dan zakat untuk pelestarian lingkungan. Mereka berfokus pada distribusi dana zakat, infak, dan sedekah bagi masyarakat Muslim, khususnya di beberapa daerah Timur Indonesia, untuk program-program pelestarian lingkungan. Sebagian besar dana zakat, infak, dan sedekah tersebut terkumpul dari pendapatan karyawan yang bekerja di bawah grup perusahaan KALLA. Beberapa program lingkungan dengan skala kecil yang telah diinisiasi adalah pemberian bantuan bibit untuk penanaman pohon, pemberdayaan pesantren ramah lingkungan, pendidikan masyarakat untuk mitigasi risiko bencana longsor dan banjir, dan pemanfaatan teknologi melalui pembangunan sarana digester biogas (sarana mengubah kotoran ternak menjadi bahan bakar biogas dan pupuk organik) untuk pertanian berkelanjutan.

Yang terakhir adalah Komunitas Muslim Adat Ammatoa di Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Komunitas Muslim suku kajang ini dikenal sebagai penjaga hutan terbaik di dunia menurut *Washington Post*. Mereka menganut kuat ajaran yang secara tegas menginstruksikan masyarakatnya untuk menjalani hidup secara sederhana tanpa kemewahan, religius (berfikir, bertindak, berkata, dan berbuat sesuai dengan keinginan Tuhan), dan aturan ketat dalam hal penebangan pohon, seperti menanam dua pohon sebagai pengganti dari pohon yang ditebang dan penebangan tersebut hanya boleh dilakukan jika pohon pengganti telah tumbuh subur. Meski demikian, sebagian besar komunitas ini menganggap aktivitas konservasi hutan tersebut bagian dari kearifan lokal yang harus dipraktikkan masyarakat, bukan didasarkan pada pengetahuan isu-isu lingkungan yang dipelajari secara mendalam.

4.3 Kesimpulan

Bab ini memetakan dan mengidentifikasi jaringan sosial organisasi atau komunitas lingkungan yang menjadi bagian dari gerakan Green Islam di Indonesia. Penelusuran penelitian dalam buku ini menemukan setidaknya 142 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam di berbagai daerah di Indonesia, yang mayoritas berada di pulau Jawa. Mayoritas dari organisasi atau komunitas Green Islam itu terafiliasi secara struktural di bawah dua organisasi massa berbasis Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU. Sementara lingkup kerja lingkungan aktivisme Green Islam itu mayoritas di basis lokal dan

sebagian berjenis ormas keagamaan. Sumber data dari buku ini juga memperlihatkan bahwa sebagian besar organisasi atau komunitas Green Islam itu cenderung masuk dalam kategori pengkampanye kebijakan, dibandingkan konservasionis atau mobilisator.

Setelah memetakan aktivisme Green Islam di Indonesia, bab ini mendiskusikan bagaimana pembentukan struktur jaringan sosial aktor-aktor yang terlibat dalam gerakan Green Islam di Indonesia. Dari hasil analisis jaringan sosial, kami menemukan bahwa ormas Islam terbesar, seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI, menjadi aktor yang paling populer dan berpengaruh dalam aktivisme Green Islam. Selain itu, visualisasi struktur jaringan sosial yang ditampilkan dalam bab ini memperlihatkan adanya variasi pendekatan dalam aktivisme Green Islam di Indonesia. Dalam hal ini, interaksi antar aktor dalam jaringan dan sumber daya yang mereka miliki masing-masing mempengaruhi variasi tersebut. Setiap klaster memperlihatkan karakteristik dan fokus pendekatan tertentu organisasi atau komunitas Green Islam dalam merespons dan mengkampanyekan isu-isu lingkungan di Indonesia.

Beberapa di antara variasi itu, misalnya, dominannya adalah organisasi-organisasi Islam besar dan kelompok yang kerap berjejaring dengan mereka. Kelompok ini biasanya memulai aksinya dengan deklarasi tokoh-tokoh keagamaan, dialog lingkungan lintas keagamaan, pengembangan program eko-pesantren, eko-dakwah, eko-masjid, eko-ramadan, penanaman pohon bersama (sedekah atau wakaf hutan), pengelolaan sampah, sedekah energi atau perubahan transisi energi, dan proyek-proyek sosio-ekologis lainnya. Klaster lainnya adalah relasi kedekatan antara kelompok Green Islam dengan organisasi lingkungan terkemuka seperti WALHI dan Greenpeace, yang menekankan aksi mobilisasi massa. Yang lainnya, jaringan organisasi yang fokus pada pelatihan dan edukasi lingkungan, mitigasi risiko bencana dan bantuan pasca-bencana, dan narasi kesalehan dengan identitas Islam modern untuk meningkatkan kesalehan individu Muslim ramah lingkungan. Terakhir, terdapat beberapa kelompok yang terpisah dari jaringan dominan para aktor Green Islam yang ada dalam visualisasi jaringan, dan secara mandiri menyelenggarakan program kerja mereka sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar mereka. Pendeknya, bab ini memperlihatkan hubungan antarkelompok dan struktur relasi para aktor aktivisme Green Islam beserta kecenderungan atau orientasi utama gerakan kelompok-kelompok tersebut.

BAB 5

IDENTITAS AGAMA DAN STRATEGI GREEN ISLAM DI INDONESIA

Setiap organisasi atau komunitas Green Islam memiliki pendekatan berbeda-beda dalam memanfaatkan nilai-nilai agama untuk mempromosikan kesadaran lingkungan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, mereka berupaya untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Bab ini membahas bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama yang berbeda-beda dalam strategi mereka dengan menganalisis pola-pola umum di balik gerakan Green Islam.

Pertama-tama bab ini akan membahas dua sasaran utama strategi gerakan Green Islam. Sasaran strategi yang dimaksud adalah mekanisme aktivisme Green Islam dalam memposisikan diri dan menyasar target gerakan yang mereka anggap dapat mengurangi dan menyelesaikan persoalan lingkungan. Selanjutnya, bab ini akan mendiskusikan karakter umum dari bentuk strategi gerakan Green Islam tersebut. Seperti akan dibahas, bentuk-bentuk strategi organisasi atau komunitas Green Islam juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk membedakan diri dari kelompok-kelompok lingkungan agama lain, atau bahkan kelompok-kelompok lingkungan non-agama.

5.1 Sasaran Strategi Gerakan Green Islam di Indonesia

Buku ini mengidentifikasi dua cara pandang utama bagaimana gerakan Green Islam memosisikan diri dan menyasar target gerakannya. Pertama, ada keyakinan bahwa aktivisme Green Islam harus bergerak dan mengkampanyekan isu-isu Islam dan lingkungan kepada masyarakat luas, terutama kepada mereka yang belum teredukasi dengan baik tentang masalah lingkungan. Dengan cara ini, mereka berharap dapat mengurangi dan mengatasi kerusakan lingkungan dari tingkat akar rumput. Kedua, ada keyakinan bahwa aktivisme Green Islam harus difokuskan pada pihak-pihak yang mereka anggap memiliki otoritas atau tanggung jawab dalam masalah lingkungan, seperti industri atau pemerintah. Dengan demikian, mereka dapat mengurangi kerusakan lingkungan dari tingkat yang paling atas. Temuan ini sejalan dengan studi gerakan sosial Islam yang membagi orientasi gerakan menjadi gerakan yang berorientasi pada negara dan gerakan yang berorientasi pada masyarakat (Yavuz 2012).

Dua cara pandang ini membentuk pola strategi aktivisme Green Islam. Yang pertama cenderung mendekati masalah dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), sehingga lebih terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah dan korporasi. Sementara yang kedua cenderung mendekati masalah dari atas ke bawah (*top-down*), sehingga lebih menjaga jarak dengan pemerintah dan korporasi. Benford dan Snow (2000) menyatakan bahwa pemosisian sasaran dan target yang patut dipersalahkan (*diagnostic framing*) sangat penting agar suatu gerakan dapat menawarkan solusi (*prognostic framing*). Dengan cara ini, gerakan sosial dapat melakukan kampanye gerakan atau memberikan penjelasan rasional yang memungkinkan orang terlibat dalam tindakan kolektif (Benford dan Snow 2000).

Misalnya, salah satu pola strategi yang akan kami jelaskan lebih lanjut, yakni pemberdayaan tokoh agama dapat berfungsi ganda: untuk menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat guna mitigasi kerusakan lingkungan dari bawah ke atas; dan untuk mempengaruhi atau mendesak otoritas terkait lingkungan guna mitigasi kerusakan dari atas ke bawah (cara pandang *top-down*). Contoh yang pertama terlihat saat para pendakwah mengkampanyekan fatwa-fatwa MUI mengenai lingkungan melalui ceramah kepada masyarakat luas atau saat ulama perempuan di Aceh mengkampanyekan program lingkungan yang telah



mereka susun bersama dengan HAKA. Sementara contoh yang kedua terlihat saat IRI memberdayakan tokoh agama untuk mempengaruhi elit otoritas terkait lingkungan.

Pola serupa juga berlaku pada strategi pelatihan dan edukasi masyarakat. Dengan cara pandang *bottom-up*, LLHPB 'Aisiyiah misalnya mengedukasi masyarakat umum, bahkan dari tingkat pendidikan anak-anak, dengan memanfaatkan sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan Aisiyiah atau Muhammadiyah. Tujuannya adalah membiasakan masyarakat itu sendiri untuk memiliki kesadaran terhadap pelestarian lingkungan. Singkatnya, LLHPB 'Aisiyiah mendorong adanya perbaikan etika lingkungan masyarakat. Sementara itu, dengan cara pandang *top-down*, Salam Institute misalnya mengedukasi masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak industrialisasi, dengan pelatihan dan kaderisasi yang disebut Pesantren Ekologi. Tujuannya adalah untuk membiasakan masyarakat agar bersikap kritis terhadap kebijakan dan korporasi yang dinilai berpotensi merusak lingkungan, terutama di masing-masing wilayah peserta pelatihan tersebut.

Dua cara pandang tersebut juga ditemukan dalam strategi mobilisasi masyarakat terdampak. Strategi ini umumnya digunakan oleh organisasi-organisasi dengan tipe mobilisator. Karenanya, strategi ini lebih banyak digunakan oleh kelompok dengan cara pandang *top-down*, yakni cara pandang yang menysasar pemerintah atau korporasi sebagai target pengaruh dalam gerakan. Hal tersebut misalnya terlihat saat FNKSDA bekerja sama dengan komunitas masyarakat lokal dalam konflik agraria ketika berhadapan dengan perusahaan perkebunan swasta PT. Bumisari di Jawa Timur. Hal yang sama dilakukan oleh Salam Institute yang bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mempertahankan Desa Ambulu di Cirebon dari potensi masuknya industrialisasi. Selain itu, studi ini juga menemukan bahwa strategi mobilisasi masyarakat terdampak ini juga dapat digunakan oleh kelompok dengan cara pandang *bottom-up*, yang mana target atau sasaran gerakan adalah masyarakat. Hal ini misalnya diperlihatkan saat Salam Institute memobilisasi masyarakat lokal terdampak PLTU Cirebon untuk menjaga, merawat, dan membersihkan lingkungan sekitar, alih-alih menysasar otoritas atau elit tertentu.

Terakhir, dalam hal strategi terkait perluasan dan pendalaman jaringan daring, sebagian besar organisasi menggunakan cara pandang *bottom-up*, yakni memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan dakwah lingkungan kepada masyarakat umum. Dengan kata lain

targetnya adalah masyarakat. Strategi ini sering diterapkan oleh berbagai organisasi, contohnya kampanye AgriQuran yang menjangkau anak-anak muda dan masyarakat urban di perkotaan, serta kampanye-kampanye sejenis yang dilakukan oleh NU, Muhammadiyah, EcoDeen, Ummah for Earth, dan HAKA. Namun, ada juga beberapa gerakan yang menggunakan strategi ini untuk mengkritik dan mempengaruhi kebijakan tertentu (*top-down*). Artinya, target utamanya adalah korporasi atau pemerintah. Sebagai contoh, kampanye FNKSDA atau KHM di platform media sosial, khususnya Instagram, yang berisi seruan-seruan perlawanan terhadap pemerintah dan korporasi.

Terkait strategi bagaimana organisasi-organisasi Green Islam memposisikan diri dan menyasar target pengaruh, studi ini lebih lanjut menemukan bahwa dua cara pandang atas target sasaran strategi di atas tidak selalu berlaku biner (jika A maka bukan B). Suatu organisasi dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam suatu situasi tertentu, dan dalam situasi yang lain dapat menjadikan mereka sebagai target gerakan. Bahkan, dalam satu waktu yang sama. HAKA, misalnya, cenderung menjadikan masyarakat sebagai target pengaruh (*bottom-up*) dalam konteksnya sebagai organisasi yang mencetuskan modul dakwah lingkungan bersama para Teungku Inong Aceh. Cara ini memungkinkan HAKA untuk bekerja sama dengan elit seperti pemerintah Aceh. Dalam contoh yang lain, misalnya, HAKA yang berfokus pada penghentian aktivitas ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser, cenderung menjadikan pemerintah dan korporasi sebagai target gerakannya (*top-down*). Strategi ini terlihat ketika HAKA beberapa kali mendesak pemerintah Aceh dengan petisi hingga demonstrasi atas kasus-kasus pelanggaran lingkungan (salah satunya kasus PT Kallista Alam).

Contoh lainnya adalah Greenpeace Indonesia. Sebagai inisiator “Ummah for Earth” yang merupakan koalisi atau aliansi antar-organisasi, Greenpeace Indonesia cenderung terbuka untuk menjadikan pemerintah sebagai mitra gerakan dalam mengkampanyekan Green Islam ke masyarakat luas. Sementara sebagai organisasi yang berfokus mengawal kerusakan lingkungan di Indonesia dengan cara aksi-aksi demonstrasi tertentu (Akbar 2023), Greenpeace cenderung menjadikan pemerintah sebagai target gerakan. Dalam konteks ini, Maftuchah Nugrahaini menjelaskan bahwa Ummah for Earth, meski tidak dapat dipisahkan dari organisasi Greenpeace, keduanya memiliki pendekatan yang berbeda: “Ada jalannya masing-masing. Misalnya, Ummah for Earth itu adalah

koalisi, jadi kalau mau bergerak maka harus berdiskusi dengan semuanya. Kalau Greenpeace ini beda lagi. Keduanya memiliki aturan tersendiri” (Maftuchah Nugrahaini, Wawancara, Ummah For Earth, 20 Maret 2024).

5.2 Strategi Aktivisme Green Islam di Indonesia

5.2.1 Penggunaan Istilah Berkonotasi Islam

Yang paling menonjol dalam strategi Green Islam adalah penggunaan istilah-istilah berkonotasi Islam, baik untuk nama program kerjanya maupun narasi program kerja tersebut. Upaya ini diperlukan sebagai mekanisme diferensiasi gerakan Green Islam, mengingat banyaknya organisasi lingkungan berbasis agama atau non-agama lainnya yang juga menjalankan program-program kerja lingkungannya. MLH Muhammadiyah, misalnya, memiliki program ‘sedekah sampah’ sebagai ciri khas dari gerakan MLH dalam pengelolaan sampah (MLH Muhammadiyah n.d.).

Program kerja lingkungan dengan istilah-istilah berkonotasi Islam juga sering diadopsi oleh PPI UNAS, misalnya Eko-Pesantren, eko-haji (*Green Hajj*), Perubahan Iklim dan Restorasi Lahan Gambut untuk Ulama (Imam), Pelatihan Konservasi Alam untuk Ulama (Imam), serta Konferensi dan Seminar tentang Islam dan Lingkungan (Muhammad Zulham, PPI UNAS, FGD, 20 Februari, 2024). Program-program serupa kemudian juga diterapkan oleh MOSAIC seperti program bernama Bengkel Hijrah Iklim dan Sedekah Energi. Gatot Supangkat mengungkapkan bahwa MOSAIC menjalankan program sedekah lingkungan dengan mengacu pada konsep ‘sedekah’ dalam Islam. Karena itu, ia berharap bahwa program sedekah mereka dapat berkembang ke isu lingkungan lain seperti sedekah air atau sedekah lingkungan lainnya (Gatot Supangkat, MOSAIC, FGD, 6-8 Maret 2024).

Organisasi-organisasi yang relatif dekat dengan NU, seperti FNKSDA dan Salam Institute, juga kerap menerapkan istilah berkonotasi Islam pada program kerja mereka atau secara spesifik menggunakan identitas Islam NU. Program Ngaji Lingkungan FNKSDA atau Pesantren Ekologi Salam Institute merupakan program yang erat kaitannya dengan identitas “*ngaji*” dan “*pesantren*” di tubuh NU. Penggunaan identitas NU seperti ini turut membentuk identitas kolektif Islam NU dalam gerakan-gerakan Green Islam di Indonesia.

Persoalan identitas Islam menjadi penting karena organisasi Green Islam sering kali menghadapi kesulitan untuk mengundang partisipasi masyarakat dalam gerakan mereka, ketika hanya menggunakan isu lingkungan semata. Karenanya, Nurul Chasanah, anggota Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, mengungkapkan bahwa penggunaan identitas berkonotasi Islam dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan Green Islam. Nurul misalnya menemukan bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Surabaya yang menjadi fokus kerja organisasi Bina Bhakti Lingkungan, relatif lebih tergerak apabila program tersebut menggunakan identitas berkonotasi Islam (Nurul Chasanah, YBBL, FGD, Rabu, 6-8 Maret 2024).

5.2.2 Pemberdayaan Pemuka Agama

Ketokohan ulama dalam agama Islam memainkan peran penting karena mereka memiliki kemampuan dalam mempengaruhi publik agar terlibat dalam gerakan Green Islam. Mengikuti Diane Singerman (2012), pelaku gerakan dan produsen budaya seperti otoritas keagamaan dan intelektual memiliki kemampuan dalam membentuk gerakan kolektif, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, otoritas keagamaan dan intelektual juga dapat untuk mengarahkan seorang simpatisan menjadi seorang aktivis (Singerman 2012). Oleh karena itu, studi ini memperlihatkan bahwa organisasi dengan tipologi pengkampanye kebijakan seperti NU, Muhammadiyah, DMI, LDII, MPU, dengan sumber daya tokoh agama di dalam organisasinya, dapat secara langsung memaksimalkan potensi ini. Sementara organisasi-organisasi yang tidak memiliki anggota yang terdiri dari ulama di dalam organisasinya, seperti Yayasan Hadji Kalla, HAKA, AgriQuran, EcoDeen, dapat melakukan rekrutmen atau melibatkan ulama-ulama di luar keanggotaan organisasinya.

Budi Setiawan (MDMC, FGD, 20-22 Februari 2024) menjelaskan bahwa mereka berupaya mengkampanyekan Green Islam dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat diimplementasikan dalam program-program lingkungan. Melalui ulama-ulama yang dimiliki oleh Muhammadiyah, MDMC dapat leluasa mengintegrasikan ajaran Islam dengan lingkungan melalui bahasa yang dapat diterima masyarakat luas, agar mereka dapat terlibat dalam gerakan-gerakan lingkungan MDMC, terutama dalam aspek kebencanaan (MDMC, FGD, 20-22 Februari 2024).

Sementara itu, MUI mengadakan pelatihan dan sosialisasi khusus untuk para pendakwah mengenai fatwa-fatwa lingkungan MUI. Agar pendakwah dapat menyampaikan dakwah-dakwah lingkungan dengan tepat, MUI terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang isi dan tujuan dari fatwa tersebut (Hayu S. Prabowo, Ketua LPLH & SDA MUI, FGD, 20-22 Februari 2024). Sebagaimana strategi Muhammadiyah, MUI menitikberatkan kepada para pendakwah agar dapat menyampaikan dakwah-dakwah lingkungan dengan tutur kata yang mudah dimengerti masyarakat luas. Kunci keberhasilan MUI serta para pendakwahnya dalam mengkampanyekan Green Islam adalah pendekatan budaya lokal masyarakat setempat. “Dari dai ke masyarakat dengan bahasa-bahasa masyarakat lokal”, kata Hayu S. Prabowo (Ketua LPLH & SDA MUI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Sebagai mitra dari MUI saat memberi pelatihan kepada para pendakwah, Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS), menjelaskan bahwa terdapat 354 pendakwah yang bergerak untuk mendakwahkan perlindungan satwa liar yang merujuk kepada fatwa perlindungan satwa liar. Sementara itu, juga terdapat 309 pendakwah yang bergerak pada sektor gambut. Khusus pada sektor gambut, mereka telah melakukan pelatihan dakwah yang bekerja sama dengan badan restorasi gambut dan MUI. Oleh karena itu, fokus utama dari dakwah lingkungan mereka adalah dakwah yang berfokus pada perlindungan satwa liar dan dakwah yang berfokus pada sektor lahan gambut (Muhammad Zulham, PPI UNAS, FGD, Rabu, 20-22 Februari 2024).

Di Aceh, MPU Aceh juga menerapkan strategi yang sama ketika menyebarkan fatwa mengenai lingkungan. Menurut Haris, masyarakat Aceh yang cenderung memegang teguh syariat Islam lebih dapat menerima pesan-pesan lingkungan jika yang menyampaikan pesan-pesan tersebut adalah anggota MPU. Anggota MPU Aceh merupakan para ulama yang diakui secara resmi dalam aturan Qanun pada sistem pemerintahan di Aceh (Haris, Kesekretariatan MPU, Wawancara, 25 April 2024).

Pembacaan atas strategi dakwah lingkungan itu, juga berlaku di beberapa tempat dan organisasi lain. Ahsan Jamet, aktivis Eco-Bhinneka Muhammadiyah, menyebutkan bahwa karena agama sangat penting bagi masyarakat Indonesia, maka strategi yang mereka gunakan adalah pertama-tama mendekati ulama atau para pemangku organisasi keagamaan, untuk mengkampanyekan Green Islam. Jamet menerangkan

bahwa strategi ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam persoalan lingkungan (Ahsan Jamet, Eco-Bhineka Muhammadiyah, FGD, 20-22 Februari 2024).

Mengingat pentingnya pemberdayaan tokoh agama dalam kampanye lingkungan ini, LDII Yogyakarta bahkan meresmikan strategi ini sebagai sebuah gerakan resmi dengan sebutan “Kiai Peduli Sampah”. Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, menyatakan bahwa mereka melakukan pendekatan dengan cara melobi para kiai di masjid untuk menggerakkan masjid-masjid yang mana pelaksana gerakannya adalah para remaja masjid. Gerakan ini, menurut Atus Syahbudin, termasuk implementasi dari ajaran agama yang menyebut manusia sebagai khalifah di muka bumi dan karenanya pelaksanaannya dapat terhitung sebagai amal ibadah (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, FGD, 6 Maret 2024). LDII merupakan salah satu organisasi berbasis Islam di Indonesia dengan tipologi pengkampanye kebijakan. Green Islam dalam konteks LDII secara teguh memegang ajaran agama Islam, khususnya dalam menjaga lingkungan. Mereka mempertimbangkan segala aspek dalam agama Islam, baik secara akidah (keyakinan), ibadah, akhlak (etika), dan muamalah, sebagai spirit mereka untuk bergerak dalam aksi lingkungan (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, FGD, 6 Maret 2024).

Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA) merupakan organisasi lingkungan yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam di Aceh. Meski bukan organisasi Islam, HAKA juga menggunakan strategi yang sama sebagaimana LDII. Mereka melakukan pendekatan terhadap ulama, untuk kemudian bekerja sama dalam mengkampanyekan Green Islam. Semula fokus utama HAKA adalah pada aktivitas ilegal di kawasan hutan, terutama Kawasan Ekosistem Leuser (KEL). Contohnya adalah kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh PT Kallista Alam. Dalam perkembangannya HAKA kemudian juga menerapkan strategi pemberdayaan ulama.

Munira Rezkina menyebutkan bahwa strategi ini digunakan atas identifikasi sumber daya masyarakat lokal Aceh. Lebih lanjut, HAKA memanfaatkan potensi lokal, seperti adanya pesantren (dayah) dan peran ulama, untuk menyebarkan kesadaran atas perlindungan lingkungan. Selain itu, Rezkina juga mengatakan bahwa isu lingkungan bukanlah hal yang umum di kalangan masyarakat Aceh termasuk mengenai Green Islam. “Seperti yang kita tahu, banyak ceramah (Islam)

yang belum menyentuh tema-tema lingkungan.” (Munira Rezkina, legal officer Yayasan HAKA, Wawancara, 24 April 2024).

Keterlibatan HAKA dalam Green Islam setidaknya terlihat ketika mereka memberi dukungan atas Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perspektif Syariat Islam. Keterlibatan mereka terlihat kuat dalam Green Islam, terutama saat mereka membangun hubungan kerja sama dengan Teungku Inong dan Teungku Agam (ulama perempuan dan ulama laki-laki), sebagai upaya mereka mengarusutamakan lingkungan di Aceh. Akhirnya, HAKA memiliki jejaring Teungku Inong dan Teungku Agam yang masing-masing mereka memiliki pengikut di seluruh kabupaten di Aceh. Mereka mengungkapkan bahwa penerapan strategi ini merupakan perencanaan yang memang telah disusun oleh HAKA (Raja, legal officer Yayasan HAKA, Wawancara, 24 April 2024).

Di Maluku, sebagai sebuah perbandingan, Komunitas Save Ake Gaale juga menyadari kuatnya unsur agama dan kearifan lokal bagi konstituen mereka, dan karenanya, mereka sering kali menggunakan ritual-ritual agama serta melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat dalam program-program pelestarian lingkungan, utamanya dalam persoalan air. Sebagaimana masyarakat Aceh, masyarakat Maluku juga lebih mudah menerima pesan-pesan tentang lingkungan jika disampaikan oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat dibanding misalnya institusi formal seperti pemerintah (Alwan Arief, Ketua Komunitas Save Akee Gaale, FGD, 6-8 Maret 2024).

Di Sulawesi, para ulama juga kerap melakukan dakwah lingkungan. Yayasan Hadji Kalla melakukan kerja sama dengan Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa untuk mengkampanyekan Green Islam melalui para pendakwah. Direktur Pesantren Muhammad Alimuddin Usman menyatakan bahwa sejak adanya intervensi dari Yayasan Hadji Kalla, mulai muncul diskusi tentang lingkungan. Sapril, aktivis Yayasan Hadji Kalla, menyarankan kepada Alimuddin agar memasukkan lingkungan ke dalam materi dakwah pesantren. Sehingga mimbar dakwah yang mulanya lebih banyak bicara tentang “surga dan neraka” berubah menjadi bicara tentang lingkungan (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, Wawancara, 27 April, 2024).

Pada momen-momen hari besar Islam seperti hari Jumat dan hari raya, Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah berfungsi sebagai pusat

pelayanan khotbah. Muhammad Alimuddin Usman menyatakan bahwa kegiatan layanan dakwah dan kegiatan keagamaan masyarakat berpusat di pondok pesantrennya untuk melayani masyarakat, terutama kelompok tani dan pegawai (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, Wawancara, 27 April, 2024). Pesantren ini memberi tugas kepada para pendakwah, untuk menjadikan lingkungan sebagai tema ceramahnya dengan berlandaskan teks-teks suci Islam. Selain itu, pihak pesantren juga berusaha menyusun kurikulum pelatihan dan pengembangan wawasan bagi para pendakwah yang bertugas melayani keagamaan. Terdapat sekitar empat puluh pendakwah yang sedang dibina, serta hampir seratus kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan keagamaan di wilayah tersebut (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, Wawancara, 27 April, 2024).

AgriQuran dan EcoDeen menggunakan strategi pemberdayaan ulama ini dengan target yang lebih spesifik yaitu para anak muda. Rissa Ozalifia, Ketua Komunitas EcoDeen, menjelaskan bahwa mereka bekerja sama dengan ulama, untuk mengingatkan masyarakat khususnya anak muda tentang bahaya dan konsekuensi agama apa yang mereka dapatkan jika merusak lingkungan (Rissa Ozalifia, EcoDeen ID, FGD, 20-22 Februari, 2024). AgriQuran juga bekerja sama dengan pemuka agama melalui pendekatan dan interaksi dengan berbagai lembaga pendidikan dan kelompok keagamaan. Tidak hanya dengan lembaga formal Islam seperti pesantren dan sekolah Islam terpadu, AgriQuran juga melakukan interaksi dengan majelis taklim ibu-ibu serta pengajian anak muda dari berbagai aliran, seperti jamaah tabligh, salafi, dan tarbiyah. Perluasan jaringan AgriQuran ini memungkinkan mereka untuk dapat mengundang partisipan yang lebih besar.

Interfaith Rainforest Initiative (IRI), yang merupakan organisasi aliansi antar-iman, juga memberdayakan pemuka-pemuka dari setiap agama di Indonesia namun dengan tujuan yang berbeda. Mereka bekerja sama dengan pemuka agama untuk berdialog dengan pengusaha. Tujuan dialog ini adalah untuk mendorong pengusaha agar mengadopsi pola pikir bisnis yang berkelanjutan. Aktivis IRI yang juga merupakan seorang pendeta, Jimmy Marcos Immanuel Sormin, menyatakan bahwa dirinya bersama pemuka-pemuka agama lainnya berinteraksi dengan pengusaha untuk terbuka terhadap pola pikir bisnis berkelanjutan yang tidak eksploitatif terhadap alam. IRI memandang para pemuka agama dapat

mengarahkan atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan tertentu dengan memberi saran-saran kepada pihak yang memiliki otoritas seperti pengusaha. IRI menggunakan strategi pemberdayaan pemuka agama ini di berbagai wilayah, seperti Kalimantan Timur dan Riau (Jimmy Marcos Immanuel Sormin, Interfaith Rainforest Initiative, FGD, 6-8 Maret 2024).

Jimmy menjelaskan bahwa setiap keputusan dari pembuat kebijakan atau pengusaha bergantung pada moralitas yang mereka miliki, sementara itu para pemuka agama dapat secara signifikan mempengaruhi moralitas tersebut. Karenanya, berbeda dengan organisasi-organisasi lain yang menggunakan strategi pemberdayaan pemuka agama untuk mempengaruhi etika lingkungan masyarakat, IRI justru memfokuskan para pemangku agama untuk mempengaruhi etika lingkungan pihak-pihak yang mereka nilai memiliki otoritas dalam membuat kebijakan (Jimmy Marcos Immanuel Sormin, Interfaith Rainforest Initiative, FGD, 6-8 Maret 2024). Pendeknya, para pemuka agama seperti ulama bukan hanya berpengaruh pada masyarakat umum, tetapi juga pada korporasi dan pemerintah.

5.2.3 Pemberdayaan Ulama Perempuan

Ulama perempuan berperan penting dalam gerakan Green Islam di Indonesia, sebab ulama perempuan memiliki kemampuan dalam membentuk identitas kolektif perempuan, dalam menjaga dan merawat lingkungan. Beberapa studi gerakan sosial (Wickham 2012; Clark 2012) memperlihatkan bahwa gerakan yang diinisiasi oleh perempuan akan berhasil bilamana gerakan tersebut dapat menjadi wadah peningkatan kualitas diri bagi perempuan di luar rumah serta bahwa gerakan tersebut tidak mengancam tatanan sosial dan politik di masyarakat tersebut. Keberhasilan HAKA dalam menginisiasi sub-kelompok sosial baru bersama Teungku Inong terletak pada bahwa HAKA dapat memfasilitasi dan memberi pengetahuan baru tentang lingkungan bagi Teungku Inong. Selain itu, gerakan mereka juga tidak bertentangan atau melawan tatanan hukum Islam di Aceh.

Sebelum berkolaborasi dengan Teungku Inong, HAKA merupakan organisasi lingkungan non-agama, yang telah memiliki berbagai pengalaman dalam memberdayakan perempuan dalam aktivisme lingkungan. Beberapa contohnya, misalnya, HAKA melibatkan perempuan dari kalangan akar rumput menjadi paralegal dan memberikan pelatihan jurnalisme warga bagi penduduk sekitar Kawasan

Ekosistem Leuser. Selain itu, HAKA juga merupakan organisasi yang memberi pendampingan pada Perempuan Pembela Sumber Daya Alam (PPSDA), yaitu ibu-ibu yang bertugas menjaga hutan dari kegiatan ilegal (Munira Rezkina, legal officer Yayasan HAKA, Wawancara, 24 April 2024).

Bersama Teungku Inong, HAKA melakukan kolaborasi untuk mengkampanyekan Green Islam melalui dakwah-dakwah Islam. Salah satu hasil dari kolaborasi tersebut adalah modul dakwah perlindungan satwa liar bagi pemuka agama Islam di Aceh. Modul ini menjadi rujukan bagi pengelola pesantren atau para pendakwah dalam menyampaikan tema-tema lingkungan dalam ceramah atau khotbah-khotbah mereka (Masyita Alzeyra, Teungku Inong Aceh, Wawancara, 26 April 2024).

Teungku Inong merupakan para ulama perempuan Aceh yang terhubung dalam jejaring sosial informal di mana tidak terdapat keanggotaan formal di dalamnya. Perempuan yang biasanya disebut Teungku Inong adalah mereka yang memiliki dayah (pesantren), majelis taklim, atau pengajian yang mengajarkan “alif ba ta” di kampung-kampung di Aceh (Masyita Alzeyra, Teungku Inong Aceh, Wawancara, 26 April 2024). Karena itu, Teungku Inong memiliki akar yang kuat dalam struktur masyarakat Aceh, dan sebagai suatu jejaring sosial, mereka menyediakan institusi ideal bagi gerakan lingkungan HAKA.

Menyadari hal tersebut, HAKA dengan bantuan jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Aceh, secara selektif memilih Teungku Inong yang menjadi perwakilan kabupaten-kabupaten di Aceh untuk diundang dalam suatu pelatihan dan pembekalan tentang lingkungan (Munira Rezkina, legal officer Yayasan HAKA, Wawancara, 24 April 2024). Dengan bekal pelatihan tersebut, para Teungku Inong mengkampanyekan Green Islam kepada konstituen di daerah masing-masing. “Setiap daerah diundang. Dulu saya mewakili Aceh Timur. Apa yang saya dapatkan di pelatihan, saya sampaikan juga ke *umi-umi* (istri para ulama) di Aceh Timur untuk disampaikan lagi dalam pengajian masing-masing. Dalam masyarakat Aceh, meski terkadang suatu ajaran belum maksimal mereka kerjakan, namun ajaran itu tidak akan mereka ingkarkan” (Masyita Alzeyra, Teungku Inong Aceh, Wawancara, 26 April 2024).

Karenanya, proses pelibatan atau kolaborasi dengan Teungku Inong dalam aksi-aksi lingkungan HAKA merupakan upaya sadar aktivis HAKA, mengingat Teungku Inong tumbuh dari akar struktural masyarakat Aceh yang cenderung Islami. Memang, para sarjana gerakan sosial umumnya

memahami bahwa jaringan asosiasi berperan penting pada tahap rekrutmen: “individu-individu tertarik berpartisipasi bukan karena kekuatan gagasan atau sikap individu, melainkan akar mereka dalam jaringan-jaringan asosiasi yang menjadikan mereka secara struktural tersedia bagi aktivitas gerakan” (McAdam 1994). Namun, proses rekrutmen tidak terjadi semata-mata melalui ketersediaan struktural atau kesamaan ideologis dengan nilai-nilai gerakan, melainkan juga melalui upaya sadar para aktivis gerakan untuk secara selektif mencari target calon anggota dalam jejaring sosial yang bersimpati (Clark 2012).

Sebagai penyampai pesan-pesan lingkungan antara HAKA yang merupakan organisasi lingkungan non-agama dengan publik Islam Aceh, Teungku Inong menjadi perantara ideal, karena beberapa hal. Pertama, sebagai ulama perempuan yang memiliki perkumpulan sosial, baik dalam bentuk pesantren, pengajian, atau tempat belajar mengaji, Teungku Inong memungkinkan nilai-nilai lingkungan HAKA menyebar hingga ke perkampungan-perkampungan di Aceh. Kedua, perkumpulan sosial yang dimiliki Teungku Inong tersebut memiliki potensi mobilisasi yang “siap” karena konstituen Teungku Inong, yang merupakan perempuan-perempuan yang religius dan cenderung patuh terhadap guru-guru mereka.

Di Aceh, oleh karenanya, rantai pesan-pesan dakwah lingkungan saling berkelindan dan bersinggungan. Para ulama perempuan menyampaikan dakwah-dakwah lingkungan dalam lingkaran-lingkaran sosial seperti pesantren, forum pengajian, hingga majelis belajar mengaji. Melalui rantai ini, HAKA mengkampanyekan Green Islam dan menjangkau banyak perempuan melalui berbagai perkumpulan. Dengan kata lain, dengan konstituennya masing-masing, Teungku Inong menyediakan bagi HAKA sesuatu yang dalam istilah gerakan sosial sebagai proses pengenalan tidak langsung atau rekrutmen tidak langsung ke suatu gerakan sosial (Clark 2012). Dalam konteks ini, Teungku Inonglah yang melakukan rekrutmen tidak langsung tersebut kepada jemaah di perkumpulan sosial masing-masing ke gerakan lingkungan HAKA. Proses rekrutmen tidak langsung ini terjadi ketika para perempuan dalam jemaah Teungku Inong berpartisipasi dalam menjaga dan merawat lingkungan di kawasan Aceh. Oleh karena itu, melalui aktivitas-aktivitas Teungku Inong, HAKA sekaligus terlibat dalam aktivitas dakwah ulama perempuan Aceh.

Alzeyra menjelaskan bahwa HAKA membawa perspektif lingkungan yang memberinya cara pandang berbeda ketika melihat Islam dan lingkungan. Menurutnya, selama ini terdapat banyak ajaran dalam Islam yang umum diajarkan namun kurang ditafsirkan dari sudut pandang lingkungan. Misalnya, ajaran tentang amal jariyah: “Amal jariyah bukan hanya membangun masjid. Perilaku sederhana seperti menanam pohon juga termasuk amal jariyah,” ungkapnya (Masyita Alzeyra, Teungku Inong Aceh, Wawancara, 26 April 2024). Dengan nilai-nilai semacam itu, Para Teungku Inong yang semula berfokus pada aspek keagamaan saja perlahan terlibat dalam aksi-aksi lingkungan HAKA. Sebaliknya, HAKA yang semula berfokus pada aspek lingkungan saja, perlahan terlibat dalam dakwah-dakwah Teungku Inong. Dalam hal inilah, hubungan yang membentuk kelompok atau sub-sub-kelompok baru terjalin oleh pemahaman dan komitmen bersama.

Hubungan yang baru terbentuk ini diperkuat bukan hanya oleh kepuasan bekerja bersama demi merawat lingkungan, melainkan juga oleh berbagai macam keuntungan yang didapatkan bagi kaum perempuan. Aktivitas-aktivitas HAKA dan Teungku Inong, mencakup berbagai fungsi seperti aktivitas dakwah, membuat modul dakwah, mengorganisasi acara-acara formal tentang lingkungan, terlibat dalam gerakan-gerakan lingkungan, dan dengan hal itu memberi perempuan berbagai keahlian yang lebih luas. Semua itu memberi kaum perempuan, baik dari sisi HAKA maupun Teungku Inong, pengetahuan-pengetahuan baru serta gerakan-gerakan baru yang berbeda dengan lingkup fokus gerakan mereka sebelumnya. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan peningkatan kualitas diri perempuan yang pada akhirnya memberi perempuan suatu peran khusus dalam aktivisme lingkungan berbasis agama.

Meski demikian, gerakan Green Islam perempuan ini tetap konsisten dengan norma-norma budaya Islam Aceh yang dominan. Sebagai contoh, dalam dakwahnya para Teungku Inong tidak menargetkan kaum laki-laki dan hanya melakukan dakwah Green Islam kepada para jemaah perempuan saja, dan karena itu hal ini tidak bertentangan norma-norma sosial masyarakat Aceh yang tidak banyak memberi ruang terhadap perempuan (Husna 2018). Masyita Alzeyra menjelaskan bahwa Teungku Agam (ulama laki-laki) boleh menyampaikan dakwah kepada laki-laki dan perempuan, sementara Teungku Inong hanya kepada kaum perempuan saja.

Tepat di sini pentingnya gerakan Green Islam HAKA dan Teungku Inong. Gerakan-gerakan mereka tidak berupaya melawan ataupun bertentangan dengan norma-norma budaya dalam masyarakat Aceh. Lebih jauh, gerakan Green Islam HAKA dan Teungku Inong lebih dipandang sebagai dakwah dan bukan sebagai kerja-kerja politik, dalam artian memiliki pengaruh hanya sebatas pada perubahan perilaku lingkungan masyarakat. Dalam suatu masyarakat dengan hukum Islam yang kuat seperti Aceh, kesempatan perempuan untuk terlibat dalam politik dan peran publik perempuan di luar mimbar ceramah relatif terbatas karena persepsi masyarakat mengenai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan cenderung bias ke arah membatasi peran perempuan pada urusan rumah tangga (Husna 2018), dan pada akhirnya membuat perempuan Aceh menarik diri dari partisipasi politik terbuka. Karakter gerakan yang tidak mengancam tatanan sosial dan politik dari aktivisme Green Islam oleh Teungku Inong dan HAKA dengan strategi pelibatan perempuan menjadikan gerakan mereka dapat secara efektif melakukan perubahan sosial, sebagaimana karakter gerakan yang juga dapat dilihat dalam gerakan sosial di Mesir (Wickham 2012) dan di Yaman (Clark 2012).

Keberhasilan HAKA dalam melibatkan Teungku Inong dalam gerakan lingkungan mereka, dengan demikian bersandar pada pemenuhan dakwah Teungku Inong dan solidaritas bersama di kalangan perempuan dalam merawat lingkungan. Kunci keberhasilan gerakan kolaborasi mereka terletak pada bahwa gerakan mereka berakar kuat dalam struktur sosial kehidupan keagamaan di Aceh seraya membentuk kembali struktur sosial tersebut dengan visi Green Islam mereka.

5.2.4 Pemanfaatan Momen-Momen Penting dalam Kalender Islam

Strategi Green Islam banyak yang memanfaatkan momen-momen penting dalam kalender Islam untuk menggalang dukungan bagi program-program lingkungan mereka. Contohnya adalah kampanye digital “buka puasa tanpa plastik” Umah for Earth pada bulan Ramadan 2023. Kampanye ini bertujuan untuk menyadarkan anak-anak muda Muslim akan pentingnya menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan alat makan berbahan plastik saat berbuka puasa (Maftuchah Nugrahaini, Ummah for Earth, FGD, 20 Februari, 2024).

Aisyiyah juga secara rutin mengadakan program lingkungan dengan memanfaatkan momen-momen penting dalam kalender Islam seperti “Green Ramadan” dan “Green Idul Fitri”. Program-program tersebut mengajak umat Muslim untuk belajar mendidik diri dengan mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan (*green lifestyle*) (Amalia Nur Milla dan Yana Fajar FY. Basori 2024). Semua program tersebut melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik lembaga donor maupun komunitas lokal (Surria Dwiwahyu, LLHPB ‘Aisyiyah, FGD, 20-22 Februari 2024).

Selain melalui momentum besar Islam seperti Ramadan, beberapa organisasi juga memanfaatkan momentum hari Jumat untuk melakukan kampanye lingkungan. Misalnya, beberapa organisasi dengan para tokoh agama melakukan kampanye melalui mimbar khotbah. NU dan Muhammadiyah yang memiliki banyak sumberdaya tokoh agama merupakan organisasi yang memaksimalkan program semacam ini. Dua organisasi tersebut kini bahkan tengah bekerja bersama dalam Joint Initiative for Strategic Religious Action (JISRA), di mana salah satu isu utamanya adalah membentuk modul dakwah dalam persoalan iklim dan lingkungan, yang dapat digunakan dalam khotbah di hari Jumat (Hening Parlan, Wawancara, 2024). Di sisi lain, MUI juga beberapa kali telah merilis naskah khotbah Jumat dengan tema lingkungan.

Selain melalui mimbar dakwah Jumat, momentum hari Jumat juga dimanfaatkan untuk kampanye Green Islam melalui media sosial. Greenpeace, misalnya, rutin melakukan kampanye Green Islam di setiap hari Jumat (Maftuchah Nugrahaini, Ummah for Earth, FGD, 20 Februari, 2024). Kampanye tersebut dilakukan dalam berbagai jenis unggahan, yang berisi mengenai nilai-nilai Islam dalam memandang lingkungan. Misalnya, unggahan *feed* di akun Instagram Greenpeace yang berisi penggalan video kajian Ummah for Earth oleh Muhim Nailul Ulya (Ustazah Ummah for Earth). Dalam postingan tersebut, Muhim Nailul Ulya menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menghadapi krisis iklim. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa perempuan seharusnya memberikan pendidikan kepada anggota keluarganya agar lebih peka dan peduli terhadap krisis iklim.

5.2.5 Aksi Lingkungan Berdasarkan Ajaran Islam

Tidak semua organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam di Indonesia menggunakan istilah-istilah



yang berkonotasi Islam dalam menjalankan program-programnya. Beberapa organisasi Green Islam menjalankan programnya dengan tanpa identitas agama, sebagaimana organisasi lingkungan non-agama. Aktivisme Green Islam dengan pola program kerja semacam ini, meski tidak menggunakan istilah berkonotasi Islam secara eksplisit, tetap menggunakan identitas Islam dengan mendasarkan program-program itu pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari teks-teks suci Islam yang sejalan dengan kampanye lingkungan mereka. Dengan kata lain, kelompok Green Islam juga berupaya melakukan mekanisme diferensiasi atau upaya untuk membedakan diri dari program-program kerja gerakan lingkungan lainnya.

MDMC Muhammadiyah sering kali terlihat menjalankan program dengan pola semacam ini. Program MDMC seperti “Satuan Pendidikan Aman Bencana” atau beberapa program Aisyiyah seperti penanaman mangrove, penghijauan, pembentukan komposter, dan program pola asuh tanam, juga tidak menggunakan identitas Islam. Selain MDMC, hal tersebut juga dapat dilihat dalam program-program MLH. Misalnya, program-program energi terbarukan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan, seperti *plastic pay*, yang dijadikan MLH sebagai program untuk mengurangi dan memulihkan kerusakan lingkungan. Sekilas, program-program tersebut boleh jadi terlihat seperti program-program lingkungan non-agama umumnya, dengan tanpa identitas atau simbol agama sama sekali. Meski demikian, masing-masing organisasi tersebut menyebut menjadikan agama sebagai panduan dan nilai-nilai dalam menjalankan program tersebut (FGD, 20-22 Februari 2024; FGD, 6-8 Maret 2024).

Sebagaimana beberapa program Muhammadiyah, Clean the City (CTC) juga menerapkan pola program kerja yang serupa. Abdul Ghani Setiawan, Pembina CTC, menjelaskan bahwa mereka membentuk organisasi Clean The City sesuai dengan prinsip ajaran Islam, yang menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Salah satu dari sekian banyak perbuatan baik tersebut adalah bersih-bersih lingkungan dengan sukarela (Ganny Setiawan, CTC, FGD, 20-22 Februari 2024). Dalam konteks ini, Abdul Ghani Setiawan mengutip Alquran (Surat Al-Isra’ ayat 7), yang menekankan pentingnya perbuatan baik untuk program yang mereka lakukan. Dengan demikian, meski program-program semacam ini terlihat seperti program lingkungan non-agama, organisasi-organisasi

Green Islam selalu mendasarkan diri pada ajaran agamanya. Dalam konteksnya sebagai gerakan, hal tersebut merupakan salah satu mekanisme untuk membedakan diri dengan kelompok gerakan lingkungan lainnya.

5.3 Integrasi Ajaran Islam dalam Aktivisme Green Islam Lainnya

5.3.1 Pelatihan Masyarakat

Sebagian organisasi Green Islam cenderung menggunakan strategi pelatihan atau edukasi mengenai Islam dan lingkungan untuk menanamkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dalam studi gerakan sosial, pendidikan merupakan salah satu ruang kesempatan yang dapat mengubah kebiasaan individu dan hubungan-hubungan sosial (Yavuz 2012). Pelatihan dan edukasi dalam beberapa organisasi Green Islam, seperti Muhammadiyah dan MOSAIC, cenderung mengarah pada pembentukan etika masyarakat untuk secara langsung dapat menjaga lingkungan. Sementara beberapa lainnya, seperti Salam Institute dan FNKSDA, cenderung mengarah pada pembentukan kesadaran masyarakat tentang sebab kerusakan lingkungan yang secara sistemik disebabkan industri ekstraktif.

Muhammadiyah, dengan badan-badan lingkungan yang secara struktural berada di bawah payung organisasinya, tampak cukup masif melakukan strategi pembentukan etika masyarakat ini. Pelatihan dan edukasi masyarakat dalam Muhammadiyah terdiri dari banyak lini. Dalam hal dakwah misalnya, terdapat pelatihan di lingkungan MLH yang melibatkan masyarakat umum untuk menjadi petugas dakwah. Pelatihan mereka disebut Pelatihan Mubalighat Lingkungan (Djihadul Mubarak, MLH, FGD, 20-22 Februari 2024).

Dalam hal kebencanaan, terdapat MDMC yang mengadakan berbagai pelatihan dengan fokus utama pada mitigasi bencana. Mereka menyelenggarakan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah sebagai upaya awal untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya lingkungan dan tindakan pra-bencana. Di daerah rawan bencana seperti Demak, mereka mengedukasi masyarakat mengenai penyebab banjir, menunjukkan bahwa masalah lingkungan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan (Budi Setiawan, FGD, 20-22 Februari 2024). Dalam hal pendidikan, terdapat Aisyiyah yang telah melakukan edukasi lingkungan, seperti program sekolah hijau (*green*



school) bahkan dari tingkat taman kanak-kanak di sekolah-sekolah yang terafiliasi dengan Muhammadiyah. Selain itu, Aisyiah juga melakukan pendidikan pada ibu-ibu Muhammadiyah untuk melahirkan pendakwah perempuan yang dapat menyampaikan ceramah-ceramah mengenai lingkungan (Surria Dwiwahyu, LLHPB 'Aisyiah, FGD, 20-22 Februari 2024)).

MOSAIC, sebagai organisasi yang memiliki hubungan yang erat dengan Muhammadiyah, juga tampak menerapkan strategi serupa. Fokus pada isu iklim, MOSAIC sering menginisiasi pelatihan untuk anak muda dengan tujuan mencetak pemimpin-pemimpin muda yang peka terhadap mitigasi kerusakan iklim melalui program bernama Bengkel Hijrah Iklim. Strategi MOSAIC melibatkan penggunaan ajaran agama sebagai panduan dalam menyusun program-program mereka. Seperti Muhammadiyah, mereka mencoba mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam aksi-aksi lingkungan mereka. Mereka mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan konteks keagamaan untuk mencapai tujuan lingkungan mereka. Gatot Supangkat, Dewan Pengarah MOSAIC yang juga Wakil Ketua MLH Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa perilaku tergantung pada pola pikir, dan cara mengubah pola pikir adalah melalui pendidikan yang sifatnya konseptual dan praktis. Program Bengkel Hijrah di MOSAIC adalah contoh peningkatan kapasitas melalui pendidikan tersebut (Gatot Supangkat, Dewan Pengarah MOSAIC, FGD, 6-8 Maret 2024).

Salam Institute juga melakukan pelatihan dan edukasi namun dengan tujuan dan target yang berbeda. Jika organisasi-organisasi di atas cenderung melatih publik dengan target mengubah etika, Salam Institute cenderung menargetkan kesadaran publik tentang kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh industrialisasi. Di Desa Ambulu dan Tawang Sari, Salam Institute memiliki program yang bernama Kampung Daulat Pesisir (KDP) yang merupakan hasil rencana tindak lanjut Pelatihan Pesantren Ekologi. Pesantren ekologi merupakan pelatihan yang diinisiasi Salam Institute yang membingkai ajaran Islam, gerakan-gerakan perlawanan, dengan persoalan-persoalan lingkungan. Pelatihan ini merupakan strategi Salam Institute yang bertujuan untuk memahami dan mengatasi kerusakan lingkungan. Syatori menjelaskan bahwa pesantren ekologi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk memahami masalah lingkungan. Menurutnya, pesantren ekologi ini menjadi ikon bagi mereka untuk menunjukkan bahwa masalah lingkungan sangat erat kaitannya

dengan isu-isu keagamaan (Ahmad Syatori, Salam Institute, FGD, 20-22 Februari 2024).

Peserta pesantren ekologi cenderung merupakan masyarakat yang telah terdampak atau yang daerah-daerahnya terancam industrialisasi. Salah seorang kader dari pelatihan ini misalnya adalah Ridwan yang merupakan nelayan di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Cirebon. Ridwan menyebutkan bahwa sudah sejak lama beberapa industri ingin mendirikan perusahaan di Desa Ambulu. Namun ia beserta beberapa koleganya menolak perusahaan-perusahaan yang mendapat dukungan pemerintah setempat. Menurutnya, industrialisasi akan memberi dampak kerusakan lingkungan, dan nelayan merupakan sektor yang paling dirugikan (Ridwan, Kader Pesantren Ekologi Salam Institute, Wawancara, 23 April, 2024)

Menurut Syatori, pelatihan pesantren ekologi yang meliputi pembekalan teori dan praktik lapangan adalah contoh nyata dari upaya mereka untuk mendidik dan memberdayakan masyarakat. Syatori menggambarkan bahwa dalam pesantren ekologi terdapat pembekalan selama tiga hari yang mencakup banyak teori dan materi. Fokus utama pembekalan ini adalah pada fikih lingkungan, yang menyoroti bagaimana agama mendekati dan memahami isu-isu lingkungan serta kaitannya dengan kondisi ekonomi politik. Singkatnya, problem lingkungan tidak bisa dilepaskan dari sudut pandang ekonomi politik (Ahmad Syatori, Salam Institute, FGD, 20-22 Februari 2024). Dengan memperkuat pemahaman dan keterampilan masyarakat, terutama terkait dampak industrialisasi, Salam Institute berharap dapat menciptakan agen perubahan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Syatori juga menjelaskan bahwa tindakan mereka adalah bagian dari pelaksanaan akidah Islam yang lebih berpihak pada mereka yang lemah dan dilemahkan (Ahmad Syatori, Salam Institute, FGD, 20-22 Februari 2024).

5.3.2 Mobilisasi Masyarakat Terdampak

Strategi lain yang cukup banyak terlihat dalam aktivisme Green Islam dalam mengatasi masalah lingkungan adalah penggunaan identitas agama sebagai landasan etika dalam mobilisasi masyarakat, khususnya mereka yang dianggap sebagai kelompok yang tereksplorasi atau terdampak oleh kebijakan pemerintah atau aksi korporasi. Studi ini memperlihatkan bahwa organisasi-organisasi dengan tipologi mobilisator, seperti Salam Institute dan FNKSDA, cenderung

menggunakan strategi ini. Mereka menggunakan kesamaan identitas agama dan mengasosiasikan diri dengan kelompok terdampak sebagai dasar bagi gerakan kolektif mereka.

Menurut Benjamin Smith (2012), dalam studi gerakan sosial, bingkai “kita” dan “mereka”, kaum yang lemah dan kuat, atau dalam konteks ini kaum yang tereksplorasi dan yang mengeksplorasi, dapat membentuk “kita” kolektif yang berpotensi untuk mobilisasi aksi (Smith 2012). Perasaan identitas kolektif yang kuat semacam ini memunculkan rasa solidaritas di kalangan orang-orang yang berpikiran sama dan menjadi lebih erat melalui bingkai-bingkai ideologis, pendidikan, budaya, politik, atau sosial (Singerman 2012).

Syatori dari Salam Institute menekankan bahwa “tugas agama mengingatkan bahwa alam ini tidak bisa dieksplorasi terus-menerus. Ia ada batasnya, ada daya dukungnya. Ketika kemudian terus-terusan dieksplorasi maka akan terjadi bencana.” (Ahmad Syatori, Salam Institute, FGD, 20-22 Februari 2024). Dengan menggunakan pendekatan ini, Syatori mencoba menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kewajiban keagamaan.

Salam Institute menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk membangun kesadaran dan memotivasi partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan. Mereka secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat lokal untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka terkait lingkungan mereka. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui pesantren ekologi, di mana mereka turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Dengan mendampingi masyarakat dalam memulihkan lahan yang terdampak, Salam Institute tidak hanya menunjukkan komitmen mereka terhadap lingkungan tetapi juga membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal untuk memperkuat suara mereka dalam advokasi dan pembelaan lingkungan. Hubungan ini merupakan strategi yang dilakukan secara sadar dan terencana dari Salam Institute, mengingat beberapa industri di daerah Cirebon kerap merebut lahan milik masyarakat. Syatori menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah mengadvokasi sekitar 25 hektar lahan yang dieksplorasi dan direbut dari masyarakat. Meski begitu, ia menjelaskan, terdapat beberapa kendala seperti adanya oknum masyarakat yang telah menerima uang, persoalan calo, dan lain sebagainya. Mereka melakukan advokasi untuk memastikan bahwa semua permasalahan ini terselesaikan sehingga

lahan-lahan tersebut dapat dikembalikan kepada masyarakat (Ahmad Syatori, Salam Institute, FGD, 20-22 Februari 2024).

Latifah, Ketua Yayasan Salam Institute, menyebutkan bahwa Islam adalah agama yang peduli terhadap kaum yang lemah. Oleh karena itu, strategi-strategi dalam melaksanakan program kerja selalu melibatkan warga lokal, terutama mereka yang terdampak langsung atas kerusakan lingkungan akibat industrialisasi. Salam Institute misalnya menysasar anak-anak remaja dari komunitas sekitar untuk menyadarkan masalah lingkungan yang diakibatkan oleh PLTU dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Bersama koleganya di Salam Institute, Latifah membuat program sekolah alternatif di area tersebut sejak 10 tahun yang lalu (2014) (Latifah, Ketua Yayasan Salam Institute, Wawancara, 23 April, 2024).

Sementara itu, Nafisah dari FNKSDA Yogyakarta menjelaskan bahwa strategi advokasi masyarakat terdampak juga dilakukan oleh organisasi mereka. Menurutnya, banyak krisis sosial-ekologis yang terjadi dengan warga Nahdlatul Ulama (NU) sebagai pihak yang paling terdampak. Warga NU, yang mayoritas dari kalangan menengah ke bawah, rentan terhadap berbagai dampak dari konflik sosio-ekologis, konflik agraria, dan sejenisnya (Nafisatul Khoidah, FNKSDA, FGD, 6-8 Maret, 2024).

FNKSDA telah mendirikan cabang di beberapa kota atau kabupaten di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan komunitas pedesaan yang hidup di daerah konflik atau mengalami kerusakan lingkungan. Di Desa Pakel, Jawa Timur, FNKSDA bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menggalang dukungan dalam menyelesaikan konflik agraria antara petani lokal dan perusahaan perkebunan.

Meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai tradisional teologi pembebasan NU, advokasi lingkungan dan iklim FNKSDA jauh lebih progresif dibandingkan dengan NU (Dewayanti, Aninda, dan Norshahril Saat 2020). Roy Murtadho (2019) memperlihatkan bahwa aktivis FNKSDA berfokus pada ekonomi-politik atas persoalan krisis sosial-ekologis. Mereka berupaya mempertahankan tanah dan air dari gangguan kapitalisme ekstraktif. Bentuk perlawanan ini adalah penetrasi gerakan progresif terhadap kapitalisme ekstraktif yang merusak lingkungan, sumber daya alam, serta mengakibatkan krisis sosial-ekologis. Meski demikian, selain nilai-nilai *Ahlussunnah Wal Jama'ah* NU, gerakan ini juga ditopang oleh nilai-nilai Islam progresif dengan alat

analisis sosial paradigma “Kiri” yang relatif dekat dengan gerakan-gerakan Marxisme (Murtadho 2019).

Karenanya, dalam persoalan lingkungan, FNKSDA berpandangan bahwa semua potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia mesti digunakan untuk kepentingan masyarakat, sementara pemerintah harus melindungi kepentingan tersebut. Demi menjaga kepentingan dan nilai-nilai tersebut, Koordinator Nasional FNKSDA 2022-2025, Ayu Rikza, menyiratkan bahwa FNKSDA cenderung tertutup untuk melakukan kerja sama dengan industri-industri ekstraktif (Ayu Rikza, FNKSDA, FGD, 7 Maret 2024).

5.3.3 Perluasan dan Pendalaman Jaringan Daring

Hampir semua organisasi Green Islam menggunakan jaringan daring sebagai medium untuk mengajak partisipasi publik. Sebagaimana yang disebutkan oleh Erick Clark (2012), selain untuk menarik dukungan dari eksternal organisasi seperti partisipasi publik yang lebih luas, jaringan daring bagi gerakan sosial dan aktivisme juga berfungsi untuk mempercepat pengambilan keputusan, serta menyebarkan informasi kepada anggota dengan cepat dan efektif dalam internal organisasi (Clark 2012).

Organisasi seperti Aisyiyah, misalnya, menggunakan jaringan daring untuk menjangkau anggota-anggotanya di tingkat wilayah dan cabang. Mereka mengadakan pertemuan secara daring dan menyampaikan tema-tema lingkungan kepada konstituen mereka, terutama ibu-ibu di suatu wilayah. Dengan begitu mereka dapat menyusun instruksi yang sesuai dengan sistem pelaksanaan di masing-masing wilayah (Surria Dwiwahyu, LLHPB ‘Aisyiyah, FGD, 20-22 Februari 2024). Oleh karenanya, Aisyiyah menitikberatkan pemanfaatan jaringan daring untuk kerja-kerja organisasi khususnya terkait dengan program-program lingkungan.

Sementara itu, organisasi-organisasi dengan tipe mobilisator seperti FNKSDA dan KHM menggunakan media sosial sebagai kampanye untuk menggalang dukungan dalam menyelesaikan konflik agraria di Desa Pakel, Jawa Timur. Mereka bekerja sama dengan komunitas pedesaan di daerah konflik tersebut untuk melakukan perlawanan terhadap PT Perkebunan dan Dagang Bumisari Maju Sukses. FNKSDA dan KHM menilai bahwa lahan warga Pakel diambil secara sepihak oleh perusahaan yang memicu konflik lahan tersebut. Dalam hal ini, FNKSDA

melakukan kampanye jaringan daring, seperti terlihat dalam unggahan akun Instagram mereka pada tanggal 11 maret 2024: “Kami menyerukan pada semua kawan untuk segera membentuk konsolidasi rakyat, mengecam PT. Bumi Sari yang tindakannya sudah lebih rendah dari binatang”.

Tidak seperti FNKSDA, AgriQuran, EcoDeen, dan Bumi Langit Permaculture menggunakan kampanye jaringan daring dengan target perbaikan perilaku masyarakat terhadap lingkungan. Di Indonesia, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim terutama dalam lingkup perkotaan sering kali memerlukan pendekatan agama modern selain mobilisasi massa (Dewayanti, Aninda, dan Saat 2020). EcoDeen dan AgriQuran merupakan organisasi yang melibatkan kelas menengah di lingkungan perkotaan Indonesia dalam isu-isu lingkungan dan pertanian berkelanjutan. Mereka dapat berinteraksi secara langsung dengan kelompok Muslim perkotaan yang mahir menggunakan media sosial dan memiliki identitas Islam modern yang kuat. Dalam gerakannya di media sosial, AgriQuran menjadikan ayat-ayat Alquran sebagai panduan untuk mengatasi masalah lingkungan serta menarik perhatian publik Islam (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024). Gerakan seperti ini serupa dengan gerakan jaringan daring #PemudaHijrah, sebuah gerakan untuk pemuda Muslim perkotaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesalehan Muslim dalam komunitas agama (Dewayanti, Aninda, dan Saat 2020).

M. Farras Muhadzib, aktivis lingkungan dari AgriQuran, menjelaskan bagaimana AgriQuran menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjangkau khalayak luas dan mempromosikan gerakan ramah lingkungan. Dia menyatakan bahwa mereka telah menginisiasi berbagai aktivitas di media sosial, dan saat ini akun Instagram mereka memiliki sekitar 47 ribu pengikut (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024). Dengan fokus pada anak-anak muda, AgriQuran juga memanfaatkan platform TikTok untuk memperluas jangkauan mereka. Dengan membuat konten-konten gaya hidup minimalis, mereka juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjual produk seperti pupuk organik (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024). Selain gerakan media sosial, AgriQuran juga menawarkan program-program kepada masyarakat luas seperti lokakarya, edukasi, dan jasa pembuatan kebun (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024).

Selain AgriQuran, EcoDeen juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kesadaran lingkungan di masyarakat urban Indonesia. EcoDeen menargetkan pemuda yang sudah peduli terhadap isu lingkungan tetapi belum sepenuhnya memahami hubungan antara menjaga lingkungan dan keimanan. Mereka mengaitkan isu lingkungan dengan ajaran agama dan melibatkan para ustad untuk menjelaskan manfaat menjaga lingkungan bagi kehidupan (Rissa Ozalifia, EcoDeen ID, FGD, 20-22 Februari, 2024).

Gerakan lingkungan EcoDeen juga menggunakan platform TikTok untuk menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda. “Akhirnya kita coba untuk menjangkau dan beruntungnya kita punya teman-teman Gen-Z yang memang paham dan sangat melek terhadap teknologi. Kita mencoba merambah juga di beberapa gerakan media sosialnya termasuk di TikTok” (Rissa Ozalifia, EcoDeen ID, FGD, 20-22 Februari, 2024). Selain kampanye dalam bentuk postingan, EcoDeen juga berfokus pada strategi seminar *online* (webinar). “Nah, terus pandemi terjadi dan ternyata memang arah gerak kita malah lebih banyak ke webinar. Jadi selama pandemi itu kita mengadakan beberapa kali *webinar series* yang didukung oleh Pak Hayu dari MUI dan juga dari PPI UNAS. Kita juga membuat diskusi *online ‘interfaith discussion’* yang berkaitan dengan lingkungan” (Rissa Ozalifia, EcoDeen ID, FGD, 20-22 Februari, 2024).

Strategi serupa juga dilakukan oleh Bumi Langit Permaculture Institute yang memiliki sekitar 60 ribu pengikut di Instagram. Bumi Langit telah melaksanakan lebih dari 25 angkatan Kursus Desain Permakultur (Permaculture Design Course – PDC), yang setiap angkatannya terdiri dari sekitar 20 peserta. Ini berarti mereka telah melatih antara 400 hingga 500 orang yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan termasuk peserta dari luar negeri (Iskandar Waworuntu, Bumi Langit Institute, FGD, 6-8 Maret 2024).

Menurut Iskandar, krisis lingkungan saat ini sangat erat kaitannya dengan krisis etika, terutama etika terhadap alam. “Mungkin kita bisa sepakat. Kita semua berada dalam sebuah masa krisis, ada sebuah krisis kehidupan dan bagi saya itu adalah krisis akhlak. Jadi kalau kita lihat keterkaitan dengan krisis akhlak tersebut tentu yang menjadi persoalan terutama akhlak kita kepada alam” (Iskandar Waworuntu, Bumi Langit Institute, FGD, 6-8 Maret 2024). Bumi Langit berusaha memulihkan hubungan sakral manusia dengan alam, yang menurut mereka telah terdegradasi di zaman modern ini.

Salah satu pendekatan utama Bumi Langit adalah mengajarkan praktik pertanian dan peternakan yang selaras dengan ajaran Islam. Waworuntu menyebutkan konsep “kebaikan” (*tayyib*) yang mengacu pada kehalalan dalam semua aspek kehidupan. Waworuntu mengatakan, “Jadi saya berangkat dari sebuah kekecewaan pada zaman, karena saya melihat tuntunan yang berada dalam agama yang saya tekuni yakni Islam, saya anggap begitu menyeluruh dan dalam terutama dalam konteks *tayyib* itu. Bagaimana kita menjadikan itu sesuatu yang aktual, bagaimana saya sebagai seorang Muslim menerjemahkannya dengan menjadi petani yang Islami, dengan menjadi peternak yang Islami” (Iskandar Waworuntu, Bumi Langit Institute, FGD, 6-8 Maret 2024).

AgriQuran, EcoDeen, dan Bumi Langit Permaculture Institute, melalui pendekatan berbasis nilai agama, pendidikan, dan pemanfaatan teknologi, menciptakan gerakan ramah lingkungan dalam media sosial. Dengan mempromosikan praktik dan perilaku lingkungan yang Islami, mereka tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan tetapi juga menguatkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan modern (Rissa Ozalifia, EcoDeen ID, FGD, 20-22 Februari, 2024; M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024; Iskandar Waworuntu, Bumi Langit Institute, FGD, 6-8 Maret 2024).

5.4 Kesimpulan

Strategi Green Islam dalam mengkampanyekan nilai-nilai Islam dan lingkungan erat kaitannya dengan bagaimana mereka mengidentifikasi sasaran dan menawarkan solusi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Studi ini menemukan dua cara pandang aksi kolektif dalam melihat target gerakan. Pertama, gerakan yang menargetkan perubahan etika masyarakat. Kedua, gerakan yang menasar perubahan kebijakan pada tingkat pemerintah dan korporasi. Yang pertama merupakan kecenderungan organisasi-organisasi dengan tipe pengkampanye kebijakan dan konservasionis, sementara yang kedua merupakan kecenderungan utama organisasi-organisasi dengan tipe mobilisator.

Dalam menasar targetnya, studi ini memperlihatkan beberapa pola strategi yang sering digunakan oleh gerakan Green Islam di Indonesia: (1) penggunaan istilah berkonotasi Islam, (2) pemberdayaan tokoh agama, (3) pemberdayaan ulama perempuan, (4) pemanfaatan momen-momen penting dalam kalender Islam, dan (5) aksi-aksi berdasarkan ajaran Islam. Secara umum, gerakan Green Islam menggunakan pola

tersebut untuk menyasar target pengaruh sesuai cara pandang yang mereka anut dalam mengidentifikasi masalah, baik dalam bentuk perbaikan etika masyarakat maupun perlawanan terhadap pemerintah atau perusahaan.

Studi ini selanjutnya menemukan bahwa strategi Green Islam, yang selalu didasarkan pada interpretasi selektif ajaran lingkungan Islam, memberi justifikasi teologis bagi aksi-aksi kolektif gerakan Green Islam. Setidaknya terdapat tiga pola strategi integrasi ajaran Islam dalam aktivisme Green Islam lainnya: (1) pelatihan masyarakat, (2) mobilisasi masyarakat terdampak, dan (3) perluasan dan pendalaman jaringan daring. Secara umum, masing-masing gerakan Green Islam juga menggunakan pola tersebut untuk menyasar target pengaruh sesuai cara pandang yang mereka anut dalam mengidentifikasi masalah.

BAB 6

IDENTITAS AGAMA DAN JARINGAN GREEN ISLAM DI INDONESIA

Gerakan Green Islam muncul sebagai fenomena penting yang mengintegrasikan wacana keislaman dan lingkungan. Beberapa sarjana telah membahas potensi Green Islam di Indonesia yang memiliki dampak positif pada perilaku pro-lingkungan (lihat Mangunjaya dan Praharawati 2019; Bodetti 2018; McKay et al. 2014; Gade 2012). Bodetti (2018), misalnya, menyatakan bahwa “sebuah pendekatan ramah lingkungan yang berpusat pada pemahaman ajaran Islam telah merevolusi pelestarian lingkungan di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia.” Dia menggambarkan Indonesia sebagai “sebuah laboratorium yang unik” yang menggabungkan Islam dan lingkungan, di mana dua filosofi tersebut jarang dikaitkan satu sama lain di dunia Barat. Sementara Gade (2012) menilai munculnya gerakan Green Islam telah menjadi kekuatan persuasif dalam mengubah persepsi Muslim dan mampu menumbuhkan sentimen moral mereka untuk peduli terhadap kondisi alam.

Bab ini membahas tentang bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama dan karakter mereka yang berbeda-beda untuk membangun jaringan mereka. Terkait hal itu, penulisan buku ini menggunakan data dan informasi dari berbagai sumber, di antaranya Diskusi Kelompok Terarah (FGD) dan wawancara mendalam dengan



pemimpin dan aktivis organisasi atau komunitas Green Islam di Indonesia. Secara umum, kelompok Green Islam menggunakan sumber daya keagamaan serta konstituen mereka untuk membangun jaringan dengan berbagai pihak. Ini supaya gerakan lingkungan yang mereka lakukan memiliki dampak positif yang lebih luas.

Dalam studi gerakan sosial, identitas kolektif telah digunakan untuk menghasilkan dan mempertahankan komitmen serta kohesi antar-aktor dari waktu ke waktu. Beberapa sarjana, seperti Hunt dan Benford (2004), telah menggunakan konsep identitas kolektif dalam gerakan sosial untuk menggantikan kesadaran kelas sebagai faktor yang mendorong mobilisasi dan keterlibatan individu dalam gerakan sosial baru (Hunt dan Benford 2004). Konsep tersebut berbeda dengan Melucci (1995) yang menyatakan bahwa identitas kolektif bukanlah suatu pemberian atau *'given'*. Untuk membawa identitas kolektif ke dalam analisis gerakan sosial, Melucci (1995) membangun argumennya ketika gerakan sosial berbasis kelas mulai menurun, sementara gerakan sosial berbasis lingkungan, perdamaian, feminis, dan sejenisnya (yang disebut gerakan sosial baru) mulai meningkat. Ia menolak ide bahwa identitas kolektif ada begitu saja, dan menilai perlunya mempelajari bagaimana identitas kolektif muncul dan bertahan. Bagi Melucci (1995), identitas kolektif merujuk pada jaringan relasi yang dinamis dan menekankan signifikansi keterlibatan emosional dari para aktivis. Dengan demikian, dalam konteks gerakan Green Islam, para aktivis lingkungan Muslim membangun jaringan mereka secara dinamis dengan menggunakan identitas kolektif yang berasal dari relasi antara keislaman dan lingkungan.

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam memang memiliki cara variatif, salah satunya dalam hal membangun jaringan. Mereka juga secara dinamis menggunakan identitas keislaman sebagai identitas kolektif untuk membangun jaringan, menyesuaikan dengan sumber daya yang mereka miliki masing-masing dalam aksi-aksi lingkungan. Meskipun aktivis lingkungan Muslim memiliki karakter dan teologi Islam lingkungan yang berbeda, mereka juga bisa membangun jaringan melalui cara yang sama, begitupun sebaliknya.

6.1 Jaringan Tokoh Agama dalam Aktivisme Green Islam

Untuk memperkuat gerakan Islam dan lingkungan, para aktivis Green Islam di Indonesia pada umumnya membangun jaringan dengan para tokoh agama. Tokoh agama yang dimaksud yaitu meliputi para ulama, kiai, dan ustad yang dikenal memiliki pengetahuan agama dan pengikut (jemaah). Para tokoh agama tersebut kemudian diberdayakan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim untuk menyerukan tentang perbaikan etika atau perilaku yang pro-lingkungan.

Organisasi Islam berbasis masyarakat Muslim, seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), misalnya, menganggap kepemimpinan kuat dari seorang tokoh agama merupakan faktor penting untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan masyarakat Muslim di Indonesia. Menurut Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh LDII dapat *survive* karena faktor kepemimpinan kuat dari tokoh agama Islam. Kepemimpinan yang kuat dari seorang tokoh agama Islam ini sangat penting, dan itu berkorelasi dengan peran kiai sebagai pemimpin masjid, kiai sebagai pemimpin pondok pesantren dan jemaah di pondok pesantren untuk menjadi tokoh penggerak utama (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, FGD, 6-8 Maret 2024).

Pentingnya membangun jaringan dengan tokoh agama juga diakui oleh organisasi lingkungan berbasis Islam seperti EcoDeen dalam kegiatan dakwah lingkungannya yang mereka selenggarakan. Ozalifia, Ketua Komunitas EcoDeen menekankan bahwa kelompok lingkungan berbasis Islam sangat perlu untuk mengajak para agamawan atau para ustad untuk menjelaskan *reward* di dunia dan di akhirat yang akan didapatkan seorang individu Muslim dengan menjaga lingkungan hidup (Rissa Ozalifia, EcoDeen ID, FGD, 20-22 Februari, 2024).

Membangun jaringan dengan para tokoh agama ini tidak hanya dianggap penting oleh organisasi lingkungan berbasis Islam maupun organisasi massa berbasis Islam yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Organisasi lingkungan berbasis non-agama, Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA), juga melihat bahwa membangun jaringan dengan ulama menjadi suatu keharusan yang perlu dipertimbangkan, melihat karakter masyarakat yang cenderung religius seperti di Indonesia, khususnya masyarakat Aceh (Munira Rezkina, HAKA Aceh, FGD, 21-22 Februari 2024).



Dalam wawancara dengan Meysita Alzeyra, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, seorang Teungku Inong (ulama perempuan) mengakui bahwa HAKA dengan membawa perspektif mengenai lingkungan kepada para Teungku Inong, secara khusus telah memberinya cara pandang berbeda terhadap lingkungan (Meyrita Alzeyra, Teungku Inong & Kolaborator HAKA, Wawancara, 26 April 2024). Meysita menjelaskan, misalnya, selama ini kita tidak sadar tentang amal jariyah dalam hal menanam pohon. Menanam pohon hanya dianggap sebagai aktivitas sepiantas oleh individu Muslim. Namun, setelah bersama HAKA, para ulama baru sadar bahwa menanam pohon merupakan suatu amal jariyah dan dapat menyelamatkan generasi ke depan, seperti dapat mencegah terjadinya banjir, tanah longsor, dan bencana ekologis lainnya. Kesadaran lingkungan umat Islam dinilai dapat membuat kita mendapatkan ketenangan dan ganjaran pahala di dunia maupun akhirat (Meyrita, Teungku Inong & Kolaborator HAKA, Wawancara, 26 April 2024).

Meyrita kemudian menjelaskan bahwa amal jariyah tidak harus dengan membangun masjid. Sebaliknya, menurutnya, keinginan membangun masjid dengan menebang pohon justru dapat menimbulkan dosa jariyah. Menurutnya, "Jadi amal jariyah tidak harus selalu bangun masjid, kan? dan sebaliknya, bahkan menjadi kebalikan dari amal jariyah, yaitu dosa jariyah yang kemudian merugikan. Misalnya, menebang pohon itu, kan, efeknya besar. Nah, itu baru kita sadar sedikit demi sedikit. Kalau kita menanam pohon menjadi pahala jariyah. Kita menebang malah jadi dosa jariyah" (Meyrita Alzeyra, Teungku Inong & Kolaborator HAKA, Wawancara, 26 April 2024).

Bahkan di organisasi IRI, sebuah lembaga aliansi lintas keagamaan, yang di antaranya terdiri dari majelis-majelis keagamaan tingkat nasional seperti NU, Muhammadiyah, MUI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI), dan organisasi lainnya, tokoh agama memiliki peran sentral dan dapat memainkan peran sebagai negosiator untuk menghentikan agenda-agenda deforestasi. Salah satu peserta FGD dari organisasi IRI mengungkapkan, "Bahkan dalam kegiatan-kegiatan kami, kami berhadapan juga dengan pengusaha. Kami (tokoh agama) bertemu dengan para pengusaha yang kami pikir masih punya harapan untuk berbisnis secara berkelanjutan. Jadi kami *sharing* bersama yang dilakukan di Kalimantan Timur, di Riau, kita *sharing*

bersama. Sebagai tokoh agama, kami berpikir ini adalah posisi strategis untuk mempengaruhi mereka, karena mereka juga, bahkan seorang presiden pun tidak bebas dari nilai-nilai agamanya” (Pendeta Jimmy Marcos Immanuel Sormin, IRI, FGD, 20-22 Februari, 2024).

Pengaruh tokoh agama juga sangat penting bagi komunitas suku Ammatoa Kajang, yang mengaku seratus persen jumlah populasi mereka memeluk agama Islam. Suku Ammatoa Kajang merupakan suku yang terkenal sebagai penjaga hutan terbaik di dunia (Yeung 2023). Mereka menjaga hutan secara ketat karena dianggap sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Ajaran dan keyakinan tentang menjaga hutan selalu disampaikan oleh ketua adat dalam berbagai ritual keagamaan yang juga selalu didampingi oleh tokoh agama Islam (Jumarlin Muslim, Penduduk dan Polisi Kehutanan Daerah Kajang, Wawancara, 26 April 2024).

6.2 Jaringan Tokoh Akademisi Muslim dalam Aktivisme Green Islam

Awal perkembangan gerakan Green Islam di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kajian dan telaah yang telah dirumuskan oleh para akademisi Muslim. Mangunjaya, contohnya, merupakan salah satu tokoh yang juga dikenal sebagai tokoh generasi awal yang memelopori kajian Islam dan lingkungan. Meskipun Mangunjaya merupakan sarjana bidang biologi, latar belakangnya sebagai santri memungkinkan ia memiliki kapasitas untuk mengkaji hubungan antara Islam dan lingkungan.

Hal tersebut dibuktikan dari karya awalnya sejak 1998 yang mengkaji tentang *“Syariah: Jalan Keluar dari Krisis Ekologi”* dan *“Fiqh Lingkungan (Fiqh al-bi’ah)”* pada 2005, sebelum aktivisme Green Islam mulai banyak bermunculan dan populer di Indonesia seperti sekarang ini (lihat Mangunjaya 1998; Muhammad et al. 2006). Selain itu, Mangunjaya juga aktif dalam menghadiri berbagai konferensi internasional dan menjadi narasumber di banyak kegiatan diskusi atau seminar yang diselenggarakan oleh organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam di Indonesia.

Dengan membangun jaringan dengan para akademisi Muslim, organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam mengakui bahwa jaringan akademisi Muslim dapat membantu mereka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengetahuan tentang lingkungan dan perubahan iklim, serta

bagaimana mempromosikannya dalam konteks masyarakat beragama (Gatot Supangkat, MOSAIC, FGD, 6-8 Maret 2024; Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, FGD, 6-8 Maret 2024; Nita Roshita, Green Faith Indonesia, Wawancara, 27 Maret 2024).

Adanya jaringan dengan tokoh akademisi juga dianggap dapat meningkatkan kepedulian pendidikan untuk mengarusutamakan isu-isu lingkungan. Tujuan membangun jaringan dengan akademisi, seperti yang dilakukan Green Faith, menjadi bagian yang tidak bisa dihindarkan mengingat organisasi ini memiliki program kerja utama untuk meningkatkan kepedulian pendidikan sebagai ruang belajar sekaligus wadah untuk melakukan aksi mendukung Indonesia meninggalkan energi fosil dan beralih pada energi terbarukan (Nita Roshita, Green Faith Indonesia, Wawancara, 27 Maret 2024).

Selain Mangujaya, terdapat banyak aktivis lingkungan berbasis Islam yang berasal dari kalangan akademisi yang juga merupakan anggota organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam. Hal itu kemudian menjadi peluang besar bagi mereka untuk melaksanakan program-program penelitian mengenai diskursus Green Islam di Indonesia. MOSAIC, contohnya, menjadi organisasi yang anggotanya terdiri dari aktivis dari kalangan akademisi. Mereka juga telah membangun kerja sama dengan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan akademisi dari salah satu universitas di Jepang untuk terlibat dalam aktivisme mereka (Gatot Supangkat, MOSAIC, FGD, 6-8 Maret 2024).

Bahkan, pendirian beberapa organisasi, seperti FNKSDA dan KHM, berangkat dari perkumpulan para aktivis, akademisi, dan intelektual Muslim sebagai motor penggerak organisasi mereka. Salah satu peserta FGD menyatakan bahwa organisasi seperti FNKSDA bermula dari perkumpulan aktivis, akademisi, intelektual, dan pemuda nahdliyin (NU). Mereka menganggap bahwa kecakapan para akademisi dan intelektual Muslim yang memiliki keilmuan yang mapan mampu merumuskan solusi bagi berbagai konflik sosial ekologis dan konflik agraria (Nafisatul Khoidah, FNKSDA, FGD, 6-8 Maret, 2024).

Membangun jaringan dengan kalangan akademisi juga dianggap krusial karena sumber-sumber pengetahuan yang mereka miliki dapat mempengaruhi cara pandang dan cara pikir mereka agar organisasi dapat berkelanjutan dan konsisten dalam bergerak. Selain itu, akademisi dapat menghadirkan fakta empiris untuk menyampaikan kepada umat

Islam bahwa perubahan iklim bukan disebabkan oleh konspirasi internasional.

Dalam FGD, Efendi, akademisi dan aktivis KHM, menyampaikan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi oleh aktivis Green Islam. Salah satu tantangan tersebut terkait dengan adanya komunitas Muslim yang masih menyangkal fenomena krisis ekologi global atau menganggap bahwa perubahan iklim merupakan fenomena konspirasi global. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi para intelektual atau akademisi Muslim untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat Muslim terkait pelestarian lingkungan dengan menghadirkan fakta-fakta empiris (David Efendi, akademisi dan aktivis KHM, FGD, 6-8 Maret 2024).

Dengan demikian, membangun jaringan dengan tokoh akademisi dinilai penting bagi aktivis Green Islam di Indonesia. Para akademisi, yang dikenal memiliki wawasan mendalam dan kemampuan dalam penelitian, dapat memperkuat basis ilmiah dari gerakan Green Islam. Kolaborasi dengan akademisi secara tidak langsung dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi organisasi atau komunitas yang terlibat dalam aktivisme Green Islam. Selain itu, hal ini sekaligus dapat membuka peluang untuk inovasi dan solusi berbasis penelitian dalam upaya menangani krisis ekologi global.

6.3 Jaringan Ormas Islam dalam Aktivisme Green Islam

Ormas dan institusi Islam di Indonesia tidak lepas dari jangkauan para aktivis Green Islam untuk memperluas jaringan mereka dalam mengurusutamakan isu-isu lingkungan. Dalam hal ini, mereka cenderung saling melakukan kerjasama, pertukaran informasi dan jaringan untuk bersama-sama terlibat dalam melakukan aksi-aksi lingkungan. Di antara jaringan lembaga-lembaga Islam tersebut adalah MUI, NU, Muhammadiyah, dan tempat-tempat ibadah umat Islam.

Muslims for Shared Action on Climate Impact (MOSAIC), misalnya, merupakan kelompok aliansi yang dibentuk NU dan Muhammadiyah untuk mengkampanyekan isu-isu perubahan iklim dengan basis keislaman. Gatot Supangkat dari MOSAIC mengaku bahwa jaringan yang selama ini terbentuk antara mereka dengan anggota NU dan Muhammadiyah yang saling bertemu dalam momen-momen tertentu perlu dikolaborasikan ke arah yang lebih produktif dalam mengurusutamakan isu-isu lingkungan dan perubahan iklim. Pendirian

MOSAIC dideklarasikan saat momen Kongres Umat Islam di 2022 dan mendapat dukungan dari Wakil Presiden Indonesia Kiai Haji (KH) Ma'ruf Amin (Gatot Supangkat, MOSAIC, FGD, 6-8 Maret 2024). Namun demikian, kerja sama itu tidak hanya sebatas NU dan Muhammadiyah, MOSAIC juga bekerja sama dengan berbagai lembaga Islam lain untuk memperkuat jaringan mereka.

Sementara itu, aktivis lingkungan Mangunjaya dari PPI UNAS, juga melihat peluang pentingnya berkolaborasi dengan ormas Islam seperti MUI. Itu dikarenakan MUI memiliki otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa serta terobosan lainnya seperti pembuatan modul pelatihan dalam mengeluarkan fatwa dan khotbah Jumat tentang lingkungan. Sejauh ini, Mangunjaya telah banyak terlibat bersama Prabowo, Ketua LPLH & SDA MUI, dalam pembuatan fatwa dan pembuatan modul-modul pelatihan yang berkaitan dengan Islam dan lingkungan. Zulham mengatakan bahwa beberapa kali dosen-dosen di Universitas Nasional juga dilibatkan dalam membuat modul khotbah Jumat yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang akan disosialisasikan kepada masyarakat (Muhammad Zulham, PPI UNAS, FGD, 20-22 Februari, 2024).

Pentingnya membangun jaringan dengan institusi Islam, seperti masjid, juga tidak luput dari perhatian khusus kalangan aktivis Muslim yang terlibat dalam gerakan Green Islam (M. Natsir Zubaidi, Dewan Masjid Indonesia (DMI), FGD, 20-22 Februari 2024; Muhammad Zulham, PPI UNAS, FGD, 20-22 Februari 2024; Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, FGD, 6-8 Maret 2024; Jimmy Marcos Immanuel Sormin, IRI, FGD, 20-22 Februari 2024; Rissa Ozalifia, Ketua Komunitas EcoDeen ID, FGD, 20-22 Februari 2024). Hal ini juga menjadi satu langkah taktis bagi mereka ketika tidak mampu menjangkau masyarakat secara langsung di akar rumput.

Salah seorang aktivis Muslim dari EcoDeen mengungkapkan bahwa sebelum pandemi beberapa kali mereka mengadakan kegiatan sosialisasi di perkumpulan komunitas Muslim dan masjid-masjid sebagai jembatan untuk merealisasikan ide-ide mereka dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan masyarakat Muslim. EcoDeen bergerak dengan mengadakan program “galon berkah” untuk menumbuhkan budaya isi ulang air mineral untuk mengurangi sampah plastik dan membuat modul pengurangan sampah. Namun, selama pandemi, EcoDeen kemudian lebih berfokus untuk melakukan sosialisasi melalui kegiatan serial webinar,

yang mana kegiatan tersebut juga membutuhkan dukungan dari lembaga Islam seperti MUI (Rissa Ozalifia, Ketua Komunitas EcoDeen ID, FGD, 20-22 Februari 2024).

Hal menarik lainnya adalah terdapat komunitas Green Islam, seperti AgriQuran, yang secara aktif membangun jaringan dengan kelompok majelis taklim dan jemaah tabligh yang kini tengah populer di kalangan anak muda Muslim kelas menengah ke atas perkotaan yang memiliki identitas Islam modern yang mendalam dan biasanya bergerak dengan moto pemuda hijrah. Berangkat dari keprihatinan terhadap permasalahan lingkungan, mereka kerap menggunakan narasi kesalehan sebagai spirit untuk menjaga lingkungan.

AgriQuran mampu mengarusutamakan isu-isu lingkungan dengan menjangkau kelompok jemaah tabligh aliran salafi. Muhadzib, Ketua AgriQuran, mengungkapkan, “Kalau di Islam, kan, ada yang gayanya jemaah tabligh, ada yang gayanya salafi, ada yang tarbiyah, dan lain sebagainya, ternyata kita diikatkan. Kita bertemu dalam satu payung naungan, yaitu Alquran dan sunnah. Jadi berangkat dari masalah (lingkungan) tersebut, akhirnya ini cukup bisa menyatukan kita, dan kita bisa menjangkau berbagai jenis kalangan (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024).

Selain AgriQuran, komunitas serupa yang menggunakan narasi tentang cara hidup minimalis dan penekanan pada kesalehan untuk mengkampanyekan isu-isu lingkungan adalah EcoDeen dan Bumi Langit Institute. Sejauh ini, untuk memupuk kesalehan Muslim dalam jemaah-jemaah keagamaan di lingkungan perkotaan, mereka telah berhasil membangun jaringan dengan jemaah-jemaah majelis taklim di perkotaan yang melek media sosial. Hal itu dibuktikan dengan akun sosial media mereka yang sudah diikuti oleh ribuan pengikut (Rissa Ozalifia, EcoDeen ID, FGD, 20-22 Februari, 2024; M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024; Iskandar Waworuntu, Bumi Langit Institute, FGD, 6-8 Maret 2024).

6.4 Jaringan Lembaga Pendidikan Islam dalam Aktivisme Green Islam

Membangun jaringan dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti pesantren dan universitas Islam, merupakan salah satu langkah penting bagi aktivis lingkungan Green Islam. Melalui jaringan lembaga pendidikan Islam, aktivis Green Islam dapat memperluas jangkauan

mereka untuk edukasi lingkungan, integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan Islam, dan mendorong partisipasi aktif komunitas Muslim dalam upaya pelestarian alam. Langkah strategis ini tidak hanya memperkuat dasar teologis dan etis dalam gerakan Green Islam di Indonesia, tetapi juga menciptakan sinergi yang lebih besar melalui contoh dan praktik yang baik dalam menghadapi tantangan lingkungan dan perubahan iklim.

Selain berjejaring dengan organisasi Islam, aktivis lingkungan seperti Mangunjaya, contohnya, melalui lembaga PPI UNAS yang dia pimpin, telah membangun jaringan dengan banyak lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan memelopori program eko-pesantren (pesantren ramah lingkungan). Sejauh ini, PPI UNAS telah memberdayakan banyak lembaga pesantren di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membangun komunitas masyarakat Muslim yang memiliki pengetahuan dan kesadaran lingkungan sebagai bagian dari iman. PPI UNAS telah mengembangkan modul pelatihan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah dengan ajaran Islam dan *web tracking ekopesantren*⁹. Selain itu, mereka juga menghadirkan pemberian penghargaan bagi pesantren berprestasi dalam praktik-praktik ramah lingkungan (Fachruddin M. Mangunjaya, Direktur PPI UNAS, Wawancara, 22 Maret 2024; Muhammad Zulham, PPI UNAS, FGD, 20-22 Februari 2024).

Organisasi lingkungan berbasis Islam seperti Yayasan Hadji Kalla (YHK) juga melakukan hal yang sama dalam membangun jaringan mereka. Pada awal pendiriannya pada 1981, YHK sebelumnya bernama Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Hadji Kalla yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Hadji Kalla (YHK). YHK sebenarnya adalah lembaga yang didirikan untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dengan penyalurannya didasarkan pada aspek pengembangan keislaman. Hingga tahun 2019, YHK menjadi bagian dari komunitas filantropis di Indonesia dan mulai bergabung di Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) dan Perkumpulan Filantropi Indonesia. Pada 2020, lembaga ini kemudian mendapatkan izin dari Kementerian Agama sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional (Yayasan Hadji Kalla n.d.).

Sejauh ini, YHK telah memiliki program-program lingkungan, salah satunya adalah Kampung Hijau Energi. Kampung Hijau Energi merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan cara

membangun sarana digester biogas (sarana teknologi untuk mengubah kotoran ternak menjadi bahan bakar biogas dan pupuk organik) yang didanai melalui dana zakat yang dikelola oleh YHK. Mereka memanfaatkan jaringan komunitas atau kelompok di daerah Indonesia Timur yang mampu menggerakkan masyarakat, khususnya Muslim, untuk misi pelestarian lingkungan. Komunitas tersebut terdiri dari berbagai kelompok tani, khususnya kelompok tani Muslim, sebagai prasyarat penerima dana zakat untuk membangun sarana digester biogas.

Salah satu langkah eksekusi program Kampung Hijau Energi yang menarik dan penting disorot adalah pihak YHK membangun jaringan dengan Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah, pondok pesantren yang berafiliasi dengan ormas NU, yang berlokasi di Malakaji, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Pondok pesantren tersebut memiliki aktivitas bertani. Masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren tersebut kemudian populer disebut sebagai “santri tani”.

Semenjak adanya intervensi program Kampung Hijau Energi, yang diinisiasi oleh YHK, aktivitas pertanian masyarakat di sekitar pondok pesantren tersebut sudah mulai sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada penggunaan pupuk kimia. Aktivitas pertanian di sekitar pondok pesantren tersebut menjadi lebih sering memanfaatkan pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran ternak yang dikelola melalui sarana digester yang ada di area peternakan di belakang pondok pesantren. Selain itu, adanya sarana digester biogas juga telah mampu mengurangi penggunaan konsumsi *Liquefied Petroleum Gas* (Gas minyak cair atau dikenal sebagai gas tabung) yang digunakan pondok pesantren dalam aktivitas memasak mereka setiap harinya untuk kebutuhan para santri (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, Wawancara, 27 April, 2024).

Tidak hanya dalam hal pertanian, dalam hal dakwah, Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah juga menjadi induk untuk melayani khotbah Jumat dan khotbah-khotbah pada momentum tertentu, khususnya di hari raya Islam, dan kegiatan-kegiatan keagamaan masyarakat dengan khotbah yang bertema lingkungan. Sementara itu, mayoritas yang mereka layani merupakan kelompok tani dan sebagian kecilnya adalah pegawai (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, Wawancara, 27 April, 2024). Dakwah mengenai keprihatinan lingkungan oleh Pondok

Pesantren Babussalam Arrahmah ini diakui bermula sejak adanya intervensi dan diskusi bersama pihak YHK. Sebelumnya, dakwah-dakwah mereka cenderung hanya berbicara mengenai surga dan neraka yang dianggap sebagai tema yang klasik.

Sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Pesantren, Usman, yang mengaku bahwa, “Jadi, mulai intervensi Kalla (YHK), kita baru diskusi-diskusi tentang lingkungan. Pak Sapril ini bilang ‘Ustad, bagaimana kalau ini dibawa ke mimbar’. Jadi, saya mengubah, yang sebelumnya melulu bicaranya tentang surga dan neraka, itu kita ubah. Sebelumnya dakwah kita masih klasik. Ya kita bicara tentang akhirat. Jadi sekarang ini kita bawa ke alam nyata, surganya itu (dengan menjaga lingkungan dan alam kita)” (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, Wawancara, 27 April 2024). Saat ini, terdapat hampir 40 masjid dan dai yang sedang dibina oleh pesantren dan hampir seratus titik kelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan untuk kegiatan keagamaan di wilayah tersebut (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, Wawancara, 27 April, 2024).

Pentingnya membangun jaringan dengan lembaga pendidikan Islam juga diperkuat oleh aktivis lingkungan Humanitarian Forum Indonesia (HFI). Meski jaringan organisasi seperti HFI telah dikenal sangat kuat dan luas, yang melibatkan berbagai organisasi berbasis agama dan lembaga swadaya masyarakat, mereka juga mengakui potensi besar dalam membangun jaringan dengan berbagai lembaga lain, termasuk lembaga pendidikan tinggi seperti UIN (Surya Rahman Muhammad, Direktur Eksekutif HFI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Selain untuk memperkuat edukasi lingkungan, membangun jaringan dengan lembaga pendidikan Islam, seperti perguruan tinggi Islam dan pesantren yang sebelumnya sudah bergerak melalui program-program eko-pesantren, juga merupakan solusi bagi aktivis lingkungan Muslim ketika mengalami kesulitan untuk membangun jaringan dengan tokoh-tokoh dari ormas agama besar seperti NU. Situasi tersebut disebabkan oleh panjangnya birokrasi di tubuh ormas Islam tersebut. Dalam hal ini, Green Faith Indonesia menjadi salah satu contoh organisasi yang mengakui lebih mudah dan penting berjejaring dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam sebagai solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi (Nita Roshita, Green Faith Indonesia, Wawancara, 27 Maret 2024).

Situasi yang demikian ini menunjukkan bahwa membangun jaringan dengan lembaga pendidikan Islam merupakan hal signifikan yang perlu diperkuat, mengingat pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam juga memiliki kapasitas dalam mempengaruhi etika dan moral masyarakat Muslim di sekitarnya secara luas.

6.5 Jaringan Lainnya dalam Aktivisme Green Islam

Selain membangun jaringan dengan tokoh agama, akademisi Muslim, ormas dan institusi Islam, serta lembaga pendidikan Islam, kelompok Green Islam di Indonesia memperluas jaringan mereka untuk meningkatkan efektivitas gerakan mereka dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan. Gerakan Green Islam di Indonesia sejauh ini telah memperluas jaringan mereka dengan melibatkan lebih banyak aktor, seperti pemerintah, lembaga internasional, kelompok lintas agama, aktivis non-agama, dan pihak swasta atau korporasi. Itu memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan membuat strategi mereka menjadi lebih kaya dalam mengatasi tantangan lingkungan hidup. Perluasan jaringan tersebut juga membantu gerakan mereka lebih berkelanjutan dan menciptakan kesadaran lebih besar di kalangan umat Islam tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.

6.5.1 Jaringan Pemerintah dalam Aktivisme Green Islam

Membangun jaringan dengan otoritas pemerintah merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh aktivis Green Islam di Indonesia pada umumnya. Menurut data kuesioner yang diisi oleh para pemimpin atau pengurus organisasi atau komunitas lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam, rata-rata dari mereka pernah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tingkat lokal maupun nasional.

Dewan Masjid Indonesia (DMI), misalnya, sebagai sebuah lembaga yang berperan dalam mengelola dan memakmurkan masjid di Indonesia, memiliki pendekatan yang unik dalam menangani isu lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya didasarkan pada fungsi sosial masjid sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan komunitas yang dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitarnya. DMI memiliki jaringan yang kuat dengan berbagai instansi pemerintah yang relevan. Kerja sama dengan Kementerian Kehutanan adalah salah satu contohnya. Jaringan pemerintah membantu DMI dalam mengakses sumber daya dan dukungan teknis yang diperlukan untuk menjalankan

program-program lingkungan. Salah satu peserta FGD, Zubaidi, Pendiri dan Pembina Perhimpunan Remaja Masjid (PRIMA) DMI mengungkapkan bahwa kerja sama dengan pemerintah, seperti Kementerian Kehutanan, dapat membantu program penghijauan masjid-masjid di Indonesia (M. Natsir Zubaidi, Dewan Masjid Indonesia (DMI), FGD, 20-22 Februari 2024).

Pentingnya membangun jaringan dengan pemerintah juga ditekankan oleh aktivis lingkungan Muslim dari Yayasan Bina Bhakti Lingkungan (YBBL) yang berlokasi di Surabaya. Bagi organisasi YBBL, pemerintah lokal juga dapat berperan dalam memberi bantuan berupa pendanaan yang cukup untuk merealisasikan program kerja lingkungan mereka. Mereka mengaku sangat terbantu dengan sosok Tri Rismaharini yang ketika itu sebagai wali kota dan kerap mengarahkan masyarakat untuk aktif dan terjun ke pengolahan sampah (Nurul Chasanah, YBBL, FGD, Rabu, 6-8 Maret 2024).

Jaringan kerja sama dengan pemerintah juga ditemukan di organisasi seperti LDII Jawa Timur yang bekerja sama dengan Dinas Kehutanan, Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Pemkot Surabaya, para Camat, Lurah atau Kepala Desa (Agus Yudianto, LDII Jawa Timur, FGD, 6-8 Maret 2024), serta organisasi Clean The City Ahmadiyah yang bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kota (Abdul Ghani Setiawan, Pembina CTC, FGD, 20-22 Februari 2024). Selain itu, terdapat organisasi lainnya seperti LDII Yogyakarta yang bekerja sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Indonesia (DPD-RI), dan DPR-RI (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, FGD, 6-8 Maret 2024); Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang bekerja sama dengan pemerintah Aceh (Munira Rezkina, HAKA Aceh, FGD, 20-21 Februari 2024); dan di organisasi atau komunitas Green Islam lainnya.

Selain itu, tujuan dari berjejaring dengan pemerintah juga untuk menyampaikan aspirasi agar pemerintah memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan (Alwan Arief, Ketua Komunitas Save Ake Gaale, FGD, 6-8 Maret 2024; Gatot Supangkat, MOSAIC, FGD, 6-8 Maret 2024; Jimmy Marcos Immanuel Sormin, IRI, FGD, 20-22 Februari, 2024). Dengan kepedulian tersebut diharapkan pemerintah mampu melakukan upaya intervensi sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Peristiwa intrusi air laut pada 2015 yang mencemari sumber air di Ternate, misalnya, telah mendorong komunitas Save Ake Gaale

untuk membangun jaringan dengan pemerintah setempat. Sebagai tanggapan atas masalah ini, Komunitas Save Ake Gaale berinisiatif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghematan air dan perlindungan lingkungan. Mereka juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengusulkan program-program intervensi, seperti pembangunan kolam retensi air hujan dan sumur resapan, serta melakukan penghijauan dan revegetasi daerah-daerah terdegradasi. Upaya ini didukung oleh berbagai program, termasuk pengusulan Peraturan Daerah (Perda) tentang sumur resapan dan pengelolaan kualitas air, yang akhirnya diimplementasikan oleh pemerintah setempat (Alwan Arief, Ketua Komunitas Save Ake Gaale, FGD, 6-8 Maret 2024).

6.5.2 Jaringan Internasional dalam Aktivisme Green Islam

Gerakan kampanye internasional dalam mengatasi krisis ekologi global telah banyak mempengaruhi perkembangan aktivisme Green Islam di Indonesia. Organisasi atau komunitas tertentu yang terlibat dalam gerakan Green Islam di Indonesia selama ini telah menunjukkan kemampuannya di dunia internasional bahwa mereka merupakan bagian penting yang harus dilibatkan dalam kampanye internasional untuk mengatasi isu-isu lingkungan dan perubahan iklim.

Organisasi massa Islam seperti NU dan Muhammadiyah, misalnya, telah banyak berkontribusi dalam melakukan pelestarian alam di tengah keprihatinan masyarakat internasional mengenai ancaman perubahan iklim yang meningkat. Sebagai organisasi massa Islam yang telah dikenal di dunia internasional, NU dan Muhammadiyah telah berhasil mengkapitalisasi sumber daya jaringan internasional mereka untuk ikut mengkampanyekan wacana Green Islam di Indonesia.

Misal, sejauh ini, organisasi NU dan Muhammadiyah telah aktif menjalin kerja sama dengan Dewan Nasional Perubahan Iklim untuk mengarusutamakan isu-isu lingkungan berbasis Islam. Negara-negara seperti Amerika Serikat melalui United States Agency for International Development (USAID), Australia melalui Australia Agency for International Development (AUSAID), dan Uni Eropa juga telah terlibat dalam kerja sama dengan kedua organisasi ini. Selain itu, dalam ranah lembaga swadaya masyarakat, NU telah berkolaborasi dengan World Wide Fund for Nature (WWF) dan Muhammadiyah dengan Conservation International (Amri 2012).

Selain itu, organisasi MUI, yang kerap bekerja sama dengan ormas-ormas Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah, dan dikenal sebagai organisasi yang memiliki otoritas keagamaan Islam tertinggi dalam hal mengeluarkan fatwa, juga telah memanfaatkan akses yang mereka miliki di dunia internasional. MUI telah aktif terlibat dalam “Faith Pavilion” di COP28 yang bertujuan untuk meningkatkan peran agama dalam isu lingkungan global. Sebelumnya, dalam aktivisme lingkungan mereka, MUI dengan jaringan lintas keagamaannya juga telah bersama-sama memelopori “Interfaith for Earth Initiative” bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam upaya melindungi hutan tropis di Indonesia dan beberapa negara lainnya seperti Kongo, Peru, Brazil, dan Kolombia (Hayu S. Prabowo, Ketua LPLH & SDA MUI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Jaringan internasional aktivisme lingkungan berbasis agama seperti itu dianggap menjadi suatu hal yang krusial karena juga menyangkut moral dan etika. Hayu S. Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH & SDA MUI) menekankan bahwa mengingat aksi lingkungan juga menyangkut perihal moral dan etika, dunia perlu mengetahui pentingnya peran agama dalam aktivismenya (Hayu S. Prabowo, Ketua LPLH & SDA MUI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Mengembangkan jaringan internasional juga dilakukan oleh Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS) dalam aktivisme Green Islam mereka. Melalui jaringan Fachruddin Mangunjaya, Direktur PPI UNAS, dengan WWF, keduanya bekerja sama dalam bidang riset untuk mengkaji tentang bagaimana perkembangan umat Islam dalam rangka menjaga lingkungan hidup (Muhammad Zulham, PPI UNAS, FGD, 20-22 Februari, 2024).

Beberapa aktivis lingkungan Muslim juga membangun jaringan internasional mereka untuk mendirikan organisasi atau komunitas lingkungan berbasis keagamaan di Indonesia. Misal, aktivis lingkungan Muslim yang telah dikenal di kalangan organisasi Muhammadiyah, Hening Parlan, telah mendorong organisasi internasional seperti Green Faith untuk memiliki perwakilan di Indonesia. Sejak 2022, organisasi Green Faith Indonesia telah berdiri di Indonesia.

Nita Roshita, Media Campaign and Training Manager Green Faith Indonesia, menyampaikan bahwa beberapa pertimbangan yang melatarbelakangi mengapa Green Faith perlu memiliki perwakilan di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas

Muslim terbesar di dunia dengan tipikal masyarakat yang religius. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan *bio-diversity* paling kaya ketiga di dunia, selain Brazil. Dari dua faktor tersebut, Green Faith memiliki alasan kuat untuk memiliki perwakilan di Indonesia (Nita Roshita, Green Faith Indonesia, Wawancara, 27 Maret 2024). Pertimbangan serupa juga melatarbelakangi berdirinya organisasi lingkungan Ummah For Earth di Indonesia, organisasi yang awalnya didirikan oleh Greenpeace MENA (Middle East and North Africa) untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan masyarakat Muslim di MENA (Rahma Shofiana & Maftuchah Nugrahaini, Wawancara, Ummah For Earth, 20 Maret 2024).

6.5.3 Jaringan Lintas Keagamaan dalam Aktivisme Green Islam

Aktivis Green Islam di Indonesia juga memainkan peran krusial dalam upaya membangun jaringan lintas keagamaan dalam aktivisme lingkungan mereka. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk memimpin gerakan lingkungan yang berakar pada nilai-nilai Islam. Namun, aktivis Green Islam di Indonesia tidak hanya berfokus pada pelestarian lingkungan berdasarkan nilai-nilai Islam secara eksklusif. Mereka juga berusaha menjalin kerja sama dengan komunitas lintas agama untuk memperkuat dampak dari gerakan mereka. Dalam hal ini, penekanan mereka adalah bahwa membangun kesadaran kolektif dan tindakan bersama dalam menghadapi permasalahan lingkungan dan akibat bencana ekologis merupakan tanggung jawab bersama yang melampaui batas-batas agama.

Organisasi seperti MUI, misalnya, dalam kerja sama lintas agama, mereka lebih fokus pada isu kemanusiaan dan lingkungan daripada perbedaan akidah. Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH & SDA MUI), menekankan bahwa “Yang kita fokuskan ketika menghadapi masalah-masalah kemanusiaan bukan tentang masalah-masalah akidah”. Hal ini bertujuan untuk mempermudah komunikasi dan kerja sama antar-agama dalam menangani isu-isu global seperti kemiskinan dan bencana lingkungan (Hayu S. Prabowo, Ketua LPLH & SDA MUI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Organisasi lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), LPBI NU,

HFI, KHM, Salam Institute, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisiyiah, Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Muhammadiyah, dan banyak organisasi lingkungan berbasis Islam lainnya memandang bahwa mereka perlu memperluas jaringan mereka untuk bergerak bersama supaya dampak dari gerakan mereka juga lebih meluas (FGD, 20-22 Februari 2024; FGD, 6-8 Maret 2024). Mereka lebih berfokus mencari titik temu dengan berbagai pihak, tanpa memandang perbedaan agama atau latar belakang, demi mencapai tujuan bersama dalam menjaga lingkungan.

Bahkan, aktivis dari organisasi KHM mengakui bahwa, dalam hal membangun jaringan, mereka sangat jarang membawa identitas agama. Fauzan, Ketua KHM Malang Raya, mengungkapkan bahwa dalam hal membangun jaringan atau berjejaring dengan organisasi atau komunitas lainnya, mereka sangat jarang membawa identitas agama. Pada prinsipnya, mereka lebih menginginkan untuk membangun suatu gerakan yang inklusif dan demokratis. Misalnya, walaupun KHM merupakan gerakan anak muda berbasis Islam, namun mereka juga membuka ruang bagi siapa pun dari kelompok non-Muslim (Fahmi Ahmad Fauzan, Ketua KHM Malang Raya, FGD, 6-8 Maret, 2023).

6.5.4 Jaringan Aktivis Non-agama dalam Aktivisme Green Islam

Aktivis Green Islam memiliki peran krusial dalam memperkuat dan memperluas gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Perbedaan pemahaman tentang pengetahuan lingkungan di kalangan aktivis Green Islam di Indonesia telah mendorong sebagian dari mereka untuk membangun jaringan, tidak hanya dengan kalangan tokoh agama Islam, yang memiliki pendekatan lebih moderat (seperti melalui dakwah) dalam merespons soal lingkungan, melainkan juga dengan aktivis lingkungan dari organisasi lingkungan non-agama yang sudah mapan sebelumnya. Mengingat urgensi krisis lingkungan yang semakin mendesak, kolaborasi antara aktivis Green Islam dengan organisasi lingkungan non-agama dianggap menjadi sangat penting.

Jaringan kelompok aktivis lingkungan non-agama dalam aktivisme Green Islam ini memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, dan strategi yang lebih luas, sehingga kampanye dan aksi lingkungan dapat memiliki dampak yang lebih signifikan. Mangunjaya, misalnya, telah membangun jaringan kolaborasi dengan Greenpeace Indonesia. Dalam hal ini, PPI UNAS, yang sebelumnya banyak terlibat dalam program-program eko-

pesantren, membangun kerjasama dengan Greenpeace Indonesia, melalui program Ummah for Earth, untuk merealisasikan program kerja solarisasi pesantren. Program kerja sama ini dinilai sebagai salah satu keluaran penting untuk menjadi percontohan dalam hal energi berkelanjutan di institusi-institusi pendidikan Islam (Muhammad Zulham, PPI UNAS, FGD, Rabu, 20-22 Februari 2024).

Menurut data kuesioner yang kami kumpulkan, kerja sama dengan kelompok lingkungan berbasis non-agama juga ditemukan di organisasi lingkungan yang terlibat dalam gerakan Green Islam lainnya seperti MUI, Green Faith Indonesia, dan LLHPB 'Aisyiyah, yang berjejaring dengan Greenpeace. Selain itu, terdapat kelompok Green Islam seperti Eco-Bhinneka Muhammadiyah dan MPU Aceh yang berjejaring dengan WALHI.

Selain itu, membangun jaringan dengan kelompok aktivis dari organisasi yang sudah mapan sebelumnya, seperti Greenpeace, WALHI, dan JATAM, juga dianggap dapat meringankan aktivis Green Islam terutama yang berkarakter mobilisator seperti KHM, FNKSDA, Salam Institute untuk bergerak ketika mereka ingin melakukan kegiatan. Kelompok Green Islam, seperti KHM, contohnya, merasa terbantu dengan jaringan aktivis dari organisasi non-agama yang sudah mapan sebelumnya, terutama ketika mereka ingin mendapatkan informasi terbaru tentang permasalahan sosio-ekologis yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini, mereka dapat mengundang narasumber yang memiliki kapasitas memadai untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai permasalahan lingkungan di Indonesia tanpa harus mengeluarkan biaya (David Efendi, KHM, FGD 6-8 Maret 2024).

Dengan demikian, mengembangkan jaringan dengan organisasi atau komunitas lingkungan non-agama yang sudah mapan sebelumnya, sangat penting bagi aktivisme Green Islam. Selain mereka memiliki penekanan terhadap nilai-nilai spiritual keislaman dalam hal lingkungan, berjejaring dengan aktivis lingkungan seperti Greenpeace, WALHI, dan JATAM dapat memberikan pengetahuan mendalam kepada aktivis Green Islam mengenai berbagai informasi yang relevan terkait permasalahan sosio-ekologis di akar rumput yang terjadi. Dengan demikian, mereka dapat memiliki berbagai pendekatan yang multi-perspektif dalam mengatasi isu-isu lingkungan dengan menggabungkan nilai-nilai spiritual Islam dan metode-metode advokasi yang terukur untuk mengatasi berbagai permasalahan lingkungan di Indonesia.

6.5.5 Jaringan Korporasi dalam Aktivisme Green Islam

Di tengah perkembangan industri yang pesat, membangun jaringan dengan korporasi menjadi salah satu langkah strategis untuk memperluas dampak positif dari gerakan Green Islam. Dalam aktivisme Green Islam di Indonesia, beberapa aktivis lingkungan menyadari mengenai pentingnya berjejaring dengan korporasi yang dianggap dapat memperkuat aktivitas lingkungan mereka.

DMI, misalnya, telah membangun jaringan dengan sektor swasta untuk memperluas jangkauan program lingkungannya. Sebagai contoh, mereka bermitra dengan PT. Unilever Indonesia dalam program "Gerakan Masjid Bersih". Hal ini menunjukkan bagaimana DMI mampu menggabungkan sumber daya swasta dengan tujuan sosial dan lingkungan (M. Natsir Zubaidi, DMI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Selain DMI, organisasi yang secara struktural berafiliasi dengan NU dan Muhammadiyah, seperti LPBI NU dan MDMC, juga melakukan hal serupa. Kemitraan yang telah terbangun antara NU dan Danone Indonesia telah mendorong mereka untuk bersama-sama melakukan sejumlah inisiatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus upaya penanggulangan bencana, melalui penggunaan mobil instalasi pengolahan air (Beny Syaaf Jafar, LPBI NU, FGD, 20 Februari 2024). Sementara itu, untuk memberi bantuan korban terdampak bencana ekologis, MDMC juga telah beberapa kali bekerja sama dengan Danone Indonesia untuk menyalurkan beberapa bantuan (MDMC 2024).

Penggunaan identitas agama Islam di Indonesia juga dianggap memainkan peran penting untuk membangun jaringan dan kerja sama terhadap lembaga swasta. YBBL, contohnya, telah menjalin kemitraan dengan komunitas-komunitas Islam dan mengambil inspirasi dari ajaran Islam yang rasional untuk menciptakan kesadaran lingkungan yang lebih baik. Kolaborasi dengan media dan dukungan dari CSR BUMN juga menjadi bagian dari strategi mereka, dengan identitas agama menjadi pendorong untuk menggerakkan para donatur dari pihak manapun (Nurul Chasanah, YBBL, Wawancara, 26 Maret 2024).

Meski demikian, aktivis Green Islam yang memiliki karakter mobilisator, seperti Salam Institute, cenderung membatasi untuk membangun jaringan atau berkolaborasi dengan pihak korporasi, bahkan pemerintah. Syatori, dari Salam Institute, dalam FGD menyatakan bahwa mereka lebih memilih untuk mengandalkan penggalangan dana

secara mandiri dari anggotanya atau masyarakat secara umum. Rasa solidaritas dari anggota ini dianggap penting dalam memperluas jangkauan dan dampak dari upaya mereka dalam melindungi lingkungan. Sebagaimana prinsipnya untuk berpihak pada masyarakat kelas menengah ke bawah yang terdampak, Salam Institute cukup berhati-hati untuk bekerja sama dengan pemerintah, dan menolak untuk bekerja sama dengan industri-industri, terutama yang dicurigai telah menjadi pelaku perusakan lingkungan (Ahmad Syatori, Salam Institute, FGD, 20-22 Februari 2024).

6.6 Kesimpulan

Bab ini membahas bagaimana para aktivis gerakan Green Islam di Indonesia membangun jaringan dengan memanfaatkan identitas keislaman mereka. Meski tiap organisasi atau komunitas memiliki karakter dan landasan eko-teologi Islam yang berbeda-beda, mereka menggunakan identitas Islam sebagai identitas kolektif untuk membangun jaringan dengan berbagai pihak. Salah satu sumber daya jaringan yang mereka bangun dan memanfaatkan mencakup jaringan dengan para tokoh agama, seperti ulama, kiai, dan ustad, karena mereka memiliki pengikut (jemaah) dan pengetahuan keislaman yang dapat membantu menumbuhkan kesadaran lingkungan di kalangan Muslim secara luas. Lebih jauh, selain membangun jaringan dengan akademisi Muslim, para aktivis Green Islam juga menganggap penting berkolaborasi dengan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan institusi Islam seperti masjid, serta membangun jaringan dengan lembaga pendidikan Islam seperti sekolah Islam, pondok pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Ikatan emosional dan kesamaan identitas keislaman dapat memudahkan para aktivis Green Islam membangun jaringan dengan entitas tersebut.

Selain itu, aktivis Green Islam memperluas jaringan mereka dengan melibatkan lebih banyak aktor untuk memperkuat gerakan mereka. Di antaranya adalah membangun jaringan dengan pemerintah, baik lokal maupun nasional, untuk mendapatkan dukungan atas aksi-aksi lingkungan yang mereka lakukan. Mereka juga membangun jaringan internasional, di mana para aktivis Green Islam menggunakan identitas keagamaan mereka untuk berpartisipasi dalam forum internasional dan berkolaborasi dengan lembaga lingkungan internasional. Lebih jauh, para aktivis Green Islam juga memperluas jaringan dengan kelompok

lintas agama. Beberapa dari mereka bahkan membangun jaringan dan berkolaborasi dengan kelompok aktivis lingkungan non-keagamaan. Terakhir, beberapa kelompok Green Islam membangun jaringan dengan korporasi untuk memperluas dampak positif gerakan lingkungan yang mereka lakukan. Meski demikian, perlu dicatat bahwa kelompok Green Islam dengan tipe mobilisator cenderung lebih berhati-hati dalam membangun jaringan dengan pihak korporasi dan pemerintah, terutama yang mereka anggap menjadi subjek perusak lingkungan.

BAB 7

PRAKTIK GREEN ISLAM DI INDONESIA: STUDI KASUS

Bab ini mengulas studi kasus beberapa program terpilih Green Islam di Indonesia. Program Green Islam yang dibahas dalam bab ini dipilih secara purposif berdasarkan hasil observasi, Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam dengan 50 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis agama di Indonesia. Studi ini menemukan bahwa secara umum Green Islam di Indonesia lahir dalam rangka merespons problem-problem lingkungan berbasis lokal. Program kerja mereka umumnya memperlihatkan upaya organisasi atau komunitas Green Islam dalam mengatasi kondisi lingkungan di daerah mereka.

Program kerja atau praktik Green Islam yang diangkat di sini cukup bervariasi, mulai dari darurat sampah, punahnya satwa langka yang dilindungi, krisis air bersih, penolakan tambang, degradasi pesisir pantai akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), hingga perjuangan menjaga tanah adat. Bab ini juga akan mendiskusikan sejumlah faktor, mencakup aspek-aspek yang berasal dari dalam organisasi atau komunitas Green Islam, yang menjadi kekuatan dan keunggulan program kerja mereka. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah kekuatan identitas agama dan ajaran, peran tokoh aktivis lingkungan, sumber pendanaan, kegiatan lingkungan yang inovatif, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pelibatan perempuan. Faktor-faktor tersebut memengaruhi keberhasilan program-program Green Islam yang kami observasi dan diskusikan dalam buku ini.



7.1 Corak Program Aktivisme Green Islam di Indonesia

Aktivisme Green Islam di Indonesia cukup variatif. Meski sama-sama menggunakan identitas Islam, para aktivis Muslim yang terlibat dalam gerakan ini memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang lingkungan yang berbeda-beda. Perbedaan pemahaman lingkungan ini pada akhirnya berpengaruh pada pendekatan dan sikap mereka yang berbeda pula, terutama ketika harus mengartikulasikan nilai-nilai Islam sebagai dasar untuk membangun strategi dan program kerja dalam merespons fenomena krisis ekologi global.

Organisasi atau komunitas gerakan Green Islam di Indonesia cenderung berlandaskan pemahaman eko-teologi yang berasal dari ajaran-ajaran yang ada dalam Alquran dan hadis yang menekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat Muslim untuk terlibat dalam proyek-proyek sosio-ekologi berskala kecil (Grossman 2019). Kondisi ini dapat dilihat dalam perkembangan beberapa pesantren di Indonesia yang mulai mempraktikkan budaya ramah lingkungan. Selain itu bisa juga termanifestasi dari proyek sosio-ekologis berskala kecil seperti yang dilakukan Bumi Langit Institute dalam mendukung dan mendidik kelompok masyarakat desa di Bantul, Yogyakarta, untuk menerapkan praktik keberlanjutan yang didasari oleh kewajiban individu melindungi lingkungan.

Aktivisme sosio-ekologi Islam ini didasarkan pada pemahaman tentang perbaikan etika atau upaya membangun tradisi umat Islam untuk mengatasi problem lingkungan. Praktik ini menyerukan pentingnya suatu perubahan sikap dan gaya hidup umat Islam secara luas. Dalam aktivismenya, para aktivis Green Islam cenderung memberikan kerangka kerja konseptual secara umum bagi individu Muslim untuk memiliki tanggung jawab terhadap sesama dan kepada alam. Aktivitas mereka lebih cenderung pada mempromosikan etika lingkungan daripada bekerja dengan basis isu sosio-ekologis yang terjadi. Mereka juga percaya bahwa mempromosikan etika lingkungan merupakan langkah pertama yang penting untuk dilakukan oleh generasi saat ini yang secara alami akan diikuti oleh generasi di masa depan (lihat Smith dan Pulver 2009: 146-147).

Perbaikan etika ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menekankan individu Muslim untuk mematuhi hukum Islam dan memberikan contoh (Fikri dan Colombijn 2021: 16). Dalam hal yang

pertama, perbaikan etika yang menekankan pada kepatuhan hukum Islam, beberapa strategi yang sudah dilakukan sejauh ini adalah upaya untuk mengembangkan fikih lingkungan oleh para sarjana Muslim yang ahli dalam hukum Islam di Indonesia. Selain itu, juga terdapat berbagai upaya dari para ulama atau cendekiawan Muslim Indonesia yang mengeluarkan produk-produk hukum Islam melalui keputusan-keputusan fatwa (pendapat hukum Islam yang tidak mengikat). Fatwa-fatwa itu diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai strategi dalam mengatasi masalah lingkungan, seperti mendaur ulang air wudu, perlindungan satwa liar, dan pengelolaan sampah yang benar (Dewayanti dan Saat 2020; Mangunjaya dan Praharawati 2019; Gade 2015; Mangunjaya dan McKay 2012; Brockopp 2012).

Cara yang kedua, perbaikan etika lingkungan dengan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Muslim di Indonesia, telah dilakukan dengan pendekatan-pendekatan kreatif, sebagaimana termanifestasi dalam berbagai program kerja yang diinisiasi oleh kelompok Green Islam. Beberapa praktik aktual Green Islam tersebut di antaranya adalah eko-pesantren, eko-masjid, eko-dakwah, eko-ramadan, eko-haji, sedekah sampah, dan lain sebagainya (Dewayanti dan Saat 2020; Fikri dan Colombijn 2021; Reuter 2015; McKay et al. 2014; Gade 2012).

7.2. Program Terpilih Organisasi atau Komunitas Lingkungan Berbasis Islam di Indonesia

Studi ini mendaftar 32 program terpilih dari 50 organisasi lingkungan berbasis agama yang dihimpun dari hasil FGD, wawancara, dan observasi. Secara terperinci, 21 program berasal dari gerakan Green Islam, 8 program dari gerakan lingkungan berbasis agama-agama lain, dan 3 program berasal dari tradisi lokal. Setidaknya terdapat tiga alasan yang menjadi dasar mengapa program-program itu kami nilai sebagai program terpilih. Pertama, program lingkungan yang mereka jalankan memberikan dampak yang luas kepada masyarakat, tidak hanya terbatas pada satu wilayah, melainkan juga menjangkau wilayah-wilayah di sekitarnya. Kedua, program yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan (*sustainability*), bukan sekadar kegiatan musiman atau sekali jalan. Ketiga, program-program tersebut memperlihatkan komitmen para aktivis Green Islam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam dalam aktivisme lingkungan (Millah, 2023).

Sebagian program terpilih yang diterapkan oleh Green Islam, komunitas adat, serta organisasi berbasis agama lainnya umumnya memiliki jenis aktivisme yang serupa atau kegiatan yang mirip. Yang membedakannya adalah latar belakang agama masing-masing. Oleh karena itu, dalam program-program terpilih, terdapat beberapa pola kesamaan yang dapat ditemukan. Misalnya, terkait dengan konservasi hutan, Pusat Pengkajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS) memiliki program terpilih dalam konservasi alam, terutama keanekaragaman hayati, melalui program "Dai Konservasi". Program ini lahir sebagai respons terhadap kelangkaan dan kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia yang disebabkan oleh perburuan dan perdagangan satwa liar (*wildlife trafficking*). Program serupa juga dijalankan oleh Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA), sebuah organisasi lingkungan yang didirikan pada tahun 2013. Organisasi ini berjuang untuk melindungi Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh yang semakin terancam.

Terkait konservasi sungai, program terpilih dalam hal ini dapat ditemukan pada komunitas lokal, seperti *Save Ake Gaale*. Komunitas ini berperan aktif dalam menjaga kelangsungan sumber air di Kota Ternate yang mengalami penurunan kualitas air akibat intrusi air laut. Hal serupa juga dilakukan oleh masyarakat adat Dayak Iban di Rumah Betang Sungai Utik. Selain itu, organisasi berbasis Kristen, seperti Klasis GMIT, juga turut berkontribusi dalam konservasi air melalui program "Hutan Gereja".

Dalam program-program terkait manajemen sampah dan limbah (*waste management*), Lembaga Dakwah Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (LDII DIY) konsisten dengan program "Kiai Peduli Sampah", sementara Yayasan Bina Bantuan Lingkungan (YBBL) juga aktif menjalankan program bank sampah di Surabaya. Selain itu, Eco Bhinneka Muhammadiyah mengelola sampah menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Tidak hanya Green Islam, organisasi-organisasi lingkungan dari berbagai agama juga memiliki kesadaran yang sama terhadap isu sampah, seperti yang dilakukan oleh Pemerhati Peduli Lingkungan (Pepulih), Sanggar Hijau, dan Yayasan Buddha Tzu Chi dari komunitas Buddha.

Dalam aktivisme penghijauan, studi ini menemukan bahwa beberapa organisasi lingkungan, seperti Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Aisyiyah, memiliki program *green school* yang serupa dengan program pendidikan ekologi yang dimiliki oleh Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Sementara itu, Dewan

Masjid Indonesia (DMI) melaksanakan aksi penghijauan di masjid-masjid di seluruh Indonesia. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) juga terlibat aktif dalam aktivisme restorasi gambut.

Beberapa program komunitas Green Islam seperti EcoDeen, AgriQuran, dan Bumi Langit cukup konsisten memengaruhi masyarakat melalui media sosial. Sementara itu, Salam Institute memengaruhi masyarakat pesisir melalui program "Pesantren Ekologi", dan Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) melalui kegiatan "Mubalighah Lingkungan". Sebagai bagian dari isu lingkungan, mitigasi bencana juga menjadi bagian program kerja kelompok Green Islam. Hal ini terlihat pada upaya yang dilakukan oleh Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), LLHPB 'Aisyiyah, dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).

Berikut adalah presentasi program terpilih gerakan Green Islam yang kami jadikan studi kasus untuk menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi dalam memengaruhi keberhasilan program-program Green Islam.

7.2.1 Manajemen Sampah dan Limbah

Salah satu program terpilih dalam pengelolaan sampah dan limbah (*waste management*) dapat ditemukan dalam program lingkungan "Kiai Peduli Sampah" dan Program Kampung Iklim (ProKlim) yang digagas oleh LDII DIY. Lembaga ini, yang dipimpin oleh Atus Syahbuddin, seorang Dosen Kehutanan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, memulai inisiatif tersebut pada Agustus 2018. Program ini muncul sebagai respons terhadap krisis darurat sampah yang melanda Yogyakarta pada tahun 2015. Pada saat itu, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Bantul, yang telah berfungsi sebagai muara pembuangan sampah di 'Kota Pelajar' sejak 1995, telah mencapai kapasitas maksimalnya. TPA Piyungan yang memiliki luas 10 hektar kini dipenuhi tumpukan sampah yang meluas hingga ke pemukiman warga.

Pada 2022, warga menuntut Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menutup TPA Piyungan, namun hasilnya dianggap nihil. Truk-truk sampah terus memadati kawasan TPA. Terlebih, kendala biaya pengelolaan sampah sangat tinggi, sementara biaya retribusi yang ditarik petugas sampah sangat rendah (*Radar Jogja* 2024). Momentum yang disebut "Jogja Darurat Sampah" ini menjadi inspirasi bagi program Kiai Peduli Sampah. Atus menyatakan, momentum Jogja Darurat Sampah



merupakan faktor eksternal terbentuknya program tersebut, meskipun sebelum itu LDII DIY sudah aktif dalam program-program lingkungan dan ketahanan pangan (Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, FGD, 6-8 Maret 2024).

Ketertarikan LDII DIY terhadap isu lingkungan, menurut Atus, diilhami oleh ajaran agama untuk melakukan "amal saleh" atau berbuat kebaikan. Landasan "amal saleh" yang menjadi ciri khas ajaran LDII DIY ini dinilai mampu membangkitkan kesadaran masyarakat, khususnya warga LDII DIY, untuk berpartisipasi aktif dalam merawat lingkungan. LDII menargetkan untuk mewujudkan rumah tangga yang minim sampah, bahkan mencapai *zero waste*. Oleh karena itu, LDII memiliki semangat menjadikan sampah sebagai sarana sedekah dan jariyah. Setiap dua kali dalam seminggu, LDII mengadakan pengajian dan mengajak jamaah untuk mengamalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan pengelolaan sampah (Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, wawancara, 27 April 2024).

Isu lingkungan telah menjadi salah satu program kerja LDII DIY sejak Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2018. Bagi LDII, lembaga dakwah tidak hanya berfokus pada dakwah keagamaan dalam arti tekstual, tetapi juga dakwah terkait isu lingkungan. Pada Munas 2018, terdapat delapan program LDII untuk bangsa yang dirumuskan, salah satunya adalah program ketahanan pangan dan lingkungan hidup (Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, FGD, 6-8 Maret 2024). Untuk mengimplementasikan rumusan tersebut, selain program Kiai Peduli Sampah, LDII DIY juga membentuk ProKlim, sebuah gerakan bersama untuk pengendalian perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Program ini merupakan perpanjangan tangan dari program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Salah satu wilayah yang menjadi bagian dari ProKlim adalah Dusun Sangurejo, Turi, Sleman, Yogyakarta. Dahulu, kampung ini dikenal sebagai daerah yang relatif kumuh, miskin, dan padat penduduk. Namun, melalui ProKlim, LDII DIY berhasil mengubahnya menjadi desa wisata lingkungan. Di desa tersebut, terdapat beberapa kegiatan, salah satunya adalah kegiatan "Kiai Sampah". Program ini digagas oleh LDII DIY sebagai kegiatan yang sederhana, praktis, murah, namun tetap relevan dan mudah diterima oleh masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada wacana, tetapi juga pada aksi nyata untuk menjaga lingkungan, seperti pembiasaan pemilahan sampah di rumah masing-masing dan

menjadikan masjid sebagai bank sampah. Pengelolaan bank sampah ini dilakukan oleh jamaah atau pemuda masjid LDII DIY. Gerakan ini umumnya dilaksanakan di kelompok-kelompok pengajian atau majelis taklim.

LDII DIY juga mendorong jamaah untuk membuat "*jugangan ing omah*" (lubang sampah) di pekarangan masjid dan di halaman rumah tangga masing-masing untuk mengelola sampah organik. Lubang ini dapat menjadi sumber pupuk kompos biopori alami yang berguna untuk konservasi air. Sementara itu, sampah plastik yang sudah dipilah akan disedekahkan ke masjid untuk dikelola sebagai bank sampah oleh remaja LDII DIY (Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, wawancara, 27 April 2024).

Selain itu, LDII DIY juga memberikan pelatihan kepada para remaja LDII melalui program "Dai ProKlim". Pelatihan tersebut diikuti oleh takmir masjid di bawah naungan LDII seluruh DIY yang biasanya dilakukan di aula Masjid Al-Huda, Sangurejo. Salah satu materi pelatihannya yaitu mengupas dalil-dalil Alquran dan sunah berkaitan dengan isu lingkungan. Hingga kini, sudah lebih dari 500 dai di DIY menerima manfaat, serta para dai di tujuh provinsi lain.

Selain program Kiai Peduli Sampah, dan ProKlim, LDII DIY juga memiliki sanggar UMKM Ecoprint dan Craft Sangurejo (ECSA). Jika remaja laki-laki umumnya bergerak pada program Kiai Peduli Sampah, remaja perempuan dan kelompok ibu-ibu aktif pada kegiatan UMKM Ecoprint. Kelompok ibu-ibu dan remaja perempuan diberikan pelatihan membuat *ecoprint* ramah lingkungan. Atus memaparkan bahwa LDII mendaur ulang sampah organik daun untuk menjadi kain yang dicetak, selain menjadi kompos yang dapat dijual (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, wawancara, 27 April 2024).

7.2.2 Dakwah Satwa Langka di Masyarakat

Program Dai Konservasi PPI UNAS yang fokus pada aspek dakwah satwa langka di masyarakat merupakan program terpilih berikutnya. PPI UNAS berdiri tahun 1985. Sejak Fachruddin Mangunjaya memimpin PPI UNAS, ia telah mengupayakan pelatihan konservasi keanekaragaman hayati di beberapa wilayah di Indonesia dengan program "Dai Konservasi". Pelatihan tersebut dimulai sejak 2006 hingga kini. Sudah 354 orang dai yang telah mengikuti pelatihan tersebut. Para dai ini sengaja dilatih oleh PPI UNAS yang nantinya diharapkan di masyarakat

dapat mendakwahkan pentingnya perlindungan satwa liar di Indonesia (Muhammad Zulham, PPI UNAS, FGD, 20-22 Februari, 2024).

Program Dai Konservasi dirancang untuk merespons kelangkaan dan kepunahan satwa dilindungi akibat perburuan dan perdagangan satwa liar (*wildlife trafficking*). Indonesia adalah negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (*megabiodiversity country*) (Sukara dan Tobing, 2008; Tobing, 2012). Namun sayangnya, dalam beberapa dekade belakangan, Indonesia mengalami penurunan keanekaragaman hayati akibat program perdagangan liar, diperparah dengan intensitas kebakaran hutan yang sering terjadi terutama pada 1997 dan 2019 yang mengakibatkan rusaknya hutan.

Kerusakan tersebut menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya yang berdampak negatif pada kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar hutan. Salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadi konflik ruang antara satwa liar dan manusia (PPI UNAS 2013). Konflik yang sering terjadi tersebut menyebabkan matinya ratusan gajah dan harimau di Sumatera. Misalnya, selama periode 2012 hingga 2014, tidak kurang dari 74 ekor gajah di Sumatera yang mati akibat berkonflik dengan manusia, mulai dari Aceh hingga Lampung (WWF Indonesia 2015). Sementara di Aceh, selama 2012-2015, sedikitnya 40 ekor gajah Sumatera mati, dan ketika ditemukan sudah tidak memiliki gading. Diduga gading-gading itu diambil untuk diperdagangkan (LPLH SDA Majelis Ulama Indonesia 2017).

Mangunjaya menyatakan bahwa pelestarian alam melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dengan pendekatan agama sangat mendesak untuk dilakukan. Menurutnya, pendekatan agama Islam merupakan strategi yang cukup efektif, mengingat sebagian besar lokasi penyebaran satwa langka berada di wilayah-wilayah di mana masyarakat Muslim memegang teguh ajaran agamanya. Pelestarian alam dapat dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati di tingkat akar rumput, seperti kiai, dai, teungku, dan lain sebagainya. Selain itu, menurutnya, menjaga kelestarian satwa liar merupakan salah satu sunah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad (Fachruddin M. Mangunjaya, Direktur PPI UNAS, wawancara, 22 Maret 2024)

Program Dai Konservasi ini dilakukan melalui kerjasama dengan WWF, Keanekaragaman Hayati (Kehati), dan Yayasan Pendidikan Pelestarian Alam (Yapeka). Program tersebut dilaksanakan di beberapa

wilayah di Indonesia, di antaranya Aceh, Aceh Selatan, Riau, Mandailing Natal, Sumatera Selatan, Banten, Bogor, Sulawesi, Kalimantan (Barat, Selatan, dan Tengah), dan Raja Ampat Papua Barat. Beberapa wilayah tersebut dipilih karena memiliki potensi hutan tutup terbaik di Indonesia (PPI UNAS 2023).

Program Dai Konservasi pertama dilakukan di Riau dengan peserta sebanyak 20 orang dai dan ustad di sekitar Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling, Riau. Mereka berasal dari tiga kecamatan dan 17 desa serta pondok pesantren di sekitar Suaka Margasatwa Rimbang Baling. Kegiatan lokalatih tersebut merupakan kerjasama PPI UNAS dengan Departemen Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH SDA) MUI dan WWF Indonesia. Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Selain minyak dan gas bumi, Riau juga merupakan kawasan hutan yang menghasilkan oksigen, sumber air bersih, serta berbagai jenis tumbuhan yang digunakan sebagai sumber pangan, obat, dan juga komoditas perdagangan. Hutan yang membentang di Riau menjadi wilayah berkembangnya satwa liar yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan. Selain itu, Suaka Margasatwa Bukit Rimbang Baling juga merupakan habitat asli bagi satwa-satwa liar yang masih tersisa di Riau (PPI UNAS, 2016).

Di akhir pelatihan, peserta menyusun materi khotbah Jumat yang berkaitan dengan konservasi alam dan pelestarian satwa langka. Mangunjaya kemudian mengusulkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta untuk membuat fatwa. Usulan tersebut kemudian direspons positif oleh MUI yang pada saat itu diketuai oleh Din Syamsuddin. Pada 2013, PPI Unas bekerja sama dengan WWF Indonesia, *Alliance of Religious and Conservation* (ARC), dan LPLH SDA MUI melakukan studi lapangan di beberapa tempat di Sumatera. Mereka mengunjungi Suaka Margasatwa Tesso Nilo di Riau, lokasi bagi lebih dari 4 ribu spesies tumbuhan, dan tempat aman bagi gajah dan harimau Sumatera yang terancam punah akibat adanya penanaman kelapa sawit ilegal, kebakaran hutan, dan tindakan perusakan lainnya (PPI UNAS, 2023).

Setelah kunjungan tersebut, MUI kemudian menyusun fatwa yang melibatkan aktivis lingkungan dan akademisi dari Unas, di antaranya Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan, WWF Indonesia, Flora dan Fauna Internasional dan Forum Konservasi Harimau Indonesia (Harimau Kita), dan *Alliance of Religious and*

Conservation (ARC) (Fachruddin M. Mangunjaya, Direktur PPI UNAS, wawancara, 22 Maret, 2024).

Pada tanggal 22 Januari 2014, MUI merumuskan Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 mengenai Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. Fatwa ini menegaskan dua hal penting. Pertama, perlakuan terhadap satwa langka harus dilakukan dengan baik, melalui upaya perlindungan dan pelestarian untuk memastikan kelangsungan hidupnya, yang hukumnya wajib. Kedua, perburuan dan/atau perdagangan ilegal satwa langka hukumnya haram. Fatwa ini juga memberikan kepastian hukum dari perspektif Islam mengenai perlindungan satwa, khususnya bagi satwa yang terancam punah, seperti harimau, gajah, badak, dan orang utan. Mengingat pentingnya aspek konservasi alam dengan pendekatan Islam tersebut, PPI UNAS kemudian secara aktif mengampanyekan fatwa tersebut dalam berbagai media sebagai sarana penyadaran kepada masyarakat dalam bentuk komik, video, poster, *flyer*, dan buku.

7.2.3 Perempuan dalam Program-Program Green Islam

Beberapa program Green Islam dapat dipahami melalui pendekatan ekofeminisme. Program Green Islam terkait ekofeminisme dapat dilihat melalui sejumlah inisiatif dari berbagai organisasi, seperti LLHPB 'Aisyiyah, HAKA (Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh), LDII DIY, dan Komunitas Muslim Adat Ammatoa Kajang. Gerakan ekofeminisme ini mengintegrasikan kepentingan perempuan dengan pelestarian lingkungan, memandang bumi sebagai representasi perempuan yang memberikan kehidupan bagi umat manusia. Ekofeminisme tidak hanya menyoroti peran perempuan dalam menjaga lingkungan, tetapi juga menggambarkan hubungan antara krisis ekologis dan pengalaman perempuan, khususnya terkait dengan minimnya representasi perempuan dalam pengambilan kebijakan lingkungan.

Beberapa inisiatif yang melibatkan perempuan dalam gerakan ekofeminisme antara lain program ProKlim LDII DIY melalui Sanggar UMKM Ecoprint dan Craft Sangurejo (ECSA), yang melatih perempuan untuk menghasilkan produk ramah lingkungan dari bahan organik, seperti kain ecoprint. Produk-produk ini telah dipasarkan baik di tingkat lokal maupun internasional. Selain itu, Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Sangurejo juga aktif dalam kegiatan penghijauan. Organisasi LLHPB 'Aisyiyah dan HAKA turut menjadi pionir dalam mengangkat

peran perempuan sebagai pelopor penyelamatan lingkungan di Indonesia. Sementara itu, Komunitas Muslim Adat Ammatoa Kajang melestarikan tradisi tenun yang juga mendukung perekonomian lokal.

Di Ammatoa Kajang, perempuan memegang peran sentral dalam kegiatan ekonomi berkelanjutan melalui produksi kain tenun, yang juga merupakan salah satu syarat untuk menikah. Kain ini tidak hanya diproduksi untuk kebutuhan komunitas, tetapi juga dipasarkan secara luas, dengan dukungan dari organisasi seperti AMAN, Kemitraan, dan Dinas LHK. Tradisi dan kearifan lokal perempuan Ammatoa mencerminkan kolaborasi ekofeminisme antara budaya dan pelestarian lingkungan, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan organisasi lingkungan.

Selain itu, program ekofeminisme juga tercermin dalam upaya HAKA dan LLHPB 'Aisyiyah. HAKA, yang didirikan oleh Farwiza Farhan, memfokuskan aktivismenya pada pemberdayaan ulama perempuan (*teungku inong*) untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh dan perlindungan satwa liar. Didirikan pada tahun 2013, HAKA awalnya fokus pada pengawasan terhadap aktivitas ilegal di kawasan hutan, seperti kasus pembakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk PT Kalista Alam. Selama perjalanan organisasinya, HAKA terus mendampingi masyarakat dalam mengawal kasus-kasus tersebut dengan memberikan penguatan kepada masyarakat melalui berbagai pelatihan hukum dan pembangunan komunitas. Seperti yang disampaikan oleh Munira Rezkina, *Legal Officer* HAKA, "Kegiatan awal kami lebih banyak berfokus pada pengadilan dan penguatan masyarakat, seperti pelatihan hukum" (FGD, 20-22 Februari 2024).

Namun, setelah sepuluh tahun berkiprah, HAKA menyadari bahwa pendekatan tersebut tidak cukup efektif. Oleh karena itu, HAKA mulai mengadopsi pendekatan baru yang lebih fokus pada advokasi kebijakan untuk memperkuat perlindungan lingkungan, terutama dalam konteks Aceh. Salah satu langkah yang diambil adalah pengawalan tata ruang wilayah Aceh melalui kanun dan pengawalan Peraturan Presiden (Perpres) tentang penetapan Kawasan Ekosistem Leuser sebagai taman nasional. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak pembangunan infrastruktur yang merusak kawasan KEL.

Selain itu, HAKA juga mengadopsi pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada keterlibatan kelompok perempuan,

seperti *ranger* perempuan. Kelompok ini bertugas untuk memantau hutan desa dan menanggapi pembangunan yang tidak berkelanjutan di wilayah masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Munira, "Kami mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal, dan perlakuannya berbeda-beda untuk setiap desa dampingan. Ada yang lebih mengarah pada ekonomi hijau, patroli hutan yang dipimpin oleh *ranger* perempuan, dan lain sebagainya" (FGD, 20 Februari 2024).

Karena kurangnya dukungan dari masyarakat, HAKA menjalin sinergi dengan pesantren (*dayah*) serta ulama Aceh untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan HAKA adalah mendukung Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam merumuskan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perspektif Syariat Islam. Fatwa ini menegaskan bahwa membunuh satwa tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dibenarkan adalah haram. Fatwa ini kemudian membuka kesempatan bagi HAKA untuk mengorganisir dan berkolaborasi dengan *teungku inong* dan *teungku agam* di seluruh wilayah dayah Aceh, guna menyebarkan pelestarian lingkungan melalui pelatihan dan *workshop* (Munira Rezkina, *Legal Officer* HAKA, FGD, 20-22 Februari 2024).

Selanjutnya, terdapat LLHPB 'Aisiyah, sebuah lembaga yang dibentuk berdasarkan Muktamar 'Aisiyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015 sebagai respons terhadap upaya penyelamatan alam dan kehidupan manusia dari dampak lingkungan dan bencana. Meskipun gerakan lingkungan dalam tubuh Aisiyah sudah dimulai sejak lama, lembaga ini baru terbentuk secara resmi pada tahun 2015. Hening Parlan, Koordinator Bidang Lingkungan LLHPB 'Aisiyah Jakarta, menjelaskan bahwa, "Aisiyah sebenarnya sudah lama bergerak dalam isu lingkungan. Pada awalnya, gerakan ini dimasukkan ke dalam program kesejahteraan, kemudian lima tahun berikutnya dialihkan ke dalam bidang kesehatan, karena mereka menganggap lingkungan adalah bagian dari kesehatan. Pada tahun 2015, diputuskan untuk membentuk lembaga tersendiri, yaitu Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB), yang hasilnya lahir dari muktamar di Makassar" (Hening Purwanti Parlan, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB 'Aisiyah, wawancara, 23 April 2024).

Sebagai sayap perempuan dari organisasi Muhammadiyah, kehadiran LLHPB 'Aisiyah menjadi tonggak sejarah karena merupakan

satu-satunya lembaga yang mempelopori gerakan perempuan Islam berkemajuan yang terlibat aktif dalam upaya penyelamatan bumi. Hening Parlan, yang sebelumnya bergabung dengan WALHI dan *Humanitarian Forum Indonesia* (HFI), mengusulkan konsep "Green Aisiyyah" untuk program LLHPB. Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan isu lingkungan ke dalam tubuh Aisiyyah dengan pendekatan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Menurut Parlan, "Green Aisiyyah adalah konsep yang dimulai dengan meletakkan nilai agama untuk membangun gerakan atau Green Islam dalam kegiatan Aisiyyah" (Hening Parlan, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB 'Aisiyyah, wawancara, 23 April 2024).

Konsep "Green Aisiyyah" kemudian diwujudkan melalui program pertama mereka, yaitu Ngaji Lingkungan. Program ini diikuti oleh hingga 200 peserta (Hening Parlan, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB 'Aisiyyah, wawancara, 23 April 2024). Ngaji Lingkungan bertujuan untuk melahirkan mubalighah lingkungan, dengan harapan para peserta dapat menjadi ustazah yang menyebarkan dakwah tentang lingkungan. "Harapannya, dari Ngaji Lingkungan ini, muncul ustazah-ustazah yang kami sebut mubalighah lingkungan. Saat ini, ada 172 mubalighah lingkungan yang telah mengikuti pelatihan. Di dalam pelatihan tersebut ada tiga hal yang dibahas, yaitu: pertama, Islam dan lingkungan; kedua, Aisiyyah dan lingkungan hidup; dan ketiga, model-model serta aksi-aksi kegiatan lingkungan" (Hening Parlan, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB 'Aisiyyah, wawancara, 23 April 2024).

LLHPB 'Aisiyyah terus berkembang dan kini memiliki cabang di seluruh Indonesia. Meskipun pusatnya berada di Jakarta, setiap ranting di daerah memiliki struktur dan kegiatan masing-masing. Sebagai gerakan dakwah sosial perempuan, LLHPB 'Aisiyyah kini dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi ini hadir di 34 provinsi, serta di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri, seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Kairo, dan Belanda (Profil LLHPB, 2016). Dalam aktivismenya, LLHPB 'Aisiyyah menggunakan dasar Islam, dengan merujuk pada Alquran dan hadis serta berlandaskan khithah perjuangan Muhammadiyah. Sebagaimana dijelaskan oleh Suria Dwiwahyu, Ketua DPW 'Aisiyyah DIY, "Kami memang bergerak dalam organisasi masyarakat yang berbasis agama, sehingga setiap langkah yang kami ambil selalu menggunakan

identitas agama sebagai landasan perjuangan” (Suria Dwiwahyu, Ketua DPW 'Aisyiyah DIY, FGD, 20-22 Februari 2024).

Profil LLHPB 'Aisyiyah juga mencantumkan beberapa rujukan dalil Alquran dan hadis terkait lingkungan, di antaranya Surah Al-Baqarah (2:30), Surah Ar-Rum (30:41), Surah Al-Qashash (28:77), Surah Ar-Rahman (55:7-8), Surah Al-A'raf (7:85), serta hadis yang berbunyi, "Sayangilah siapa yang ada di muka bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh siapa saja yang ada di langit" (HR. At-Tirmidzi No. 1924). Landasan-landasan ini menjadi motivasi dan amanat yang kuat bagi LLHPB 'Aisyiyah di seluruh rantingnya. Prinsip tersebut semakin diperkuat dengan penerapan ajaran *amar ma'ruf nahi munkar* yang terdapat dalam Surah Al-Imran (3:104), yang dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan LLHPB 'Aisyiyah. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kesadaran iman, tetapi juga memerintahkan umat manusia untuk berperan aktif dalam menjaga dan menyelamatkan bumi (LLHPB 'Aisyiyah, 2022). Prinsip ini dituangkan dalam visi “mewujudkan masyarakat utama yang menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*, andal dan proaktif dalam melestarikan lingkungan hidup, serta tanggap terhadap bencana yang mengancam” (Profil LLHPB 'Aisyiyah Pimpinan Pusat Aisyiyah, 2016).

Sejak tahun 2015, LLHPB 'Aisyiyah telah melaksanakan berbagai program lingkungan, termasuk kajian, pengajian, penelitian, pendidikan, pelatihan, dan dakwah. Selain itu, LLHPB 'Aisyiyah juga menerbitkan berbagai buku dan panduan, seperti *Green Idul Fitri*, *Green Idul Adha*, Surat Edaran *Green Idul Adha*, manajemen sampah dan limbah, konservasi gambut, sedekah pohon, penanaman pohon dengan sistem pola asuh, program kelenturan keluarga, dan lainnya. Setiap ranting memiliki fokus program yang disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya, dan semua kegiatan LLHPB 'Aisyiyah, baik di tingkat pusat maupun ranting, saling berkoordinasi. Kegiatan-kegiatan ini juga terdokumentasi dalam majalah dan situs *website* Suara Aisyiyah: Inspirasi Perempuan Berkemajuan.

Di Yogyakarta, LLHPB 'Aisyiyah DIY fokus pada kegiatan lingkungan dengan memanfaatkan potensi pendidikan Aisyiyah di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), khususnya melalui program "*Green School*" yang diterapkan di Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA). Program ini bertujuan untuk mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Salah satu TK yang kami kunjungi adalah TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) di

Komplek Masjid Kotagede, Yogyakarta. Di TK ini, para guru mengajarkan peserta didik untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Anak-anak diajarkan untuk membawa bekal yang tidak dikemas dalam plastik, dan apabila mereka membawa plastik, bekas plastik tersebut akan diubah menjadi *ecobrick*. LLHPB 'Aisyiyah DIY juga meluncurkan Modul Tanaman Obat (Motoga) dalam bentuk aplikasi yang dapat diunduh di *Playstore*. Aplikasi Motoga ini berfungsi sebagai panduan bagi masyarakat untuk mengetahui manfaat berbagai tanaman obat. Penyusunan aplikasi ini merupakan hasil kerja sama antara LLHPB 'Aisyiyah, Universitas Ahmad Dahlan, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

7.2.4 Kampanye Lingkungan Berbasis Islam di Media Sosial

Terdapat tiga komunitas atau lembaga Green Islam yang konsisten mengampanyekan isu lingkungan melalui kanal-kanal media sosial, yaitu EcoDeen, AgriQuran, dan Bumi Langit. Dua di antaranya, EcoDeen dan AgriQuran, didirikan oleh kelompok anak muda yang aktif mengkaji Islam, sementara Bumi Langit didirikan oleh seorang mualaf keturunan Inggris. Ketiga akun media sosial itu memiliki jumlah pengikut yang cukup signifikan. Sebagai contoh, Bumi Langit memiliki 59,5 ribu pengikut, AgriQuran 46,6 ribu, dan EcoDeen 4,7 ribu pengikut. Banyaknya pengikut ini menjadikan AgriQuran sebagai salah satu *startup* terbaik di Indonesia. Meskipun ketiga komunitas ini memiliki perbedaan dalam latar belakang, mereka memiliki kesamaan dalam aktivisme, terutama dalam kajian mengenai gaya hidup minimalis dan pendekatan pertanian dalam Islam. Media sosial menjadi alat penting yang mereka manfaatkan untuk mempromosikan isu lingkungan di kalangan masyarakat Muslim perkotaan.

EcoDeen didirikan pada tahun 2019 oleh Rissa Ozalifia dan rekan-rekannya yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan. Komunitas ini lahir sebagai respons terhadap peningkatan volume sampah yang terjadi setiap bulan Ramadan (Rissa Ozalifia, Co-Founder EcoDeen, FGD, 20-22 Februari 2024). EcoDeen menjadikan Islam sebagai motivasi utama, dengan prinsip bahwa "kita tahu bahwa lingkungan itu penting dalam Islam, di mana Alquran mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan, tidak berlebihan, dan tidak merusak. Itulah semangat yang mendorong berdirinya EcoDeen pada tahun 2019" (Rissa Ozalifia, Co-Founder EcoDeen, FGD, 20-22 Februari 2024). Menanggapi kondisi

tersebut, EcoDeen kemudian merancang program-program yang berkolaborasi dengan komunitas dakwah dan pegiat lingkungan. Melalui strategi ini, EcoDeen berperan sebagai penghubung dan wadah belajar bersama mengenai peran penting umat Muslim dalam menjaga lingkungan (Rissa Ozalifia, Co-Founder EcoDeen, FGD, 20 Februari 2024).

Di media sosial, terutama Instagram EcoDeen (@ecodeen.id), komunitas ini mengampanyekan gaya hidup minimalis, khususnya kepada masyarakat Muslim kelas menengah ke atas di perkotaan, dengan tiga pendekatan utama: edukasi, modul toolkit, dan aksi bersama. Dalam hal edukasi, EcoDeen secara rutin menyelenggarakan serangkaian webinar, pelatihan, dan konsultasi, yang menghadirkan berbagai tokoh dan pakar, seperti Andini Miranda dari komunitas Suara Sampah, Kang Gun Gun, Direktur Utama PD Kebersihan Kota Bandung, Hayu Prabowo, Ketua LPLH SDA MUI, Galih dari Komunitas 1000 Kebun, M. Elvandi dari Pembina Muda *Environment Care*, Fachruddin Mangunjaya dari PPI UNAS, dan lainnya (Rissa Ozalifia, Co-Founder EcoDeen, FGD, 20 Februari 2024).

Terkait modul dan toolkit (serangkaian modul dan toolkit komunitas). sebagai upaya menyediakan panduan bagi masyarakat Muslim, EcoDeen menyusun beberapa materi, di antaranya modul 'Ramadan Minim Sampah', modul 'Islam dan Minimalisme', modul 'Ekonomi Sirkular', serta penyusunan literatur Islam dan lingkungan. Semua panduan ini dapat diunduh secara gratis melalui situs web EcoDeen

Yang ketiga adalah kegiatan aksi berbagi. Kegiatan ini merupakan hasil kerja sama dengan program *crowdfunding*. Hingga saat ini, EcoDeen telah melaksanakan empat kegiatan berbagi, yaitu: *Berbagi Galon Berkah*, *Hampers untuk Hutan*, *Patungan Besek*, dan *Donasi 1 Mud untuk Wudu*. Semua kegiatan ini dipromosikan melalui media sosial, terutama Instagram EcoDeen. Seperti yang disampaikan oleh Rissa, "Kami juga sempat mengadakan *Galon Berkah* untuk berbagi galon berkah, kemudian membuat modul *less waste* yang diluncurkan saat awal pandemi COVID-19. Kami juga menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi. Namun, ketika pandemi terjadi, arah gerak kami justru lebih banyak berfokus pada webinar. Selama pandemi, kami mengadakan beberapa seri webinar yang disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pak Hayyu S. Prabowo, serta PPI UNAS. Selain itu, kami juga mengadakan diskusi *online* bertema '*Interfaith Discussion*' yang

membahas isu-isu lingkungan" (Rissa Ozalifia, Co-Founder EcoDeen, FGD, 20 Februari 2024).

AgriQuran juga melakukan kegiatan serupa dengan EcoDeen dalam mengampanyekan isu lingkungan melalui media sosial. Komunitas AgriQuran, yang berpusat di Bandung konsisten memperkenalkan konsep pertanian yang berlandaskan pada visi Alquran sejak tahun 1995. Komunitas ini dipimpin oleh Muhammad Farras Muhadzdzib dan kini memiliki ribuan pengikut di berbagai platform media sosial. Seperti yang disampaikan oleh Farras dalam Forum Group Discussion (FGD) pada 6-8 Maret 2024, "Salah satu upaya yang kami lakukan selama lima tahun terakhir adalah memanfaatkan media untuk mengedukasi masyarakat tentang pertanian berlandaskan Alquran. Di Instagram, kami memiliki 47 ribu pengikut, sementara di TikTok, dalam waktu satu bulan, jumlah pengikut kami sudah mencapai 9 ribu" (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024).

Komunitas ini berawal dari keprihatinan terhadap kerusakan dan ketidakseimbangan yang ditimbulkan oleh tindakan manusia. Menurut Farras, sejatinya tugas manusia adalah memakmurkan bumi, bukan merusaknya. Oleh karena itu, agar tetap konsisten dalam menggerakkan isu lingkungan, AgriQuran berpegang pada nilai-nilai agama yang selaras dengan ayat-ayat Allah, baik yang tercantum dalam Alquran maupun yang dapat dilihat dalam alam semesta. Farras menambahkan, "Kami terus belajar dari para guru yang kami temui, salah satunya Pak Iskandar Waworuntu dari Bumi Langit. Setelah lima tahun belajar, kami semakin tersadarkan akan peran kita sebagai makhluk yang diamanahkan oleh Tuhan untuk memakmurkan bumi" (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024).

Sebagai bagian dari strategi untuk membangun kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat perkotaan, AgriQuran aktif mengunggah informasi berbagai kegiatan lingkungan mereka di media sosial, terutama yang berkaitan dengan pertanian dan Alquran. Farras menjelaskan, "Kami menemukan banyak keserasian antara pertanian dan Alquran, dan ini mendorong kami untuk terus belajar dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat" (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024).

AgriQuran juga mengampanyekan pentingnya hidup minimalis dan menghindari sikap mubazir. "Kami mengambil inti sari dari Alquran sebagai pedoman hidup, seperti dalam Surat Al-Baqarah ayat 60 yang

mengajarkan kita untuk makan dan minum tanpa berlebihan, serta tidak merusak. Contoh lainnya, dalam Surat Al-Isra' ayat 27, Allah berfirman, 'Sesungguhnya orang-orang yang berlebih-lebihan itu adalah saudara-saudara setan.' Banyak dari sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik, seperti sisa konsumsi atau sisa dapur," ujar Farras.

Selain aktif di media sosial, AgriQuran juga menyelenggarakan berbagai program, antara lain *workshop*, proyek pesantren berdaya, dan aktivasi lahan yang sempat terbengkalai. Farras menambahkan, "Kami sering diundang ke sekolah-sekolah dan pesantren untuk berbagi pengetahuan tentang cara menciptakan lingkungan hijau. Kami mengapresiasi pemerintah yang mendukung program Adiwiyata, dan kami juga sering diminta untuk memberikan masukan mengenai bagaimana menciptakan kawasan hijau di sekolah-sekolah atau pesantren" (M. Farras Muhadzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024).

7.2.5 Membangun Energi Baru Terbarukan

Program terpilih Green Islam terkait transisi energi terbarukan dapat dilihat pada program lingkungan Yayasan Hadji Kalla (YHK), yang didirikan oleh Muhammad Jusuf Kalla pada tahun 1981 di Makassar. YHK memiliki program lingkungan yang bernama "Kampung Hijau Energi," sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat Muslim di pedesaan, terhadap penggunaan gas elpiji dan pupuk kimia di kalangan petani.

YHK mulai bergerak dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari Perusahaan Kalla Group untuk empat kegiatan utama, yaitu pendidikan (*educare*), pemberdayaan masyarakat (*community development*), kemanusiaan dan lingkungan hidup (*humanity and environment*), serta kepedulian Islam (*Islamic Care*) (Yayasan Hadji Kalla, n.d.). Pada tahun 2019, YHK menjadi bagian dari komunitas filantropis di Indonesia dengan bergabung dalam Perkumpulan Filantropi Indonesia dan Dewan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP). Di tahun 2020, YHK juga memperoleh izin dari Kementerian Agama (Kemenag) sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala nasional. Dengan izin tersebut, YHK secara resmi menjadi lembaga pengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk Perusahaan Kalla Group (Sapril Akhmady, Program Manager Humanity and Environment Care, YHK, FGD, 6-8 Maret 2024).

Dana yang dikumpulkan dari ZIS sebagian besar digunakan untuk kegiatan *humanity and environment care* yang difokuskan pada isu-isu lingkungan (Sapril Akhmady, Program Manager Humanity and Environment Care, YHK, FGD, 6 Maret 2024). Kegiatan lingkungan yang dilakukan meliputi penghijauan, manajemen sampah, sedekah hijau, desinfektan, dan lain sebagainya. "Jika lingkungan menghadapi masalah seperti deforestasi, kami melakukan penghijauan. Di beberapa wilayah, program ini sudah berjalan selama 10 tahun dan terus berlanjut. Pola-pola programnya pun sedikit berubah, ada yang kami lakukan secara penuh, ada juga yang bersifat kolaboratif. Hingga saat ini, kami telah menjalankan 36 program dengan berbagai isu, mulai dari sampah hingga desinfektan," ujar Sapril Akhmady, Program Manager Humanity and Environment Care, YHK (FGD, 6 Maret 2024).

Program unggulan yang hingga kini terus berjalan adalah Kampung Hijau Energi. Program ini mengusung integrasi keahlian hijau berbasis pemberdayaan masyarakat dengan tujuan memberikan edukasi mengenai pemanfaatan energi hijau, salah satunya melalui pembangunan reaktor biogas sebagai sumber energi alternatif. Program ini sangat berpotensi untuk membuka peluang produksi pupuk organik secara mandiri di pedesaan, yang dihasilkan dari ampas kotoran sapi atau *bio-slurry*. Dengan demikian, program ini tidak hanya menghasilkan energi yang dapat menggantikan penggunaan elpiji, tetapi juga menghasilkan pupuk organik yang ramah lingkungan dan bebas bahan kimia.

Tujuan lain dari program ini, seperti yang disampaikan oleh Sapril Akhmady, Program Manager Humanity and Environment Care YHK, adalah untuk menciptakan petani yang Islami dan dekat dengan alam (Sapril Akhmady, Program Manager Humanity and Environment Care, YHK, Wawancara, 25 April 2024). YHK mendanai program ini melalui dana zakat yang dikelolanya (Yayasan Hadji Kalla, n.d.). Program Kampung Hijau Energi, yang didanai melalui dana zakat dari Kalla Group telah menjadi program unggulan bagi YHK sejak tahun 2022. Pada tahun 2024, program ini telah mencakup delapan kabupaten di empat provinsi di Sulawesi. "Salah satu capaian kami adalah pengembangan delapan pusat edukasi komunitas untuk energi terbarukan. Selain menghasilkan pupuk organik, biogas yang dihasilkan juga dimanfaatkan sebagai sumber gas oleh warga setempat," ujar Sapril Akhmady.

Salah satu lokasi yang mendapat manfaat dari program ini adalah Malakaji, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Di sana, YHK bekerja sama

dengan pesantren yang dikenal dengan nama "Santri Tani," yaitu Pondok Pesantren Babussalam Ar Rahman. Sejak YHK terlibat di pesantren tersebut, aktivitas pertanian mulai mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Pupuk kimia kini digantikan oleh pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran ternak. Proses pengolahan pupuk organik ini dilakukan melalui sarana digester yang terletak di area peternakan pondok pesantren. Selain itu, adanya sarana digester biogas juga telah mengurangi konsumsi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) yang digunakan oleh pondok pesantren untuk kegiatan memasak sehari-hari yang melibatkan para santri (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, Wawancara, 27 April 2024).

Selain fokus pada bidang pertanian, Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah juga aktif mengadakan kajian dalam bidang dakwah. Pesantren ini menjadi pusat layanan untuk khotbah Jumat, khotbah pada momen-momen tertentu, seperti hari raya, serta berbagai kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat. Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, menjelaskan, "Untuk kegiatan dakwah keagamaan dan berbagai kegiatan keagamaan masyarakat, pusatnya ada di sini, di pondok. Kami membuka layanan di pondok ini untuk khotbah dakwah Babussalam. Kami melayani kelompok tani dan beberapa pegawai" (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, wawancara, 27 April 2024).

Dakwah yang mengangkat keprihatinan Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah terhadap lingkungan dimulai setelah adanya komunikasi dan diskusi dengan pihak Yayasan Hadji Kalla. Direktur Pesantren, Usman, menjelaskan, "Setelah intervensi dari Kalla, diskusi-diskusi tentang lingkungan pun mulai berkembang. Pak Sapril berkata, 'Ustadz, bagaimana jika kita bawa isu ini ke mimbar?' Sejak saat itu, saya mengubah pendekatan dakwah kami yang sebelumnya hanya fokus pada pembahasan surga dan neraka, menjadi lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, dakwah kami cenderung klasik, hanya membahas akhirat. Kini, kami menyampaikan pesan bahwa surga bisa kita capai dengan menjaga lingkungan dan alam kita" (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, wawancara, 27 April 2024). Usman melanjutkan, "Saya sampaikan bahwa yang ingin kami bangun adalah kesadaran masyarakat untuk memaksimalkan pemanfaatan alam, bukan mengeksploitasi alam. Kami mengajarkan bagaimana bersahabat dengan alam, termasuk penggunaan

air di hulu yang sudah mulai dimanfaatkan. Masyarakat di hulu harus dibimbing secara masif. Ketika mereka menggunakan air, sebisa mungkin mereka menghindari limbahnya agar tidak masuk ke sungai” (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, wawancara, 27 April 2024).

Saat ini, Usman mengungkapkan bahwa penugasan para dai dilakukan dengan menentukan tema-tema lingkungan. Para dai kemudian mencari ayat-ayat atau dalil-dalil yang relevan secara mandiri. Namun, Usman juga berupaya untuk mendiskusikan hal ini dengan para tokoh agama Islam di seluruh kecamatan. Selain itu, dia sedang menyusun kurikulum pelatihan dan pengembangan wawasan bagi para dai yang ditugaskan untuk melayani kegiatan keagamaan. Berdasarkan informasi yang diberikan, terdapat hampir 40 masjid dan dai yang sedang dibina, serta hampir 100 titik kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan dalam kegiatan keagamaan di wilayah tersebut (Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, wawancara, 27 April 2024).

7.2.6 Komunitas Adat Penjaga Hutan Terbaik Dunia

The Washington Post, surat kabar dari Amerika Serikat, menobatkan Ammatoa Kajang sebagai penjaga hutan terbaik di dunia pada tahun 2023. Komunitas yang dipimpin oleh Ammatoa pemangku adat tertinggi ini terletak di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini memegang teguh adat mereka dalam menjaga kelestarian hutan, yang mereka anggap sakral dan suci (Ramadhani, dkk., 2023).

Komunitas ini mengikuti ajaran *andingingi* yang dengan tegas menginstruksikan anggotanya untuk hidup sederhana tanpa kemewahan (*tallase kamase'-mase'*), serta memiliki kewajiban untuk melestarikan hutan. "Pesan tentang menjaga lingkungan ini diturunkan secara turun-temurun, bahwa hutan beserta alamnya harus dijaga, sebagaimana yang diajarkan oleh nenek moyang kita," ujar Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN Pengurus Harian Komunitas (PHKom) Kajang, dalam FGD pada 6-8 Maret 2024.

Konsep hidup sederhana ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam aktivitas sehari-hari, pemanfaatan hutan, dan desain rumah yang seragam. Rumah-rumah di Kajang tidak hanya memiliki bentuk yang sederhana, tetapi juga seragam dalam hal bahan

bangunan, ukuran, dan orientasi bangunan. Tujuan dari keseragaman ini adalah untuk menghindari persaingan antar anggota masyarakat adat, yang bisa menyebabkan eksploitasi terhadap hutan (Ramadhani, dkk, 2023). Selain itu, Kajang juga memiliki tiga pilar utama dalam menjalani hidup yang benar, yaitu menghormati Tuhan, menjaga tanah yang diberikan Tuhan, dan menghormati nenek moyang (Heryati, 2011).

Secara administratif, wilayah Kajang terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Kajang Dalam atau "Ri Laleng Embayya" (*tanah kamase-masea*) dan Kajang Luar atau "Ipantarang Embayya" (*tanah kausayya*). Sebagaimana halnya Suku Baduy di Banten, masyarakat di Kajang Luar lebih terbuka terhadap modernisasi, sementara di Kajang Dalam, masyarakat menolak teknologi dan menganggap bahwa Kajang tidak bisa mengikuti kemajuan seperti masyarakat pada umumnya. Ini sesuai dengan prinsip mereka "*di Kajang tala kulle modern*", atau yang sering disebut sebagai "ri Kajang". Di kawasan Kajang Dalam, warga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol kesederhanaan (Syahidatul Amalia, 2022).

Jaja Ramlah, Anak Ketua Suku Kajang, menjelaskan bahwa terdapat satu wilayah yang terisolasi dan tidak bisa berkembang secara modern, khususnya wilayah yang masih mempertahankan tradisi dan tidak menerima alat-alat modern. Ia menyebutkan bahwa ada empat hal yang dijaga di hutan, yaitu kayu, rotan, ikan (termasuk udang), dan lebah. Aktivitas apa pun di hutan tersebut tidak diperbolehkan, sehingga keasliannya tetap terjaga. Jika ada seseorang yang mencoba mengambil bahkan satu ranting, mereka akan dikenakan hukuman adat dan denda. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin mengambil atau menebang pohon harus mendapatkan izin melalui Galla Puto, lembaga yang khusus menangani masalah hutan (Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN PHKom Kajang, FGD, 6-8 Maret 2024)

Kajang menjadikan hutan sebagai identitas dan sumber kehidupan bagi masyarakat adat. Karena itu, mereka menjaga hutan dengan ketat. Jika ada anggota masyarakat yang merusak atau mengambil sesuatu dari hutan, komunitas ini tidak ragu memberikan hukuman. Hukuman yang diberikan bervariasi, mulai dari denda, isolasi, hingga pengusiran dari tanah adat, tergantung pada hutan mana yang dirusak. Menurut Ramlah, aktivisme lingkungan di masyarakat Ammatoa Kajang menjadi hal yang sangat penting. Hutan dianggap sebagai sumber kehidupan bagi mereka, sehingga hutan adat di wilayah tersebut sangat terjaga, dengan luas sekitar 314 hektar. Hutan di Kajang tetap terjaga karena wilayahnya

masih jelas, hukum adat masih diterapkan, dan masyarakat adat masih ada sampai sekarang (Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN PHKom Kajang, FGD, 6-8 Maret 2024).

Bagi masyarakat Adat Kajang, perusakan hutan dianggap sebagai dosa terbesar, karena mereka memandang menjaga hutan sebagai tugas mulia (Ramadhani, dkk, 2023). Oleh karena itu, mereka menerapkan hukum adat yang tegas bagi siapa saja yang merusak hutan. "Hukuman terberat bagi masyarakat Kajang adalah merusak hutan. Jika ada warga yang sengaja mengambil rotan atau empat komoditas lainnya (kayu, rotan, ikan, dan lebah), mereka langsung didenda sebesar 12 juta. Selain itu, ada juga hukuman sosial. Orang yang melanggar tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan sebagai binatang. Jika seseorang melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali, mereka akan diusir dari kawasan hutan adat," ujar Jaja Ramlah, anak Ketua Adat Kajang sekaligus Perempuan AMAN PHKom Kajang, dalam FGD pada 6-8 Maret 2024.

Aktivitas utama perempuan Kajang adalah menenun, yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Menenun bukan hanya pekerjaan, tetapi juga kewajiban, terutama bagi perempuan yang ingin menikah. Salah satu syarat pertama bagi perempuan Kajang yang hendak menikah adalah kemampuan menenun (Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN PHKom Kajang, FGD, 6 Maret 2024). Kain tenun Kajang menjadi kebutuhan pokok masyarakat setempat, karena kain ini merupakan pakaian yang mereka gunakan sehari-hari. Selain itu, tenun juga dijual untuk mendukung perekonomian masyarakat Kajang. Kualitas tinggi kain tenun Kajang menarik perhatian berbagai lembaga untuk menjalin kerja sama, salah satunya adalah Lembaga Kemitraan. Lembaga ini turut serta dalam penyediaan bahan baku tenun sarung Kajang, pengembangan produk, serta memberikan mesin jahit kepada masyarakat Kajang. Mereka juga memberikan pelatihan dan mendukung pemasaran produk olahan tenun Kajang, seperti baju, syal, tas, dan berbagai barang lainnya (Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN PHKom Kajang, wawancara, 23 Mei 2024).

Keberhasilan Komunitas Adat Ammatoa Kajang dalam menjaga hutan didorong oleh beberapa faktor, antara lain keberadaan hukum adat yang dipegang teguh untuk menjaga kelestarian hutan, pemberlakuan sanksi adat, serta kegiatan kerajinan tenun yang mendukung perekonomian masyarakat adat. Selain itu, kerja sama dengan pemerintah, NGO, dan sektor swasta juga turut memperkuat upaya ini.

Namun, perlu dicatat bahwa meskipun Komunitas Adat Ammatoa Kajang memiliki aturan yang ketat dalam pelestarian hutan, mereka belum memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai isu lingkungan dan perubahan iklim. Aktivisme mereka berakar pada ketergantungan komunitas terhadap alam, khususnya hutan.

7.3 Analisis Faktor Keberhasilan

Keberhasilan Green Islam dalam memengaruhi kesadaran masyarakat akan isu lingkungan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dimiliki oleh kelompok Green Islam. Faktor-faktor tersebut adalah hal-hal yang menjadi kekuatan dari dalam organisasi Green Islam, seperti identitas agama, ketokohan, pendanaan, inovasi, dan kolaborasi. Faktor-faktor itu menjadi kunci yang mendorong keberhasilan program terpilih Green Islam yang didiskusikan di atas. Berikut penjelasan masing-masing faktor tersebut.

7.3.1 Identitas Agama dan Ajaran

Sebagian besar organisasi atau komunitas Green Islam menjadikan ajaran agama sebagai motivasi utama dalam menjalankan aktivitas organisasi mereka. Ajaran ini berfungsi sebagai kekuatan yang mendorong mereka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, karena terdapat nilai pahala atau ganjaran (jariyah) yang akan diperoleh. Selain itu, ajaran agama juga menjadi pedoman dan strategi dalam melaksanakan program-program mereka. Contohnya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) DIY yang selalu mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan tuntunan agama Islam, baik dari sisi akidah (keyakinan), ibadah, akhlak (etika), maupun muamalah. Hal ini tercermin dalam program-program lingkungan mereka, seperti “Kiai Peduli Sampah” dan “ProKlim”. Sejak 2017, organisasi ini mulai fokus pada isu lingkungan, dan dalam setiap aksinya, mereka sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, khususnya konsep “amal saleh” atau berbuat kebaikan.

Landasan amal saleh, yang menjadi ciri khas LDII DIY, dinilai mampu mendorong kesadaran masyarakat Yogyakarta untuk aktif berpartisipasi dalam merawat lingkungan, khususnya terkait penanganan “darurat sampah DIY”. Sebagaimana dijelaskan oleh Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, “Kami benar-benar ingin menjalankan ajaran agama. Sebagai khalifah di bumi, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan.

Menjaga lingkungan adalah amal jariyah, yang dalam konsep Islam, pahalanya mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Agama Islam juga mengajarkan kita untuk berakhlak mulia. Sebagai umat, kita diutus untuk memiliki akhlak yang baik" (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, FGD, 6-8 Maret 2024). Spirit ajaran agama tersebut kemudian diejawantahkan dalam bentuk program "Dai Proklim". LDII secara rutin mengadakan pelatihan dan pengajian bagi remaja dan anggota LDII untuk membahas isu lingkungan menggunakan Alquran maupun dari hadis. "Agama itu tidak hanya dipelajari, kami di LDII mengaji dua kali seminggu dan kami selalu mendorong peserta pengajian untuk mengamalkan apa yang dikaji, termasuk ayat-ayat terkait dengan sampah" (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, Wawancara, 27 April 2024).

Pusat Pengajian Islam dan Masyarakat (PPI) UNAS mengakui bahwa program terpilihnya "dai konservasi" digerakkan oleh semangat ajaran agama. Konservasi alam dianggap sebagai bagian integral dari ajaran Islam. Seperti yang dijelaskan oleh Fachruddin Mangunjaya, Ketua PPI UNAS, "Orang Melayu memiliki pantangan untuk makan daging primata karena 'tabu', sehingga orang utan, bekantan, dan hewan lainnya masih ada dan jinak. Saya sempat heran, kenapa orang utan tidak lari dari manusia. Seiring waktu, saya memahami bahwa semua itu adalah bagian dari tradisi Islam yang melarang makan daging primata. Saya mempelajari ini karena ayah saya seorang guru mengaji. Ternyata, ada aturan dalam fikih yang melarang makan hewan dengan kuku tajam atau bertaring, seperti harimau. Setelah mempelajarinya, saya menyadari betapa pentingnya agama untuk menjaga lingkungan" (Fachruddin M. Mangunjaya, Ketua PPI UNAS, wawancara, 22 Maret 2024).

Hal yang sama juga dilakukan oleh AgriQuran. Komunitas ini menjadikan identitas Islam sebagai fondasi dalam membangun strategi mereka terkait isu lingkungan di media sosial. Farras, pendiri AgriQuran, menyatakan bahwa komunitasnya secara konsisten berpegang pada nilai-nilai Islam, dengan menyatakan bahwa tugas manusia adalah sebagai *khalifah fi al-ard*, yaitu pemakmur bumi, bukan sebagai perusak. Oleh karena itu, kampanye-kampanye yang dilakukan di media sosial selalu dikaji dari perspektif ajaran Islam. Ia mengungkapkan bahwa strategi yang mereka ambil banyak bersumber dari ajaran Alquran, seperti yang tercantum dalam Surat 2 Ayat 60 yang menyatakan agar umat Islam makan dan minum tanpa berbuat kerusakan. Ia juga

memberikan contoh lainnya terkait dengan masalah sampah, dengan merujuk pada Surat Al-Isra' Ayat 27: "*inna al-mubazzirīna kānū ikhwanasy-syayātīn*," yang menyebutkan bahwa kemubaziran adalah perbuatan setan, di mana banyak sampah yang dihasilkan adalah sampah organik, sisa konsumsi, atau sisa dapur (M. Farras Muhadzib, Founder AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024).

7.3.2 Pelibatan Tokoh Agama

Peran tokoh agama sangat penting di dalam gerakan sosial Green Islam. Keberhasilan organisasi atau komunitas Green Islam umumnya bergantung pada kemampuan pimpinannya melibatkan tokoh agama dalam aktivisme lingkungan mereka. Beberapa organisasi Green Islam menjalin jaringan dengan tokoh dan aktivis lingkungan Muslim dalam menjalankan program-program mereka. Salah satunya adalah Komunitas EcoDeen, yang secara rutin melibatkan tokoh-tokoh lingkungan dalam agenda webinar yang mereka selenggarakan. EcoDeen selalu mengundang tokoh atau pakar yang memang fokus pada isu-isu lingkungan. Beberapa tokoh kenamaan yang pernah diundang antara lain Hayu Prabowo (Ketua LPLH SDA MUI), Galih dari Komunitas 1000 Kebun, M. Elvandi (Pembina Muda Environment Care), Fachruddin Mangunjaya dari PPI UNAS, Nana Firman dari Green Faith, dan beberapa tokoh lainnya yang diundang sesuai dengan tema webinar.

Hal yang sama juga dilakukan oleh LDII DIY, yang berjejaring dengan para kiai dan dai dalam program Kiai Peduli Sampah dan Dai ProKlim. Hingga kini, sekitar 500 dai telah mengikuti pelatihan tersebut. Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, menjelaskan bahwa terkait dengan masjid, ada beberapa hal yang mereka lakukan. Di masjid, terdapat kiai yang dihormati dan diberikan penghargaan, yang memberikan nasihat dan arahan untuk menjaga keharmonisan jamaah dalam menangani lingkungan. Selain itu, di masjid juga ada mubalig yang menyampaikan dalil-dalil Alquran dan hadis sebagai landasan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari ibadah yang mendatangkan pahala, dan menjadi amal jariyah yang akan memberikan manfaat setelah seseorang meninggal. Di masjid juga diadakan pengajian yang melibatkan generasi muda yang menjadi penggerak dan pelaksana dalam pengelolaan sampah berbasis masjid, seperti memilah sampah dan menjualnya (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII DIY, Wawancara, 27 April 2024).

Pelibatan tokoh agama juga dilakukan oleh HAKA dalam program pelatihan Teungku Inong. HAKA menjalin jejaring dengan dayah-dayah di wilayah Aceh yang dipimpin oleh para Teungku Inong. Keterlibatan Teungku Inong dianggap penting oleh HAKA, mengingat potensi lokal Aceh yang kuat dalam aspek religius. Teungku Inong dipandang sebagai representasi yang strategis untuk mempromosikan kesadaran tentang perlindungan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) di Aceh dan perlindungan satwa liar. Melalui keterlibatan ini, Teungku Inong berhasil menyusun modul dakwah yang berfokus pada perlindungan satwa liar bagi pemuka agama Islam. Modul ini kemudian disosialisasikan melalui khotbah, ceramah, majelis pengajian, dan diskusi bersama masyarakat.

Pengaruh Fachruddin Mangunjaya sangat penting dalam aktivisme lingkungan PPI UNAS, terutama dalam mengarusutamakan isu lingkungan di dalam agenda dan program PPI UNAS. Ia berhasil memperkenalkan program “Dai Konservasi” yang telah menjangkau sejumlah wilayah Indonesia dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi. Keberhasilan dai konservasi tersebut dipengaruhi oleh ketokohan Fachruddin yang telah lama menggeluti dunia lingkungan terutama dalam hal konservasi alam dengan pendekatan agama Islam. Mangunjaya sering kali diundang sebagai delegasi Indonesia untuk membahas isu-isu lingkungan di tingkat internasional. Salah satu contohnya, ia terlibat sebagai penyusun Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, pada tahun 2015. Selain itu, ia juga merupakan anggota penasihat Siagam Bumi (*Interfaith Action for Climate and Environment*) serta berbagai organisasi lainnya. Pada tahun 2023, PPI UNAS mendapat apresiasi dan pengakuan dari Arab Saudi dengan masuk ke dalam “Hima”, sebuah forum perlindungan kawasan konservasi tingkat dunia. Dalam forum tersebut, PPI UNAS bergabung dengan para ahli dari Protected Area Global.

Yayasan HAKA menjalin kerja sama dengan dayah-dayah di seluruh wilayah Aceh untuk melatih Teungku Inong (ulama perempuan) agar dapat terlibat aktif dalam penjagaan hutan dan satwa liar. Selama pelatihan, Teungku Inong diberikan pengetahuan mengenai konservasi ekosistem hutan (KEL) dan diharapkan dapat menyebarkannya ke dayah-dayah yang mereka pimpin. Berkat pelibatan Teungku Inong dalam upaya konservasi hutan, program-program HAKA dinilai cukup berhasil sehingga turut berkontribusi dalam mengurangi banjir dan pembalakan liar di Aceh, dan bahkan KEL mendapatkan penghargaan

sebagai wilayah yang asri serta berpotensi menjadi kawasan ekowisata (Iqra, 2023).

7.3.3 Pendanaan

Keberhasilan program lingkungan kelompok Green Islam tidak lepas dari faktor pendanaan atau finansial. Dua lembaga yang berhasil menjalankan program berkat dukungan pendanaan adalah YHK dan PPI UNAS. YHK, sebagai lembaga CSR yang dipimpin oleh Jusuf Kalla (JK), mengelola pendanaan secara terorganisasi melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang diterapkan di seluruh Kalla Group. Hasil dari ZIS yang dihimpun kemudian dialokasikan untuk empat kegiatan utama, yaitu pendidikan (*educare*), pemberdayaan masyarakat (*community development*), kemanusiaan dan lingkungan hidup (*humanity and environment*), serta kepedulian Islam (*Islamic Care*) (Yayasan Hadji Kalla, n.d.). Salah satu program kemanusiaan dan lingkungan yang didanai oleh ZIS adalah "Kampung Hijau Energi." Akhmady, selaku Program Manager Humanity and Environment Care YHK, menjelaskan dalam FGD bahwa Yayasan Hadji Kalla awalnya didirikan sebagai lembaga CSR untuk menampung dana ZIS perusahaan. Meskipun dimulai dengan pendekatan *charity*, program ini kemudian berkembang menjadi model pemberdayaan masyarakat, salah satunya melalui program lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Akhmady juga menambahkan bahwa isu lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bisnis Kalla Group.

Pada tahun 2024, Yayasan Hadji Kalla (YHK) berkomitmen untuk memberikan kontribusi besar dalam gerakan hijau dengan menyiapkan dana hingga Rp 40 miliar untuk kegiatan sosial, termasuk program-program lingkungan. Muhammad Zuhair, Direktur Eksekutif Lembaga Amil Zakat Hadji Kalla, menyatakan bahwa Yayasan Hadji Kalla melalui lembaga tersebut akan berusaha memaksimalkan distribusi zakat dari perusahaan-perusahaan Kalla Group agar tepat sasaran. Tujuan mereka adalah memberikan kontribusi nyata dalam kesejahteraan masyarakat, menciptakan dampak yang berkelanjutan, dan memberikan santunan yang bermanfaat bagi kehidupan banyak orang.

Target selanjutnya, YHK juga akan menjangkau lebih dari 2 ribu orang yang tersebar di empat provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, serta di daerah yang terdampak bencana, baik di tingkat nasional maupun internasional

(Yukemi Koto, 2024). Pada tahun 2022, YHK berhasil membangun sarana digester biogas. Selain itu, Program Kampung Hijau telah melatih 40 kader komunitas di empat desa, dan sekitar 200 warga juga memperoleh pengetahuan mengenai pengembangan desa dengan fokus pada bisnis energi terbarukan. Langkah ini dilakukan melalui pendirian kebun yang memanfaatkan pupuk hasil produksi sebagai aplikasi untuk mendukung keberlanjutan desa.

Selain YKH, PPI UNAS juga memiliki berbagai program lingkungan yang sebagian besar didukung oleh pemberi dana dari luar negeri, salah satunya adalah program Dai Konservasi. Program ini berhasil menjangkau beberapa wilayah di Indonesia berkat bantuan dari organisasi internasional seperti WWF (*World Wide Fund for Nature*), Keanekaragaman Hayati (Kehati), dan Yayasan Pendidikan Pelestarian Alam (Yapek). Pemberi dana luar negeri juga berperan besar dalam keberhasilan program Dai Konservasi, yang pada akhirnya menghasilkan terbitnya Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. Selain WWF, pemberi dana PPI UNAS antara lain Fish & Wildlife Service's Rhinoceros and Tiger Conservation Fund (the Rufford), Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, dan Mott Foundation.

7.3.4 Inovasi

Beberapa organisasi dan komunitas Green Islam berusaha berinovasi dengan menciptakan model-model baru dalam penghematan energi, yang pada akhirnya berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Mereka beranggapan bahwa isu lingkungan tidak hanya terbatas pada pengelolaan sampah, penanaman pohon, atau kegiatan bersih-bersih, namun juga meliputi isu penting lainnya, seperti perubahan iklim dan energi terbarukan. Salah satunya adalah YHK, yang merespons tingginya penggunaan gas elpiji dan pupuk kimia di kalangan petani. YHK menciptakan program inovatif bernama “Kampung Hijau Energi” untuk mengatasi masalah tersebut.

Dalam programnya, Kampung Hijau Energi merupakan kegiatan membangun reaktor biogas sebagai energi alternatif. Energi tersebut dihasilkan dari ampas kotoran sapi atau *bio-slurry*, yang dialirkan ke reaktor biogas, kemudian menghasilkan gas, dan pupuk organik non kimia. Melalui inovasi ini, masyarakat di wilayah Indonesia Timur terutama di Sulawesi Selatan merasa terbantu. Kebutuhan pupuk non

kimia di Pesantren Pertanian Babussalam Arrahmah tercukupi, dan ketergantungan pesantren pada penggunaan pupuk kimia berkurang. Selain itu, warga sekitar pesantren juga merasa terbantu kebutuhan gasnya untuk kebutuhan memasak. Berkat intervensi dari YHK, pesantren tersebut mulai memasukkan kajian isu lingkungan di dalam materi kepesantrenan.

7.3.5 Kolaborasi

Sebagian besar organisasi atau komunitas Green Islam di Indonesia menyadari bahwa kolaborasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan aktivitas mereka. Kolaborasi ini dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Edward M. Marshal (1995) mendefinisikan kolaborasi sebagai proses kerja sama yang dapat membangun kepercayaan, integritas, dan inovasi melalui pencapaian kesepakatan, rasa memiliki, dan keterpaduan dalam seluruh aspek organisasi (Marshal, 1995). Beberapa komponen yang berperan penting dalam keberhasilan kolaborasi meliputi pembagian kerja antar-lembaga, struktur kelembagaan, dan koordinasi. Organisasi atau komunitas Green Islam yang sudah lama berjejaring umumnya berkolaborasi untuk mengadvokasi, mengampanyekan, dan menyebarkan isu lingkungan kepada publik, baik melalui pelatihan, seminar, maupun aksi bersama, terutama yang memiliki isu lingkungan yang serupa.

PPI UNAS, misalnya, aktif menjalin kolaborasi di berbagai tingkat. Mangunjaya, dalam berbagai kesempatan menjadi delegasi Indonesia di kancah internasional untuk terus mengkampanyekan program-program lingkungan. Salah satu program unggulan PPI UNAS adalah dakwah konservasi, yang berhasil berkat kerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki misi serupa, seperti WWF Indonesia, Alliance of Religious and Conservation (ARC) UK, Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan, Flora dan Fauna Internasional, serta Forum Konservasi Harimau Indonesia (Harimau Kita). Berkolaborasi dengan LPLH SDA Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tahun 2023, PPI UNAS berhasil mendorong lahirnya Fatwa Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem. Fatwa ini menjadi dasar hukum bagi PPI UNAS untuk terus mengkampanyekan dakwah konservasi, khususnya dalam upaya menjaga satwa liar yang dilindungi.

LDII DIY juga melaksanakan program serupa, seperti Program Kiai Peduli Sampah dan ProKlim, yang berhasil berkat kolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya, LDII DIY bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengadopsi program ProKlim. Selain itu, LDII DIY juga menjalin kerja sama dengan beberapa organisasi dan lembaga, antara lain *Ethiopian Muslims Relief and Development Association* (EMRDA), *Norwegian Church Aid* (NCA), Komisi Dakwah MUI DIY, Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah DIY, Kajian NU DIY, Dewan Masjid Indonesia (DMI) DIY, Forum Kolaborasi Komunitas Peduli Sampah (FOKKALIS), dan Kampung Pramuka Sangurejo.

LDII DIY juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Yogyakarta, Kanwil Kemenag DIY, P3 Ekoregion Jawa, Fakultas Kehutanan UGM, Fakultas Kehutanan Instiper, dan Sekolah Vokasi UGM. Selain itu, lembaga swasta seperti Ecoprint Omah Fatma Sleman, Kwarda Pramuka DIY, Satuan Komunitas Sekawan Persada Nusantara (Sako SPN), serta kerja sama dengan *World Clean Up Day* juga turut mendukung program-program ini. Jaringan kerja sama ini menjadi faktor penting kesuksesan LDII DIY dalam mengatasi isu-isu lingkungan.

Sejalan dengan PPI UNAS dan LDII DIY, Komunitas Adat Ammatoa Kajang juga menjalin kerja sama dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk memperjuangkan hak atas tanah adatnya. Meskipun Ammatoa Kajang memiliki aturan yang kuat, mereka tetap terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga lain. Beberapa bentuk kemitraan yang telah dilakukan, antara lain, kolaborasi dalam penyediaan bahan baku tenun sarung Kajang, pengembangan produk, pemberian mesin jahit untuk masyarakat Kajang, serta pelatihan dan pemasaran untuk mengembangkan produk dari hasil tenun kain Kajang menjadi berbagai barang, seperti baju, syal, tas, dan lain-lain (Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN PHKom Kajang, wawancara, 23 Mei 2024).

Selain melalui Kemitraan, Kajang telah bekerja sama dengan beberapa lembaga dalam upaya pelestarian hutan, di antaranya Dinas LHK Kabupaten Bulukumba dan Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, serta Bank Sulselbar. Beberapa donor juga turut mendukung komunitas Kajang, antara lain dari Dinas LHK, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian, serta Dinas Peternakan (Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN PHKom Kajang, FGD, 6-8 Maret 2024).

7.3.6 Pelibatan Perempuan

Organisasi atau komunitas Green Islam umumnya dapat berhasil menjalankan program-programnya karena mereka membangun strategi yang melibatkan perempuan dalam melakukan aksi-aksi pelestarian alam di Indonesia. Beberapa organisasi yang menerapkan pendekatan ini antara lain LDII DIY, Komunitas Muslim Adat Ammatoa Kajang, Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA), dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) 'Aisyiyah. Organisasi-organisasi tersebut secara konsisten menjadikan perempuan sebagai garda terdepan dalam upaya penyelamatan lingkungan di Indonesia.

Di Yogyakarta, LDII melalui program ProKlim-nya membentuk Sanggar UMKM Ecoprint dan Craft Sangurejo (ECSA) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Dalam program ini, perempuan dilatih untuk membuat produk *ecoprint* yang bernilai jual tinggi namun ramah lingkungan. Sanggar ini memanfaatkan sampah organik daun, yang tidak hanya didaur ulang menjadi kompos, tetapi juga dicetak pada kain atau bahan lainnya menggunakan teknik *ecoprinting*. Menurut Atus Syahbudin, hasil daur ulang sampah organik ini dapat dijual. Produk yang dihasilkan melalui teknik *ecoprinting* ini berupa kain yang dicetak dengan sampah daun, yang kemudian dijual dan memberikan nilai ekonomi. Hal ini tidak hanya baik untuk lingkungan, tetapi juga menciptakan peluang penghidupan bagi masyarakat (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, Wawancara, 27 April 2024).

Berkat kolaborasi dengan pengrajin *ecoprint* Yogyakarta, Omah Fatmah, sanggar ECSA berhasil membuat produk *ecoprint* berupa kain, baju, *pouch bag*, *tumbler*, dan lainnya yang kini telah dipasarkan di Yogyakarta dan bahkan telah diperkenalkan di Hortus Botanicus Leiden, kebun botani tertua di Belanda. Selain ECSA, LDII DIY juga melibatkan kelompok ibu-ibu dalam aksi penghijauan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) di Dusun Sangurejo. Warga dusun ini, berjumlah sekitar 150 Kepala Keluarga (KK), melakukan penghijauan dengan menanam tanaman obat, sayur, dan buah di sekitar pekarangan rumah mereka. KWT ini aktif mengadakan perkumpulan di balai desa untuk membuat eco enzim, komposter, dan biopori di sepanjang jalan kampung. KWT

menjadi gerakan ibu-ibu yang sangat solid, karena mereka memiliki komitmen dan kesadaran yang tinggi untuk merawat alam (Nurohmah Nuraini, Ketua KWT, wawancara, 27 April 2024).

Selain LDII DIY, Komunitas Muslim Adat Ammatoa Kajang juga mengembangkan kerajinan tenun yang memiliki nilai ekonomi dengan melibatkan perempuan. Selain menjadi tradisi, keterampilan menenun juga menjadi mata pencaharian bagi perempuan Kajang. Menurut Jaja Ramlah, yang mendampingi ibu-ibu penenun di sana, mereka menanam bahan tenun, seperti tanaman Tarung, yang juga berfungsi untuk mencegah erosi dan banjir. Tanaman ini dikembangkan untuk mendukung kegiatan menenun di komunitas tersebut (Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN PHKom Kajang, FGD, 6 Maret 2024).

Tenun Kajang menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat karena kain tenun ini adalah pakaian sehari-hari bagi mereka. Selain itu, kain tenun ini juga dijual untuk membantu perekonomian masyarakat Kajang. Kualitas tinggi kain tenun Kajang ini menarik beberapa lembaga untuk berkolaborasi, salah satunya Lembaga Kemitraan. Lembaga ini berkolaborasi dengan masyarakat Kajang dalam penyediaan bahan baku tenun Sarung Kajang, pengembangan produk, pemberian mesin jahit, serta pelatihan dan pemasaran produk-produk dari hasil tenun, seperti baju, syal, tas, dan lainnya (Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN Pengurus Harian Komunitas [PHKom] Kajang, wawancara, 23 Mei 2024).

Organisasi Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA) juga menerapkan pendekatan serupa. HAKA mengadopsi pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kelompok perempuan, seperti program Ranger Perempuan, untuk memantau hutan desa dan menolak pembangunan yang tidak berkelanjutan di wilayah sekitar hutan desa tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menghindari konflik antara masyarakat dan perusahaan. Munira Rezkina, Legal Officer HAKA, menjelaskan bahwa mereka mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal dengan pendekatan yang berbeda untuk setiap desa dampingan. Beberapa desa fokus pada ekonomi hijau, sementara yang lainnya lebih mengutamakan patroli hutan yang dipimpin oleh Ranger Perempuan (Munira Rezkina, Legal Officer HAKA, FGD, 20 Februari 2024).

Mengingat masih terbatasnya dukungan dari masyarakat, HAKA kemudian berusaha memanfaatkan potensi lokal Aceh dengan bersinergi bersama pesantren (dayah) dan ulama di Aceh untuk meningkatkan kesadaran tentang perlindungan lingkungan dengan memasukkan tema lingkungan dalam ceramah-ceramah para ulama Aceh guna meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat (Munira Rezkina, Legal Officer HAKA, FGD, 20 Februari 2024). HAKA juga mendukung Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam merumuskan Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perspektif Syariat Islam. Fatwa ini menegaskan bahwa membunuh satwa tanpa alasan yang jelas adalah haram hukumnya.

Organisasi LLHPB 'Aisiyiah juga melibatkan perempuan dalam seluruh aktivitas Green Islam. Sebagai sayap perempuan dari ormas Muhammadiyah, kehadiran LLHPB 'Aisiyiah menjadi penting karena perannya sebagai lembaga dalam organisasi Muhammadiyah yang memelopori gerakan perempuan Islam yang terlibat aktif dalam upaya penyelamatan bumi. Hening Parlan, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB 'Aisiyiah, memperkenalkan konsep "Green Aisiyiah", sebuah konsep yang mengintegrasikan isu lingkungan dengan nilai-nilai Islam. Menurut Hening, Green Aisiyiah dimulai dengan meletakkan nilai agama untuk membangun gerakan Green Islam dalam kegiatan 'Aisiyiah, sembari mengkampanyekan apa yang disebutnya sebagai "eco jihad". Konsep ini dirancang untuk memperkuat kegiatan lingkungan yang sesuai dengan visi dan misi 'Aisiyiah yang berbasis nilai-nilai agama (Hening Parlan, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB 'Aisiyiah, wawancara, 23 April 2024).

Konsep Green 'Aisiyiah ini terwujud dalam program mereka Ngaji Lingkungan. Sejak didirikan, LLHPB 'Aisiyiah telah aktif mengadakan pelatihan Ngaji Lingkungan yang diikuti oleh sekitar 100 hingga 200 peserta. Program ini memiliki dampak besar bagi masyarakat dan menjadi salah satu program unggulan LLHPB 'Aisiyiah. Dalam pelatihan ini, peserta belajar mengenai tiga hal: hubungan antara Islam dan lingkungan, peran Aisiyiah dalam lingkungan hidup, dan model-model aksi penyelamatan lingkungan. Program Ngaji Lingkungan ini juga menghasilkan Mubalighah Lingkungan, yaitu ustazah yang dilatih untuk menyebarkan pengetahuan tentang lingkungan. Saat ini, terdapat 172 Mubalighah Lingkungan yang telah mengikuti pelatihan tersebut (Hening

Parlan, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB 'Aisiyiah, wawancara, 23 April 2024).

Sejak 2015, LLHPB 'Aisiyiah telah melaksanakan berbagai program lingkungan, di antaranya melalui penelitian, pendidikan, pelatihan, dan dakwah. Selain itu, LLHPB 'Aisiyiah juga menerbitkan berbagai buku dan panduan, seperti *Green Idul Fitri* dan *Green Idul Adha*. Organisasi ini juga mengeluarkan Surat Edaran mengenai manajemen sampah dan limbah, konservasi gambut, sedekah pohon, penanaman pohon dengan sistem pola asuh, program ketahanan keluarga, dan beberapa program lainnya. Di setiap ranting, fokus program disesuaikan dengan kebutuhan wilayah setempat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LLHPB 'Aisiyiah, baik di tingkat pusat maupun ranting, terdokumentasi dalam majalah dan *website* "Suara 'Aisiyiah: Inspirasi Perempuan Berkemajuan".

7.4 Kesimpulan

Secara umum, program-program Green Islam terpilih di Indonesia muncul sebagai respons terhadap berbagai isu dan permasalahan lingkungan yang berbasis lokal. Temuan riset ini menunjukkan bahwa umumnya organisasi Green Islam lahir sebagai respons terhadap masalah lingkungan yang berbasis lokal. Program-program Green Islam, pada umumnya, disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan masyarakat setempat. Program-program tersebut memiliki kesamaan, terutama dalam upaya untuk menangani isu-isu lingkungan, namun perbedaan terletak pada latar belakang atau identitas agama dari masing-masing organisasi atau komunitas. Terdapat enam program terpilih yang dibahas dalam bab ini, yang dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan, antara lain dampak lingkungan yang dihasilkan program tersebut, jangkauan yang tidak hanya terbatas pada satu wilayah tetapi mencakup beberapa wilayah di Indonesia, serta keberlanjutan program yang dilaksanakan. Program-program ini juga dirasakan manfaatnya oleh banyak kalangan, terutama masyarakat yang terdampak secara langsung. Selain itu, organisasi atau komunitas Green Islam yang menjalankan program-program ini memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip yang bersumber dari ajaran Islam.

Keberhasilan program-program Green Islam tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, mencakup kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh organisasi atau komunitas Green Islam, seperti identitas agama dan ajaran yang dijadikan sebagai motivasi dalam aktivisme lingkungan.

Sebagian besar organisasi atau komunitas Green Islam menganggap ajaran agama sebagai pendorong utama dalam aktivitas mereka. Misalnya, LDII DIY memiliki konsep amal saleh dalam isu lingkungan, yang menganggap lingkungan sebagai bagian dari amal jariah. PPI UNAS meyakini bahwa konservasi adalah bagian dari ajaran Islam, sehingga menjaga lingkungan dianggap sebagai kewajiban. AgriQuran dan Bumi Langit juga memandang bahwa isu lingkungan sejalan dengan perintah Tuhan dalam Alquran dan sunah. Faktor lain yang mempengaruhi adalah pelibatan tokoh agama dalam aktivisme lingkungan, akses bantuan pendanaan program lingkungan, inovasi lingkungan yang beragam, kolaborasi dengan berbagai pihak, serta pelibatan perempuan.

BAB 8

KEKUATAN DAN PELUANG PERKEMBANGAN GREEN ISLAM DI INDONESIA

Dalam peta besar gerakan lingkungan, gerakan Green Islam tidak hanya menunjukkan eksistensi Islam dalam mewujudkan nilai dan ajarannya untuk isu lingkungan, tetapi juga memperlihatkan kemampuan Muslim dalam proses mengadaptasikan ajaran-ajaran Islam dalam menciptakan praktik yang positif terhadap lingkungan. Bab ini menganalisis kekuatan dan peluang yang memungkinkan gerakan Green Islam tumbuh dan menjadi bagian aktivisme lingkungan yang berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, meski gerakan Green Islam relatif plural, namun mereka memiliki bentuk umum atau kesamaan satu sama lain. Karena itu, bagian ini akan menganalisis pola-pola umum kekuatan gerakan Green Islam di Indonesia. Selain itu, sebagai sebuah gerakan lingkungan yang memiliki jaringan global, nasional, dan lokal sekaligus, terdapat beberapa peluang lain, seperti kapasitas personal aktivis dan fenomena pergeseran ekologis, yang memungkinkan perkembangan dan penguatan gerakan Green Islam di Indonesia. Jika para aktivis gerakan Green Islam dapat memanfaatkan peluang tersebut, Green Islam akan mewarnai peta besar gerakan lingkungan di Indonesia.



8.1 Kekuatan Green Islam di Indonesia

8.1.1 Kerangka Etika

Pada perdebatan teoritis awal tentang hubungan agama dan lingkungan, kerangka etika atau landasan moral (*ethical or moral framework*) ajaran agama, terutama agama-agama monoteis, dituduh menjadi penyebab eksploitasi lingkungan karena ajaran antroposentrisnya yang menempatkan manusia memiliki kendali penuh atas alam (White 1967). Pandangan esensialis ini kemudian ditentang oleh kalangan esensialis yang lebih simpatik memandang agama, seperti McDaniel (1995) dan Jenkins (2008) yang menafsirkan bahwa ajaran agama memiliki seruan yang kuat untuk menjaga dan merawat alam. Untuk menguatkan pandangan serupa, beberapa sarjana dan pemuka agama berupaya untuk melepaskan tuduhan ajaran agama antroposentris itu dengan berusaha mengetengahkan hubungan agama dan alam yang lebih harmonis, sakral, dan penuh kearifan (Wilson 1993; Fransiskus 2015; Waitling 2008).

Dalam studi ini, kami menemukan hal serupa dari para pemuka maupun aktivis Green Islam. Namun, secara lebih cermat dan hati-hati, kami berupaya untuk tidak terjebak pada dikotomi pemahaman antroposentris dan non-antroposentris yang mengakibatkan diskursus tentang agama dan lingkungan tidak melampaui domisili teoritisnya. Studi ini setidaknya menemukan dua pandangan terhadap kerangka moral atau landasan etika keagamaan yang menjadi kekuatan gerakan Green Islam di Indonesia, yaitu kerangka etika yang bersifat antroposentris transgenerasi dan kerangka etika yang memberikan nilai transenden pada alam. Pendekatan ini melepaskan diskursus mengenai kerangka etika dari domisili teoritis dikotomis antroposentris dan non-antroposentris. Pendekatan ini menyoroti masuknya substansi etika yang lebih pluralistik dari berbagai kerangka moral mengenai hubungan ajaran agama dan lingkungan. Kami menemukan bahwa ajaran agama Islam adalah untuk menyelematkan manusia di satu sisi dan lingkungan di sisi lain secara sekaligus (*rahmatan li al-'ālamīn*).

Dalam hal ini, kerangka moral atau landasan etika keagamaan memberikan nilai tambah pada aksi lingkungan, baik bagi pendekatan lingkungan yang antroposentris maupun bagi pemahaman yang menilai relasi manusia dan lingkungan sebagai suatu yang sakral. Antroposentrisme dapat dilihat lebih positif ketika ia dilekatkan sebagai

pandangan hidup yang berpusat pada manusia lintas generasi atau antroposentris transgenerasi. Bahasa sederhananya: “untuk kepentingan anak, cucu kita” (Kronlid, Ohman 2012). Pandangan antroposentris yang seperti ini dapat mendefinisikan ulang tentang hubungan manusia dan lingkungan yang tidak menekankan pada aspek eksploitasi, melainkan pada aspek mutualisme, bahwa alam perlu dijaga untuk memberikan dampak timbal balik bagi kepentingan generasi penerus.

Sejak 1979, teolog Jerman Hans Jonas telah menyerukan bahwa kondisi dunia memerlukan pendekatan etika baru, yang mengedepankan tanggung jawab antar-manusia lintas generasi (Jonas 1979). Wacana perusakan lingkungan memerlukan antroposentrisme transgenerasi, pandangan yang mengingatkan masyarakat tentang tanggung jawab moral atau etika yang menjadikan generasi mendatang sebagai acuan untuk aksi lingkungan. Pandangan tentang antroposentrisme transgenerasi ini memberikan perhatian terhadap isu keselamatan generasi sebelumnya dan generasi mendatang (Kronlid, Ohman 2012). Pandangan ini menyiratkan bahwa pelestarian alam juga dapat menjadi instrumen esensial untuk komitmen jangka panjang terhadap keselamatan dan kesejahteraan lintas generasi.

Studi ini menemukan kerangka etika yang bersifat antroposentris transgenerasi pada hampir semua organisasi maupun komunitas yang menjadi objek studi ini, baik yang memiliki kecenderungan konservasionis, pengkampanye kebijakan, maupun mobilisator. Di organisasi Green Islam yang bercorak pengkampanye kebijakan, misalnya Muhammadiyah—organisasi Islam yang memiliki varian organisasi atau komunitas lingkungan yang paling beragam, terdapat landasan etika yang jelas terhadap pandangan antroposentris transgenerasi ini. Mereka memandang hubungan manusia dan alam dalam tiga bentuk: sebagai hubungan keimanan dan peribadatan, sebagai hubungan pemanfaatan yang berkelanjutan, dan hubungan pemeliharaan untuk semua makhluk (Mawardi, Samidjo 2021). Pada bentuk kedua dan ketiga, kerangka etika yang bersifat antroposentris transgenerasi secara eksplisit terlihat. Bagi Muhammadiyah, “alam dengan segala sumber dayanya diciptakan oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Manusia tidak diperkenankan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang hanya untuk memenuhi kebutuhan bagi generasi saat ini, sementara pemanfaatan bagi generasi mendatang terabaikan” (Mawardi, Samidjo 2021). Kerangka etika ini diperkuat dengan pemberian hukum

haram terhadap perbuatan-perbuatan yang mengabaikan pemeliharaan dan konservasi alam.

Muhammadiyah secara implisit mengambil jarak dengan pandangan antroposentrisme yang menempatkan hubungan manusia dengan alam secara subordinat. Namun, pandangan-pandangannya tidak terhindarkan dari kerangka etika atau moral yang bersifat antroposentris transgenerasi. Untuk memperjelas landasan dan kerangka etika itu, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerbitkan Fikih Air dan Fikih Kebencanaan yang merupakan hasil Musyawarah Nasional Tarjih pada 2014 di Palembang dan 2015 di Yogyakarta. Bagi Muhammadiyah, air merupakan elemen penting bagi keberlanjutan hidup manusia dan makhluk hidup dengan berdasarkan pada beberapa ayat penting tentang air: Q.S.2:164, 6:99, 22:5, 25:48-49, 56: 68-70, dan 67:30 (MTT 2016).

Bagi Muhammadiyah, tindakan eksploitasi sumber daya alam, termasuk air, secara ekstraktif, melakukan kesalahan dalam manajemen dan cara pemanfaatan air dan sumber daya air, melakukan perusakan terhadap air dan sumber daya air, merupakan tindakan pelanggaran terhadap takdir Tuhan, karena tindakan-tindakan tersebut akan dapat mengganggu keseimbangan alam (MTT 2016). Muhammadiyah membagi dua konsep konservasi air dan tanah, yaitu *haram* dan *hima*. *Haram* merupakan kawasan yang berada di sekitar mata air atau sumber air yang harus dilindungi dari gangguan, perusakan atau eksploitasi yang berlebihan untuk menjaga kelestarian sumber air yang bersangkutan. Sedangkan *hima* adalah kawasan cagar alam atau semacam hutan lindung di mana pengambilan kayu, rumput, penggembalaan ternak, perburuan hewan dan sebagainya dilarang. Dua konsep ini disandarkan pada hadis Nabi Muhammad dan cara hidup para sahabat (Mawardi 2014).

Sementara terkait kebencanaan, meskipun pada Fikih Kebencanaan Muhammadiyah lebih banyak berbicara tentang cara pandang teologis Islam terhadap bencana dan sikap terhadap kebencanaan, namun konten Fikih Kebencanaan itu memberikan penguatan terhadap harapan keberlanjutan hidup manusia. Muhammadiyah menggambarkan bahwa terdapat hubungan kebencanaan dengan unsur ilahiah. Dalam hal ini, Muhammadiyah membagi bencana menggunakan terminologi Islam menjadi 10, yaitu *musibah*, *bala'*, *fitnah*, *azab*, *fasad*, *halak*, *tadmir*, *tamziq*, *iqab*, dan *nazilah*. Muhammadiyah memandang sikap terhadap bencana sebagai peningkatan solidaritas dan penguatan harapan hidup manusia.

Mengutip al-Qurzhiy, Muhammadiyah memandang korban bencana (*allaẓī aṣābathu al-jāiḥah*) sebagai orang-orang yang boleh menerima bantuan (*al-maḥrūm*). Oleh karena itu, bagi umat Muslim perlu untuk tidak meninggalkan korban bencana sendiri dan berusaha untuk saling mendukung demi meningkatkan harapan dan keberlanjutan hidup (MTT 2016).

Sementara di tubuh Nahdlatul Ulama (NU), kerangka moral terhadap lingkungan sudah aktif dibicarakan sejak tahun 1990-an. Fatwa ekologis yang dicetuskan NU pada Mukhtamar yang digelar pada 1994 di Cipasung juga tidak terlepas dari pandangan antroposentris transgenerasi ini. Dalam fatwa itu ditegaskan bahwa kerusakan pemanfaatan sumber daya alam yang membawa kerusakan lingkungan adalah perbuatan kriminal (LTN-PBNU 2011). Dalam pandangan ulama NU, memelihara serta menjaga kelestarian ekologi adalah bagian dari memperpanjang usia kehidupan manusia dan bumi (Suryadi 2023). Mengenai ini, merusak lingkungan hukumnya adalah haram dan menjaganya adalah *fardh al-kifāyah* dalam kerangka *mabādi‘ at-tashrī‘iyyah* (prinsip legislasi hukum) (Zainuddin 2021). Pada Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017, isu lingkungan juga dibicarakan, dan salah satu isu penting yang diangkat adalah memberikan landasan moral pada pemanfaatan tanah yang harus menjamin kelangsungan hidup manusia. Salah satu putusan rekomendasi dalam Munas tersebut adalah tanah harus dikembalikan kepada fungsi utamanya sebagai alat produksi untuk kesejahteraan rakyat (Emhas 2017).

Selain Muhammadiyah dan NU, berbagai organisasi maupun komunitas keagamaan yang terlibat dalam aktivisme lingkungan juga memiliki kerangka etika terhadap lingkungan berdasarkan pandangan antroposentris transgenerasi ini. Misal, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 86 tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global juga menitikberatkan terhadap keberlanjutan hidup manusia. Fatwa itu mengutip Q.S. Al-Syu‘ara: 183 yang melarang perbuatan yang merugikan hak-hak manusia dan membuat kerusakan. Selain itu, fatwa itu juga mencantumkan beberapa hadis masyhur yang berkaitan tentang lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan, contohnya adalah hadis dari Anas bin Malik mengenai anjuran Nabi Muhammad untuk menanam biji kurma yang secara tersirat untuk mencegah hari kiamat (H.R. Abu Dawud dan Ahmad) atau anjuran Nabi

Muhammad untuk menyelamatkan Muslim lainnya dengan tangan dan ucapan (H.R. Al-Bukhari dan Muslim). Dalam fatwa MUI ini, kerusakan alam yang berdampak pada krisis iklim dihukumkan haram, deforestasi yang tidak terkendali dan menyebabkan pelepasan besar-besaran gas rumah kaca juga dihukum haram (MUI 2023). Fatwa serupa terkait lingkungan juga telah dikeluarkan MUI, Fatwa tentang Air Daur Ulang (2010) dan Fatwa tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem (2014).

Pengarusutamaan kerangka etika melalui fatwa juga dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui Fatwa nomor 4 tahun 2019 tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam (MPU 2019). Dalam pertimbangan utama fatwa ini disebutkan secara jelas bahwa kerusakan lingkungan hidup merupakan ancaman serius bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Dalam ketetapan pertama fatwa ini, lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan alam sekitarnya. Fatwa kedua menekankan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup untuk kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan hukumnya adalah boleh. Dalam hal ini, MPU Aceh menggarisbawahi unsur kemaslahatan, yang berarti juga kelanjutan hidup manusia, menjadi titik ukur kebolehan mengelola alam. Dengan kerangka etika ini, MPU Aceh menegaskan kepada pemerintah untuk memperketat perizinan dan penertiban bentuk perbuatan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang meliputi kerusakan hutan akibat *illegal logging*, pencemaran sungai dan laut, kerusakan tanah dan sumber mata air akibat pertambangan, dan pencemaran udara. Kerangka etika ini yang kemudian dimanfaatkan oleh Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA) sebagai landasan untuk membuat program-program pro-lingkungan yang melibatkan para pemuka agama di Aceh (Rahimun dkk tt).

Di masing-masing area gerakan Green Islam, kerangka moral ini menyebar ke berbagai konstituen mereka. Tokoh-tokoh agama yang aktif dalam isu lingkungan dengan kapasitas dan keahlian mereka juga menguatkan paradigma yang bersifat antroposentris transgenerasi ini. Misal, Ketua Pusat Pengajian Islam (PPI) Universitas Nasional (UNAS) Fachruddin Mangunjaya yang bergerak sebagai pengkampanye kebijakan dan kerap kali juga terlibat dalam aktivisme konservasionis mengarusutamakan gerakan *green hajj* atau eko-haji, eko-masjid, dan

eko-pesantren, menyampaikan pentingnya menjaga lingkungan untuk melestarikan dunia bagi anak, cucu, dan generasi yang akan datang (Mangunjaya, Ahmad 2013). Dengan kerangka etika ini, di PPI UNAS ia membuat program Dai Konservasionis untuk menyebarkan kerangka moral ajaran Islam terhadap lingkungan ke masyarakat luas. Kerangka etika ini juga ditemukan kuat pada organisasi Islam seperti Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) yang beberapa cabangnya, seperti Yogyakarta (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, FGD, 6-8 Maret 2024) dan Surabaya (Agus Yudianto, LDII Jawa Timur, FGD, 20-22 Februari 2024), aktif dalam program lingkungan. Selain itu, Dewan Masjid Indonesia (DMI) juga memiliki program eko-masjid (Natsir Zubaidi, Mustasyar DMI, FGD, 20-22 Februari 2024). Di Cirebon, Salam Institute juga memiliki program pesantren lingkungan (Syatori, Pendiri Salam Institute, FGD 20-22 Februari 2024). Ahmadiyah melalui Clean the City (CTC) juga berfokus pada isu sampah (Abdul Ghani, Sekretaris Umr Ammah PB JAI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Selain kerangka etika yang bersifat antroposentris transgenerasi, kerangka etika yang memberikan nilai transenden pada hubungan alam dan manusia juga menjadi kekuatan gerakan Green Islam. Pandangan ini memberikan kekuatan nilai terhadap aktivisme lingkungan (Kronlid, Ohman 2012). Salah satu pandangan utama kerangka etika ini dikampanyekan oleh Imam Masjid Istiqlal K.H. Nasaruddin Umar. Dalam pandangannya, kerusakan lingkungan merupakan akibat dari ketidakharmonisan manusia dengan alam. Karena itu, hal yang perlu diperbaiki, menurutnya, adalah memperbaiki hulunya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah memperbaiki hubungan manusia dengan alam atau yang ia sebut sebagai “resakralisasi”. Menurutnya, alam adalah bentuk perwujudan dari Tuhan, sehingga logikanya bila Tuhan adalah sakral, maka seharusnya alam juga sakral. Ia memotret hubungan manusia dan alam saat ini lebih banyak disandarkan pada kecenderungan maskulinitas dengan pendekatan rasional, seperti untung-rugi ekonomi, dibandingkan emosional. Kerangka etika ini menghindari alam sebagai objek, melainkan subjek yang setara dengan manusia (Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, wawancara 8 April 2024).

Pandangan serupa juga dapat ditemukan pada organisasi besar Green Islam yang bergerak dalam pengkampanye kebijakan, seperti Muhammadiyah dan NU. Misal, dalam teologi lingkungannya, Muhammadiyah mendefinisikan hubungan manusia dan alam sebagai

bentuk keimanan dan peribadatan. Alam dipandang sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Tetapi dalam hal ini, Muhammadiyah memberikan batas dengan konsep animisme, bahwa kesatuan dengan alam bukan untuk menjadi objek yang disembah (Mawardi, Samdijo 2021). Di NU, paradigma ini dapat ditemukan pada *fiqh al-bi'ah* (fikih lingkungan hidup). Pada paradigma ini, NU mengetengahkan konsep *Al-bi'ah* untuk mendefinisikan kesatuan ruang seluruh benda, makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, bintang, dan seluruh makhluk hidup lainnya (Mufid 2020).

Pendekatan yang cenderung dekat dengan pemahaman tasawuf ini ditemukan di beberapa organisasi maupun kelompok Muslim yang terlibat aktif dalam aktivisme lingkungan sebagai konservasionis. Pemahaman ini menjadikan aktivisme lingkungan mendapat nilai tambah sebagai ibadah. Salah satunya adalah Bumi Langit Permaculture di Yogyakarta. Pemilik Bumi Langit Farm dan Ketua Yayasan Wakaf Bumi Langit Iskandar Waworuntu mengutarakan bahwa menjadi penting bagi umat Muslim untuk menerjemahkan konsep *ṭayyib* (baik) dalam keseharian. Ia mengetengahkan hubungan yang “intim” dengan alam sebagai kerangka moral untuk memahami hubungan manusia dengan alam. Menurutnya, manusia perlu mencari keberkahan dari alam, karena jika tidak, maka konsep keberlanjutan yang dipromosikan banyak pihak akan sulit terlaksana. Ia cukup banyak memotret fenomena industri makanan yang berinduk pada mekanisme industri yang mengeksploitasi alam, sehingga prosesnya ia nilai “tidak islami”. Ia mempertanyakan proses keberkahan yang akan didapatkan jika hidup dalam mekanisme industri yang ekstraktif ini. Oleh karena itu, dalam pandangannya, ia menganggap sangat penting untuk kembali ke fitrah dengan melakukan *self-control* melalui sebuah gaya hidup yang menjaga hubungan primordial dengan alam (Iskandar Waworuntu, pendiri Bumi Langit Permaculture, FGD, 6-8 Maret 2024). Dengan kerangka moral seperti ini, melalui yayasan yang dibentuknya, Iskandar melakukan penyebaran nilai melalui pendidikan dan wisata alam. Nilai yang disebarluaskan Iskandar melalui yayasannya ini telah diadaptasi berbagai pihak, baik secara personal maupun kelembagaan, di antaranya oleh LDII Yogyakarta (Ketua DPW LDII Yogyakarta, FGD, 6-8 Maret 2024) dan AgriQuran di Jawa Barat yang juga mengembangkan konsep permaculture (Farras Muhadzdzib, pendiri AgriQuran, FGD 6-8 Maret 2024).

8.1.2 Gerakan dengan Struktur dari Pusat ke Daerah

Pada dasarnya agama, dengan berbagai tingkatan keimanannya, memengaruhi penalaran moral, sikap, dan perilaku para penganutnya (Hutson 2000; King 2007). Ini yang menjadi salah satu pembeda utama gerakan Green Islam dengan gerakan aktivisme 'sekular', yaitu pada kedalaman konstituennya. Berkaitan dengan organisasi, agama, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik, memiliki hubungan positif terhadap komitmen berorganisasi. Komitmen itu dapat dalam bentuk komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif (Imran, Hamid, Aziz 2017).

Organisasi maupun komunitas agama pada umumnya menyebarluaskan pemahaman agama kepada para anggotanya, baik melalui pendidikan formal, pelatihan-pelatihan informal berjenjang, ataupun kegiatan-kegiatan kultural, sehingga mereka yang pada awalnya sudah terbentuk religiusitas pada dirinya, dengan berbagai tingkatan yang beragam, semakin mendalam wawasannya tentang agama. Dalam hal ini, hubungan positif antara religiusitas dan komitmen berorganisasi juga dapat semakin mendalam.

Jika melihat komposisi anggota organisasi-organisasi di Indonesia, organisasi Islam, baik skala nasional maupun lokal, memiliki jumlah anggota yang banyak. Dua organisasi Islam terbesar di Indonesia adalah NU dan Muhammadiyah. Meskipun secara faktual dapat berbeda, tetapi NU diperkirakan memiliki kader mencapai 90 juta jiwa, sementara Muhammadiyah sekitar 60 juta jiwa (Taufani, CNBC 2024), yang menjangkau masyarakat perkotaan dan pedesaan. Ini belum memperhitungkan mereka yang terafiliasi secara kultural. Selain itu, terdapat banyak pula masyarakat Muslim Indonesia yang terafiliasi dengan beragam organisasi maupun komunitas agama di luar NU dan Muhammadiyah.

Dalam studi ini, kami menemukan semua gerakan aktivisme lingkungan berbasis Islam memiliki hubungan atau ikatan secara langsung maupun tidak langsung dengan organisasi atau komunitas Islam. Dalam hal ini, kami menemukan banyak gerakan Green Islam yang bergerak dalam aktivisme pengkampanye kebijakan memiliki karakter ini. Hal ini menunjukkan potensi yang kuat dari gerakan lingkungan berbasis Islam. Dalam temuan studi ini, sumber daya konstituen loyal itu terkonfirmasi memudahkan pergerakan aktivisme lingkungan berbasis



agama. Misal, dalam pergerakan MDMC untuk melakukan aksi lingkungan dan kebencanaan, mereka memiliki 12 badan atau sayap organisasi yang siap siaga untuk berkolaborasi, yaitu Pendidikan Darurat Muhammadiyah, Water Sanitation and Hygiene (WASH) Muhammadiyah, Logistics Muhammadiyah, Shelter Muhammadiyah, Disaster Medicine Muhammadiyah, Psikososial Muhammadiyah, Comdev Muhammadiyah, S.A.R. Muhammadiyah, Dapur Umum Muhammadiyah, Driver Muhammadiyah, Data Informasi Muhammadiyah, dan Media Center Muhammadiyah (Dede Haris Sumarno, Bendahara MDMC, wawancara 26 April 2024). Oleh karena itu, dalam operasionalnya, MDMC tidak menghadapi masalah sumber daya manusia yang berarti. Kader-kader Muhammadiyah yang terjaring pada 12 badan atau sayap itu akan selalu siap membantu pergerakan MDMC.

Organisasi lingkungan di bawah Muhammadiyah juga memiliki pola yang sama. LLHPB 'Aisyiyah saat membentuk sekolah hijau memanfaatkan jaringan tingkat Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Busthanul Athfal (TK ABA) yang jumlahnya dapat mencapai ribuan atau saat membentuk program duta lingkungan yang melibatkan Lazismu (Surria Dwiwahyu, LLHPB 'Aisyiyah, FGD, 20-22 Februari 2024). MLH yang menjadi sayap utama pergerakan lingkungan dalam Muhammadiyah juga sering menemui kemudahan membuat program karena kekuatan keanggotaan persyarikatan (Djihadul Mubarak, MLH, FGD, 20-22 Februari 2024). Begitu pula komunitas lingkungan kultural kader Muhammadiyah KHM. Meskipun bukan lembaga di bawah struktur Muhammadiyah, namun identitas dan nilai-nilai organisasi Muhammadiyah memudahkan konsolidasi para kader (David Efendi, Ketua KHM, FGD, 6-8 Maret 2024).

Contoh lain adalah LDII Jawa Timur dan LDII Yogyakarta. Di Kediri, dengan bantuan anggaran 10 miliar rupiah, LDII Jawa Timur membangun PLTS tenaga surya di Pondok Wali Barokah, pesantren milik jaringan LDII, dengan kapasitas 200 ribu watt per-bulan. Di Ngawi, di kebun teh milik jaringan LDII, LDII Jawa Timur berhasil menggunakan teknologi mikrohidro untuk kegiatan warga sekitar. Di Surabaya, LDII Jawa Timur, melalui jaringannya, sering mengadakan program menanam tanaman hortikultura bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk menciptakan Surabaya sebagai kota hidroponik (Agus Yudianto, LDII Jawa Timur, wawancara, 6-8 Maret 2024). Di Yogyakarta, LDII secara konsisten melalui jaringan kiai mereka membentuk gerakan "Kiai Peduli

Sampah” (Atus Syahbuddin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, wawancara, 6-8, 2024). Dengan konstituen tradisional yang ada, adalah menjadi lebih mudah dan terarah bagi LDII untuk mengembangkan dan menjalankan program lingkungan mereka.

8.1.3 Konstituen Loyal

Agama yang memengaruhi penalaran etika, sikap, dan perilaku para penganutnya dan memperkuat hubungan positif terhadap gerakan sosial (Hutson 2000; King 2007; Imran, Hamid, Aziz 2017) juga membawa implikasi pada kuatnya daya tarik gerakan Green Islam pada konstituen yang memiliki ikatan kultural dengan suatu organisasi keagamaan. Mereka yang secara kultural terafiliasi dengan sebuah gerakan keagamaan, baik melalui pendidikan formal maupun informal, kegiatan-kegiatan kultural seperti pengajian, tahlil, dan kegiatan guyub kemasyarakatan relatif lebih mudah diajak pada gerakan Green Islam yang memiliki kesamaan identitas.

Jaringan kultural aktivisme lingkungan yang kuat dapat ditemukan pada NU. Organisasi lingkungan pada struktur resmi NU, LPBI, ketika menjalankan programnya sangat terbantu dengan jaringan NU yang luas. Dalam banyak kasus bencana, tidak sulit bagi LPBI untuk mengumpulkan para relawan yang membantu aksi-aksi mereka. Identitas NU yang melekat pada organisasi menjadi daya tarik bagi para konstituennya yang menyebar luas di Indonesia. Hal itu juga dirasakan oleh gerakan Green Islam yang banyak bergerak sebagai mobilisator. Terlebih gerakan jenis ini, selain mampu merangkul konstituen loyal ini dalam aktivisme lingkungannya, mereka juga memiliki kesamaan tujuan sebagai warga terdampak proyek-proyek industri ekstraktif, seperti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) yang telah memiliki beberapa jaringan cabang (Ayu Rikza, Koordinator Nasional FNKSDA, FGD, 6-8 Maret 2024; David Efendi, Ketua KHM, FGD, 6-8 Maret 2023). Aksi-aksi yang dilakukan FNKSDA merespons isu-isu lingkungan relatif terbantu dengan kesamaan identitas itu. Baik pada tingkat pusat maupun cabang, FNKSDA dapat menarik para warga terdampak dan para aktivis sejenis di kalangan NU untuk terlibat dalam program-program mereka.

Selain FNKSDA, gerakan lingkungan mobilisator sejenis, Salam Institute di Cirebon, melalui jaringan warga sekitar, dan juga jaringan Nahdliyin mampu secara konsisten mengembangkan program pesantren ekologis (Syatori, pendiri Salam Institute, wawancara, 20-22 April, 2024).



Bahkan dengan kesamaan identitas itu, para aktivis Salam Institute dapat menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang ekologi politik kepada masyarakat awam melalui program pesantren ekologi. Dengan identitas keislaman yang melekat, para konstituennya juga menjadi tertarik pada program-program pendidikan yang disebut sebagai “pengajian”, seperti pengajian geotermal. Tidak sedikit pula gerakan pesantren ekologis yang diinisiasi oleh kalangan Nahdliyin di daerah-daerah. Meskipun dalam kapasitas yang lebih terbatas, hal serupa juga dapat ditemui di komunitas Ahmadiyah. Melalui anggota mereka yang tersebar pada 400 titik di 50 kota/kabupaten, gerakan lingkungan yang diinisiasi melalui program Clean the City tidak pernah kekurangan orang. Gerakan yang selalu diawali dengan shalat subuh berjamaah dengan masyarakat setempat itu dapat menggalang massa yang luas.

Sementara AgriQuran, EcoDeen, dan Yayasan Bina Bhakti Lingkungan memanfaatkan jaringan Muslim urban yang telah terbina dari aktivisme di sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Mereka juga memiliki pengikut solid di jaringan daring. Misalnya, AgriQuran melalui platform Instagramnya memiliki 46 ribu pengikut solid dan EcoDeen melalui platform Instagram [ecodeen.id](https://www.instagram.com/ecodeen.id) memiliki 4.795 pengikut. Mereka juga memanfaatkan jaringannya untuk membantu mengembangkan program-program lingkungan, seperti mendatangkan para akademisi atau pengusaha yang terbina melalui perkaderan yang sama. Dengan jaringan Muslim urbannya, program-program lingkungan mereka juga dikemas dengan gaya hidup Muslim urban yang senang dengan praktik filantropi, seperti sedekah pangan, santunan duafa pelestari lingkungan, eko-kurban, dan pemberdayaan komunitas wirausaha lingkungan.

8.1.4 Kemampuan Adaptasi dan Inovasi

Sebagian gerakan Green Islam memiliki kemampuan beradaptasi dan inovasi. Studi ini menemukan mereka yang bergerak dalam aktivisme lingkungan yang bercorak konservasionis dan pengkampanye kebijakan lebih memiliki kemampuan adaptasi dan inovasi untuk aksi-aksi lingkungan. Meskipun dalam skalanya masing-masing, terdapat upaya dari mereka untuk melakukan adaptasi, bahkan inovasi dalam aktivisme lingkungannya. Kemampuan inovasi, terutama dalam penggunaan teknologi, memiliki manfaat bagi pengembangan program-program lingkungan (Shabir, Hussain, dkk 2023).

Di Yogyakarta, gerakan konservasionis seperti Bumi Langit Permaculture menggunakan teknologi untuk memperkuat aktivismenya. Mereka menggunakan panel surya sebagai penghasil listrik lingkungannya. Teknologi itu diperoleh oleh Iskandar Waworuntu, pendiri Bumi Langit Permaculture, secara swadaya. Ia mengembangkan proyek lingkungannya itu sebagai ekowisata yang menghasilkan dampak berantai, mulai hasil manfaatnya untuk lingkungan, pemberdayaan masyarakat yang menguntungkan mereka karena membuka lapangan pekerjaan, hingga eksperimen teknologi terhadap program pro-lingkungan (Iskandar Waworuntu, pendiri Bumi Langit Permaculture, FGD, 6-8 Maret, dan observasi, 27 April 2024).

MDMC yang juga berbasis di Yogyakarta mendalami pengetahuan tentang manajemen bencana. Mereka bahkan membentuk tim satgas medis atau *task force* dari satuan tenaga kesehatan Muhammadiyah yang mereka klaim sebagai tim satgas media pertama dan masih satu-satunya di Indonesia yang siap diberangkatkan ke negara yang mengalami bencana (Dede Haris Sumarno, Bendahara MDMC, wawancara, 27 April 2024; Twediana, Ketua Bidang Jaringan dan Kerjasama MDMC, wawancara, 27 April 2024). Dengan inovasi perubahan paradigma dari “penanggulangan” ke “resiliensi”, MDMC melakukan pembaharuan pendekatan dalam memahami bencana. Mereka juga berupaya untuk menghilangkan narasi bencana sebagai “azab” yang menurut mereka menghilangkan daya kritis Muslim dalam memandang bencana (Dede Haris Sumarno, Bendahara MDMC, wawancara, 27 April 2024). MDMC berusaha untuk keluar dari jebakan pemahaman yang tidak progresif.

Di Sulawesi Selatan, Yayasan Hadji Kalla membentuk Kampung Hijau Energi untuk membangun sarana digester biogas yang didanai melalui skema zakat yang dikelola secara mandiri. Kelompok tani yang menjadi objek pemberdayaan mereka dapat memperoleh zakat dengan prasyarat membangun sarana digester biogas yang ramah lingkungan. Program ini juga menjalin jaringan dengan Pondok Pesantren Babussalam Arrahmah di Kabupaten Gowa. Dengan program ini, masyarakat sekitar pesantren secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan pada penggunaan pupuk kimia. Mereka lebih sering memanfaatkan pupuk organik yang dihasilkan dari kotoran ternak yang dikelola melalui sarana digester yang didirikan di area peternakan pesantren (Sapril, wawancara 2024). Yayasan Hadji Kalla bergerak berlandaskan konsep-konsep Islam yang

terkandung dalam konsep infak, sedekah, dan zakat untuk pelestarian lingkungan.

Upaya untuk berinovasi dan beradaptasi ini juga ditemukan pada komunitas Save Ake Gaale di Ternate. Saat menyelesaikan permasalahan air, mereka cukup serius mempertimbangkan inovasi untuk menjadi solusi masyarakat. Mereka melakukan uji pemeriksaan kualitas air untuk menemukan bakteri *Escherichia coli* (*E. coli*) yang biasa hidup di usus manusia dan hewan. Penemuan bakteri itu menunjukkan terdapat sesuatu yang mengalir melewati sumber resapan yang mereka buat. Mereka kemudian menemukan penyebab masalah itu berasal dari septic tank yang tidak memenuhi standar. Dari identifikasi masalah itulah Save Ake Gaale menjalankan program konversi septic tank yang dalam implementasinya mendapat tantangan eksternal dari masyarakat berupa ketidaksadaran masyarakat tentang inovasi ini. Untuk mematangkan program lingkungannya, Save Ake Gaale bahkan kerap kali beradu argumen ilmiah dengan para sarjana lainnya. Misal dalam penerapan program sumur resapan, Save Ake Gaale pernah ditentang oleh sekumpulan sarjana geologi karena menurut mereka sumur resapan akan memberikan dampak terhadap kerentanan tanah. Namun, hal itu dibantah oleh Save Ake Gaale dengan menjelaskan bahwa program sumur resapan mereka bukan sumur resapan biasa, melainkan sumur resapan biopori atau lubang resapan yang dibuat dengan ukuran tertentu kemudian ditutupi sampah organik yang berfungsi sebagai penyerap air ke tanah sekaligus membuat kompos alami. Berkaitan dengan ini, Save Ake Gaale juga mengkritik Dinas Lingkungan Hidup yang sebenarnya memiliki program sumur resapan biopori, tetapi karena tidak berdasarkan bukti (*evidence base*), programnya kemudian salah sasaran (Alwan Arif, pendiri Save Ake Gaale, wawancara, 6-8 Maret 2024).

Identifikasi persoalan yang dilakukan oleh para aktivis Green Islam itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya cukup mengerti tentang inovasi. Contoh lain, LDII Jawa Timur berhasil mendekatkan pesantren milik jaringannya dengan teknologi panel surya untuk menciptakan energi. Mereka juga aktif dalam bidang inovasi bisnis hijau melalui usaha pertanian yang tersebar di berbagai daerah (Agus Yudianto, LDII Jawa Timur, FGD, 6-8 Maret 2024). Terkait inovasi, komunitas AgriQuran dan EcoDeen yang digerakkan oleh anak-anak muda menggunakan media sosial cukup membantu gerak aktivisme mereka. Dengan pemanfaatan media sosial ini, diseminasi nilai-nilai lingkungan dapat menyentuh

pihak-pihak yang sebelumnya belum tersentuh isu lingkungan dan di sisi lain memperkuat basis tradisional yang memiliki perhatian serius terhadap masalah lingkungan (Rissa Ozalifia, EcoDeen, FGD, 20-22 Februari 2024; Farras Muhadzdzib, pendiri AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024).

Kemampuan adaptasi dan inovasi ini menjadi nilai tambah yang menguatkan gerakan Green Islam. Kemampuan ini timbul dari sensitivitas masalah-masalah yang timbul di sekitar dan dorongan moral untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Beberapa gerakan Green Islam mampu mengembangkan strategi secara konsisten. Meskipun ada perbedaan mazhab dalam memandang masalah lingkungan, namun utilisasi terhadap teknologi, kemampuan mengelola bisnis hijau, dan strategi yang inovatif dan menjadi kekuatan signifikan organisasi maupun komunitas atau lembaga lingkungan berbasis Islam.

8.2 Peluang Perkembangan Green Islam di Indonesia

8.2.1 Jaringan yang Luas

Gerakan lingkungan berbasis agama secara umum memiliki karakteristik yang khas dengan posisinya yang hibrida dan memiliki jaringan pada aktivisme global, nasional, dan lokal (Smith 2017). Dalam konteks global, gerakan Green Islam terlibat dalam forum-forum global, seperti United Nations Climate Change Conference atau Interfaith Climate Statement, yang menjadi wahana mereka untuk memperkuat konsolidasi. Namun, gerakan Green Islam juga tidak terlepas dari konteks lokal, bahkan mereka menggunakan bahasa-bahasa lokal untuk membentuk wacana yang beragam. Posisinya yang khas ini memberikan peluang bagi para aktornya untuk terus memperluas jaringan menguatkan aktivisme lingkungan.

Jaringan yang luas memberikan peluang untuk memperbesar gerakan. Jaringan luas ini dapat ditemukan dalam berbagai tipologi gerakan Green Islam, baik mereka yang bercorak konservasionis, pengkampanye kebijakan, dan mobilisator. Pada umumnya, masing-masing gerakan berjejaring dengan kelompok lain yang memiliki karakteristik yang sama, seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya mengenai jaringan. Kemampuan gerakan menafsirkan pesan ke dalam wacana yang berbeda memperkuat pesan itu untuk menjangkau kelompok di luarnya (Beyer 2011). Studi ini menemukan bahwa



perluasan jaringan organisasi atau komunitas Green Islam terbentuk melalui interaksi pertukaran informasi (*information exchange*), seperti saat membuat pernyataan bersama, aktif dalam forum-forum lingkungan, pelatihan, atau diseminasi informasi, seperti penyebarluasan fatwa.

Ada beberapa contoh yang dapat diketengahkan untuk menggambarkan pembentukan jaringan ini. Salah satunya adalah aktivis utama lingkungan Muhammadiyah yang lebih banyak bergerak sebagai pengkampanye kebijakan, Hening Parlan. Sebelumnya, ia aktif di WALHI yang waktu dipimpin oleh Suraya Afif (Hening Parlan, Ketua Koordinator Bidang Lingkungan LLHPB 'Aisyiyah, wawancara, 25 April 2024). Saat mulai aktif di Muhammadiyah, ia menyebarkan pesan kesadaran lingkungannya yang relatif banyak menggunakan pendekatan ekonomi politik dengan wacana yang lebih diterima oleh kalangan agama—meskipun ia akui minim menggunakan dalil-dalil, misal melalui pendidikan wanita di Aisyiyah yang dekat dengan pengalaman sehari-hari bermasyarakat. Kemampuannya dalam mengubah pesan ke dalam wacana yang berbeda memperkuat peluangnya untuk memperluas gerakan lingkungan pada organisasi agama.

Pengalaman dan konsistensi pada isu lingkungan selama bertahun-tahun, kemudian dilengkapi kemampuannya untuk mengubah pesan ke dalam wacana yang mudah diterima, membuatnya terlibat lebih aktif dalam pergerakan Muhammadiyah pada isu lingkungan. Ia kemudian aktif di MLH, dan juga organisasi lintas iman seperti HFI yang sebelumnya ia telah aktif di sana, kemudian membentuk Green Faith, Ummah for Earth, dan membantu para kader lingkungan Muhammadiyah di organisasi kultural KHM (Hening Parlan, wawancara 2024). Melalui kemampuannya itu, ia dapat menghubungkan berbagai organisasi lingkungan keagamaan untuk melakukan pertukaran informasi, sehingga terus memperluas jaringan aktivisme lingkungan berbasis agama.

Contoh lain adalah aktivis lingkungan Muslim Direktur Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS) Fachruddin Mangunjaya. Memiliki pengalaman pada World Wide Fund for Nature (WWF) dan aksi-aksi konservasi, Fachruddin merupakan cerminan aktivis lingkungan hibrida yang menjadi saluran utama aktivisme lingkungan dari Indonesia pada aktivisme global di satu sisi dan aktivis lingkungan yang berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan lokal di sisi lain. Dengan kapasitas dan pengalamannya itu, ia dapat menghubungkan PPI UNAS kepada LSM konservasi internasional,

kelompok masyarakat lokal, kelompok perempuan dan pemuda, serta pemerintah setempat (Zulham, PPI UNAS, FGD, 20-22 Februari 2024).

Isu lingkungan menjadi sarana yang cukup efektif bagi gerakan Green Islam untuk memperluas jaringannya. Misal, komunitas Eco Bhinneka di Surakarta yang merupakan program binaan Muhammadiyah pada awalnya hanya diampu oleh dua orang. Namun, dengan pendekatan yang mereka lakukan melalui isu lingkungan, mereka dapat memperluas jaringannya. Bahkan, kota Solo yang dikenal dengan beberapa kasus intoleransi, dengan pendekatan isu lingkungan, Eco Bhinneka juga dapat memberikan keluaran berupa penguatan toleransi. Contohnya adalah dengan merangkul komunitas agama lain untuk bergabung dalam komunitas ini, seperti komunitas Konghucu, Kristen, Katolik, dan Budha, dan komunitas seperti kelompok ibu-ibu PKK dan komunitas pemuda. Ada beberapa kasus sebelum bergabung dengan Eco Bhinneka, mereka memiliki kecurigaan satu sama lain, namun setelah bergabung kecurigaan itu hilang dan justru dapat saling akrab (Uswatun Hasanah, Koordinator Eco Bhinneka Surakarta, wawancara, 27 April 2024; Diana, pengurus PKK Desa Joyotakan, wawancara, 27 April 2024).

Di Ternate, komunitas Save Ake Gaale yang juga terlibat aktif sebagai pengkampanye kebijakan dan juga sekaligus sebagai konservasionis tidak pernah kekurangan kolega sejak awal pendiriannya pada 2001. Melalui momentum-momentum seperti Hari Air se-Dunia, sering kali Save Ake Gaale berkolaborasi dengan komunitas lain untuk melakukan kegiatan. Di hari-hari tertentu di Ternate terdapat perayaan khusus yang mengundang banyak komunitas dan dimanfaatkan Save Ake Gaale untuk melakukan sinergi (Alwan Arif, pendiri Save Ake Gaale, wawancara, 6-8 Maret, 2024).

Begitu pula organisasi besar seperti NU, MUI, DMI, atau LDII tidak pernah menutup diri untuk bekerja sama memperluas jaringan mereka. LDII Jawa Timur beberapa kali melakukan program bersama dengan Ansor NU, Muhammadiyah, MUI, dan FKUB di hari lingkungan. Mereka beberapa kali melakukan program *urban farming* bersama kelompok Fatayat NU dan Aisyiyah Muhammadiyah. Di luar organisasi agama, LDII juga sering kali melakukan program pengelolaan sampah bersama berbagai lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan.

Peran aktivis gerakan Green Islam bercorak mobilisator, seperti FNKSDA, menjelaskan bahwa ukuran untuk berjejaring adalah bahwa umat manusia disatukan oleh penderitaan yang sama berbasis material.

Dengan pandangan ini, mereka tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan siapa pun, baik intra-agama dan antar-agama, terutama terhadap mereka yang memiliki kesamaan itu. FNKSDA sering kali bersilaturahmi baik ke pesantren-pesantren untuk mengadvokasikan isu-isu lingkungan. Di Kendeng, misalnya, FNKSDA melakukan kerja advokasi melalui istighasah akbar dengan jaringan pesantren (Ayu Rikza, Koordinator Nasional FNKSDA, FGD 6-8 Maret 2024). FNKSDA juga sering mengambil bagian advokasi bersama WALHI dan kolega pada beberapa LBH. FNKSDA juga secara aktif berjejaring dengan komunitas kultural Muhammadiyah KHM dalam gerakan politik lingkungan, termasuk juga dengan gerakan Kristen Hijau.

Di Aceh, HAKA tidak pernah merasa kesulitan memperluas jaringannya dengan kelompok agama. HAKA tidak pernah menganggap para tengku ataupun inong yang mengurus dayah-dayah di pesantren sebelah mata. Menurut HAKA, mereka justru merupakan kekuatan Aceh, termasuk dalam mempromosikan nilai-nilai pro-lingkungan. Para tengku itu ketika diajak bekerja sama terkejut dengan hasil temuan tim GIS Geospasial HAKA yang menunjukkan kerusakan lingkungan di Aceh (Munira, HAKA, FGD, 20-22 Februari 2024). Hal serupa ditemukan pada gerakan Green Faith yang lebih berorientasi pada gerakan lingkungan lintas iman. Pengalaman Green Faith sejak beroperasi di Indonesia pada 2002, mereka selalu dapat memperluas jaringannya, seperti dengan kalangan majelis taklim melalui program pengajian, Muhammadiyah, NU, komunitas gereja, termasuk juga kelompok Hindu (Nita Roshita, Green Faith, FGD, 20-22 Februari 2024).

Dalam temuan riset ini, hampir semua gerakan Green Islam memiliki kemampuan dalam berjejaring, dibandingkan sebaliknya, meskipun dalam skala yang berbeda-beda. Pesan agama terhadap lingkungan yang disebarluaskan oleh gerakan lingkungan agama mampu diterjemahkan ke dalam berbagai wacana, sehingga daripada mengecil, gerakan Green Islam cenderung membesar.

8.2.2 Kapasitas Personal Aktivis

Studi ini menemukan bahwa sebagian besar aktivis gerakan Green Islam setidaknya menempuh pendidikan tingkat sarjana. Bahkan beberapa dari mereka memiliki latar belakang pendidikan master dan doktoral, di antaranya menempuh pendidikan di luar negeri. Sebagian juga merupakan dosen aktif di kampus. Ini menjadi peluang mereka

dalam mengembangkan gerakan Green Islam. Basis pengetahuan mereka dapat digunakan dalam aktivisme lingkungan di komunitas mereka.

Pada dasarnya, pendidikan meningkatkan kapabilitas dari aktivis meningkatkan kualitas hidup. Peran penting pendidikan adalah untuk memperluas pilihan dan kebebasan (Walker 2005). Dalam aktivisme lingkungan, latar belakang pendidikan yang dimiliki para aktivis Green Islam ini memberikan peluang yang lebih dalam meningkatkan kualitas organisasi maupun komunitas mereka.

Bagian ini melihat hubungan latar pendidikan dan peningkatan kapasitas bagi gerakan Green Islam. Salah satu figur yang memiliki latar belakang pendidikan dan kapasitas pengetahuan yang memadai bagi pengembangan gerakan Green Islam adalah Fachruddin Mangunjaya yang banyak bergerak di isu konservasi dan kebijakan. Fachruddin menempuh pendidikan sarjananya dari Fakultas Biologi Universitas Nasional (UNAS), lalu melanjutkan gelar master di biologi konservasi pada Universitas Indonesia (UI), dan meraih doktor pada program studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Institut Pertanian Bogor (IPB). Pada 2024, ia diangkat menjadi Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian UNAS periode 2024-2028 (PPI UNAS). Dalam dunia konservasi, ia memiliki pengalaman bekerja di WWF. Saat menjadi Direktur Pusat Pengajian Islam (PPI) UNAS, ia mengarahkan lembaganya itu pada pengarusutamaan isu lingkungan (Zulham, PPI UNAS, FGD, 20-22 Februari 2024; Mangunjaya, Direktur PPI UNAS, wawancara, 22 Maret 2024). PPI UNAS sejak berdiri berfokus pada pengkajian masalah sosial-politik melalui pendekatan Islam yang filosofis. Berperan penting bagi aktivisme UNAS terhadap isu lingkungan.

Ia merupakan salah satu aktivis lingkungan terkemuka di dunia Muslim dan terpilih sebagai salah satu dari empat Pejuang Lingkungan Muslim (*Muslim Eco-Warrior*) (PPI UNAS). Di PPI UNAS, ia berfokus mengembangkan program Eko-Pesantren, *Green Hajj*, dan Dai Konservasionis. Bersama MUI, PPI UNAS membentuk dan menyebarluaskan Fatwa tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem.

Fachruddin juga representasi dari aktivis lingkungan yang memposisikan dirinya berada di antara aktivisme lingkungan global dan lokal. Di tingkat global, Fachruddin aktif pada forum-forum global, di antaranya ia merupakan anggota aktif kelompok penasihat Yale Forum on Religion and Ecology, penasihat Faith for Our Planet (FFOP), dan

nggota IUCN-WCPA Specialist Group in Cultural and Spiritual Values of Protected Areas. Fachruddin juga merupakan perwakilan akademisi penyusun draf Al-Mizan Covenant for Earth. Meski demikian, ia juga aktif pada aktivisme lingkungan tingkat nasional maupun lokal. Ia aktif sebagai penasehat Flight Foundation dan SIAGA BUMI, Dewan Pembina Yayasan Kehati, dan Majelis Kehormatan Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia (PPI UNAS).

Contoh lain adalah Program Manager organisasi lingkungan non-pemerintah (NGO) Yayasan Hadji Kalla Sapril Akhmady. Sapril merupakan lulusan master pada bidang sosiologi dan antropologi di Universitas Hawaii. Sejak lama ia aktif dalam isu lingkungan hidup dan kebudayaan. Sebelum aktif sebagai Manajer Program pada Yayasan Hadji Kalla yang berfokus pada isu kemanusiaan, kesehatan, dan lingkungan, ia pernah aktif sebagai jurnalis di Majalah Lingkungan Hidup, aktivis di Latar Nusa Makassar, Manajer Project pada program revitalisasi budaya komunitas Bajo, Dekan Fakultas Film dan Televisi di Institut Kesenian Makassar, Wakil Direktur Proyek Economic, Quality and Sustainability Improvement (EQSI) yang di antaranya berfokus pada program agrikultur, dan Manajer Project pada Yayasan Plan Internasional Indonesia yang berfokus pada penyelamatan ikan laut dari eksploitasi.

Aktivis lingkungan di lingkungan Muhammadiyah Hening Parlan sedang menempuh pendidikan tinggi hingga tingkat doktoral di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Sebelumnya, ia pernah menempuh studi sosiologi di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan master dalam bidang manajemen bencana di Universitas Tarumanagara (Lubis dkk 2023). Pada 2013, dengan kapasitas keilmuannya pada bidang kebencanaan, Hening pernah menerima Person Reksa Utama Anindha for Disaster Risk Reduction from Community (Tokoh Inspiratif Reksa Utama Anindha). Dengan keilmuannya juga ia terlibat aktif sebagai pemimpin pada Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Pimpinan Pusat Aisyiyah. Di bidang yang sama, ia pernah menduduki pimpinan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Direktur Humanitarian Forum Indonesia (HFI), pengurus Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) PP Muhammadiyah, Koordinator bidang Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, dan Isu Institusi pada Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas RB), serta terlibat aktif dalam perumusan lebih dari 12 kebijakan, di antaranya

Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, dan berbagai perda (Lubis dkk 2023). Meskipun sebelumnya ia lama aktif di WALHI, namun pengelolaan bencana menjadi awal ia mengembangkan aktivisme lingkungan di kalangan Muhammadiyah, sesuai linear dengan bidang keilmuannya. Dalam hal ini, latar belakang pendidikan memperkuat Hening untuk mengembangkan gerakan Green Islam di tubuh Muhammadiyah.

Di Ternate, komunitas Save Ake Gaale juga digerakkan oleh seorang akademisi dan praktisi kesehatan Alwan M. Arif. Ia aktif pada Ikatan Penata Anestesi Indonesia dan memiliki posisi sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Penelitian RSUD Dr. H. Chasan Boesoerie Provinsi Maluku Utara. Ia juga tercatat sebagai mahasiswa pada program Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi. Sebagai Ketua Komunitas Save Ake Gaale, Alwan turut mengampanyekan isu kesehatan pada komunitas, terutama pada masalah kualitas air bersih dan limbah.

Pada gerakan kultural, seperti Kader Hijau Muhammadiyah (KHM), para aktivisnya juga memiliki latar belakang pendidikan yang relatif baik. Salah satu pendiri utama KHM David Efendi merupakan dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sebelumnya, ia menempuh pendidikan sarjana di Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan pendidikan master di bidang Administrasi Publik, Universitas Hawaii. Keahlian risetnya pada isu gerakan sosial dan demokrasi keterlibatan memiliki linearitas dengan aktivismenya di KHM sebagai aktivis sosial yang berfokus pada isu lingkungan. Kader KHM lain Fahmi Ahmad Fauzan yang aktif di Kota Malang juga mengakui bahwa latar belakang pendidikannya membantu dalam mengembangkan aktivisme lingkungannya (Fahmi Ahmad Fauzan, KHM Kota Malang, FGD, 6-8 Maret 2024). Begitu pula Koordinator Nasional FNKSDA Ayu Rikza yang merupakan sarjana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Aktivismenya pada FNKSDA erat dengan aktivismenya yang dibangun di dunia kampus. Ia aktif pada lembaga riset dan swadaya masyarakat yang bergerak pada isu-isu sosial dan agraria. Di FNKSDA ia dan kelompoknya mengarusutamakan isu-isu agraria sebagai fokus aktivisme lingkungannya (Ayu Rikza, Koordinator Nasional FNKSDA, FGD, 6-8 Maret 2024).

Di tataran aktivis lingkungan Muslim yang lebih populer, seperti Din Syamsuddin dan Nasaruddin Umar, latar belakang pendidikan menjadi

pendorong utama kemunculan mereka sebagai aktivis Muslim, yang mendorong pengarusutamaan isu lingkungan pada masing-masing lembaga mereka. Setelah lulus dari IAIN Jakarta, Din Syamsuddin melanjutkan pendidikan master dan doktoralnya di Universitas California, Los Angeles (UCLA), Amerika Serikat di bidang studi Islam (Sustiwi 2017). Begitu pula Nasaruddin Umar, setelah lulus dari IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ia melanjutkan pendidikan master dan doktoral di kampus yang sama, di samping sempat menjalani pendidikan di Universitas McGill, Kanada dan Universitas Leiden. Setelah mendapatkan gelar doktor, ia pernah menjadi sarjana tamu di Universitas Sophia, Tokyo dan SOAS Universitas London, dan Universitas Georgetown.

Meskipun pendidikan menguatkan ketokohan aktivis Green Islam, namun mereka yang sedari awal memiliki akar yang relatif kuat dalam pergerakan lingkungan, seperti Fachruddin Mangunjaya yang sebelumnya di WWF dan Hening Parlan di WALHI, menjadikan aktivisme lingkungan sebagai prioritas utama dalam aktivisme mereka. Keterlibatan mereka di tingkat global, nasional, maupun lokal tidak terlepas dari aktivisme lingkungan, dan hal itu tampak menonjol. Sementara para aktivis lingkungan yang lebih menempatkan lingkungan sebagai agenda politik, seperti Din Syamsuddin dan Nasaruddin Umar, lebih banyak bergerak memanfaatkan momentum-momentum untuk mendekatkan gerakan Green Islam kepada masyarakat. Keberagaman pergerakan ini memperkaya gerakan Green Islam di Indonesia.

8.2.3 Fenomena Pergeseran Ekologis

Aktivisme lingkungan berbasis agama mulai muncul sebagai tren pada tahun 1960-an (Koehrsen, 2022). Pada dekade 1990-an, berbagai karya mengenai hubungan antara agama dan alam diterbitkan oleh penulis Muslim, seperti Fazlun Khalid (1992) dan Mawil Izzi Dien (2000). Di Indonesia, gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh NU seperti Ali Yafie dan Sahal Mahfudz. Pada Muktamar NU tahun 1994, mereka mengeluarkan fatwa ekologis (Mufid, 2020). Inisiatif tersebut membuka ruang bagi diskursus mengenai peran agama dalam lingkungan. Namun, meskipun diskursus ini berhasil meningkatkan kesadaran di kalangan umat Muslim, gerakan yang secara sistematis menyelaraskan pembangunan dengan pelestarian lingkungan, dengan melibatkan peran agama, belum terbentuk dengan kuat. Akibatnya, tren ekologi yang

mengancam tetap berlangsung dan menimbulkan tantangan signifikan pada tingkat kebijakan baik di tingkat global, nasional, maupun domestik.

Meski demikian, para sarjana mengembangkan indikator atau ukuran tentang kerusakan lingkungan serta menjelaskan mengapa usaha-usaha lingkungan yang sudah ada sejak 1960-an mengalami kebuntuan. Simonis (2020) mengembangkan tahapan tren ekologis. Fase pertama adalah “*ecological footprint*” dan *ecological ruksack*” atau masa ketika para sarjana mulai memunculkan ukuran-ukuran ilmu lingkungan. Indikator itu kemudian berkembang menjadi fase internalisasi pada kebijakan, dan dikenal dengan istilah “*ecological turn*” atau pergeseran paradigma yang lebih memperhatikan aspek ekologi dan keberlanjutan di ranah kebijakan, khususnya sejak Islamic Declaration on Global Climate Change pada 2015. Fase ini diawali di Jerman, pada 2011 ketika pemerintah Jerman mulai secara bertahap menghapus tenaga nuklir dan batu bara dan beralih pada teknologi yang bersih dan terbarukan, seperti tenaga surya, angin, air, biomassa, dan energi panas bumi melalui resolusi pemerintah dan parlemen Jerman. Pada 2019 muncul resolusi untuk menghentikan penggunaan batu bara pada 2038 (Simonis 2020).

Secara global, sebenarnya sudah banyak konferensi yang diadakan sebelum masa “*ecological turn*”, seperti yang dijelaskan bab sebelumnya, misal Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm pada 1972, namun mekanisme hubungan antar-negara dengan lingkungan tidak mencukupi. Mulai pada 2012, kita dapat mendeteksi mulai terjadinya “*ecological turn*” pada Konferensi PBB di Rio de Janeiro yang menempatkan dua tema lingkungan. Konferensi PBB ini menghasilkan laporan yang menjadi acuan untuk “ekonomi hijau” (Simonis 2020).

Kemudian momentum yang cukup penting untuk fase ini terjadi pada 2015, ketika terselenggaranya Konferensi COP21 Paris di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), di mana 195 negara sepakat dengan rancangan Paris Agreement yang dihasilkan. Untuk mendukung itu, negara-negara Muslim berkumpul dalam Islamic Declaration on Global Climate Change (IDGCC) sebelumnya pada Agustus 2015. Deklarasi ini memberikan sejarah penting bagi negara-negara Muslim terlibat dalam isu lingkungan. Dalam momentum yang sama pada 2015, kelompok agama di Indonesia, di antaranya yang terdiri dari NU, Muhammadiyah, MUI, DMI, PPI UNAS, PHDI, KWI, Matakin, dan lainnya juga membentuk deklarasi Indonesia Bergerak

Menyelamatkan Bumi (SIAGA BUMI) (Mangunjaya, Direktur PPI UNAS, wawancara, 22 Maret 2024). Selain itu, untuk konteks Indonesia, momentum tsunami Aceh pada 2004 juga memunculkan perhatian terhadap isu lingkungan. Berdasarkan penjelasan Din Syamsuddin, yang saat itu memimpin Muhammadiyah, sejak saat itu banyak pihak luar negeri yang ingin bekerja sama dengan Muhammadiyah sebagai mitra lokal, karena keharusan pendaftaran di Bappenas, termasuk di antaranya dari Australia (Din Syamsuddin, wawancara, 27 Maret 2024).

Dengan dua momentum itu, setidaknya terdapat dua peluang yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan Green Islam. Pertama, perhatian pemerintah yang lebih serius terhadap masalah lingkungan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menandatangani Paris Agreement. Karena itu, pemerintah memiliki target-target khusus mengenai lingkungan, seperti target *net zero emissions* pada 2060, yang dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89 persen (KLHK 2016). Untuk mencapai target ini, aksi-aksi lingkungan pun masuk ke dalam agenda para pemegang kebijakan. Kedua, kesempatan bekerja sama dengan pihak luar terkait isu lingkungan juga terbuka lebar. Di antaranya PPI UNAS yang mendapat dukungan dari Templeton Foundation untuk program eko-pesantren atau MDMC yang secara luas bekerja sama dengan beragam pihak luar negeri, seperti The Asia Foundation, Catholic Relief Services, Global Peace Mission Malaysia, dan sebagainya. Begitu pula dukungan untuk organisasi lain, seperti komunitas Save Ake Gaale yang mendapat dukungan dari USAID IUWASH Plus dan LDII yang bekerja sama dengan Norwegian Church Aid (NCA) dan Ethiopoian Muslims Relief and Development Association (EMRDA).

Dalam setidaknya 50 tahun ke depan, pemerintahan global memiliki komitmen serius terhadap persoalan lingkungan. Oleh karena itu, momentum ini dapat menjadikan gerakan Green Islam untuk terus-menerus melakukan adaptasi serta inovasi bagi program pro-lingkungan. Terlebih forum-forum internasional seperti COP beberapa kali diadakan di negara-negara Muslim, seperti Maroko dan Qatar. Begitu pula Indonesia yang berkesempatan menjadi tuan rumah pada 2022 bagi forum Religion-20 yang turut membahas masalah lingkungan, dan World Water Forum pada 2024.

8.3 Kesimpulan

Gerakan Green Islam di Indonesia memiliki empat kekuatan utama, yaitu kerangka etik, baik itu etika terkait pentingnya melestarikan lingkungan untuk generasi berikutnya maupun etika tentang kesatuan manusia dan alam; sumber daya organisasi yang terbentuk dari struktur gerakan pusat ke daerah, seperti yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah; pengikut loyal yang didasari oleh kesamaan identitas agama; dan kemampuan kreatif untuk beradaptasi dan berinovasi, seperti penggunaan panel surya oleh Bumi Langit Permaculture dan LDII, pembuatan sumur biopori oleh Save Ake Gaale, dan pemanfaatan limbah organik untuk pupuk organik dan biogas oleh Yayasan Hadji Kalla.

Studi ini juga menemukan tiga peluang penting yang dimiliki gerakan Green Islam, yaitu jaringan yang secara alamiah terus membesar karena mengintegrasikan Islam dan lingkungan, serta jaringan yang melampaui batas lokal; kapasitas para aktivis Green Islam yang memperkuat gerakan Green Islam; dan fenomena pergeseran ekologis atau pergeseran paradigma yang lebih memperhatikan aspek ekologi dan keberlanjutan di ranah kebijakan, khususnya sejak Islamic Declaration on Global Climate Change (Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global) di Istanbul dan Paris Agreement 2015. Kekuatan dan peluang ini merupakan faktor yang dapat berkontribusi memperkuat gerakan Green Islam di Indonesia. Kekuatan dan peluang ini juga memperlihatkan kemampuan Green Islam dalam proses adaptasi nilai dalam kaitannya dengan penciptaan praktik yang positif terhadap lingkungan.



BAB 9

TANTANGAN PERKEMBANGAN GREEN ISLAM DI INDONESIA

Gerakan Green Islam di Indonesia telah berkembang sejak tahun 2000-an. Organisasi massa Islam utama seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah berkontribusi bagi penguatan gerakan ini. Meski gerakan lingkungan keagamaan terus bermunculan, baik secara kuantitas organisasi maupun aksi-aksinya, harus diakui bahwa gerakan Green Islam masih belum menjadi gerakan besar yang dikenal publik. Kenyataan ini menjadi tantangan yang dihadapi oleh gerakan Green Islam di Indonesia.

Bab ini berupaya menjawab pertanyaan mengapa aktivisme Green Islam belum menjadi gerakan besar yang populer atau dikenal publik. Secara garis besar, bab ini mendiskusikan beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Faktor-faktor tersebut meliputi kenyataan bahwa kelompok Green Islam masih tersegmentasi, sebagian gerakan Green Islam hanya merespons problem lokal, ketidakmampuan mengoptimalkan sumber daya organisasi, kesenjangan pengetahuan antara aktivis dan konstituen, serta pelibatan perempuan yang belum maksimal.

9.1 Potensi Gerakan Green Islam di Indonesia

Berdasarkan *database* hasil *desk research* penelitian dalam buku ini, dari 192 organisasi atau komunitas lingkungan berbasis keagamaan di Indonesia, terdapat 142 organisasi dan komunitas aktif yang menggunakan identitas Islam untuk mengarusutamakan isu-isu

lingkungan di Indonesia. Meski gerakan Green Islam memiliki potensi cukup besar, survei nasional Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 2024 menunjukkan bahwa gerakan Green Islam masih belum populer ditinjau dari segi pengetahuan, sikap, dan praktik masyarakat Muslim di Indonesia (lihat Halimatusa'diyah dkk. 2024).

Dari aspek pengetahuan, survei tersebut menanyakan beberapa aktivitas atau program gerakan lingkungan yang dilakukan oleh organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam di Indonesia. Hasil survei yang dilakukan oleh Halimatusa'diyah dkk. (2024) menunjukkan bahwa pengetahuan publik terkait isu Green Islam di Indonesia masih sangat minim. Hal ini terlihat dari tingginya persentase individu yang tidak tahu tentang aktivitas atau gerakan lingkungan dari komunitas Muslim di Indonesia. Sebanyak 87.85% Muslim di Indonesia tidak tahu tentang eko-pesantren atau pesantren ekologi, 82.96% Muslim Indonesia tidak tahu tentang fikih penanggulangan sampah, dan 69.62% tidak tahu fatwa MUI terkait isu lingkungan seperti pelarangan perusakan hutan, pelestarian satwa langka, pertambangan ramah lingkungan, dan lain-lain. Dibandingkan aktivitas dan gerakan lain, publik cenderung lebih tahu terkait fatwa MUI terkait isu lingkungan meskipun proporsinya hanya mencapai 30.38%.

Lebih lanjut, meskipun sebagian besar dari Muslim Indonesia mengaku berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), hanya 9.29% Muslim Indonesia yang mengetahui tentang gerakan lingkungan dari kalangan anak muda NU, yakni Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya (FNKSDA). Sementara itu, hanya 11.58% Muslim di Indonesia yang tahu tentang Kader Hijau Muhammadiyah (KHM). Jika dilihat per organisasi kemasyarakatan Islam, hanya 13.12% individu yang menyatakan dirinya berafiliasi dengan NU mengetahui tentang FNKSDA. Proporsi ini lebih kecil dibandingkan individu yang mengaku berafiliasi dengan Muhammadiyah yang tahu tentang FNKSDA (14.22%). Bahkan, orang NU cenderung lebih tahu KHM daripada FNKSDA, di mana proporsinya mencapai 21.4%. Sedikit lebih besar dibandingkan mereka yang berafiliasi dengan NU, proporsi mereka yang mengaku berafiliasi dengan Muhammadiyah tahu tentang KHM sebesar 25.55%. Di sisi lain, di kalangan Muslim yang tidak berafiliasi dengan ormas Islam mana pun, proporsi mereka yang tahu FNKSDA sangat kecil yaitu hanya 2.67%, dan yang tahu KHM hanya 6.66%. Hasil di atas menunjukkan bahwa gerakan

Green Islam hanya diketahui oleh sedikit orang saja, masih cenderung elitis, atau diketahui secara terbatas terutama oleh komunitas mereka sendiri. Di luar komunitasnya masing-masing, gerakan Green Islam masih sangat tidak populer bagi Muslim di Indonesia (Halimatusa'diyah dkk. 2024).

Selain itu, terkait dengan sikap Muslim Indonesia terhadap beberapa isu Green Islam, mereka cenderung tidak setuju dengan pembatasan air wudu di masjid (55.8%), menggunakan air daur ulang dari air yang telah digunakan untuk bersuci (69.73%), penebangan pohon di hutan atau penambangan itu haram (56.59%), membuang sampah plastik sembarangan itu haram (51.98%), dan zakat boleh digunakan untuk membiayai penanganan perubahan iklim (55.07%). Sebaliknya, sikap Muslim Indonesia cenderung setuju dengan hal-hal yang justru mungkin berkontribusi bagi kerusakan lingkungan seperti kepemilikan pesantren atas usaha pertambangan atau perkebunan sawit (71.49%) atau produksi air minum kemasan plastik karena alasan ekonomi (85.87%). Temuan ini mengindikasikan bahwa motivasi ekonomi masih mendominasi sikap Muslim di Indonesia terkait isu Green Islam.

Dari aspek perilaku, hasil survei PPIM menunjukkan bahwa masih banyak Muslim Indonesia yang tidak pernah melakukan aktivitas terkait isu Green Islam seperti membatasi air wudu (52.65%), mengajak orang lain membatasi air wudu (60.39%), dan mengikuti kegiatan ormas Islam yang bergerak di isu lingkungan (78.81). Tingginya individu yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan ormas Islam yang bergerak di isu lingkungan secara tidak langsung juga menunjukkan bahwa isu Green Islam belum tersosialisasi dengan baik kepada publik yang lebih luas. Dari poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan Green Islam masih belum menjadi gerakan besar dan dikenal publik terlepas dari potensi mereka yang cukup besar. Oleh karena itu, studi ini berupaya menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut dalam lima poin penjelasan sebagai berikut.

9.2 Tantangan Gerakan Green Islam di Indonesia

9.2.1 Kelompok Green Islam Masih Tersegmentasi

Penelitian dalam buku ini menemukan, meskipun Gerakan Green Islam memiliki konstituen yang loyal, namun masalah internal tidak dapat dihindari. Bagian ini menjelaskan mengenai dua hal dari persoalan

itu, yaitu mengenai masalah organisasi-organisasi lingkungan berbasis Islam yang pada umumnya tersegmentasi pada konstituen loyal mereka dan persoalan internal organisasi yang menjadi kesenjangan dalam menjalankan keberlanjutan program lingkungan mereka. Meskipun para aktivis Green Islam ini terus berupaya untuk memperluas jaringannya, namun dalam menjalankan program cenderung menjadikan konstituen loyal mereka sebagai basis utama. Di satu sisi ini menjadi kekuatan, namun di sisi lain ini juga dapat menjadi kesenjangan yang perlu diatasi, seperti yang dirasakan oleh LLHPB 'Aisiyyah.

Dalam menjalankan programnya, misal pengelolaan sampah, sering kali Aisiyyah memiliki kesamaan program dengan organisasi yang lain, seperti Muslimat NU dan kelompok ibu-ibu PKK, dalam satu wilayah. Karena itu, dalam satu tempat bisa terdapat tiga program yang sama sekaligus yang dijalankan oleh tiga organisasi yang berbeda. Padahal ada wilayah lain yang belum tersentuh program pengelolaan sampah itu (Surria Dwiwahyu, LLHPB 'Aisiyyah, FGD 20-22 Februari 2024). Dalam hal ini, setidaknya ada dua masalah yang dihadapi LLHPB 'Aisiyyah dan kelompok sejenisnya, bagaimana mereka dapat melakukan kolaborasi yang lebih luas sehingga program mereka tidak hanya diperuntukkan untuk konstituen loyal mereka, melainkan juga dapat dilakukan lintas konstituen dan merata kepada wilayah-wilayah, atau tidak tersentralisasi pada satu wilayah.

Masalah serupa juga dirasakan CTC Ahmadiyah—meski dalam skala yang berbeda. Walaupun CTC ditujukan untuk masyarakat luas, namun relawan yang terlibat tidak dapat terlepas dari konstituen tradisional mereka. Oleh karena itu, ketika CTC ingin menjalankan programnya, yang sudah pasti berada di kota, masalah jarak geografis diakui oleh pengurusnya Abdul Ghani menjadi tantangan yang harus dihadapi. Mereka membutuhkan waktu untuk bepergian dari wilayah asal mereka untuk ke kota yang menjadi objek program CTC. Bahkan seperti yang dijelaskan Abdul Ghani, tidak sedikit relawan yang berasal dari luar pulau dan membutuhkan 4-6 hari jika datang ke kota (Abdul Ghani, CTC, FGD, 20-22 Februari 2024).

Gerakan Green Islam dijalankan oleh komunitas pemuda, seperti EcoDeen, menghadapi masalah konstituen yang lebih berlapis. EcoDeen tidak menginduk pada organisasi Islam tertentu dan digerakkan oleh para relawan muda yang memiliki perhatian pada lingkungan, namun sayangnya mereka sering kali tidak memiliki kesediaan waktu.



Kesenjangan ini kerap kali membuat produksi media, yang menjadi fokus pergerakannya, terhambat. Sejak awal pendiriannya, EcoDeen memang lebih menargetkan pada konstituen yang tersegmentasi ini, meskipun setelah berkembang juga merambah para konstituen yang lebih luas. Terdapat keinginan EcoDeen untuk menyebarkan isu lingkungan bukan hanya kepada pemuda, namun juga kepada masyarakat lintas generasi. Karena menurut mereka, saluran media memiliki potensi untuk mengembangkan program yang bisa diterima banyak kalangan (Rissa Ozalifia, EcoDeen, FGD, 20-22 Februari 2024).

Dalam hal kepemudaan, konsistensi memang menjadi masalah bagi mereka, terlebih konstituen mereka sudah tersegmentasi. Contoh lain, FNKSDA dan KHM yang hampir seluruh anggotanya merupakan mahasiswa aktif atau sivitas kampus. Mereka juga memiliki perbedaan fokus pada masing-masing wilayah kerja cabang mereka. Menurut penilaian Koordinator Nasional FNKSDA Ayu Rikza, hal itu berpotensi untuk keberlanjutan organisasi, karena jika organisasi tidak sanggup menghadapi tantangan yang beragam itu akan membuat gerakan tidak tumbuh besar dan keberlanjutannya dapat dipertanyakan (Ayu Rikza, Koordinator Nasional FNKSDA, FGD 6-8 Maret 2024; Nafisatul Khoidah, Koordinator Daerah FNKSDA, FGD, 6-8 Maret 2024). Karena banyak anggota yang masih mahasiswa, jumlah mereka dalam aktivismenya tidak selalu konsisten, dan cenderung berkurang. Namun, organisasi semacam ini memang diperuntukkan untuk kalangan yang tersegmentasi dalam hal memperjuangkan nilai-nilai lingkungan yang bersifat antagonistik terhadap narasi besar tentang politik dan industri. Ayu Rikza menyebut gerakan ini sebagai blok alternatif politik di Indonesia.

Terkait gerakan alternatif, Bumi Langit juga memperjuangkan narasi alternatif dengan memaknai usaha pro-lingkungan yang lebih bersifat sufistik. Pendiri Bumi Langit Iskandar Waworuntu mengakui Bumi Langit membawa misi spiritualisme yang cukup tinggi. Meskipun jaringannya tidak tersegmentasi secara khusus, namun dengan misi yang dibawanya membuat pergerakannya lebih ditujukan untuk orang-orang yang memiliki minat khusus dalam menafsirkan ulang mengenai hubungan manusia dan lingkungan. Ini menjadi tantangan tersendiri agar menyentuh masyarakat yang lebih luas. Karena itu, Iskandar mengakui tidak menjadi soal bila sebagian masyarakat menilai tempat Bumi Langit “aneh”. Di Bumi Langit, misalnya, Iskandar lebih memilih untuk menggunakan barang-barang bekas, karena menurutnya penggunaan

barang bekas lebih ringan tanggung jawab dosanya dibandingkan menggunakan barang baru. Dalam penilaiannya, setiap barang dalam Islam akan diminta pertanggung jawabannya nanti di akhirat (Iskandar Waworuntu, pendiri Bumi Langit Permaculture, FGD, 6-8 Maret 2024). Menurutny, dengan berlandaskan etika yang ia pahami, mengambil barang tidak boleh berlebihan. Nilai-nilai ini diimplementasikan melalui usaha agro-wisata religius.

Agak berbeda dengan Bumi Langit yang dikelola secara profesional sehingga program-programnya terus berlanjut, gerakan sosial kemasyarakatan seperti LPBI yang menginduk pada NU dan MLH yang menginduk pada Muhammadiyah, memiliki keterbatasan dalam periodisasi kepengurusan. Semangat memperjuangkan isu lingkungan kerap kali ditantang oleh masalah internal organisasi, seperti pergantian kepengurusan pada level pengurus pusat (PP Muhammadiyah). Seperti yang disampaikan MLH, diperlukan waktu untuk berkomunikasi dengan para pengurus di periode berikutnya agar program lingkungan di MLH dapat berlanjut (Djihadul Mubarak, MLH PP Muhammadiyah, FGD, 20-22 Februari 2024). Hal itu juga dirasakan oleh LPBI di tubuh NU. Ini yang kerap kali membuat para pengurusnya masih terus mempelajari cara kerja organisasi yang sesuai untuk program lingkungan. Selain itu, diperlukan upaya lebih untuk mengomunikasikan suatu program dengan majelis atau badan lain agar tidak saling tumpang tindih (Beny Syaaf Jafar, LPBI NU, FGD, 6-8 Maret 2024).

9.2.2 Sebagian Kelompok Green Islam Hanya Merespons Problem Lokal

Beberapa organisasi atau komunitas Green Islam cenderung hanya berfokus pada masalah lokal di wilayah kerja masing-masing. Memang, dalam kepustakaan gerakan sosial, beberapa gerakan sosial Islam sering kali muncul sebagai respons atas masalah yang terjadi pada masyarakat (Smith 2012). Meski demikian, sebagaimana diperlihatkan dalam diskusi sebelumnya tentang gerakan sosial, bahwa dalam pengembangan suatu gerakan, fokus atau bahkan isu gerakan juga perlu mendapat perluasan (*framing extension*) (Bernford dan Snow 2000), sehingga gerakan sosial itu dapat mengundang partisipasi yang lebih luas.

Salam Institute di Cirebon misalnya. Sejak awal, Salam Institute hadir untuk merespons dampak lingkungan akibat industrialisasi, seperti PLTU batu bara dan perusahaan semen. Salam Institute memandang

industrialisasi berdampak langsung pada aktivitas warga, seperti tidak berfungsinya tambak-tambak kerang, bandeng, dan udang, serta matinya sumber air. Untuk merespons masalah ini, Salam Institute memberikan pelatihan-pelatihan mengenai lingkungan melalui pesantren ekologi (Syatori, Salam Institute, FGD 20-22 Februari 2024). Banyak remaja dan masyarakat sekitar yang ikut serta dalam program ini. Keterikatan dengan masalah setempat mendorong penguatan organisasi untuk berlanjut dan berkembang. Meski demikian, Salam Institute relatif hanya berfokus tentang isu industrialisasi di daerahnya dan belum dapat memperluas isu gerakannya.

Contoh lainnya adalah Yayasan Bina Bhakti Lingkungan di Surabaya. Yayasan Bina Bhakti Lingkungan berfokus pada sampah karena keresahan para aktivisnya terhadap masalah lokal sampah di kota Surabaya (Nurul Chasanah, Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, FGD, 6-8 Maret 2024). Program mereka cenderung pada kegiatan filantropi yang berbasis peningkatan kesejahteraan ekonomi warga. Sebagaimana Salam Institute, Yayasan Bina Bhakti Lingkungan juga cenderung berfokus hanya pada area kerjanya, dan belum berupaya memperluas isu gerakannya yang memungkinkan mereka mengundang partisipasi yang lebih luas.

Ketua Save Ake Gaale, Alwan Arif (FGD, 6-8 Maret 2024), memberi gambaran mengenai rumitnya permasalahan lokal yang terkadang membutuhkan fokus dan waktu hingga bertahun-tahun untuk mereka tangani. Bersama masyarakat Sangaji, Save Ake Gaale berupaya menentang PDAM yang menurut mereka telah melakukan eksplorasi secara berlebihan sehingga membuat daerah mereka mengalami kekeringan dan intrusi air laut. Mereka melakukan perlawanan dengan demonstrasi sejak tahun 2014. Perlawanan semacam itu konsisten mereka lakukan hingga saat ini. Kurang lebih 10 tahun mereka berjuang untuk merespons persoalan lokal itu. Meski upaya mereka relatif dapat menyelesaikan persoalan kekeringan dan intrusi air laut, namun menurut Alwan Arif, mereka masih perlu menjaga dan merawat sumber air Sangaji terutama terhadap perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan (Alwan Arif, Ketua Save Ake Gaale, FGD, 6-8 Maret 2024).

FNKSDA dan Eco Bhinneka juga memperlihatkan hal yang serupa. Meski FNKSDA memiliki hubungan dengan NU dan Eco Bhinneka dengan Muhammadiyah, namun secara struktur bukan menjadi lembaga atau majelis tertentu, sehingga keberlangsungannya juga bergantung pada

keterikatannya dengan masalah-masalah lingkungan di daerah kerja masing-masing. Misalnya di Surakarta, tepatnya di Desa Joyotakan. Akibatnya persoalan sampah yang kerap menimbulkan banjir musiman (Damai, Ketua Sedhere' Eco Bhinneka Surakarta, wawancara, 27 April 2024) membuat Eco Bhinneka terikat dengan masalah setempat. Sementara itu, kuatnya konflik agraria di Kendeng, Jawa Tengah, membuat FNKSDA fokus melakukan kerja-kerja advokasi (Ayu Rikza, Koordinator Nasional FNKSDA, FGD 6-8 Maret 2024).

Padahal, sebagaimana diskusi gerakan sosial sebelumnya, situasi setelah transnasional (2015) memunculkan berbagai macam “ruang kesempatan” (*opportunity space*) (Yavuz 2012) yang baru bagi aktivisme serta penyebaran makna dan norma-norma budaya. Ruang-ruang kesempatan baru itu berupa jejaring asosiasi internasional untuk produksi nilai dan norma-norma baru tentang perubahan iklim yang relatif berbeda dengan jejaring asosiasi isu lingkungan kebencanaan atau masalah lokal lainnya. Meski ruang kesempatan baru ini mengandaikan mekanisme pemberdayaan, implikasinya terhadap organisasi tidak merata. Singkatnya, perubahan situasi struktur kesempatan politik tahun 2015 tidak serta merta dapat dimanfaatkan oleh gerakan Green Islam. Lebih jauh, hanya beberapa organisasi besar yang memiliki modal jejaring internasional yang dapat memanfaatkan perubahan situasi tersebut.

Di Indonesia, ruang kesempatan baru internasional dimanfaatkan oleh gerakan dengan sumber daya yang baik seperti Muhammadiyah. Muhammadiyah menyesuaikan simbol-simbol Islamnya dengan norma internasional untuk mendorong penciptaan interpretasi, nilai, dan makna keagamaan (strategi pembingkai) melalui forum-forum internasional. Muhammadiyah bahkan menggunakan bahasa Inggris untuk nama organisasi lingkungan mereka, seperti Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) (Din Syamsuddin, wawancara, 27 Maret 2024), sebagai cara untuk memaksimalkan ruang kesempatan ini. Muhammadiyah merupakan salah satu contoh organisasi yang memanfaatkan arena tersebut dan kemudian membentuk identitas Muslim, yang meminjam istilah Wiktorowicz (2012), “mempublik di ruang internasional,” melalui mekanisme forum-forum internasional dan sarana-sarana lain bagi diseminasi makna. Ruang kesempatan baru internasional ini bukanlah sumber daya yang benar-benar baru; ia merupakan saluran interaksi sosial yang menciptakan kemungkinan-

kemungkinan baru untuk memperluas jaringan yang telah ada (Yavuz 2012). Saluran-saluran ini meliputi ruang maya dan forum-forum lingkungan internasional.

Namun demikian, beberapa komunitas yang kecenderungannya berorientasi pada masalah-masalah lokal sebagaimana organisasi-organisasi di atas belum dapat memanfaatkan ruang-ruang kesempatan baru ini. Organisasi-organisasi ini umumnya memiliki akar yang kuat di daerah-daerah dan relatif kurang memiliki akses terhadap jejaring internasional. Kurangnya akses ditambah akutnya masalah yang mereka hadapi di tingkat lokal membuat mereka relatif tidak memperoleh keuntungan yang sama atas ruang kesempatan yang baru sebagaimana yang didapatkan oleh organisasi besar seperti Muhammadiyah. Hal ini berakibat pada kurangnya jangkauan, baik nasional maupun internasional, organisasi atau komunitas Green Islam di Indonesia.

9.2.3 Ketidakmampuan Mengoptimalkan Sumber Daya Organisasi

Beberapa organisasi atau komunitas Green Islam di Indonesia kurang mampu mengoptimalkan sumber daya organisasi mereka, sementara sebagian lainnya memang tidak memiliki sumber daya yang kuat. Sebagaimana diskusi tentang mobilisasi sumber daya organisasi sebelumnya, teori gerakan sosial menekankan pentingnya sumber daya organisasi, seperti basis kelembagaan, kepemimpinan individu, dan pendanaan, bagi mobilisasi suatu gerakan (Tilly 1995). Terdapat sekurangnya dua tantangan sumber daya paling mencolok dari gerakan Green Islam di Indonesia. Yang paling sering terlihat adalah masalah finansial. Selain itu juga terdapat masalah sumber daya manusia. Tantangan-tantangan tersebut pada gilirannya menghambat berbagai macam inisiatif yang mungkin dari suatu gerakan (Robinson 2012). Karena itu, beberapa organisasi cenderung kesulitan dalam memperluas bingkai organisasinya dalam mengundang partisipasi yang lebih luas.

Yang pertama adalah aspek sumber daya manusia. Di Riau, tidak banyak sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam gerakan MLH Riau. Bahkan di antara mereka menjadikan aktivisme lingkungan ini di luar prioritas pertama. Karena itu, program-program lingkungan baru dapat berjalan setelah para anggotanya menyelesaikan pekerjaan utama mereka. Terlebih mereka menghadapi realitas masyarakat dan organisasi mereka yang masih menganggap isu lingkungan sebagai objek

yang menghasilkan dana. Program lingkungan mereka baru dapat dijalankan oleh mereka yang memiliki perhatian pada lingkungan, itu pun konstituennya sangat terbatas. Sering kali mereka berkumpul ramai di awal, namun pertemuan atau aksi-aksi selanjutnya sangat sedikit yang berpartisipasi (Edi Rianto, MLH Riau, FGD, 20-22 Februari 2024).

Yang kedua adalah aspek dukungan dana. Meskipun sejak 2012 mulai ada fenomena "*ecological turn*" atau pergeseran paradigma yang lebih memperhatikan aspek ekologi dan keberlanjutan di ranah kebijakan (Simonis 2020) sehingga gerakan lingkungan, termasuk yang berbasis Islam, mendapatkan akses yang lebih luas untuk kerja sama baik dengan pihak luar maupun domestik, namun gerakan Green Islam belum berada pada tahap yang mapan secara dukungan finansial. Pengurus MLH Djihadul Mubarak memberikan perumpamaan mengenai hal ini, dengan menyebutnya seperti menyusuri jalan sunyi. Ia memberikan perbandingan dengan majelis lain, seperti Majelis Dikti atau Majelis Dikdasmen yang memiliki skema pembiayaan yang jelas (Djihadul Mubarak, MLH PP Muhammadiyah, FGD, 20-22 Februari 2024). Hal ini juga dirasakan oleh pengurus MLH Riau Edi Rianto. Ia mengakui bahwa berbeda dengan masjid dan pendidikan, masyarakat belum banyak yang memberikan perhatian terhadap masalah lingkungan, sehingga aliran dana untuk isu ini masih terbatas (Edi Rianto, MLH Riau, FGD 20-22 Februari 2024). Lembaga lain yang berfokus pada isu lingkungan, di antaranya LLHPB 'Aisiyyah, juga merasakan hal serupa (Surria Dwiwahyu, LLHPB 'Aisiyyah, FGD, 20-22 Februari 2024).

Sebagai salah satu majelis yang berada pada organisasi induk yang besar, Muhammadiyah, MLH menghadapi dilema. Djihadul Mubarak menjelaskan, MLH pernah mendapatkan tawaran dari bank tertentu, namun ia mengetahui bahwa bank itu mensponsori kegiatan industri batu bara. Sikap MLH adalah menolaknya, karena hal itu menjadi prinsip majelis. Ia menerangkan bahwa MLH tidak mau, "mereka (industri ekstraktif) yang membuang kotoran, kita (aktivis lingkungan) yang membersihkannya" (Djihadul Mubarak, MLH PP Muhammadiyah, FGD, 20-22 Februari 2024). Aktivisme lingkungan sering kali menghadapi dilema yang mengarah pada upaya "*greenwashing*" atau suatu strategi pemasaran dan komunikasi bisnis yang memberikan citra yang ramah lingkungan, tanpa benar-benar melakukan kegiatan yang berdampak bagi pelestarian lingkungan. Ketua MDMC Budi Setiawan juga menceritakan bahwa Muhammadiyah pernah ditawari bantuan dana

yang cukup besar untuk mencetak Alquran dengan kertas yang lebih murah oleh salah satu industri yang bergerak di bidang batu bara, namun ia mengingatkan para pengurus Muhammadiyah jika mereka menerimanya, maka Muhammadiyah bertolak belakang dengan cita-cita mereka yang ingin mengedepankan nilai-nilai pro-lingkungan (Budi Setiawan, Ketua MDMC, FGD, 20-22 Februari 2024).

Meski demikian, para pengurus MLH tetap berusaha mencari jalan keluar. Salah satu yang diusahakan adalah dengan menciptakan amal usaha lingkungan hidup. Misal, melalui program pengelolaan sampah yang menghasilkan keuntungan ekonomi atau panel surya untuk menciptakan energi matahari. Inisiatif ini merupakan inspirasi dari pengalaman panjang Muhammadiyah yang selalu berusaha untuk independen melalui kegiatan amal usahanya, seperti amal usaha pendidikan melalui sekolah-sekolah atau amal usaha kesehatan melalui berbagai rumah sakit. Dengan inspirasi itu, amal usaha lingkungan akan selalu berusaha didorong MLH agar persoalan finansial dapat teratasi seperti pada bidang-bidang lain di Muhammadiyah yang telah mapan (Djihadul Mubarak, MLH PP Muhammadiyah, FGD, 20-22 Februari 2024).

Masalah finansial ini juga dirasakan oleh LPLH SDA MUI. Salah satu kekuatan MUI yang diakui Ketua LPLH SDA MUI Hayu Prabowo adalah independensi lembaga. Namun, independensi ini pada awalnya dirasakan olehnya sebagai kesenjangan organisasi, karena meskipun Wakil Presiden Ma'ruf Amin merupakan mantan Ketua MUI, namun itu tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap LPLH SDA MUI karena sifat independensi MUI. Karena itu, MUI tidak dapat mengharapkan ketergantungan pada pihak luar, termasuk terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI). Yang dilakukan untuk mengisi kesenjangan itu adalah mengedepankan keunggulan MUI sebagai lembaga yang menjunjung moral dan menjadi rujukan masyarakat Indonesia ketika menghadapi berbagai masalah. Berbeda dengan lembaga fatwa di Malaysia yang bergantung pada negara dan terpecah-pecah pada negara bagian, MUI sebagai lembaga independen relatif didengar oleh masyarakat. Di MUI, Hayu Prabowo mendorong gerakan ekonomi sirkuler untuk membentuk ekosistem lingkungan yang tidak lepas dari kepentingan ekonomi masyarakat melalui gerakan sedekah sampah. Menurutnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang menganggap sampah sebagai barang yang tidak memiliki nilai. Tetapi dalam pandangannya, sudah banyak contoh bagaimana pengelolaan sampah juga memiliki nilai ekonomis.

MUI mengampanyekan kepentingan lingkungan dan ekonomis itu perlu disejajarkan dengan nilai ibadah, bahwa membuang sampah dapat berubah menjadi “bersedekah sampah” (Hayu S. Prabowo, Ketua LPLH MUI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Keterbatasan bergerak akibat masalah finansial juga dirasakan oleh CTC Ahmadiyah. Bagi Ahmadiyah, masalah ini merupakan lapisan lain dari tantangan yang dihadapi mereka, selain penilaian negatif dan aksi persekusi yang sering dihadapi mereka. Dalam hal ini, Ahmadiyah menghadapi persoalan yang lebih berlapis dibandingkan Muhammadiyah dan MUI. Sekretaris Umr Ammah Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) Abdul Ghani menyatakan bahwa kesadaran bersama para relawan terhadap kegiatan peduli lingkungan merupakan “sentuhan Tuhan”. Maksudnya adalah meskipun mengalami kekurangan dana, semangat Ahmadiyah untuk terlibat dalam isu lingkungan juga tinggi. Ada keinginan dari Ahmadiyah untuk membuat gerakan lingkungan yang lebih luas, namun mereka sulit bergerak untuk pencarian dana dari luar. Setidaknya hingga saat ini, Ahmadiyah hanya mengandalkan pembiayaan dari internal yang terbatas. Beberapa usaha telah dilakukan dengan berupaya untuk bekerja sama dengan pemerintah dan pihak swasta melalui kegiatan CTC, seperti yang dilakukan di Sukabumi yang mendapat dukungan dari perusahaan air Aqua (Abdul Ghani, FGD 2024). Pada tahap ini, Ahmadiyah melalui gerakan CTC berusaha untuk memberikan kesan positif terhadap citra organisasinya juga memperluas jaringan kerja sama untuk mendapatkan rekognisi yang lebih luas.

Gerakan Green Islam lain juga mengalami keterbatasan yang serupa, seperti yang dihadapi oleh AgriQuran. Sebagai gerakan lingkungan yang dimotori oleh kelompok pemuda, AgriQuran menghadapi kesulitan untuk menutupi persoalan sumber dayanya, termasuk sumber daya finansial. Namun, persoalan finansial ini juga menjadi penggerak bagi perkembangan fokus gerakan. Selama lima tahun sejak pendiriannya, AgriQuran berupaya untuk mencari bentuk fokus gerakannya, hingga menemukan keunggulan pada bidang media digital. Dengan kekurangannya pada masalah finansial, mereka berupaya menggalang dana melalui berbagai kegiatan yang mempromosikan isu lingkungan lewat pelatihan, pendidikan, *event organizer*, hingga jasa konsultan. Melalui upaya untuk menghimpun mitra-mitranya yang ditemui di lapangan, seperti komunitas petani, AgriQuran berupaya mengisi

kekosongan pada bidang media dan pemasaran (Farras Muhadzdzib, FGD 2024). Dalam hal ini, jaringan tradisional AgriQuran dimanfaatkan sebagai sumber daya sosial mereka untuk menutupi kesenjangan sumber daya ekonomi mereka.

Tantangan finansial juga dihadapi oleh gerakan lingkungan yang lebih kultural dan bergerak sebagai mobilisator, seperti FNKSDA. Gerakan ini pada dasarnya diakui oleh pengurusnya bukan sebagai gerakan yang berorientasi material, melainkan pada perjuangan moral. Meski demikian, mereka sering menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat pragmatis. Koordinator Nasional FNKSDA Ayu Rikza menceritakan bahwa, baik di pedesaan maupun perkotaan, sering menemukan kesulitan melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Ia menyebut masyarakat semacam ini sebagai “massa mengambang”. Gerakannya sering menemui kesulitan ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki modal lebih, namun merusak lingkungan (Ayu Rikza, FGD 2024). Dalam hal ini, FNKSDA menghadapi masalah yang berlapis, bukan hanya gerakan versus korporasi, melainkan juga gerakan versus rakyat, atau rakyat versus rakyat. Sebab, apa yang disebut “massa mengambang” itu juga merupakan bagian dari rakyat yang diperjuangkan FNKSDA itu sendiri, seperti yang FNKSDA hadapi di Rembang.

9.2.4 Kesenjangan Pengetahuan antara Aktivis dan Konstituen

Dalam menjalankan aktivisme lingkungan, baik yang bercorak konservasionis, pengkampanye kebijakan, maupun mobilisator, para aktivis beberapa organisasi Green Islam sering kali dihadapkan pada persoalan ketimpangan pemahaman tentang masalah lingkungan antara para aktivis dengan para konstituennya. Misal, di antara internal mereka sering kali terdapat perbedaan dalam cara memandang perubahan iklim, memperdebatkan apakah perubahan iklim merupakan siklus alami dan bukan. Organisasi maupun lembaga yang bergerak dalam isu lingkungan pada organisasi-organisasi Islam yang besar, seperti MDMC dan MLH di Muhammadiyah, tidak jarang menemui masalah kesenjangan ini dengan konstituennya (Djihadul Mubarak, MLH, FGD, 20-22 Februari 2024).

Oleh karena itu, salah satu tantangan utama pada organisasi semacam ini adalah menginternalisasi nilai-nilai dan permasalahan lingkungan pada organisasi dan konstituen secara menyeluruh. Tidak jarang mereka menemukan hambatan karena anggota maupun konstituen mereka belum memahami masalah lingkungan secara baik.

Kesenjangan pengetahuan yang berarti pernah dihadapi oleh Ketua MDMC Budi Setiawan saat menangani kasus Wadas. Ia menjelaskan terkadang apa yang dipahami atau dibicarakan oleh pusat tidak linear dengan yang dipahami oleh pengurus dan anggota Muhammadiyah di wilayah. Pada kasus Wadas, masyarakat Muhammadiyah yang tinggal di sekitar Wadas memiliki hubungan baik dengan bupati setempat, sehingga mereka mempertanyakan kedatangan pengurus pusat ke wilayah tersebut (Budi Setiawan, Ketua MDMC, FGD, 20-22 Februari 2024). Menurut Budi, kesenjangan itu juga terjadi karena kondisi ekonomi, yang mengharuskan mereka lebih berpikir pragmatis dibandingkan idealis.

Masalah sama juga dihadapi Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH SDA MUI) Hayu Prabowo yang menyatakan bahwa tugas pertamanya adalah mendidik para ulama di internal MUI. Hal itu ditujukan agar para ulama di tubuh internal memiliki cara pandang yang sama dalam memahami masalah lingkungan. Para pengurus LPLH SDA MUI menyiasatinya dengan membentuk fatwa terkait lingkungan. Perumusan fatwa untuk mengeliminasi kesenjangan cara pandang terhadap masalah lingkungan. Di antara program untuk mengimplementasikan fatwa itu adalah gerakan sedekah sampah, yang pada bulan Ramadan digunakan untuk memotivasi masyarakat untuk mengalokasikan pakaian atau sepatu di rumah agar disedekahkan pada Idul Fitri. Tujuannya di antaranya agar perayaan Idul Fitri dipahami tidak melulu dengan kegiatan-kegiatan yang konsumtif (Hayu S. Prabowo, Ketua LPLH SDA MUI, FGD, 20-22 Februari 2024).

Ahmadiyah juga mengalami hal serupa. Mereka perlu melakukan konsolidasi internal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengenai lingkungan hidup melalui pelatihan-pelatihan atau kajian-kajian tradisional yang sudah ada. Sekretaris Umr Ammah Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia (PB JAI) Abdhul Ghani menjelaskan, melalui pelatihan-pelatihan itu, mulai terbentuk kesadaran para kader Ahmadiyah yang menjadi relawan CTC tentang kepedulian terhadap isu lingkungan merupakan bagian dari ibadah. Hal itu ditujukan untuk secara bertahap mengikis kesenjangan pengetahuan antara para aktivisnya dengan para konstituennya yang tersebar di 400 titik di Indonesia (Abdul Ghani, Sekretaris Umr Ammah JAI, FGD, 20-22 Februari 2024).



Di Ternate, Save Ake Gaale meskipun tidak memiliki masalah berarti dengan para pengurusnya, namun mereka menghadapi kenyataan konstituen di masyarakat yang memahami masalah secara pragmatis. Di lapangan, Save Ake Gaale sering kali menghadapi masyarakat yang menginginkan masalah segera dituntaskan, bahkan kalau bisa masalah itu diselesaikan satu malam. Padahal, dari Save Ake Gaale diperlukan waktu untuk memahami masalah dan menyelesaikannya, terlebih masalah lingkungan merupakan persoalan yang perlu dilihat dari banyak faktor (Alwan Arif, Ketua Save Ake Gaale, FGD, 6-8 Maret 2024). Dalam hal ini, masyarakat belum memiliki pemahaman memadai mengenai lingkungan, karena dihadapkan persoalan pragmatis ekonomi.

Masih adanya kesenjangan pengetahuan antara para aktivis dan konstituen ini membuat pengetahuan mengenai isu-isu lingkungan kurang dipahami secara mendalam baik di tingkat masyarakat maupun organisasi. Untuk menyebarluaskan dan menerapkan program lingkungan, itu diperlukan keseimbangan antara pemahaman tentang etika dan pengetahuan saintifik mengenai lingkungan (Harman, Harrington, Cervený, 1998). Kesenjangan pengetahuan semacam ini dihadapi gerakan Green Islam pada level masyarakat dan organisasi. Kesenjangan itu misalnya ditemui MDMC di beberapa kasus. MDMC mengakui bahwa kearifan lokal perlu dirangkul untuk mengembangkan pengetahuan tentang lingkungan (Dede Haris Sumarno, Bendaraha MDMC, wawancara, 27 April 2024; Barori Budi Aji, Sekretaris MDMC, wawancara, 27 April 2024). Namun, dalam kasus-kasus tertentu, kearifan lokal ini menjadi hambatan yang berarti dalam menyebarluaskan pengetahuan tentang lingkungan. Misal, secara saintifik, letusan gunung berapi dapat diprediksikan arahnya, sehingga masyarakat dapat diarahkan untuk melakukan upaya mitigasi bencana untuk meminimalkan korban. Dalam beberapa kasus, masyarakat lebih percaya dengan informasi yang disebarluaskan oleh juru kunci (Budi Setiawan, Ketua MDMC, FGD, 20-22 Februari 2024).

Kesenjangan pengetahuan ini yang mendorong Muhammadiyah untuk terus mengingatkan bahwa manajemen bencana tidak cukup hanya pada level penanggulangan, tetapi juga harus pada tahap resiliensi atau ketahanan yang melibatkan pemahaman lebih holistik tentang hubungan manusia dan lingkungan. Karena itu, dalam paradigma kebencanaan, MDMC menghindari pelabelan azab terhadap bencana yang terjadi. Sebab, menurut mereka, pandangan itu di satu sisi berarti

lebih menganggap Allah dengan sifat ‘jahat’-nya, di sisi lain juga menjauhkan masyarakat untuk mempelajari pengetahuan kebencanaan lebih mendalam (Dede Haris Sumarno, wawancara 2024; Barori Budi Aji, wawancara 2024).

Kesenjangan pengetahuan organisasi dan masyarakat juga dihadapi oleh Yayasan Bina Bhakti Lingkungan di Surabaya yang berfokus pada pengelolaan sampah. Pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan sampah tidak merata. Yayasan Bina Bhakti Lingkungan memiliki jaringan yang cukup kuat ke masyarakat akar rumput. Dalam hal penyebaran pengetahuan tentang pengelolaan sampah, mereka sering kali mendekatkan diri dengan masyarakat melalui pengajian dan program-program ibu-ibu PKK. Kemudian, dengan memanfaatkan program pengabdian masyarakat di kampus, mereka kerap kali mengundang jaringan mereka di kampus-kampus, baik yang melibatkan mahasiswa maupun dosen aktif untuk terlibat menyebarluaskan pengetahuan tentang lingkungan. Mereka juga memanfaatkan jaringan sosial media, seperti Instagram dan TikTok untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang pengelolaan sampah yang lebih luas, terutama kepada anak muda (Nurul Chasanah, FGD dan wawancara 2024).

Kesenjangan pengetahuan ini sering mempersulit pergerakan para aktivis lingkungan dalam mengadvokasi nilai-nilai yang diperjuangkannya, terutama pada gerakan kultural seperti FNKSDA dan KHM (Ayu Rikza, FGD 2024). Untuk mengatasi masalah itu, apa yang dilakukan Salam Institute di Cirebon dapat menjadi contoh. Salam Institute memiliki akar yang kuat sebagai gerakan kultural, karena digerakkan oleh mereka yang mengalami pengalaman sama dengan masyarakat di wilayah kerjanya. Sehari-hari para penggerak Salam Institute berinteraksi dengan warga sekitar dengan pengalaman yang sama. Karena itu, pendekatan yang dilakukan Salam Institute dapat lebih mudah terwujud, seperti pesantren ekologis, di mana para penggeraknya bersama warga sekitar berupaya mengatasi kesenjangan pengetahuan lingkungan (Syatori, Pendiri Salam Institute, FGD 20-22 Februari 2024).

Usaha untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan di masyarakat juga dilakukan oleh HAKA kepada para pemuka agama di Aceh. Sebagai lembaga yang berpengalaman di bidang konservasionis, HAKA memiliki basis pengetahuan mengenai lingkungan. Namun, mereka menyadari pengetahuan itu perlu didiseminasikan kepada para pemuka agama di Aceh. Pada awalnya, terdapat kesenjangan pengetahuan antara para

aktivis HAKA dengan masyarakat agama di Aceh. Namun, melalui pendekatan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan para Tengku di dayah-dayah, mulai muncul kesadaran tentang lingkungan di kalangan mereka. Secara bertahap, melalui modul-modul yang dikembangkan HAKA dan berisi tentang pengetahuan mendasar tentang lingkungan, pengetahuan mengenai lingkungan mulai dipahami dan diterapkan oleh para pemuka agama dalam kegiatan keseharian (Munira, wawancara 2024). Namun, seperti yang ditemukan dalam penelitian buku ini, kesenjangan itu masih tampak di Aceh. Fatwa tentang lingkungan yang dirumuskan MPU Aceh belum diterapkan secara baik, bahkan belum masuk menjadi Qanun, sehingga pelanggaran atau perusakan lingkungan masih belum mendapat hukuman syariah.

Selain kesenjangan pengetahuan lingkungan antara aktivis dan konstituen, terdapat pula kesenjangan internal. Di banyak gerakan Green Islam ditemukan bahwa pengurus maupun anggotanya lebih kuat mengedepankan kesadaran etika dibandingkan pengetahuan lingkungan yang saintifik. Karena itu, program-program yang dijalankan mereka lebih banyak digerakkan oleh dorongan etis dibandingkan motivasi ilmiah. Misal, pendirian Yayasan Bina Bhakti Lingkungan yang lebih digerakkan oleh keresahan pribadi para aktivisnya terhadap masalah sampah dan kemiskinan di kota Surabaya. Para pengurusnya tidak ada yang memiliki rekam jejak pendidikan mengenai lingkungan, karena itu tidak jarang mereka mengundang para akademisi (Nurul Chasanah, Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, FGD, 6-8 Maret 2024). Program mereka lebih diarahkan pada kegiatan filantropi yang berbasis peningkatan kesejahteraan ekonomi warga. Sementara, isu-isu lingkungan menjadi instrumen untuk program peningkatan kesejahteraan itu.

Kesenjangan pengetahuan juga terlihat di organisasi-organisasi besar Islam, seperti pada NU dan Muhammadiyah. Misal, pemahaman tentang perubahan iklim di tubuh organisasi Muhammadiyah belum merata: apakah merupakan sesuatu yang natural atau lebih disebabkan oleh faktor eksternal, seperti intervensi manusia. Dalam hal ini, belum ada diskursus yang lebih mendalam tentang pengukuran problem-problem lingkungan dalam skala organisasi secara menyeluruh. Meski demikian, terdapat upaya-upaya khusus yang dilakukan oleh MLH untuk mengarusutamakan kesadaran dan pendalaman pengetahuan tentang lingkungan. Begitu pula dalam organisasi NU. Diskursus tentang lingkungan banyak berfokus pada dampak sosial-ekonomi yang muncul

akibat tindakan perusakan lingkungan. Bentuk jelasnya adalah seruan moral untuk melabelkan tindakan perusakan alam sebagai haram (Emhas 2017).

9.2.5 Pelibatan Perempuan Belum Maksimal

Meski isu lingkungan penting melibatkan perempuan sebagai aktor potensial karena perannya yang sentral dalam komunitas lokal maupun aktivitas sehari-hari, kenyataannya perempuan sering kali menghadapi kendala struktural dan kultural yang membatasi partisipasi mereka. Kendala ini boleh jadi mencakup kurangnya akses terhadap dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan, sumber daya, dan persepsi bahwa isu lingkungan lebih relevan dengan peran domestik perempuan daripada sebagai isu sosial dan politik. Akibatnya, keterlibatan perempuan dalam agenda Green Islam sering kali belum mampu menghasilkan dampak yang signifikan secara berkelanjutan. Studi ini menemukan bahwa pelibatan perempuan dalam aktivisme Green Islam masih belum maksimal dan belum menjadi pola umum di berbagai aktivitas organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam.

Padahal, studi ini menemukan bahwa pelibatan perempuan sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan gerakan Green Islam. Beberapa organisasi dan komunitas yang secara aktif melibatkan perempuan dalam kepemimpinan, perancangan, dan implementasi agenda Green Islam menunjukkan keberhasilan yang lebih konsisten dibandingkan organisasi yang kurang mengakomodasi keterlibatan perempuan. Dalam beberapa kasus, keterlibatan perempuan membawa perspektif yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan komunitas. Dengan demikian, program kerja menjadi lebih relevan dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan perempuan juga mampu meningkatkan rasa kepemilikan kolektif terhadap program lingkungan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan inisiatif tersebut. Pelibatan perempuan ini bukan hanya soal keadilan gender, tetapi juga strategi penting untuk memperkuat efektivitas aktivisme Green Islam.

Organisasi seperti LDII DIY, misalnya, menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan perempuan mampu menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Melalui program ProKlim, LDII DIY melibatkan perempuan dengan memberdayakan Kelompok Wanita Tani (KWT) untuk terlibat dalam program-program pelestarian lingkungan dan



melibatkan mereka dalam pengelolaan Sanggar UMKM Ecoprint dan Craft Sangurejo (ECSA). Program ini tidak hanya meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pemanfaatan sampah organik tetapi juga menghasilkan produk ramah lingkungan yang bernilai jual tinggi. Keberhasilan ECSA, yang bahkan berhasil memasarkan produknya hingga ke Hortus Botanicus Leiden di Belanda, menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus mempromosikan pelestarian lingkungan (Atus Syahbudin, Ketua DPW LDII Yogyakarta, Wawancara, 27 April 2024).

Komunitas Muslim Adat Ammatoa Kajang juga memberikan contoh bagaimana pelibatan perempuan dapat mendukung kelestarian lingkungan dan ekonomi lokal. Melalui tradisi menenun, perempuan Kajang tidak hanya menjaga kearifan lokal tetapi juga menciptakan solusi ekologis, seperti penanaman tanaman Tarung untuk bahan baku tenun yang membantu mencegah erosi dan banjir. Kemitraan dengan lembaga lain untuk pengembangan produk dan pemasaran semakin memperkuat posisi perempuan dalam komunitas ini. Dampak ekonomi dan lingkungan yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat menjadi model integrasi antara budaya, ekonomi, dan ekologi (Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Kajang dan Perempuan AMAN PHKom Kajang, FGD, 6 Maret 2024).

Di Aceh, organisasi Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (HAKA) menerapkan pendekatan berbeda dengan melibatkan perempuan sebagai Ranger Perempuan untuk menjaga hutan desa. Peran mereka dalam memantau aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan membuktikan bahwa perempuan dapat menjadi penjaga penting dalam isu konservasi hutan. Selain itu, kolaborasi HAKA dengan ulama dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kesadaran lingkungan semakin menguatkan relevansi pelibatan perempuan dalam konteks keislaman di Aceh. Hal ini tercermin dalam inisiatif seperti Fatwa MPU Aceh yang mengaitkan perlindungan lingkungan dengan nilai syariah (Munira Rezkina, Legal Officer HAKA, FGD, 20 Februari 2024).

Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) 'Aisyiyah menjadi contoh lain bagaimana pelibatan perempuan dalam gerakan Green Islam dapat menghasilkan program-program inovatif dan berdampak luas. Konsep "Green Aisyiyah", yang mengintegrasikan isu lingkungan dengan nilai-nilai Islam, berhasil menciptakan Muballighat Lingkungan, yaitu ustazah yang menyebarkan pengetahuan tentang

lingkungan. Melalui kegiatan dakwah, pelatihan, dan publikasi, LLHPB 'Aisyiyah telah membangun kesadaran lingkungan yang kuat di kalangan perempuan Islam di berbagai daerah, menjadikan mereka agen perubahan dalam penyelamatan lingkungan (Hening Parlan, Koordinator Divisi Lingkungan Hidup LLHPB 'Aisyiyah, wawancara, 23 April 2024).

Keberhasilan sejumlah program organisasi dan komunitas ini menegaskan bahwa pelibatan perempuan dalam aktivisme Green Islam bukan hanya langkah strategis, tetapi juga kebutuhan mendesak. Dengan memberikan ruang dan peran yang signifikan bagi perempuan, organisasi dan komunitas dapat meningkatkan efektivitas program lingkungan sekaligus mendorong transformasi sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Perempuan terbukti mampu menjadi katalis perubahan yang menghubungkan isu lingkungan dengan kepentingan komunitas lokal, tradisi budaya, dan nilai-nilai religius.

Sayangnya, sejauh ini, hasil *desk research* kami menunjukkan bahwa dari total 142 organisasi dan komunitas lingkungan berbasis Islam yang teridentifikasi dalam *database*, hanya ada 32 kelompok yang dipimpin oleh atau berbentuk organisasi perempuan. Sebagian besar kepemimpinan perempuan ini berasal dari organisasi LLHPB 'Aisyiyah, yang secara struktural memang berfokus pada keanggotaan dan kepemimpinan perempuan. Temuan ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam gerakan Green Islam di Indonesia, di mana peran perempuan belum sepenuhnya dimaksimalkan sebagai aktor utama dalam berbagai inisiatif agenda gerakan Green Islam.

9.3 Kesimpulan

Bab ini membahas mengapa Green Islam aktivisme Green Islam belum menjadi gerakan besar yang dikenal publik. Memang, telah banyak organisasi dan komunitas Green Islam bermunculan di Indonesia, yang juga didukung oleh pembentukan lembaga-lembaga khusus dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan dan perubahan iklim di bawah organisasi massa Islam utama seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI. Namun, gerakan Green Islam masih belum populer atau menjadi gerakan besar yang dikenal publik. Kondisi ini dibuktikan dengan tingkat persepsi mayoritas Muslim Indonesia yang rendah baik dari aspek pengetahuan, sikap, dan praktik terkait gerakan Green Islam (Halimatusa'diyah dkk. 2024).

Studi kualitatif ini memperlihatkan lima tantangan gerakan Green Islam di Indonesia, yang meliputi kelompok Green Islam masih

tersegmentasi, sebagian gerakan Green Islam hanya merespons problem lokal, sebagian organisasi kurang mampu mengoptimalkan sumber daya organisasi mereka dan sebagian lainnya memang tidak memiliki sumber daya yang kuat, kesenjangan pengetahuan antara aktivis dan konstituen, serta pelibatan perempuan yang belum maksimal. Berbagai tantangan ini dapat menjadi faktor penghambat bagi perkembangan gerakan Green Islam di Indonesia dalam memperjuangkan agenda-agenda pelestarian lingkungan. Kemampuan para aktivis gerakan Green Islam dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh gerakan itu akan berkontribusi pada menguatnya Green Islam dalam peta besar gerakan lingkungan di Indonesia.

BAB 10 PENUTUP

10.1 Kesimpulan

Studi dalam buku ini menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana gerakan Green Islam berkembang di Indonesia, siapa para aktornya dan bagaimana mereka berjejaring, serta bagaimana para aktivis Green Islam itu menggunakan identitas agama untuk membangun strategi dan program kerja mereka.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kami melakukan penelitian yang berlangsung selama delapan bulan, menggunakan metode studi kasus dan menerapkan teknik pengumpulan data meliputi *desk research* (November 2023-Januari 2024), diskusi kelompok terarah (FGD; Februari-Maret 2024), wawancara mendalam (April-Mei 2024), dan observasi (April-Mei 2024). FGD dilakukan di Jakarta dan Surabaya dengan melibatkan 50 pemimpin organisasi atau komunitas lingkungan berbasis agama. Selain itu, buku ini melakukan wawancara mendalam terhadap 53 informan dari organisasi atau komunitas Green Islam serta melakukan observasi di 28 lokasi kerja lingkungan dari 10 organisasi atau komunitas Green Islam di Indonesia.

Green Islam dalam buku ini merujuk pada upaya bersama dalam pengamalan ajaran Islam yang menegaskan hubungan integral antara keimanan dan pelestarian lingkungan atau, singkatnya, upaya kolektif yang menggunakan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam aksi-aksi pelestarian alam. Meski gerakan Green Islam terus meningkat di Indonesia, baik secara kuantitas organisasi maupun aksi-aksinya, belum banyak studi sistematis yang berupaya melihat bagaimana para aktivis Green Islam menggunakan identitas agama untuk membangun strategi, jaringan, dan program kerja mereka.



Terdapat setidaknya tiga periode utama perkembangan gerakan Green Islam di Indonesia. Yang pertama adalah fase awal yang bermula pada periode 1980-an, yaitu ketika MUI merumuskan Fatwa tentang Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan pada Oktober 1983, yang di dalamnya mencakup masalah lingkungan hidup, dan keterlibatan komunitas pesantren dalam gerakan lingkungan. Selanjutnya adalah periode pasca-tsunami Aceh 2004, di mana gerakan mitigasi risiko bencana dan bantuan pasca-bencana mendorong perkembangan gerakan Islam lebih dekat pada isu lingkungan. Yang terakhir adalah fase *ecological turn*, yang ditandai Islamic Declaration on Global Climate Change (Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global) di Istanbul, Turki, dan Paris Agreement pada tahun 2015. Pasca-kedua momentum tersebut, hampir semua komunitas agama terlibat dalam aksi-aksi lingkungan dan iklim.

Sementara ditinjau dari pola pembentukannya, terdapat tiga pola pembentukan Green Islam di Indonesia. Pertama, gerakan Green Islam yang muncul dari rahim organisasi-organisasi Islam besar, seperti LPBI pada NU, MLH, MDMC, dan LLHPB 'Aisyiyah pada Muhammadiyah, serta LPLHSDA pada MUI. Kedua, gerakan Green Islam yang muncul dari organisasi lingkungan non-agama, seperti Greenpeace dengan Ummah For Earth dan HAKA dengan gerakan Teungku Inong. Ketiga, gerakan Green Islam yang sejak awal berdirinya memang ditujukan untuk integrasi Islam dan lingkungan, seperti FNKSDA, KHM, dan AgriQuran.

10.2 Green Islam sebagai Gerakan Sosial di Indonesia

Berangkat dari analisis pendekatan gerakan sosial, buku ini menemukan tiga faktor yang membentuk Green Islam di Indonesia. Yang pertama adalah terbukanya kesempatan politik. Pasca tsunami Aceh dan gempa Yogyakarta, terjadi perubahan paradigma mengenai kebencanaan, dari tindakan cepat tanggap menjadi gerakan resiliensi dan mitigasi risiko bencana. Perubahan ini melahirkan aturan-aturan baru mengenai kebencanaan yang memungkinkan organisasi-organisasi besar Islam, seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI mendapatkan peluang kerja sama dengan mitra berpengaruh dengan membuat badan lingkungan, terutama kebencanaan, dalam tubuh organisasinya.

Faktor kedua adalah kemampuan organisasi memobilisasi sumber daya organisasinya. Organisasi-organisasi besar Islam, seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI yang mengawali gerakan Green Islam memiliki

kapasitas mengembangkan infrastruktur organisasi yang sebelumnya berfokus pada isu keagamaan. Mereka memiliki struktur organisasi dari tingkat lokal hingga pusat dan figur-figur yang berpengalaman dalam merumuskan konsep integrasi Islam dan lingkungan.

Faktor ketiga adalah pemingkungan (*framing*) aksi kolektif. Untuk mendapatkan dukungan dan simpati publik, para aktor Green Islam menggunakan beberapa medium seperti perumusan fatwa, penerbitan buku, atau penyampaian pesan-pesan lingkungan melalui ceramah agama. Nilai-nilai yang disampaikan dalam medium tersebut memuat ajaran agama untuk menjaga lingkungan. Dalam perkembangannya, para aktivis Green Islam juga melakukan upaya perluasan batas-batas pemingkungan, dari isu yang semula spesifik tentang kebencanaan ke isu internasional perubahan iklim, baik karena mengikuti tren global maupun untuk menarik dukungan publik yang lebih besar.

Terkait peta Green Islam di Indonesia, studi ini menemukan 142 kelompok organisasi atau komunitas lingkungan berbasis Islam di berbagai daerah di Indonesia yang kecenderungannya dikategorikan ke dalam tiga tipologi: konservasionis, pengkampanye kebijakan, dan mobilisator. Mayoritas kelompok Green Islam terafiliasi secara struktural di bawah dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah. Banyak dari mereka bekerja di basis lokal daripada nasional dan internasional, dan paling banyak berjenis ormas keagamaan, dibandingkan NGO, komunitas, dan koalisi. Sebagian besar aktivisme Green Islam menggunakan pendekatan pengkampanye kebijakan, dibandingkan konservasionis dan mobilisator. Selain itu, mereka cenderung memiliki karakter keanggotaan organisasi atau komunitas yang didominasi oleh kategori yang tidak membatasi keanggotaan mereka pada kelompok atau segmen tertentu.

Analisis jaringan sosial yang kami lakukan menemukan bahwa ormas Islam terbesar seperti Muhammadiyah, NU, dan MUI menjadi aktor paling populer dan berpengaruh dalam struktur jaringan sosial Green Islam di Indonesia. Selain itu, kami menemukan beberapa kluster yang terbentuk dalam jaringan sosial aktivisme Green Islam, di antaranya kelompok yang didominasi oleh organisasi massa Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, dan lembaga yang kerap berjejaring dengan mereka; kelompok yang menekankan pada aksi mobilisasi massa; kelompok yang didominasi oleh organisasi yang berafiliasi struktural dengan Muhammadiyah, seperti MLH Muhammadiyah, LLHPB 'Aisyiyah, dan

Eco-Bhinneka; dan kelompok yang fokus terhadap mitigasi risiko bencana dan bantuan pasca-bencana.

Meski memiliki karakter dan landasan teologi Islam lingkungan yang berbeda, setiap organisasi atau komunitas Green Islam menggunakan identitas Islam sebagai identitas kolektif untuk melakukan aksi-aksi lingkungan. Para aktivis Green Islam menggunakan identitas Islam untuk membangun jaringan dengan tokoh agama, tokoh akademisi Muslim, ormas dan institusi Islam, lembaga pendidikan Islam. Selain itu, para aktivis Green Islam juga menggunakan identitas Islam untuk memperluas jaringan mereka dengan pemerintah, aktor dan institusi internasional, kelompok lintas keagamaan, kelompok aktivis lingkungan non-agama, dan korporasi untuk memperluas dampak positif dari gerakan Green Islam di Indonesia.

Dalam hal strategi, buku ini memperlihatkan lima pola strategi yang sering digunakan oleh gerakan Green Islam di Indonesia: (1) penggunaan istilah berkonotasi Islam, misalnya penggunaan istilah Islam dalam program eko-pesantren dan *green hajj* dari PPI UNAS; (2) pemberdayaan tokoh agama, misalnya LDII Yogyakarta dengan programnya “Kiai Peduli Sampah”; (3) pemberdayaan ulama perempuan, misalnya HAKA memberdayakan ulama-ulama perempuan untuk mengkampanyekan Green Islam melalui ceramah-ceramah di masjid atau forum pengajian masyarakat Aceh; (4) pemanfaatan momen-momen penting dalam kalender Islam, misalnya program “buka puasa tanpa plastik” Ummah for Earth pada bulan Ramadan; dan (5) aksi-aksi berdasarkan ajaran Islam, misalnya CTC menyatakan bahwa program bersih-bersih lingkungan CTC merupakan bentuk implementasi ajaran agama. Secara umum, gerakan Green Islam menggunakan pola tersebut sesuai cara pandang yang mereka anut dalam mengidentifikasi masalah, baik dalam bentuk perbaikan etika masyarakat maupun perlawanan terhadap pemerintah atau perusahaan.

Buku ini juga menemukan bahwa strategi Green Islam, yang selalu didasarkan pada interpretasi selektif ajaran lingkungan Islam, memberi justifikasi teologis bagi aksi-aksi kolektif gerakan Green Islam. Setidaknya terdapat tiga pola strategi integrasi ajaran Islam dalam aktivisme Green Islam lainnya: (1) pelatihan masyarakat, misalnya MDMC yang mengadakan berbagai pelatihan kepada masyarakat dengan fokus utamanya mengenai mitigasi bencana; (2) mobilisasi masyarakat terdampak, misalnya FNKSDA bekerja sama dengan komunitas lokal

Desa Pakel, Jawa Timur, dalam menyelesaikan konflik agraria antara petani lokal dan perusahaan perkebunan; dan (3) perluasan dan pendalaman jaringan daring, misalnya AgriQuran menggunakan media sosial sebagai sarana untuk menjangkau khalayak luas terutama anak muda untuk mempromosikan pertanian Islam. Tiga pola strategi ini juga mereka gunakan sesuai dengan kepentingan mereka, baik untuk menysar pemerintah maupun individu atau kelompok masyarakat secara umum.

Secara umum, aksi-aksi Green Islam di Indonesia bertujuan merespons persoalan-persoalan lingkungan yang terjadi di masyarakat lokal, seperti darurat sampah, punahnya satwa langka yang dilindungi, krisis air bersih, penolakan tambang, degradasi pesisir pantai akibat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), hingga perjuangan menjaga tanah dan tradisi adat. Berdasarkan FGD, wawancara dan observasi, studi ini mencatat setidaknya ada enam program terpilih gerakan Green Islam di Indonesia, yaitu manajemen sampah dan limbah, dakwah satwa langka di masyarakat, kampanye lingkungan di media sosial, keterlibatan perempuan dalam aksi lingkungan, Kampung Hijau Energi yang didanai oleh zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dan konservasi hutan.

Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi keberhasilan program-program Green Islam tersebut. Beberapa faktor itu meliputi: (1) kuatnya identitas Islam, seperti aksi lingkungan dipandang sejalan dengan perintah Tuhan melalui Alquran dan Sunnah; (2) ketokohan aktivis lingkungan, contohnya PPI UNAS yang melakukan pelatihan dai konservasi karena peran Fachruddin M. Mangunjaya yang sebelumnya berkecimpung di WWF; (3) pendanaan, seperti keberhasilan program kampung hijau energi yang didanai oleh lembaga pengelola ZIS Yayasan Hadji Kalla; (4) kegiatan lingkungan yang inovatif, misalnya dengan pembangunan sarana reaktor digester untuk memanfaatkan limbah ternak untuk menghasilkan pupuk organik dan biogas di pondok pesantren; (5) kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti kerja sama dengan organisasi lingkungan lainnya, atau kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam aksi-aksi lingkungan; dan (6) pelibatan perempuan.

Terdapat empat kekuatan gerakan Green Islam di Indonesia: (1) kerangka etik, baik itu etika terkait pentingnya melestarikan lingkungan untuk generasi berikutnya maupun etika tentang kesatuan manusia dan

alam; (2) sumber daya organisasi yang terbentuk dari struktur gerakan pusat ke daerah, seperti yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah; (3) pengikut loyal yang didasari oleh kesamaan identitas agama; dan (4) kemampuan kreatif untuk beradaptasi dan berinovasi, seperti penggunaan panel surya oleh Bumi Langit Permaculture dan LDII, pembuatan sumur biopori oleh Save Ake Gaale, dan pemanfaatan limbah organik untuk pupuk organik dan biogas oleh Yayasan Hadji Kalla.

Selain itu, terdapat tiga peluang yang dapat memperkuat aktivisme lingkungan gerakan Green Islam di Indonesia, yaitu (1) jaringan yang secara alamiah terus membesar karena mengintegrasikan Islam dan lingkungan, serta jaringan yang melampaui batas lokal; (2) latar belakang pendidikan para aktivis: tidak sedikit dari mereka memiliki pendidikan tinggi yang memberikan peningkatan kapasitas bagi gerakan Green Islam; (3) fenomena *ecological turn* atau pergeseran paradigma yang lebih memperhatikan aspek ekologi dan keberlanjutan di ranah kebijakan, khususnya sejak Islamic Declaration on Global Climate Change (Deklarasi Islam tentang Perubahan Iklim Global) di Istanbul dan Paris Agreement 2015.

Meski telah banyak organisasi dan komunitas Green Islam bermunculan di Indonesia, yang juga didukung oleh pembentukan lembaga-lembaga khusus dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan dan perubahan iklim di bawah organisasi massa Islam utama seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI, gerakan Green Islam masih belum menjadi gerakan besar yang dikenal publik. Kondisi ini dibuktikan dengan persepsi mayoritas Muslim Indonesia yang masih rendah dalam aspek pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait Green Islam (Halimatusa'diyah dkk. 2024).

Buku ini menunjukkan terdapat lima tantangan gerakan Green Islam di Indonesia. Lima tantangan ini meliputi (1) kelompok Green Islam masih tersegmentasi; (2) sebagian gerakan Green Islam hanya merespons problem lokal; (3) sebagian organisasi kurang mampu mengoptimalkan sumber daya organisasi mereka dan sebagian lainnya memang tidak memiliki sumber daya yang kuat; (4) adanya kesenjangan pengetahuan antara aktivis dan konstituen; serta (5) pelibatan perempuan yang belum maksimal.

10.3 Refleksi dan Rekomendasi

10.3.1 Memperluas Kolaborasi untuk Pelestarian Lingkungan

Temuan penelitian dalam buku ini menemukan bahwa agenda-agenda pelestarian lingkungan yang digerakkan oleh kelompok Green Islam relatif berhasil dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Meski demikian, sebagian besar agenda-agenda tersebut masih berorientasi pada program organisasi yang berskala terbatas. Masih sedikit di antara aktivis Green Islam maupun pemerintah yang berhasil menjadikan agenda-agenda lingkungan mereka sebagai agenda bersama yang lebih luas. Perluasan kolaborasi dan kerja sama, baik antar-gerakan Green Islam maupun dengan pemerintah, dan sebaliknya, penting dilakukan untuk mendorong atau mengadopsi agenda pelestarian lingkungan Green Islam pada kebijakan-kebijakan publik dan implementasinya yang lebih luas. Dalam hal ini, institusi pemerintah seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agama juga dapat memainkan peran signifikan untuk menjadikan agenda Green Islam menjadi agenda publik.

Beberapa organisasi maupun komunitas secara terbatas telah berhasil mengkampanyekan agenda lingkungan ini dengan kerja sama yang luas. Misalnya, Save Ake Gaale yang fokus melakukan advokasi kepada pemerintah terhadap isu air. Konsistensi Save Ake Gaale pada isu air memperkuat gerakan mereka, sehingga dapat berhasil mengadvokasikan beberapa peraturan daerah, seperti Perda tentang Sumur Resapan dan Perda tentang Pengelolaan Kualitas Air di Ternate. Namun, Ketua Komunitas Save Ake Gaale Alwan Arif menjelaskan bahwa meskipun berhasil mendorong rumusan peraturan itu, kehendak politik pemimpin daerah juga menentukan arah implementasi kebijakan kepada masyarakat. Regulasi yang sudah berhasil diadvokasi oleh komunitas Save Ake Gaale masih perlu dipantau, sehingga kehendak politik yang pro-lingkungan dapat lebih konsisten diimplementasikan dan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat yang lebih luas terhadap isu lingkungan.

Untuk mendorong kesadaran lingkungan sebagai agenda bersama yang lebih luas, sejatinya banyak gerakan Green Islam menekankan urgensi kolaborasi. Narasi ini kuat ditemukan dari komunitas lingkungan yang skala kerjanya terbatas, seperti gerakan Green Islam yang terbatas



bergerak pada dunia digital, dan organisasi maupun komunitas Green Islam yang terbatas karena menginduk pada organisasi-organisasi besar Islam. Pada komunitas yang lebih banyak bergerak di dunia digital, seperti EcoDeen dan AgriQuran, mereka sangat mendorong kerja sama antar-aktivis Green Islam. EcoDeen memiliki hubungan relatif kuat dengan MUI dan CTC (Rissa Ozalifia, EcoDeen, FGD, 20-22 Februari 2024). Sementara AgriQuran memiliki hubungan dengan Bumi Langit Permaculture (Farras Muhadzdzib, AgriQuran, FGD, 6-8 Maret 2024). Dalam banyak kasus, pola-pola kolaborasi ini tampak mulai terlihat dalam upaya-upaya mereka dalam menjalin kerja sama. Mereka cenderung lentur dalam melakukan kolaborasi, meskipun sebagian mereka, seperti FNKSDA dan Bumi Langit Permaculture menerapkan prinsip-prinsip yang lebih hati-hati dalam memilih mitra kerja sama.

Dalam beberapa kasus, pergeseran kesadaran lingkungan yang lebih luas sudah berjalan, misal pada MDMC. Pada awal pendiriannya, MDMC hanya berorientasi pada penanggulangan bencana, yaitu pada sikap responsif organisasi terhadap dampak bencana. Belakangan terdapat perubahan paradigma dari orientasi penanggulangan pada resiliensi atau ketahanan yang lebih menitikberatkan pada kebermanfaatan program terhadap masyarakat yang lebih luas agar memiliki ketahanan terhadap bencana (Dede Haris Sumarno, Bendahara MDMC, wawancara, 27 April 2024; Barori Budi Aji, Sekretaris MDMC, wawancara, 27 April 2024). MLH Muhammadiyah dalam beberapa tahun ke depan juga sedang mengupayakan penerapan panel surya sebagai modal energi bagi aset-aset Muhammadiyah, sehingga agenda terhadap lingkungan dapat menjadi amal usaha yang bermanfaat lebih luas (Djihadul Mubarak, MLH PP Muhammadiyah, FGD, 20-22 Februari 2024). MUI bersama PPI UNAS dan MOSAIC juga telah mendorong rumusan wakaf hijau yang berorientasi pada dampak program terhadap kemaslahatan (Hayu S. Prabowo, FGD, 20-22 Februari 2024; Mangunjaya, wawancara, 22 Maret 2024; Gatot Supangkat, FGD, 6-8 Maret 2024).

Untuk mewujudkan tujuan ini, gerakan Green Islam perlu memperdalam pengetahuan dan literasi tentang lingkungan. Pendalaman pengetahuan atau literasi lingkungan dapat diciptakan melalui pelibatan para ahli lingkungan ke dalam gerakan Green Islam, baik terlibat sebagai pengurus atau anggota aktif maupun sebagai pembicara tamu untuk memberikan penguatan materi tentang literasi lingkungan melalui pelatihan, seminar, bedah buku, atau kegiatan ilmiah lainnya. Hasil-hasil

studi para ahli lingkungan tersebut kemudian dapat memperkuat gerakan Green Islam yang menggabungkan aspek keislaman dengan data atau fakta empiris mengenai bahaya kerusakan lingkungan.

Prospek yang lebih penting adalah bagaimana kepentingan lingkungan yang berbasis ajaran Islam dapat terserap pada kebijakan pemerintah, baik yang bersifat nasional maupun daerah, serta dapat terhubung dengan program-program organisasi maupun komunitas atau lembaga lingkungan berbasis Islam dan dapat dirasakan pada keseharian masyarakat secara lebih luas. Salah satu hal lain yang dapat menjadi agenda publik adalah masjid ramah lingkungan, atau dikenal sebagai eko-masjid. Di Indonesia, Masjid Istiqlal telah menjadi percontohan yang baik, ketika ia dapat menghasilkan energi dan mengelola air dengan baik. Seperti yang didorong oleh Imam Besar Masjid Istiqlal K.H. Nasarudin Umar, bahwa gerakan Green Islam dapat dimulai dan digerakkan dari masjid (Nasarudin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, wawancara, 8 April 2024). Di masjid-masjid, kampanye-kampanye tentang lingkungan juga dapat disebarluaskan melalui para dai. Dalam hal ini, program dai konservasionis yang dijalankan oleh PPI UNAS (Zulham, PPU UNAS, FGD, 20-22 Februari 2024), atau kiai peduli sampah yang sudah masif digerakkan oleh LDII DIY dapat dilanjutkan sebagai agenda yang lebih luas (Atus Syahbuddin, Ketua DPW LDII DIY, wawancara, 25 April 2024). Untuk menyebarkan kampanye hijau ini perlu dukungan dan kehendak politik para pemangku kepentingan, seperti, Kemenag, KLHK, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Organisasi-organisasi maupun komunitas-komunitas Green Islam juga dapat membentuk suatu forum bersama untuk saling memperkuat kerja sama dalam aktivisme lingkungan. Forum bersama itu dapat diinisiasi pada tingkat nasional, untuk kemudian menjadi inspirasi bagi gerakan sejenis di tingkat daerah. Organisasi massa Islam besar, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang memiliki badan atau organisasi tersendiri untuk mengatasi lingkungan, dapat menginisiasi forum bersama itu, merangkul berbagai aktivis Green Islam secara nasional. Forum bersama itu dapat mudah dilakukan melalui agenda penyebaran pengetahuan, seperti pertemuan tahunan atau konferensi periodik tentang lingkungan yang didekati melalui pendekatan Islam. Melalui forum itu, gerakan Green Islam dapat membicarakan agenda bersama yang dapat dilakukan, seperti agenda masjid ramah lingkungan,

kritik terhadap regulasi yang tidak pro-lingkungan, haji ramah lingkungan, eko-pesantren atau wakaf atau zakat lingkungan yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan Green Islam.

10.3.2 Wakaf sebagai *Endowment Fund*

Dalam banyak kasus, faktor pendanaan merupakan salah satu kendala utama bagi gerakan Green Islam. Pada tahun-tahun ke depan, keberlanjutan gerakan Green Islam akan tergantung pada faktor pendanaan ini. Dengan munculnya fenomena “*ecological turn*” atau pergeseran paradigma yang lebih memperhatikan aspek ekologi dan keberlanjutan di ranah kebijakan setelah Islamic Declaration on Global Climate Change di Istanbul pada 2015, gerakan Green Islam mendapatkan momentumnya. Beberapa gerakan Green Islam mendapatkan dukungan finansial dari kemunculan fenomena *ecological turn* ini. Namun, banyak yang mengakui dukungan finansial masih menjadi masalah utama gerakan, meskipun sebagian organisasi memang memiliki prinsip untuk menjaga jarak dengan dukungan dana korporasi.

Untuk mengatasi dan juga sekaligus menangani masalah ini, beberapa aktivis Green Islam menawarkan konsep dana abadi terhimpun atau *endowment fund* sebagai alternatif yang patut dipertimbangkan. Dalam hal ini, mereka mengetengahkan sistem wakaf sebagai skema *endowment fund* gerakan Green Islam di Indonesia. Wakaf dilihat tidak hanya sebagai kegiatan keagamaan tetapi juga sebagai sarana pengelolaan aset atau dana produktif secara berkelanjutan. Skema wakaf yang ditawarkan adalah “wakaf hijau” untuk membantu adaptasi Islam dalam memenuhi kebutuhan terhadap perubahan lingkungan. Wakaf hijau ini dianggap dapat menyelesaikan persoalan untuk memobilisasi aset-aset produktif (BWI 2022).

Secara lebih terorganisasi, gagasan ini telah dirumuskan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan United Nations Development programme (UNDP), didukung oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), organisasi Green Waqf, dan Waqf Center for Indonesia Development and Studies (WaCIDS). Dalam rumusan ini, wakaf disandingkan dengan target-target keberlanjutan global (SDGs). Wakaf dilihat sebagai katalisator untuk membantu menyelesaikan permasalahan pembangunan global saat ini (Cizakca 2014; Sadeq 2002). Dalam rumusan ini, ada empat tahapan menuju inisiatif wakaf hijau, yaitu tahapan pra-kondisi, konsolidasi, pembangunan proyek, dan

pengarusutamaan wakaf hijau. Hingga saat ini, inisiatif wakaf hijau baru masuk ke dalam tahapan pra-kondisi, yaitu pada perluasan penyadaran melalui kampanye-kampanye hijau. Untuk menguatkan upaya penyadaran ini, fatwa-fatwa MUI terkait lingkungan menjadi basis utama inisiatif ini, di antaranya fatwa No. 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi bagi Masyarakat.

Salah satu prospektif wakaf hijau yang sudah mulai diterapkan adalah wakaf pohon. Wakaf pohon dinilai memiliki berbagai tujuan, termasuk meningkatkan kualitas dan kebersihan udara, mengurangi pemanasan global, mencegah banjir dan tanah longsor, serta menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan (BWI 2022). Wakaf pohon ini mulai diprakarsai oleh pendiri WaCIDS Muhaimin Iqbal bekerja sama dengan Yayasan Dana Wakaf Indonesia pada 2021, yang memperkenalkan wakaf pohon tamanu. Pohon tamanu secara ilmiah dinilai terbukti untuk menyediakan kebutuhan biodiesel. Pohon tamanu juga dianggap mampu menggantikan bahan solar berbasis fosil tanpa modifikasi mesin (BWI 2022). Wakaf pohon tamanu menjadi *pilot project* dari wakaf hijau ini. Banyak penelitian yang mengidentifikasi beragam manfaat dari pohon tamanu ini (Leksono dkk., 2016; BWI 2022). Proyek wakaf hijau juga akan menyasar lahan menganggur dan kritis yang perlu didistribusikan benih tanaman. Berkaitan dengan ini, Hayu Prabowo dan Fachruddin berupaya mengetengahkan wakaf hutan (Hayu S. Prabowo, FGD 2024; Mangunjaya, wawancara 2024).

Setidaknya ada 5 pihak yang akan perlu terlibat dalam gerakan ini, yaitu pemerintah, swasta, komunitas, akademisi, dan mitra pembangunan. Gerakan Green Islam dapat mengisi kebutuhan gerakan wakaf hijau ini dari pihak komunitas. Ada beberapa lembaga yang telah berupaya untuk menjalankan wakaf hijau ini, seperti Yayasan Hutan Wakaf Bogor. Mereka memanfaatkan tanah wakaf dengan menggalang dana untuk menanam pohon yang kemudian menghasilkan manfaat ekologis, seperti memanen buah-buahan (BWI 2022). Gerakan ini, selain memberikan fungsi penghijauan dan menghasilkan nilai ekonomi, juga dapat memberdayakan penduduk sekitar sebagai petani produktif. Di luar negeri, seperti di Kuwait terdapat contoh yang baik mengenai dana abadi untuk lingkungan yang dikelola oleh lembaga wakaf. Lembaga wakaf ini telah berdiri sejak 1993, dan sejak 1995 memulai fokus untuk membentuk dana lingkungan hidup sebagai respons untuk mengatasi

problem iklim di negara yang memiliki lahan kecil dengan iklim gurun tersebut (BWI 2022; Yaakob 2017).

10.3.3 Memperkuat Peran Perempuan dalam Isu Lingkungan

Studi ini menemukan pelibatan perempuan dalam gerakan Green Islam dapat memperluas aktivisme lingkungan kepada masyarakat. Namun, belum banyak organisasi maupun komunitas Green Islam yang melibatkan perempuan dalam aktivismenya. Sebagian besar organisasi maupun komunitas Green Islam yang masih minim melibatkan perempuan tampak lebih kesulitan dalam menjalankan aktivisme lingkungan mereka, dalam hal partisipasi masyarakat. Sementara, gerakan Green Islam yang melibatkan perempuan dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas.

Pelibatan dan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivisme lingkungan. Pelibatan perempuan dapat dilakukan setidaknya pada dua hal, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi dan pemberdayaan komunitas. Organisasi maupun komunitas Green Islam dapat merangkul kelompok ibu-ibu dan keluarga untuk kegiatan ekonomi yang sejalan dengan kepentingan pelestarian lingkungan. Untuk pemberdayaan komunitas, organisasi maupun komunitas Green Islam dapat memberdayakan tokoh-tokoh perempuan, seperti nyai di pesantren, Teungku Inong, kelompok pengajian, hingga aktivis lingkungan ke dalam agenda aktivisme lingkungan, baik aktivitas konservasi, advokasi, maupun mobilisasi massa untuk aksi-aksi lingkungan.

Berkaitan dengan ini, dalam menjalankan aktivisme lingkungan, para aktivis Green Islam, baik yang bergerak sebagai konservasionis, pengkampanye kebijakan, maupun mobilisator, sering kali menghadapi persoalan ketimpangan pemahaman tentang masalah lingkungan dengan para konstituennya. Di tingkat masyarakat umum, kesenjangan pengetahuan tentang lingkungan juga terjadi karena kondisi ekonomi, yang mengharuskan masyarakat lebih berpikir pragmatis dibandingkan strategis dan berpikir jangka panjang. Masyarakat pada umumnya mempertimbangkan kepentingan ekonomi sebagai aspek utama untuk terlibat pada aktivisme lingkungan.

Untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan dengan para konstituen, gerakan Green Islam dapat mengarusutamakan program-program yang bersifat pengembangan

ekonomi dalam aktivismenya. Dengan pelibatan perempuan pada aktivisme Green Islam, program-program seperti ini dapat mudah dilakukan. Dalam hal ini, gerakan Green Islam semestinya memandang kesadaran pragmatis masyarakat sebagai peluang untuk menjadikan aktivisme lingkungan sejalan dengan kepentingan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, akomodasi terhadap kepentingan ekonomi masyarakat dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan pengetahuan dan pemahaman tentang masalah lingkungan.

Program lingkungan yang dapat menyentuh kepentingan ekonomi masyarakat, seperti eko-print yang menghasilkan produk (kain, baju, *pouch bag*, tumbler) yang ramah lingkungan, program penghijauan yang dapat menghasilkan produk pangan, program eko-enzim, komposter dan sumur biopori, dan program eko-wisata, membutuhkan keterlibatan masyarakat luas, khususnya kaum perempuan. Dalam hal ini, organisasi maupun komunitas Green Islam dapat bekerja sama dengan para pelaku ekonomi kreatif untuk membentuk program-program yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sejalan dengan agenda pelestarian lingkungan, dengan pelibatan perempuan sebagai pilar utamanya.

10.3.4 Integrasi Green Islam dalam Arah Kebijakan Kementerian Agama

Ulama berperan penting dalam mengkampanyekan Green Islam, sebab mereka dapat mempengaruhi masyarakat yang cenderung Islami seperti masyarakat Indonesia. Mengikuti Diane Singerman (2012), pelaku gerakan dan produsen budaya seperti otoritas keagamaan dan intelektual memiliki kemampuan dalam membentuk gerakan kolektif, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu, otoritas keagamaan dan intelektual, dapat mengarahkan seorang simpatisan menjadi seorang aktivis (Singerman 2012).

Dalam hal strategi gerakan, studi ini memperlihatkan organisasi-organisasi Green Islam cenderung melibatkan otoritas keagamaan dalam aksi-aksi lingkungan mereka. Karena itu, keterlibatan Kementerian Agama (Kemenag) juga cukup penting. Organisasi dengan tipologi pengkampanye kebijakan seperti NU, Muhammadiyah, DMI, LDII, MPU, dengan sumber daya tokoh agama yang mereka miliki, atau Yayasan Hadji Kalla, HAKA, AgriQuran, EcoDeen, dengan mendekati ulama-ulama di wilayah kerja masing-masing, sepenuhnya dapat memanfaatkan

sumber daya tersebut untuk menggerakkan anggota atau masyarakat agar terlibat dalam aksi kolektif mereka. Pelaku gerakan dan produsen budaya seperti otoritas keagamaan dan intelektual, sebagaimana yang dikatakan oleh Diane Singerman (2012), memiliki kemampuan dalam membentuk identitas dan gerakan kolektif, baik secara sadar atau tidak sadar. Singkatnya, dakwah Green Islam yakni kampanye-kampanye Islam dan lingkungan dalam bentuk ceramah, khutbah, atau pengajian, merupakan strategi yang kerap digunakan dalam gerakan Green Islam untuk mengarusutamakan tema Islam dan lingkungan.

Dalam hal program kerja, organisasi-organisasi Green Islam, cenderung menggunakan identitas Islam sebagai mekanisme membedakan diri dengan organisasi lingkungan non-agama umumnya. Di antaranya meliputi *green hajj* dan eko-pesantren dalam program PPI UNAS, eko-masjid dalam program LLHPB 'Aisyiyah, MUI, serta Ummah For Earth Greenpeace. Dalam pembiayaan gerakan Green Islam, selain melalui kerja sama antar lembaga, organisasi-organisasi Green Islam juga kerap menggunakan dana ekonomi keagamaan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dan infak. Beberapa lembaga pengelola dana ekonomi keagamaan seperti Lembaga Amil, Zakat, Infak, dan Sedekah NU (Lazisnu), Lazis Muhammadiyah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yayasan Hadji Kalla kerap mengalokasikan dana untuk agenda-agenda Green Islam.

Oleh karena itu, setidaknya dua poin rekomendasi yang dapat dipertimbangkan Kemenag dalam memaksimalkan infrastruktur beserta ekosistem aktivisme Green Islam yang telah terbentuk di Indonesia. Pertama, Kemenag dapat menjadikan agenda Green Islam sebagai agenda prioritas baru dalam arah kebijakan Rencana Strategis Kemenag 2025-2029. Kedua, Kemenag dapat mengadopsi strategi dan program kerja Green Islam dalam arah kebijakan yang selama ini telah menjadi tema sentral dalam Kemenag. Misal, Ditjen Bimas Islam dapat memberi pelatihan-pelatihan Islam dan lingkungan pada penyuluh dan penyiar agama Islam, dengan melibatkan organisasi-organisasi Green Islam.

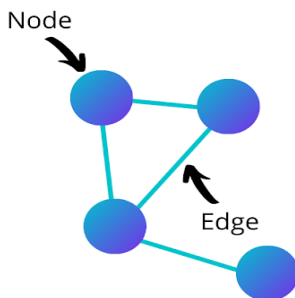
Kemenag juga dapat menjadikan kebijakan lingkungan sebagai indikator dalam Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Rumah Ibadah Bersih, Sehat, Inklusif, dan Ramah. LLHPB Aisyiyah serta Muhammadiyah dapat dijadikan sebagai mitra program. Upaya lain dapat dilakukan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk memasukkan Haji atau Umrah Ramah Lingkungan ke dalam Pusat Layanan Haji dan

Umrah Terpadu (PLHUT) untuk meningkatkan layanan haji dan umrah. Organisasi-organisasi yang mengusung program *green hajj*, yakni PPI UNAS, MUI serta Ummah For Earth Greenpeace dapat menjadi mitra program. Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf juga dapat membuat regulasi untuk menjadikan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen agenda-agenda Green Islam. Dalam hal pendidikan, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren juga dapat mengintegrasikan materi Green Islam ke dalam kurikulum lembaga pendidikan formal dan non-formal di bawah Kemenag.

APENDIKS

APENDIKS 1

Analisis Jaringan Sosial (Social Network Analysis, SNA)



Gambar 10 Komponen struktur sosial dalam Analisis Jaringan Sosial (SNA)

Sumber: <https://builtin.com/data-science/social-network-analysis>

Dalam menganalisis jaringan sosial, studi ini menggunakan aplikasi Social Network Analysis (SNA) Gephi versi 0.10.1. Terdapat dua komponen struktur sosial dalam SNA (lihat gambar 10). Pertama adalah *nodes* yang merupakan aktor atau entitas yang akan dikoneksikan. Kedua adalah *edges* yang merupakan hubungan atau garis yang mengkoneksikan antar *nodes* tersebut (Foster et al. 2020).

Setelah mengimpor *dataset* ke aplikasi Gephi, selanjutnya, kami mengeksplorasi struktur dasar jaringan, sekaligus membuat visualisasi data dan grafis untuk mengidentifikasi pola atau relasi organisasi dan komunitas lingkungan berbasis keagamaan tersebut. Kami menggunakan

dua algoritma pengolahan data, yaitu *degree centrality* dan *modularity class*, untuk membantu dalam menganalisis.

Algoritma *degree centrality* bertujuan untuk menentukan aktor-aktor mana saja yang memiliki peran penting dalam komunikasi kolaboratif, yang dinilai dari banyaknya hubungan yang dimiliki dengan para aktor lainnya di seluruh jaringan. Tingkat sentralitas ini berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan bahwa aktor tersebut tidak terhubung dengan pemangku kepentingan lainnya, sementara nilai 1 menunjukkan bahwa mereka terhubung dengan pemangku kepentingan lainnya. Ketika *nodes* atau aktor-aktor memiliki koneksi dengan tingkat yang lebih banyak atau lebih tinggi dalam struktur, maka mereka cenderung memiliki kapasitas yang lebih besar dalam mempengaruhi aktor-aktor lainnya (Umadevi 2013). Dengan kata lain, semakin banyak satu *node* atau sebuah aktor terhubung dengan aktor atau *nodes* lain, semakin besar pula visualisasi ukuran *node* yang dimiliki oleh aktor, yang menandakan satu *node* atau aktor tersebut memiliki pengaruh lebih besar bagi aktor-aktor lainnya.

Algoritma *modularity class* berguna untuk menemukan berapa jumlah kluster atau komunitas yang terbentuk, yang dibuat oleh interaksi aktor dalam jaringan. Pada aplikasi Gephi, algoritma perhitungan penentuan kelas berdasarkan *modularity* diukur dari kepadatan tautan dalam komunitas, bukan tautan antar komunitas, dengan nilai skala 1 dan 1 (Blondel et al. 2008). Yang dimaksud dengan kepadatan tautan adalah, jika dibayangkan, seorang peneliti sedang mengamati sekumpulan orang dalam sebuah pesta. Peneliti akan melihat beberapa orang atau aktor akan berbicara dengan banyak orang atau aktor lain dan membentuk kelompok yang berbeda.

Dengan algoritma *modularity class*, penulis akan dibantu untuk mengetahui berapa banyak kelompok-kelompok terbentuk, berdasarkan seberapa sering orang-orang dalam kelompok tersebut berinteraksi satu sama lain (kepadatan tautan dalam komunitas dengan skala 1 dan 1), bukan berdasarkan interaksi mereka dengan orang-orang di luar kelompok mereka (tautan antar komunitas 0 dan 1). Dengan demikian, kondisi ini mengacu pada seberapa sering interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam satu kelompok. Misalnya, jika ada 5 aktor dalam satu kelompok atau kluster dan mereka semua saling berinteraksi, maka kepadatan tautan dalam komunitas ini sangat tinggi.

APENDIKS 2

32 Program Terpilih Green Islam di Indonesia

Tabel 3 Program Terpilih Green Islam

No	Organisasi atau Komunitas	Praktik Terpilih
Green Islam		
1	Pusat Pengajian Islam Universitas Nasonal (PPI UNAS)	Dai konservasi
2	Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA)	Konservasi Ekosistem Leuser (KEL). Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perspektif Syariat Islam; Eco-Feminis.
3	Salam Institute	Pesantren ekologi
4	Yayasan Hadji Kalla (YHK)	Kampung Hijau Energi
5	Yayasan Bina Bhakti Lingkungan (YBBL)	Bank sampah
6	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	Kiai Peduli Sampah, ProKlim
7	Clean the City (CTC)	Aksi bersih-bersih wilayah dengan konsep Wikari Amal
8	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI NU)	Mitigasi bencana
9	EcoDeen ID	Edukasi, Modul & Toolkit, dan Aksi Berbagi
10	AgriQuran	Edukasi Pertanian melalui workshop, dan produksi konten media sosial
11	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Hibah 3000 pohon untuk masjid



12	Eco Bhinneka Muhammadiyah (EBM)	Pengelolaan sampah menjadi kerajinan
13	Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah	Seribu Cahaya; Mubalighat Lingkungan; Buku Fikih Lingkungan
14	Green Faith Indonesia	Faith for Climate Justice, Kampanye
15	Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLH SDA MUI)	Lahirnya beberapa fatwa merespon isu lingkungan.
16	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM)	Mubalighat lingkungan, Advokasi
17	Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)	Mitigasi bencana
18	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) PP Aisyiyah	Mubalighat lingkungan; Penanaman pohon dengan pola asuh; Kelentingan keluarga; Shodaqoh sampah; Mangrove dan Gambut; Green School, Green Ramadan
19	Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Pusat	Ngaji Lingkungan
20	Bumi Langit Permaculture Institute	Bumi Langit Course
21	Interfaith Rainforest Initiative (IRI)	Konservasi hutan tropis
Tradisi Lokal (Local traditions)		
22	Masyarakat Adat Dayak Iban Rumah Betang Sungai Utik	Konservasi Sungai
23	Komunitas Save Ake Gaale	Seribu (1000) sumur resapan; Biopori; Peraturan Daerah tentang Sumur Resapan; dan Perda



		Pengelolaan Kualitas Air di Ternate
24	Komunitas Adat Ammatoa Kajang	Hutan adat
Organisasi Berbasis Agama (Faith Based Organization)		
25	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Penanaman hutan mangrove
26	Sanggar Hijau	Waste Management, Bank sampah
27	Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)	Ecological education
28	Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI)	Restorasi gambut
29	Yayasan Buddha Tzu Chi	Manajemen sampah dan limbah; gaya hidup vegetarian.
30	Caritas Indonesia	Ketahanan pangan
31	Klasis GMIT (Sefnat Sailana)	Hutan Gereja (Konservasi Air Resapan)
32	Pemerhati Peduli Lingkungan Hidup (Pepulih)	Manajemen sampah dan limbah

Keterangan: Data diolah berdasarkan hasil FGD dengan 50 organisasi lingkungan berbasis agama di Indonesia. Dari 50 organisasi tersebut tidak semuanya memiliki program atau praktik terpilih yang berkelanjutan karena sifatnya hanya momentum saja. Organisasi atau komunitas lingkungan yang termasuk dalam tabel di atas yakni organisasi atau komunitas yang memiliki program atau praktik terpilih yang hingga kini masih dilakukan atau berkelanjutan.

APENDIKS 3

192 Organisasi dan Komunitas Lingkungan Berbasis Agama

No	Organisasi/Komunitas Green Islam	Agama
1	Ada' Mappurondo	Adat
2	Adat Musi	Adat
3	AgriQuran	Islam
4	Aliansi Interfaith Rainforest Initiative (IRI)	Lintas Agama
5	AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Indonesia)	Adat
6	Budi Suci	Adat
7	Bumi Langit Permaculture Institute	Islam
8	Caritas Indonesia	Katolik
9	Catholic Relief Services Indonesia	Katolik
10	CDCC - Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations	Lintas Agama
11	Clean The City	Islam
12	Desa Adat Seminyak	Adat
13	Desa Margoyoso Kecamatan Salaman	Adat
14	Dewan Masjid Indonesia (DMI)	Islam
15	Dewan Pengurus Nasional Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (DPP PAKIN)	Islam
16	Eco Bhinneka Muhammadiyah (EBM)	Islam
17	EcoDeen	Islam
18	Eco-Islam	Islam
19	FNKSDA (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) Komite Makassar	Islam
20	FNKSDA (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) Komite Semarang	Islam
21	FNKSDA (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) Komite Surabaya	Islam



22	FNKSDA (Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam) Komite Yogyakarta	Islam
23	Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Cirebon	Islam
24	Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Jember	Islam
25	Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) Pusat	Islam
26	Golongan Siraja Batak	Protestan
27	Green Faith Indonesia	Lintas Agama
28	Greenpeace Indonesia (Ummah for Earth)	Islam
29	Hak Sejati	Kepercayaan
30	Humanitarian Forum Indonesia	Lintas Agama
31	Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAKA)	Islam
32	Jaringan Pemuda Kristen Hijau	Protestan
33	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Aceh	Islam
34	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Banyumas	Islam
35	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Jakarta	Islam
36	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Jember	Islam
37	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Kalimantan Barat	Islam
38	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Kalimantan Selatan	Islam
39	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Komite D.I. Yogyakarta	Islam
40	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Komite Daerah Kendari	Islam
41	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Komite Daerah Malang Raya	Islam
42	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Lampung	Islam

43	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Madura Raya	Islam
44	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) NTT	Islam
45	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Sumatera Selatan	Islam
46	Kader Hijau Muhammadiyah (KHM) Surabaya	Islam
47	Kakadhangsan Waringin Seto	Kepercayaan
48	Kasampurnan Ketuhanan Awal dan Akhir	Kepercayaan
49	Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan (KBTPK)	Kepercayaan
50	Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)	Kepercayaan
51	Klasis GMIT (wadah buat persekutuan gereja-gereja di NTT)	Protestan
52	Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) Keuskupan Denpasar	Katolik
53	Komunitas Adat Ammatoa Kajang	Adat
54	Komunitas Muslim Desa Sepinggan	Adat
55	Komunitas Save Ake Gaale	Adat
56	Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)	
57	Laskar Hijau	Islam
58	Lembaga Adat Mapur	Adat
59	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Aceh	Islam
60	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Depok	Islam
61	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Tengah	Islam
62	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jawa Timur	Islam
63	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Palangkaraya	Islam
64	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Pusat	Islam



65	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Riau	Islam
66	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sulawesi Selatan	Islam
67	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatera Utara	Islam
68	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Yogyakarta	Islam
69	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 'Aisyiyah Sumatera Utara	Islam
70	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah	Islam
71	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Bali	Islam
72	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Banten	Islam
73	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Bengkulu	Islam
74	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Islam
75	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Jakarta Selatan	Islam
76	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Jawa Barat	Islam
77	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Jawa Tengah	Islam
78	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Jawa Timur	Islam

79	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Kalimantan Barat	Islam
80	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Kalimantan Timur	Islam
81	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Lampung	Islam
82	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah NTB	Islam
83	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Riau	Islam
84	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Sulawesi Tengah	Islam
85	Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PP 'Aisyiyah Sumater Selatan	Islam
86	Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia (LPLHSDA MUI)	Islam
87	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) Mojokerto	Islam
88	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Banten	Islam
89	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Bengkulu Tengah	Islam
90	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Cabang Jombang	Islam
91	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-	Islam



	NU) PW. Nahdlatul Ulama Cabang Makassar	
92	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama DKI Jakarta	Islam
93	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Jawa Barat	Islam
94	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Jawa Tengah	Islam
95	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Jawa Timur	Islam
96	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang	Islam
97	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon	Islam
98	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Kabupaten Sampang	Islam
99	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat	Islam
100	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Ponorogo	Islam
101	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan	Islam

102	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Tuban	Islam
103	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) PW. Nahdlatul Ulama Yogyakarta	Islam
104	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) Sidoarjo	Islam
105	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) Sumenep	Islam
106	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) Sumenep	Islam
107	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) Tangerang Selatan	Islam
108	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI-NU) Kabupaten Malang	Islam
109	Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI NU)	Islam
110	Mahayana	Kepercayaan
111	Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI)	Kepercayaan
112	Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia (MUKKI)	Kepercayaan
113	Majlis Lingkungan Hidup Muhammadiyah (MLH) PP Muhammadiyah	Islam
114	Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Islam
115	Majlis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN)	Konghucu
116	Marapu	Adat



117	Masyarakat Adat Dayak Iban Rumah Betang Sungai Utik	Adat
118	MDMC Gorontalo	Islam
119	MDMC Papua Barat	Islam
120	MDMC PWM Aceh	Islam
121	MDMC PWM Bali	Islam
122	MDMC PWM Bangka Belitung	Islam
123	MDMC PWM Banten	Islam
124	MDMC PWM Bengkulu	Islam
125	MDMC PWM DIY	Islam
126	MDMC PWM DKI Jakarta	Islam
127	MDMC PWM Jambi	Islam
128	MDMC PWM Jawa Barat	Islam
129	MDMC PWM Jawa Tengah	Islam
130	MDMC PWM Jawa Timur	Islam
131	MDMC PWM Kalimantan Barat	Islam
132	MDMC PWM Kalimantan Selatan	Islam
133	MDMC PWM Kalimantan Tengah	Islam
134	MDMC PWM Kalimantan Timur	Islam
135	MDMC PWM Kalimantan Utara	Islam
136	MDMC PWM Kepulauan Riau	Islam
137	MDMC PWM Lampung	Islam
138	MDMC PWM Maluku	Islam
139	MDMC PWM Maluku Utara	Islam
140	MDMC PWM NTB	Islam
141	MDMC PWM NTT	Islam
142	MDMC PWM Papua	Islam
143	MDMC PWM Papua Barat Daya	Islam
144	MDMC PWM Riau	Islam
145	MDMC PWM Sulawesi Barat	Islam
146	MDMC PWM Sulawesi Selatan	Islam
147	MDMC PWM Sulawesi Tengah	Islam
148	MDMC PWM Sulawesi Tenggara	Islam
149	MDMC PWM Sumatera Barat	Islam

150	MDMC PWM Sumatera Selatan	Islam
151	MDMC PWM Sumatera Utara	Islam
152	MDMC Sulawesi Utara	Islam
153	MLH Kalimantan Timur	Islam
154	MLH PWM DIY	Islam
155	MLH PWM DKI Jakarta	Islam
156	MLH PWM Jawa Barat	Islam
157	MLH PWM Jawa Tengah	Islam
158	MLH PWM Jawa Timur	Islam
159	MLH PWM Kalimantan Selatan	Islam
160	MLH PWM Kalimantan Tengah	Islam
161	MLH PWM Lampung	Islam
162	MLH PWM Maluku Utara	Islam
163	MLH PWM Riau	Islam
164	MLH PWM Sulawesi Selatan	Islam
165	MLH PWM Sumatera Utara	Islam
166	Mosaic (Muslim for Shared Action on Climate Impact)	Islam
167	Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)	Islam
168	Organisasi Batin Suku Akit	Kepercayaan
169	Organisasi Sabuk Belo	Kepercayaan
170	Paguyuban Purnomo Sidi	Kepercayaan
171	Paguyuban Purnomo Sidi	Kepercayaan
172	Palang Putih Nusantara Kejawen Urip Sejati	Kepercayaan
173	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Hindu
174	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)	Hindu
175	Parisadha Hindu Dharma Kota Batu	Hindu
176	PARMALIM	Kepercayaan
177	Pemerhati Peduli Lingkungan Hidup (Pepulih)	Katolik
178	Perkumpulan Qbar	Islam
179	Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI)	Budha



180	Persaudaraan Muslimah (PD Salimah) Klaten	Islam
181	Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI)	Protestan
182	Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI)	Budha
183	Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional (PPI UNAS)	Islam
184	Rumah Pengetahuan Daulat Hijau (RPDH Jombang) (FNKSDA Jombang)	Islam
185	Salam Institute	Islam
186	Sanggar Hijau Indonesia	Islam
187	Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM)	Protestan
188	Sambernyawa	Kepercayaan
189	Yayasan Bhina Bakti Lingkungan	Budha
190	Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia	Budha
191	Yayasan Hadji Kalla	Islam
192	Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII)	Islam

APENDIKS 4

Daftar Peserta Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

- Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Jakarta

Ahmad Syatori, Salam Institute, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Ahsan J. Hamidi, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Aldi D. Satya, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Anggun Astri Sanjaya, Dewan Pengurus Nasional Pemuda Agama Khonghucu Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Antonius Eko Sugiyanto, Caritas Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Astono C. Dana, Parisada Hindu Dharma Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Beny S. Jafar, Lembaga Penanggulangan Bencana dan perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Budi Setiawan, Muhammadiyah Disaster management Center, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Djihadul Mubarak, MLH PP Muhammadiyah, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Edi Rianto, Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Riau, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Endang R. Lastani, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Ganny Setiawan, Clean The City, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Hayu S. Prabowo, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Jimmy M. I. Sormin, Interfaith Rainforest Initiative, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Maftuchah Nugrahaini, Greenpeace Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Maria Ratnaningsih, Konferensi Waligereja Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Maria S.A. Wardhanie, Pemerhati Peduli Lingkungan Hidup, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.



Marolop M. Gorga, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Muhammad N. Zubaidi, Dewan Masjid Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Muhammad Zulham, Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Munira Rezkina, Hutan Alam dan Lingkungan Aceh, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Nita Roshita, Green Faith Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Rafian T. Periadi, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Rissa Ozalifia, EcoDeen, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Shuresj Tomaluweng, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Suherman Widjaja, Persatuan Umat Buddha Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Surria Dwiwahyu, Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Pusat Aisyiyah, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

Surya R. Muhammad, Humanitarian Forum Indonesia, FGD, Jakarta, 20-22 Februari, 2024.

- Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Surabaya

Agus Yudianto, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Alwan M. Arif, Komunitas Save Ake Gaale, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Andreas Kristianto, Jaringan Pemuda Kristen Hijau, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Arnold Panahal, Adat Musi, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Atus Syahbuddin, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Yogyakarta, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Ayu Rikza, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Pusat, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

David Efendi, Kader Hijau Muhammadiyah Yogyakarta, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Fahmi Ahmad Fauzan, Kader Hijau Muhammadiyah Kota Malang, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Farras Muhadzdzib, AgriQuran, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Gatot Supangkat, Muslim for Shared Action on Climate Impact, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

I Nyoman Kenak, Parisada Hindu Dharma Indonesia Bali, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Iskandar Waworuntu, Bumi Langit Permaculture Institute, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Jhon Victor Kainama, Sinode Gereja Protestan Maluku, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Nafisatul Khoidah, Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam Yogyakarta, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Nurul Chasanah, Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Ramlah, Komunitas Adat Ammatoa Kajang, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Raymundus Remang, Masyarakat Adat Dayak Iban Rumah Betang Sungai Utik, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Sapril, Yayasan Hadji Kalla, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Sefnat Sailana, Klasis Gereja Masehi Injili di Timor, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

Shanti W. Ramadhani, Sanggar Hijau Indonesia, FGD, Surabaya, 06-08 Maret, 2024.

APENDIKS 4

- Daftar Informan Wawancara

Abdul Wahid, Kepala Balai Komunitas Swabina Pedesaan Salassae, 25 April, Wawancara, Bulukumba, 2024.

Abidin Wakur, Pendiri Komunitas Tobonga, Wawancara, Sinjai, Wawancara, 26 April, 2024.

Agus Yudianto, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur, Wawancara (Zoom), 19 Maret, 2024.

Alwan Arif, Save Ake Gaale, Wawancara (Zoom), 2 April, 2024.

Ammatoa, Kepala Adat Ammatoa Kajang, Wawancara, Bulukumba, 24 April, 2024.

Asih Ratesih, ketua LLHPB PDA Kota Yogyakarta, Wawancara, Yogyakarta, 25 April, 2024.

Aulia Taarufi, Anggota MDMC, Wawancara, Yogyakarta, 26 April, 2024.



Barori Budi Aji, Wakil Sekretaris MDMC, Wawancara, Yogyakarta, 26 April, 2024.

Bukhari, Mahkamah Syar'iyah Aceh Banda Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 26 April, 2024.

Damai, Ketua Sedhere Eco Bhinneka Surakarta, Wawancara, Surakarta, 27 April, 2024.

Dede Haris Sumarno, Bendahara MDMC, Wawancara, Yogyakarta, 26 April, 2024.

Diana, Pengurus PKK, Wawancara, Surakarta, 27 April, 2024.

Din Syamsuddin, Ketua PP Muhammadiyah 2005-2015, Wawancara, Jakarta, 27 Maret, 2024.

Distro Alfa, Biro Hukum Pemerintah Aceh, Banda Aceh, 26 April, 2024.

Endang Retno Lastani, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), Wawancara, Jakarta, 13 Februari, 2024.

Fahmi Ahmad Fauzan, Kader Hijau Muhammadiyah Kota Malang, Wawancara (Zoom), 5 April, 2024.

Galla Puto, Juru Bicara Ammatoa/Kepala Adat, Wawancara, Bulukumba, 24 April, 2024.

Hanifah, Koordinator Eco Bhinneka Surakarta, Wawancara, Surakarta, 27 April, 2024.

Haris, Kesekretariatan MPU Aceh, Wawancara, Aceh Besar, 25 April, 2024.

Hening Parlan, Pendiri Green Faith Indonesia dan Koordinator Bidang Lingkungan Hidup LLHPP Aisyiah, Wawancara, Jakarta, 25 Maret, 2024.

Indra Bahari, Aktivis PB HMI Bidang Lingkungan Hidup, Wawancara, Cirebon, 23 April, 2024.

Jaja Ramlah, Anak Ketua Adat Ammatoa Kajang dan Pengurus Harian Komunitas Adat Kajang Aman, Wawancara, Bulukumba, 22 April, 2024.

Jumarlin Muslim, Penduduk Desa Tana Toa dan Polisi Kehutanan Daerah Kajang, Wawancara, Bulukumba, 24 April, 2024.

Latifah, Ketua Yayasan Salam Institute, Wawancara, Cirebon, 22 April, 2024.

Listiati Budi Utami, ketua divisi LH LLHPB PWA DIY, Wawancara, Yogyakarta, 25 April, 2024.

Lulu, Pengurus Bank Sampah, Wawancara, Surakarta, 27 April, 2024.

M. Farras Muhadzdzib, AgriQuran, Wawancara (Zoom), 2 April, 2024.

Mahfutchah Nugrahaini, Ummah For Earth, Wawancara (Zoom), 5 Maret, 2024.

Marwan, Yayasan Buddha Tzu Chi, Wawancara, Jakarta, 12 Februari, 2024.

Masyita Alzeyra, Teungku Inong Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 26 April, 2024.

Muhammad Alimuddin Usman, Direktur Pesantren Babussalam Arrahmah Gowa, Wawancara, Gowa, 26 April, 2024.

Muhammad Arman, Pengurus Besar AMAN, Wawancara, Bulukumba, 23 April, 2024.

Muhammad Jumadi, Program Officer, Humanity & Environment Care, Yayasan Hadji Kalla, Wawancara, Bulukumba, 25 April, 2024.

Muhammad Jumadi, Program Officer, Humanity & Environment Care, Yayasan Hadji Kalla, Wawancara, Sinjai Barat, 26 April, 2024.

Muhammad Nur, Kepala Komunitas Swabina Pedesaan Salassae, 25 April, Wawancara, Bulukumba, 2024.

Munira Rezkina, Legal officer Yayasan HAKA, Wawancara, Banda Aceh, 24 April, 2024.

Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Wawancara, Jakarta, 11 April, 2024.

Nita Roshita, Green Faith Indonesia, Wawancara (Zoom), 27 Maret, 2024.

Nurhaedah, Ketua Perempuan AMAN Pengurus Harian Komunitas Adat Kajang, Wawancara, Bulukumba, 23 April, 2024.

Nurul Chasanah, Yayasan Bina Bhakti Lingkungan, Wawancara (Zoom), 26 Maret, 2024.

Nurwibawa, FKUB Solo Budha, Komunitas Sedhere Eco Bhinneka Surakarta, Wawancara, Surakarta, 27 April, 2024.

Pinasti Utami, anggota Divisi LLHPB PWA Aisyiyah Yogyakarta, Wawancara, Yogyakarta, 25 April, 2024.

Rahimun, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Wawancara, Banda Aceh, 25 April, 2024.

Raja, Legal officer Yayasan HAKA, Wawancara, Banda Aceh, 24 April, 2024.

Ridwan, Kader Pesantren Ekologi Salam Institute, Wawancara, Cirebon, 23 April, 2024.

Rosmawardini, Mantan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Wawancara, Banda Aceh 27 April, 2024.

Salmawati Mattang, Perempuan Adat Kajang, Wawancara, Bulukumba, 23 April, 2024.

Sapril Akhmady, Program Manager, Humanity & Environment Care, Yayasan Hadji Kalla, Wawancara, Bulukumba, 25 April, 2024.

Suria Dwiwahyu, Ketua DPW Aisyiyah Yogyakarta, Wawancara, Yogyakarta, 25 April, 2024.

Tendri Itti, Perempuan Adat Kajang dan Pengurus Wilayah AMAN Sulawesi Selatan, Wawancara, Bulukumba, 23 April, 2024.

Tining Sundari, Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal Komplek Masjid Perak, Wawancara, Yogyakarta, 25 April, 2024.

TK Aisyiyah Bustanul Athfal Komplek Masjid Perak, Wawancara, Yogyakarta, 25 April, 2024.

Twediana Budi Hapsari, Ketua Bidang Jaringan dan Kerja Sama MDMC, Wawancara, Yogyakarta, 26 April, 2024.

Uswatun Hasanah, Koordinator Eco Bhinneka Surakarta, Wawancara, Surakarta, 27 April, 2024.

Zulkarnain, Kepala Desa Tanah Towa, Wawancara, Bulukumba, 23 April, 2024



Catatan Akhir

¹Buku ini menggunakan definisi dan konsep lingkungan dalam pengertian yang longgar. Konsep lingkungan yang dimaksud berbasis pada definisi yang digunakan oleh the United Nations Environment Programme (UNEP) dan European Environment Agency (EEA). Menurut UNEP, isu lingkungan dapat mengakomodasi beberapa topik, antara lain penipisan lapisan ozon (*ozone layer depletion*), pemanasan global (*global warming*), *acid rain*, biodiversitas hutan, kelautan dan pantai, hingga ketersediaan air (*fresh water*) (UN Environment Programme n.d.).

Serupa dengan UNEP, EEA memiliki setidaknya lima topik utama. Pertama, alam (*nature*) yang mengakomodasi isu kehutanan, pegunungan, dataran luas, sungai panjang, kelautan, dan danau. Kedua, kesehatan (*health*) yang mengakomodasi isu kualitas udara, air, dan tanah serta polusi udara. Ketiga, iklim (*climate*) yang berfokus pada isu mengenai temperatur global. Keempat, ekonomi dan sumber daya alam (*economy and resources*) yang mengakomodasi isu pertanian, energi dan transportasi, perubahan iklim, ekonomi sirkular, netral karbon, sampah, dan nol polusi. Kelima, keberlanjutan (*sustainability*) yang berfokus pada transisi sistem produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan (European Environment Agency n.d.).

²Perubahan iklim mengacu pada fenomena perubahan jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya pola suhu rata-rata regional dan global, atau dikenal sebagai pemanasan global (*global warming*). Dampak luas dari aktivitas manusia sejak Revolusi Industri pada pertengahan tahun 1800-an ditandai sebagai penyebab dari tren perubahan iklim (United Nations 2023; NASA 2021). The Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) turut mengonfirmasi bahwa separuh dari peningkatan suhu permukaan rata-rata global, yang diamati sejak pertengahan abad ke-20,



disebabkan oleh pengaruh aktivitas manusia yang bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas (IPCC 2014). Penggunaan energi tersebut kemudian berpengaruh pada peningkatan konsentrasi gas rumah kaca antropogenik, yang mana lebih dari 75 persen emisi gas rumah kaca dunia dan hampir 90 persen dari seluruh emisi karbondioksida merupakan kontributor terbesar terhadap perubahan iklim (United Nations n.d.).

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) telah melaporkan bahwa tahun 2015-2022 telah tercatat sebagai tahun terpanas dalam sejarah perubahan iklim, di mana suhu rata-rata global meningkat sebesar 1,5°C (WMO 2023; (IPCC n.d.). Suhu yang lebih hangat ini secara bertahap mengakibatkan perubahan pola cuaca dan terganggunya keseimbangan alam. Kondisi itu dapat menimbulkan risiko berbahaya bagi manusia, ekonomi, dan ekosistem lain di bumi. Fenomena yang kerap terjadi belakangan ini mencerminkan risiko-risiko tersebut, seperti tekanan panas, curah hujan ekstrim, polusi udara, kekeringan, kelangkaan air, kenaikan permukaan laut, badai, banjir di darat dan pesisir, serta tanah longsor. Peristiwa ini dikenal sebagai bencana ekologis yang membahayakan kesehatan manusia dan mengganggu produktivitas pertanian serta produksi pangan (Pachauri, Mayer, and Intergovernmental Panel on Climate Change 2015).

³Termasuk Eco-Congregation Scotland, suatu jejaring non-denominasi gereja-gereja di Skotlandia yang mengambil isu-isu lingkungan sebagai fokus gerakan. Termasuk juga tiga organisasi besar Kristen di Inggris; UK-Wide Christian Organisations Operation Noah, Christian Aid dan A Rocha.

⁴Di Amerika, pemingkaian teologis dan budaya keagamaan di kalangan gerakan lingkungan berbasis keagamaan yang cenderung liberal, dapat mendorong pembentukan ikatan antar organisasi karena kebanyakan dari kelompok ini memiliki prinsip-prinsip teologis yang luas dan telah akrab dengan proses bekerja dengan anggota tradisi lain. Kelompok ini membentuk pemingkaian bahwa terdapat banyak klaim kebenaran dalam agama. Kelompok Green Faith, Religious Witness for Earth, Unitarian Universality Ministry for Earth dan Interreligious Eco-Justice Network dikategorikan dalam kecenderungan ini (Ellingson, Woodley, and Paik 2012).

⁵Misalnya, di Amerika Serikat, Evangelical Environmental Network (EEN) mengalami kesulitan berkolaborasi dengan kelompok lain, seperti National Council of Churches (NCC), karena perbedaan pandangan teologis (NCC menyangkal bahwa Yesus dilahirkan dari seorang perawan, menyangkal bahwa Yesus dibangkitkan secara jasmani, namun masih mengklaim nama Christian). Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan Evangelis, sehingga mereka merasa sulit untuk membangun kerja sama kolektif bersama mereka. Karenanya, kaum Evangelis membentuk pembingkaiannya hanya dalam batas-batas teologisnya, dan cenderung akan membentuk aksi kolektif dengan organisasi yang sesuai dengan batas-batas tersebut. Demikian pula, gerakan lingkungan agama yang konservatif, seperti dalam Protestanisme atau Katolik konservatif di Amerika, menghadapi risiko signifikan dalam berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan teologis, di mana hal tersebut dianggap dapat menimbulkan risiko kehilangan dukungan di antara konstituen inti mereka (Ellingson, Woodley, and Paik 2012).

⁶Sebelum menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

⁷Lembaga yang telah dibubarkan pada tahun 2015 ini, merupakan dewan nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian perubahan iklim.

⁸Lihat Suharko 1998; van der Heijden, Koopmans, and Giugni 1992, mengenai tiga tipologi (*conservationist, policy campaigners, dan mobilizers*) dalam gerakan organisasi atau komunitas lingkungan.

⁹*Website* bagi pengelola program ekopesantren untuk mengukur proses perubahan untuk mewujudkan pesantren yang hijau.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Abdul-Matin, Ibrahim. 2010. *Green Deen: What Islam Teaches about Protecting the Planet*. Berrett-Koehler Publishers.
- Abumoghli, Iyad. 2023. "The Role of Religions, Values, Ethics, and Spiritual Responsibility in Environmental Governance and Achieving the Sustainable Development Agenda." *Religion and Development* 2(3): 485–95. doi:10.30965/27507955-20230008.
- Afiff, Suraya Abdulwahab, and Noer Fauzi Rachman. 2019. "Institutional Activism: Seeking Customary Forest Rights Recognition from Within the Indonesian State." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20(5): 453–70. doi:10.1080/14442213.2019.1670245.
- Aditjondro, George Junus. 1996. "Dampak Politik Pembangunan PLTN Muria". In *Pembangunan PLTN: Demi Kemajuan Peradaban?*, eds Iwan Kurniawan. Yayasan Obor Indonesia.
- Afrasiabi, Kaveh L. 2003. "Toward an Islamic ecotheology." *Islam and Ecology: A Bestowed Trust*. Harvard: the President and Fellows of Harvard College.
- Ali-Fauzi, Ihsan. 2012. "Sintesis Saling Menguntungkan: Hilangnya "Orang Luar" dan "Orang Dalam"". In *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, eds. Quintan Wiktorowicz. Penerbit Gading Publishing dan Paramadina, 8-26.

- Ali, Saleem H. 2016. "Reconciling Islamic Ethics, Fossil Fuel Dependence, and Climate Change in the Middle East." *Review of Middle East Studies*, 50(2): 172–178. <https://doi.org/10.1017/rms.2016.135>
- Almeida, Paul, and Chris Chase-Dunn. 2018. "Globalization and Social Movements." *Annual Review of Sociology* 44(1): 189–211. doi:10.1146/annurev-soc-073117-041307.
- Alybina, Tatiana. 2014. "Vernacular Beliefs and Official Traditional Religion: The Position and Meaning of Mari Worldview in the Current Context." *Approaching Religion* 4(1): 89–100.
- Amri, Ulil. 2012. "Konservasi Berbasis Komunitas Religi: Membedah Peran Ormas Keagamaan Dalam Upaya Melestarikan Sumber Daya Alam di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 38(1): 149239. doi:10.14203/jmi.v38i1.294.
- , Ulil. 2013. "From Theology to a Praxis of 'Eco-Jihad': The Role of Religious Civil Society Organizations in Combating Climate Change in Indonesia." In *How the World's Religions Are Responding to Climate Change*, Routledge.
- Arnez, Monika. 2014. "Shifting Notions of Nature and Environmentalism in Indonesian Islam." In *Environmental and Climate Change in South and Southeast Asia*, Brill, 75–102. doi:10.1163/9789004273221_005.
- Asworo, Listiana, and Nuruddin Akbar. 2020. "Beyond Mainstream Environmental Studies Track the Struggle of Environmental Issues from a Religious Perspective (Study of FNKSDA as a Form of Islamic Movement Concerning the Environment)." In *Proceedings of the 1st International Conference on Environmental Governance, ICONEG 2019, 25-26 October 2019, Makassar, South Sulawesi, Indonesia*, Makassar, Indonesia: EAI. doi:10.4108/eai.25-10-2019.2300495.
- Azra, Azyumardi. 2020. *Fenomena Beragama: Dari Dunia Arab Hingga Asia Pasifik*. Kencana.
- Bagir, Zainal Abidin, and Najiyah Martiam. 2016. "Islam: Norms and Practices." In *Routledge Handbook of Religion and Ecology*, Routledge.

- Baker, Chris, and Hannah Skinner. 2006. "The Dynamic Connection between Spiritual and Religious Capital." *William Temple Foundation*.
- Bastian, Mathieu, Sebastien Heymann, and Mathieu Jacomy. 2009. "Gephi: An Open Source Software for Exploring and Manipulating Networks." *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media* 3(1): 361–62. doi:10.1609/icwsm.v3i1.13937.
- Bauhardt, Christine, and Wendy Harcourt, eds. 2018. *Feminist Political Ecology and The Economics of Care*. London: Routledge.
- Benford, Robert D. 1997. An insider's critique of the social movement framing perspective. *Sociological inquiry* 67(4): 409-430.
- _____, Robert D., and David A. Snow. 2000. Framing processes and social movements: An overview and assessment. *Annual review of sociology* 26(1): 611-639.
- Beyer, Peter. 2011. "Who Shall speak for the environment?" pada C. Deane-Drummond dan H. Bedford-Strohm (ed.). *Religion and Ecology in the Public Sphere*. London: Bloomsbury.
- Billahi, Savran, Idris Thaha. 2018. *Bangkitnya Kelas Menengah Santri*. Jakarta: Prenada Kencana.
- Blondel, Vincent D., Jean-Loup Guillaume, Renaud Lambiotte, and Etienne Lefebvre. 2008. "Fast Unfolding of Communities in Large Networks." *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment* 2008(10): P10008. doi:10.1088/1742-5468/2008/10/P10008.
- Bomberg, Elizabeth, and Alice Hague. 2018. "Faith-Based Climate Action in Christian Congregations: Mobilisation and Spiritual Resources." *Local Environment* 23(5): 582–96. doi:https://doi.org/10.1080/13549839.2018.1449822.
- _____, Elizabeth, and Nicola McEwen. 2012. "Mobilizing Community Energy." *Energy Policy* 51: 435–44. doi:10.1016/j.enpol.2012.08.045.
- Bowman, Marion, and Ülo Valk. 2012. *Vernacular Religion in Everyday Life: Expressions of Belief*. eds. Marion Bowman and Ülo Valk. New

York & London: Routledge.
<https://www.taylorfrancis.com/books/e/9781315728643>
(January 22, 2024).

- Boyatzis, Richard E. 1998. *Transforming Qualitative Information: Thematic Analysis and Code Development*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Brockopp, Jonathan. 2012. "Introduction to Special Issue: Islam and Ecology: Theology, Law and Practice of Muslim Environmentalism." *Worldviews* 16(3): 213–17.
- Burke, Peter. 1986. Strengths and Weaknesses of the History of Mentalities. *History of European ideas* 7(5), 439-451.
- Campbell, John L. 2005. "Where Do We Stand? Common Mechanisms In Organizations And Social Movements Research." In *Social Movements and Organization Theory*, Cambridge Studies in Contentious Politics, eds. Doug McAdam, Gerald F. Davis, Mayer N. Zald, and W. Richard Scott. Cambridge: Cambridge University Press, 41–68. doi:10.1017/CBO9780511791000.004.
- Canel, Eduardo. 1997. "New Social Movement Theory and Resource Mobilization Theory: The Need for Integration." In *Community Power and Grassroots Democracy: The Transformation of Social Life*, eds. Haroldo Kaufman and Haroldo Dilla Alfonso. London: Zed Books, 189–221.
- Cizakca, M. 2014. "The Waqf, Its Basic Operational Structure, Development and Contribution". WIEF-UiTM Occasional Papers, h. 15.
- Clark, Janine A., 2012. "Perempuan Islamis di Yaman: Titik-titik Pertemuan Aktivisme Informal". In *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, eds. Quintan Wiktorowicz. Penerbit Gading Publishing dan Paramadina, 307-344.
- Coleman, Simon, and Peter Jeffrey Collins. 2017. *Religion, Identity and Change: Perspectives on Global Transformations*. Routledge.
- Colombijn, Freek. 1998. "Global and Local Perspectives on Indonesia's Environmental Problems and the Role of NGO's." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social*



- Sciences of Southeast Asia and Oceania* 154.
doi:10.1163/22134379-90003900.
- Cribb, R. 1997. "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis." *Science*, 155 (3767): 1203–1207.
- Della Porta, Donatella, and Mario Diani. 2006. *Social Movement: An Introduction*. 2nd ed. Australia: Blackwell Publishing.
- Dewayanti, Aninda, and Norshahril Saat. 2020. "Islamic Organizations and Environmentalism in Indonesia." *ISEAS Yusof Ishak Institute*, 1–7.
- Diani, Mario. 2003. "Introduction: Social Movements, Contentious Actions, and Social Networks: 'From Metaphor to Substance'?" In *Social Movements and Networks: Relational Approaches to Collective Action*, eds. Mario Diani and Doug McAdam. Oxford University Press, 0. doi:10.1093/0199251789.003.0001.
- Dien, Mawil I. 1997. "Islam and the Environment: Theory and Practice." *Journal of Beliefs & Values*, 18(1): 47–57.
<https://doi.org/10.1080/1361767970180106>.
- _____, Mawil I. 2000. *The Environmental Dimensions of Islam*. Redwood Books.
- _____, Mawil I. 2013. "Islam and the Environment: Towards an 'Islamic' Ecumenical View." *QURANICA-International Journal of Quranic Research* 5(2): 33-52.
- Durkheim, Emile. 1995. *The Elementary Forms of Religious Life*. Free Press.
- Edwards, Bob, and Melinda Kane. 2014. "Resource Mobilization and Social and Political Movements." In *Handbook of Political Citizenship and Social Movements*, Edward Elgar Publishing, 205–32.
<https://www.elgaronline.com/display/edcoll/9781781954690/9781781954690.00018.xml> (January 22, 2024).
- Ellingson, Stephen, Vernon A. Woodley, and Anthony Paik. 2012. "The Structure of Religious Environmentalism: Movement

- Organizations, Interorganizational Networks, and Collective Action." *Journal for the Scientific Study of Religion* 51(2): 266–85.
- Evans, John H. 1997. "Multi-Organizational Fields and Social Movement Organization Frame Content: The Religious Fro-Choice Movement." *Sociological Inquiry* 67(4): 451–69. doi:10.1111/j.1475-682X.1997.tb00447.x.
- Fikri, Ibnu, and Freek Colombijn. 2021. "Is Green Islam Going to Support Environmentalism in Indonesia?" *Anthropology Today* 37(2): 15–18. doi:10.1111/1467-8322.12642.
- Foltz, Richard C. 2003. "Islamic Environmentalism: A Matter of Interpretation." *Islam and Ecology*. Cambridge: Harvard University Press.
- Foster, Ian, Rayid Ghani, Ron S. Jarmin, Frauke Kreuter, and Julia Lane. 2020. *Big Data and Social Science: Data Science Methods and Tools for Research and Practice*. CRC Press.
- Fransiskus, Paus. 2005. *Laudato Si' Terpujilah Engkau*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Frömming, Ursula U., and Martin Reichel. 2012. "Environmental Degradation in Indonesia: The Role of Religious Movements." *Environmental Crisis and Human Costs: Case Studies from Indonesia*, eds. Thomas Reuter, 75–102. Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-10-7364-2_5.
- Gade, Anna M. 2012. "Tradition and Sentiment in Indonesian Environmental Islam." *Worldviews* 16(3): 263–85.
- _____, Anna M. 2015. "Islamic Law and the Environment in Indonesia: Fatwa and Da'wa." *Worldviews* 19(2): 161–83.
- _____, Anna M. 2019. *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations*. Columbia University Press.
- Gamson, William A. 1992. *Talking Politics*. Cambridge University Press.
- Gardner, Gary. 2013. "Engaging Religious to Shape World Views." In *State of the World 2010: Transforming Cultures from Consumerism to Sustainability*, ed. The Worldwatch Institute. Routledge, 23–29.

- Gelling, Peter. 2009. "Indonesia: The Home of 'Green Islam.'" *The World*. <https://theworld.org/stories/2009-11-16/indonesia-home-green-islam> (January 22, 2024).
- Gerring, John. 2004. "What Is a Case Study and What Is It Good For?" *American Political Science Review* 98(2): 341–54. doi:10.1017/S0003055404001182.
- Gill, Michael J., David James Gill, and Thomas J. Roulet. 2018. "Constructing Trustworthy Historical Narratives: Criteria, Principles and Techniques." *British Journal of Management* 29(1): 191–205. doi:10.1111/1467-8551.12262.
- Gonçalves Brito, Luz. 2020. "Spirituality and Ecology within the Phenomenological Realm of Secularity." *Revista del CESLA: International Latin American Studies Review* 26: 307–26.
- Gulati, Ranjay, and Martin Gargiulo. 1999. "Where Do Interorganizational Networks Come From?" *American Journal of Sociology* 104(5): 1439–93. doi:10.1086/210179.
- Hancock, Rosemary. 2017. *Islamic Environmentalism: Activism in the United States and Great Britain*. London: Routledge. doi:10.4324/9781315543062.
- Harman, Jay R., John A. Harrington, Jr. and Randall S. Cerveney Science. 1998. "Policy, and Ethics: Balancing Scientific and Ethical Values in Environmental Science" pada *Annals of the Association of American Geographers*, Vol. 88, No. 2, h. 277-286
- Heryati. 2015. "Konsep Islam Dalam Pasang Ri Kajang Sebagai Suatu Kearifan Lokal Tradisional Dalam Sistem Bermukim Pada Komunitas Ammatoa Kajang" *Prosiding* 10(206).
- Hutson, Smith. 2000. *Why Religion Matters: The Fate of the Human Spirit in an Age of Disbelief*. New York: Harper & Row.
- Hunt, Scott and Robert Benford. 2004. "Collective Identity, Solidarity, and Commitment." In *The Blackwell Companion to Social Movements*, eds. David Snow, Sarah Soule and Hanspeter Kriesi. Oxford, UK: Blackwell, 433-460.

- Iannaccone, Laurence R. 1990. "Religious Practice: A Human Capital Approach." *Journal for the Scientific Study of Religion* 29(3): 297–314. doi:10.2307/1386460.
- Ichwan, Moch Nur. 2012. "Eko-teologi Bencana, Aktivisme Sosial dan Politik Kemaslahatan." In Yogyakarta: Mizan Pustaka, 19–32. doi:10/2/surat-surat-pernyataan1681956845.pdf.
- Halimatusa'diyah, Iim, Endi Auliya Garadian, Ronald Adam, Afrimadona, Aptiani Nur Jannah, Khalid Walid Djamaludin, dan Grace Rachmanda. 2024. *Dilema Environmentalism: Seberapa 'Hijau' Masyarakat Indonesia?* PPIM UIN Jakarta. <https://ppim.uinjkt.ac.id/download/dilema-environmentalisme-seberapa-hijau-masyarakat-indonesia/> (December 2, 2024).
- Imran, Muhammad, Siti Norasyikin binti Abdul Hamid, Azelin binti Aziz. 2017 "Religiosity and Organizational Commitment: A Conceptual Framework" in *International Journal of Management, Accounting and Economics* 4(9), 953-961.
- Jamil, Sofiah. 2022. "Halal Wastewater Recycling: Environmental Solution or Religious Complication?" In *Religious Environmental Activism*, Routledge.
- Jenkins, Willis, and Christopher Key Chapple. 2011. "Religion and Environment." *Annual Review of Environment and Resources* 36(1): 441–63. doi:10.1146/annurev-environ-042610-103728.
- _____, Willis. 2008. *Ecologies of Grace: Environmental Ethics and Christian Theology*. New York: Oxford University Press.
- Jonas, H. 1985. *The Imperative of Responsibility: In Search of An Ethics for The Technological Age*. Chicago: The University of Chicago Press.
- _____, Hans. 1979. *The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology*. Connecticut: Greenwood Press.
- Katz, E. 2003. "Yudaisme dan Krisis Ekologi" in Tucker, Mary Evelyn dan A. Grim, John. *Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- Khalid, Fazlun (ed.). 1992. *Islam and Ecology*. New York: Cassell.



- _____, Fazlun. 2002. "Islam and the Environment." In P. Timmerman (Ed.), *Encyclopedia of Global Environmental Change*: v. 5. Social and Economic Dimensions of Global Environmental Change (332–339).
- _____, Fazlun. 2010. "Islam and the Environment—Ethics and Practice an Assessment." *Religion Compass*, 4(11), 707–716. <https://doi.org/10.1111/j.1749-8171.2010.00249.x>.
- King, Stephen M. 2007. "Religion, Spirituality, and the Workplace: Challenges for Public Administration." *Public Administration Review*, 67(1): 103-114.
- Koehrsen, Jens. 2021. "Muslims and Climate Change: How Islam, Muslim Organizations, and Religious Leaders Influence Climate Change Perceptions and Mitigation Activities." *Wires Climate Change*. <https://doi.org/10.1002/wcc.702>.
- _____, Jens, Julia Blanc, Fabian Huber. 2022. *Religious Environmental Activism Emerging Conflicts and Tensions in Earth Stewardship*. London: Routledge.
- Kronlid, David O., and Johan Öhman. 2013. "An Environmental Ethical Conceptual Framework for Research on Sustainability and Environmental Education." *Environmental Education Research* 19(1): 21–44. doi:10.1080/13504622.2012.687043.
- Leksono, B. 2016. "Silvikultur Intensif untuk Pembangunan Hutan Tanaman Energi: Prospek dan Teknik Silvikultur Nyamplung. Calophyllum Inophyllum. *Makalah pembicara kunci pada Prosiding Seminar nasional Silvikultur ke IV dan Kongres Masyarakat Silvikultur Indonesia*, 1–15.
- LeVasseur, Todd, and Anna Peterson, eds. 2016. *Religion and ecological crisis: the "Lynn White thesis" at fifty*. Routledge.
- Ma'aarij, Zhohirussalam Al. 2020. "Kesempatan Politik (Political Opportunities) Gerakan Lingkungan Di Indonesia (Studi Kasus: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)." Bachelor Thesis. FISIP UIN Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57070> (January 22, 2024).

- Ma'afi, Mahbub and Alhafiz Kurniawan 2017. *Hasil-hasil Munas Alum Ulama Konbes NU 2017*. Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (MTT). 2016. *Coping with Disaster Principle Guidance from An Islamic Perspective*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (MTT). 2016. *The Islamic View of Water Use and Conservation*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah.
- Mangunjaya, Fachruddin M., and Gugah Praharawati. 2019. "Fatwas on Boosting Environmental Conservation in Indonesia." *Religions* 10(10): 570. doi:10.3390/rel10100570.
- _____, Fachruddin M., and Jeanne Elizabeth McKay. 2012. "Reviving an Islamic Approach for Environmental Conservation in Indonesia." *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 16(3): 286–305. doi:10.1163/15685357-01603006.
- _____, Fachruddin M., Imran S. L. Tobing, Andang Binawan, Evangeline Pua, and Made Nurbawa. 2015. "Faiths from the Archipelago: Action on the Environment and Climate Change." *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 19(2): 103–22. doi:10.1163/15685357-01902003.
- _____, Fachruddin M., dan Husna Ahmad. 2013. *Haji Ramah Lingkungan Bagaimana Peserta Haji dan Umrah dapat Berkontribusi Melestarikan Lingkungan?* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor dan Universitas Nasional Press.
- _____, Fachruddin. 2022. *Generasi Terakhir*. Jakarta: LP3ES.
- Mardhiah, Izzatul, Rihlah Nur Aulia, and Sari Narulita. 2014. "Konsep Gerakan Ekoteologi Islam Studi Atas Ormas NU Dan Muhammadiyah." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 10(1): 83–99.
- Mawardi, Muhjidin, and Gatot Supangkat Samdijo. 2021. *Teologi Lingkungan Etika Pengelolaan Lingkungan Perspektif Islam*. Yogyakarta: UMY Press.
- _____, Muhjidin. 2014. "Air dan Masa Depan Kehidupan." *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, 12(1): 131-142.



- McAdam, Doug, and Snow, D.A. (eds). 1997. *Social Movement: Readings on Their Emergence, Mobilization and Dynamics*. Los Angeles: Roxbury Publishing Company.
- _____, Doug, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald. 1996. "Introduction: Opportunities, Mobilizing Structures, and Framing Processes – toward a Synthetic, Comparative Perspective on Social Movements." In *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, Cambridge Studies in Comparative Politics, eds. Doug McAdam, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald. Cambridge: Cambridge University Press, 1–20. doi:10.1017/CBO9780511803987.002.
- McCarty, John D., dan Mayer N. Zald. 1977. "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory." *American Journal of Sociology* 82:1212-1241.
- McDaniel, Jay B. With Roots, dan Wings. 1995. *Christianity in an Age of Ecology and Dialogue*. New York: Orbis.
- _____, Jay B. 2003. "Taman Eden, Dosa Asal dan Hidup dalam Kristus; Pendekatan Kristen terhadap Ekologi" in Tucker, Mary Evelyn dan A. Grim, John. *Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Kanisius.
- McKay, Jeanne E., Fachruddin M. Mangunjaya, Yoan Dinata, Stuart R. Harrop, and Fazlun Khalid. 2014. "Practise What You Preach: A Faith-Based Approach to Conservation in Indonesia." *Oryx* 48(1): 23–29. doi:10.1017/S0030605313001087.
- Melucci, Alberto. 1995. "The Process of Collective Identity." In *Social Movements and Culture*, eds. Hank Johnston and Bert Klandermans. Minneapolis: University of Minnesota Press, 41–63.
- Messias, Teresa. 2024. "From Ecotheology to Ecospirituality in Laudato si." *Religions* 15, 68. <https://doi.org/10.3390/rel15010068>.
- Meyer, David, and Catherine Corrigan-Brown. 2006. "Coalitions and Political Context: U.S. Movements Against Wars in Iraq." *Mobilization: An International Quarterly* 10(3): 327–44. doi:10.17813/mai.10.3.f8u6t4u2708kw442.

- Millah, Ahmad Shihabul. 2023. *Green Islam, Counter Discourse terhadap Konsep Ekologi Kapitalisme Lanjut*. Yogyakarta: Istana Agency.
- _____, Ahmad Sihabul. 2021. "Green Islam Sebagai Counter Discourse Dalam Mempromosikan Gaya Hidup Ramah Lingkungan (Studi Di Pesantren Ath Thariq Garut Jawa Barat)." Universitas Gadjah Mada. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/204537> (May 29, 2024).
- Mirola, William A. 2003. "Religious Protest and Economic Conflict: Possibilities and Constraints on Religious Resource Mobilization and Coalitions in Detroit's Newspaper Strike." *Sociology of Religion* 64(4): 443–61. doi:10.2307/3712335.
- Morris, Aldon D. 1984. *The Origins of the Civil Rights Movement*. Simon and Schuster.
- Mufid, Mohd. 2020. "Green Fatwas in Bahtsul Masāil: Nahdlatul Ulama's Response to the Discourse on the Environmental Crisis in Indonesia" pada *Jurnal al-Ihkam*, Vol 15, No. 2, h. 174-200.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1996. *Religion and Order of Nature*. New York: Oxford University Press.
- Nasr, Seyyed Hossein. 1990. "Islam and the Environmental Crisis." *Islamic Quarterly* 34(4): 217.
- Nepstad, Sharon Erickson. 2004. *Convictions of the Soul: Religion, Culture, and Agency in the Central America Solidarity Movement*. Oxford University Press.
- Nilan, Pam. 2021. "Muslim Youth Environmentalists in Indonesia." *Journal of Youth Studies* 24(7): 925–40. doi:10.1080/13676261.2020.1782864.
- Pachauri, R. K., Leo Mayer, and Intergovernmental Panel on Climate Change, eds. 2015. *Climate Change 2014: Synthesis Report*. Geneva, Switzerland: Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Paus Fransiskus. 2015. *Ensiklik LAUDATO SI*. Eds. P. Martin Harun. Jakarta: Penerbit Obor. <https://www.sesawi.net/wp-content/uploads/2015/09/LAUDATO-si.pdf>.

- Piggot, Georgia. 2018. "The Influence of Social Movements on Policies That Constrain Fossil Fuel Supply." *Climate Policy* 18(7): 942–54. doi:10.1080/14693062.2017.1394255.
- Porta, Donatella della, and Mario Diani. 2009. *Social Movements: An Introduction*. John Wiley & Sons.
- Arumningtyas, Ramadhani, Andi Alimuddin Unde, and Jeanny Maria Fatimah. 2023. "Komunikasi Simbolik Ritual Andingingi: Pesan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Tentang Pentingnya Menjaga Hutan." *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis* 7(1): 19–32. doi:10.24853/pk.7.1.19-32.
- Reuter, Thomas A. 2015. "The Green Revolution in the World's Religions: Indonesian Examples in International Comparison." *Religions* 6(4): 1217–31. doi:10.3390/rel6041217.
- Ritchie, Jane, Jane Lewis, and Gillian Elam. 2013. "Designing and Selecting Samples." In *Qualitative Research Methods*, eds. Laura Maruster and Maarten J. Gijsenberg. SAGE, 77–108.
- Robinson, Glenn., 2012. "Hamis sebagai Gerakan Sosial". In *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, eds. Quintan Wiktorowicz. Penerbit Gading Publishing dan Paramadina, 221–269.
- Rodríguez-Labajos, Beatriz, Ivonne Yáñez, Patrick Bond, Lucie Greyl, Serah Munguti, Godwin Uyi Ojo, and Winfridus Overbeek. 2019. "Not So Natural an Alliance? Degrowth and Environmental Justice Movements in the Global South." *Ecological Economics* 157: 175–84. doi:10.1016/j.ecolecon.2018.11.007.
- Rootes, Christopher. 1999. "Environmental Movements: From the Local to the Global." *Environmental Politics* 8(1): 1–12. doi:10.1080/09644019908414435.
- Sadeq, AbulHasan M. 2002. "Waqf, perpetual charity and poverty alleviation." *International Journal of Social Economics* 29(1/2): 135–151.
- Safrilisyah and Fitriani. 2014. "Agama dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 16(1): 61–78. doi:10.22373/substantia.v16i1.4918.

- Santoro, Wayne A., and Gail M. McGuire. 1997. "Social Movement Insiders: The Impact of Institutional Activists on Affirmative Action and Comparable Worth Policies." *Social Problems* 44(4): 503-19. doi:10.2307/3097220.
- Shabir, Mohsin, Iftikhar Hussain. 2023. "The role of innovation in environmental-related technologies and institutional quality to drive environmental sustainability." *Environmental Economics and Management* 11: 2-12.
- Simonis, Udo E. 2020. "Ecological Turn-around: Trends and Perspectives." *Acta Prosperitatis* 11: 156-163.
- Singerman, Diane, 2012. "Dunia Gerakan-gerakan Sosial Islamis yang Berjejaring". In *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, eds. Quintan Wiktorowicz. Penerbit Gading Publishing dan Paramadina, 269-306.
- Smidt, Corwin E. 2003. *Religion as Social Capital: Producing the Common Good*. Baylor University Press.
- Shiva, Vandana, Maria Mies, Kelik Ismunanto, and Lilik dan Mies. 2005. *Ecofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Yogyakarta: IRE Press.
- Smith, Angela, and Simone Pulver. 2009. "Ethics-Based Environmentalism in Practice: Religious-Environmental Organizations in the United States." *Worldviews: Global Religions, Culture, and Ecology* 13(2): 145-79. doi:10.1163/156853509X438580.
- Smith, Christian. 1996. *Resisting Reagan: The U.S. Central America Peace Movement*. Chicago, IL: University of Chicago Press. <https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/R/bo3641367.html> (January 22, 2024).
- Smith, Christian. 2014. *Disruptive Religion: The Force of Faith in Social Movement Activism*. Routledge.
- Smith, Jonathan D, Ronald Adam, and Samsul Maarif. 2024. "How Social Movements Use Religious Creativity to Address Environmental Crises in Indonesian Local Communities." *Global Environmental Change* 84: 102772. doi:10.1016/j.gloenvcha.2023.102772.

- _____. Jonathan D. 2018. "Connecting Global and Local Indonesian Religious Environmental Movements." *Jurnal Kawistara* 7(3): 207–25. doi:10.22146/kawistara.25908.
- Snow, David A. 2004. "Framing Processes, Ideology, and Discursive Fields", in David A. Snow, Sarah A. Soule, and Hanspeter Kriesi (ed.), *The Blackwell Companion to Social Movements*. UK: Blackwell Publishing Ltd.
- _____. David A., Rens Vliegthart, and Catherine Corrigan-Brown. 2007. "Framing the French riots: A comparative study of frame variation." *Social Forces* 86(2): 385-415.
- Snow, David A. E, Burke Rochford, Steven K. Worden, and Robert D. Benford. 1986. "Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation", In *American Sociological Review*, Vol. 51, No. 4.
- Stark, Rodney, and Roger Finke. 2000. *Acts of Faith: Explaining the Human Side of Religion*. University of California Press.
- Steffen, Paul B. 2019. "Ecological Conversion and Eco-Spirituality." *Nurt SVD* 145(1): 267–84.
- Steffen, Will, Paul J. Crutzen, and John R. McNeill. 2007. "The Anthropocene: Are Humans Now Overwhelming the Great Forces of Nature?" *Ambio* 36(8): 614–21.
- Stewart-Kroeker, Sarah. 2019. "Exploring New and Renewed Eco-Spiritualities: French Contributions to Environmental Ethics." *Journal of Religious Ethics* 47: 790–817.
- Suharko, Suharko. 1998. "Model-Model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 2(1): 374-99. doi:10.22146/jsp.11158.
- Suryadi, Muhammad. "Nahdlatul Ulama dan Isu Lingkungan (Komitmen NU Mewujudkan Keadilan Ekologi dan Sumber Daya Alam)" *Jurnal Mimikri* 9(1): 122-134.
- Sustiwi, Fadmi. 2017. *Din Syamsuddin: dari Sumbawa untuk Dunia*. Bandung: Mizan Pustaka.

- Tarrow, Sidney. 1998. *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge University Press.
- Taylor, Bron. 2010. *Dark Green Religion*. Berkeley: University of California Press.
- Thies, Cameron G. 2002. "A Pragmatic Guide to Qualitative Historical Analysis in the Study of International Relations." *International Studies Perspectives* 3(4): 351–72. doi:10.1111/1528-3577.t01-1-00099.
- Tilly, Charles. 1978. *From Mobilization to Revolution*, Reading, Mass.: Addison Wesley.
- Tremblay, Marie-Claude, Debbie H. Martin, Ann C. Macaulay, and Pierre Pluye. 2017. "Can We Build on Social Movement Theories to Develop and Improve Community-Based Participatory Research? A Framework Synthesis Review." *American Journal of Community Psychology* 59(3–4): 333–62. doi:10.1002/ajcp.12142.
- Tucker, Mary Evelyn, John A. Grim, and Willis Jenkins. 2017. *Routledge Handbook of Religion and Ecology*. Abingdon New York (N. Y.): Routledge Earthscan from Routledge.
- Umadevi, V. 2013. "Case Study–Centrality Measure Analysis on Co-Authorship Network." *Journal of Global Research in Computer Science* 4(1): 67–70.
- van der Heijden, Anton, Ruud Koopmans, and Marco Giugni. 1992. "The West European Environmental Movement." In *The Green Movement Worldwide*, JAI Press, 1. <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:112898> (January 22, 2024).
- Villamayor-Tomas, Sergio, and Gustavo García-López. 2018. "Social Movements as Key Actors in Governing the Commons: Evidence from Community-Based Resource Management Cases across the World." *Global Environmental Change* 53: 114–26. doi:10.1016/j.gloenvcha.2018.09.005.
- Walder, Andrew G. 2009. "Political Sociology and Social Movements." *Annual Review of Sociology* 35(1): 393–412. doi:10.1146/annurev-soc-070308-120035.

- Walker, Melanie. 2005. "Amartya Sen's capability approach and education." *Educational action research* 13(1): 103-110.
- Wang, Guang-Xu. 2013. "Policy Network Mapping of the Universal Health Care Reform in Taiwan: An Application of Social Network Analysis." *Journal of Asian Public Policy* 6(3): 313-34. doi:10.1080/17516234.2013.850229.
- Watling, Tony. 2008. "The field of religion and ecology: Addressing the environmental crisis and challenging faiths." *Religion: Beyond a Concept*, 473-488.
- White Jr, Lynn. "The historical roots of our ecologic crisis." *Science* 155.3767 (1967): 1203-1207.
- Wibowo, S. Bernadus, dan Woro M. Caritas. 2019. *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan & Menyelamatkan Lingkungan: Telaah Kritis Etika Ekofeminis Vandan Shifa*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Wickham, Carrie Rosefsky, 2012. "Kepentingan, Gagasan, dan Dakwah Kelompok Islamis di Mesir". In *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, eds. Quintan Wiktorowicz. Penerbit Gading Publishing dan Paramadina, 221-269.
- Wijzen, Frans. 2021. "Environmental Challenges in Indonesia: An Emerging Issue in the Social Study of Religion." *Journal of Asian Social Science Research* 3(1): 1-14. doi:10.15575/jassr.v3i1.30.
- Wiktorowicz, Quintan. 2012. *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*. (Tim Penerjemah Paramadina, Penerjemah). Yogyakarta: Gading Publishing & Yayasan Wakaf Paramadina.
- Williams, Rhys H. 2003. "Religious Social Movements in the Public Sphere: Organization, Ideology, and Activism." In *Handbook of the Sociology of Religion*, ed. Michele Dillon. Cambridge: Cambridge University Press, 315-30. doi:10.1017/CBO9780511807961.022.
- Wilson, Edward O. 1993. "Biophilia and the Conservation Ethic" in Kellert S.A Wilson E.O. (ed.), *The Biophilia Hypothesis*. Washington: Shearwater Books.
- _____, Edward O. 2006. *The Creation: A Meeting of Science and Religion*. New York: W. Norton & Company.

- Yaakob, A., Mahzir, N., Supaat, D. I., Zakaria, M. Z., Wook, I., & Mustafa, M. 2017. "Waqf as a means of forest conservation: Alternative for Malaysia." *Advanced Science Letters* 23(5): 4860-4864.z
- Yafie, Alie. 1994. "Norma Fiqh Dan Masalah Lingkungan Hidup." In *Menggagas Fiqh Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Higga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 132-42.
- Yafuz, Hakan M., 2012. "Ruang-ruang Kesempatan, Identitas, dan Makna Islam di Turki". In *Gerakan Sosial Islam: Teori, Pendekatan, dan Studi Kasus*, eds. Quintan Wiktorowicz. Penerbit Gading Publishing dan Paramadina, 493-524.
- Zainuddin, Faiz. 2021. "Perspektif Fiqih Terhadap Lingkungan." *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 2(1): 41-52. doi:10.35316/alhukmi.v2i1.1414.
- Zald, Mayer N., and John David McCarthy. 1987. *Social Movements in an Organizational Society: Collected Essays*. Transaction Publishers.

Majalah/Koran/Internet

- "Survei Nasional Green Islam PPIM UIN Jakarta." 2024. Dipresentasikan dalam Launching Hasil Survei Nasional "Green Islam Setengah Hati? Potret Muslim Ramah Lingkungan di Indonesia," Jakarta. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2024/07/23/press-release-dua-wajah-agama-dalam-pelestarian-lingkungan-survei-nasional-green-islam-ppim-uin-jakarta/>.
- Akbar, Adrial. 2023. "Aksi Greenpeace Bawa 'Gurita' ke Kolom HI Bubarkan, 12 Orang Diamankan." *DetikNews*. <https://news.detik.com/> (May 10, 2024).
- Alliance of Religions and Conservation. "The Story of the Indonesian Muslim Conservation Movement." *Alliance of Religions and Conservation*. <http://www.arcworld.org/newsd41a.html?pageID=908> (May 6, 2019).
- Berita Aceh. 2023. "HAKA Luncurkan Modul Dakwah Perlindungan Satwa Liar bagi Pemuka Agama di Aceh." *Berita Aceh*.



- <https://beritaaceh.co.id/haka-luncurkan-modul-dakwah-perlindungan-satwa-liar-bagi-pemuka-agama-di-aceh/> (May 10, 2024).
- Berita Yudha. "Tarmizi Taher: Hidup Tanpa Moral dan Agama Rusak Lingkungan". *Berita Yudha*, (August 13, 1996).
- BNPB. "Sejarah Berdirinya BNPB". *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. <https://www.bnpb.go.id/sejarah-bnpb> (May 12, 2024).
- Bodetti, Austin. 2018. "Indonesia's Eco-Theology: An Islamic Environmental Consciousness." *The New Arab*. <https://www.newarab.com/analysis/indonesias-eco-theology-islamic-environmental-consciousness> (May 12, 2024).
- Dewayanti, Aninda. 2022. "What Can We Learn from Indonesian Muslim Environmentalism?". *Eco-Business*. <https://www.eco-business.com/opinion/what-can-we-learn-from-indonesian-muslim-environmentalism/> (May 25, 2024).
- EEA. "At A Glance." *European Environment Agency*. <https://www.eea.europa.eu/en/topics> (January 22, 2024).
- Efendi, David. 2021. "Menjadi Kader Hijau Muhammadiyah." *Kumparan*. <https://kumparan.com/david-efendi-1615791284070942903/menjadi-kader-hijau-muhammadiyah-1war7iOSiwr> (May 13, 2024).
- FOSS Climate Talk - Roundtable Discussion Agama, Ideologi, dan Lingkungan (FOSS Climate Talk - Roundtable Discussion Agama, Ideologi, dan Lingkungan). (2024, July 19). In UIII Official <https://www.youtube.com/live/NhJgcvNbvmE>
- Gregorius Bramantyo. "Warga Piyungan Bantul Tolak Pembangunan RDF Milik Pemkot Jogja." *Jawa Pos*. <https://radarjogja.jawapos.com/>, (March 7, 2024).
- Grossman, Kristina. 2019. "'Green Islam': Islamic Environmentalism in Indonesia." *New Mandala*. <https://www.newmandala.org/green-islam/> (January 23, 2024).
- Hakim, M. Arief. "Manuver-manuver Spektakuler Gus Dur". *Bernas*, (February 8, 1992).

- Humanitarian Forum Indonesia (HFI). "Sejarah HFI." *Humanitarian Forum Indonesia*. <https://www.humanitarianforum.or.id/sejarah/> (April 23, 2024).
- Hutari, Fandi. 2021. "Ambisi senjata nuklir Sukarno, gagalnya pembangkit listrik Soeharto." *Alinea*. <https://www.alinea.id/nasional/senjata-nuklir-sukarno-gagalnya-pembangkit-listrik-soeharto-b2cAE96Rv> (Juli 19, 2024).
- IPCC. "Global Warming of 1.5 °C —." *Intergovernmental Panel on Climate Change*. <https://www.ipcc.ch/sr15/> (July 18, 2023).
- IPCC. 2014. "AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 — IPCC." *Intergovernmental Panel on Climate Change*. <https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/> (July 15, 2023).
- KLHK. 2016. "Indonesia Menandatangani Perjanjian Paris Tentang Perubahan Iklim." Siaran Pers KLHK, (April 23, 2024).
- Kompas. "Australia Khawatir Bila PLTN Dibangun di Muria". *Kompas*, (January 26, 1994)
- MDMC. 2024. "Danone Indonesia - MDMC: Kerjasama Untuk Banjir Jawa Tengah." *MDMC*. <https://mdmc.or.id/danone-indonesia-percaya-kmdmc-salurkan-bantuan-korban-banjir-jawa-tengah/> (May 25, 2024).
- MLH Muhammadiyah. 2018. "Berikan Santunan dari Sedekah Sampah". *Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah*. <http://lingkungan.muhammadiyah.or.id/berita-13488-detail-berikan-santunan-dari-sedekah-sampah.html> (May 05, 2024).
- NASA. 2021. "Evidence: How Do We Know Climate Change Is Real?" *Global Climate Change: Vital Signs of the Planet*. <https://climate.nasa.gov/evidence> (July 15, 2023).
- Sejarah WALHI. n.d. *Sejarah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)*, [https://www.walhi.or.id/sejarah#:~:text=Kamis%20malam%2C%20tanggal%2015%20Oktober.Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%20\(WALHI\)](https://www.walhi.or.id/sejarah#:~:text=Kamis%20malam%2C%20tanggal%2015%20Oktober.Lingkungan%20Hidup%20Indonesia%20(WALHI)) (May 05, 2024).

- SIPSN KLHK, <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (May 7, 2024).
- Taufani, Muhammad Reza Ilham. 2024. "Organisasi Islam Terbesar RI, NU apa Muhammadiyah?" *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240403160423-128-528006/organisasi-islam-terbesar-ri-nu-apa-muhammadiyah> (June 10, 2024).
- Tempo. 1994. "Dari Alam ke Nuklir". *Tempo*. (January 22, 1994).
- UNEP. "UN Environment Programme." *UNEP - UN Environment Programme*. <http://www.unep.org/explore-topics> (January 22, 2024).
- UNEP. 2019. "UN Environment 2018 Annual Report." *UNEP - UN Environment Programme*. <http://www.unep.org/resources/un-environment-2018-annual-report> (January 23, 2024).
- UNFPA Indonesia. 2023. Profil Pemimpin Perempuan Indonesia dalam Penanggulangan Bencana. *UNFPA Indonesia*. <https://indonesia.unfpa.org/en/publications/profil-pemimpin-perempuan-indonesia-dalam-penanggulangan-bencana/> (May 10, 2024).
- United Nations. "Causes and Effects of Climate Change." *United Nations*. <https://www.un.org/en/climatechange/science/causes-effects-climate-change> (July 18, 2023).
- United Nations. 2023. "What Is Climate Change?" *United Nations*. <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change> (July 15, 2023).
- WMO. 2023. "WMO annual report highlights continuous advance of climate change." <https://public.wmo.int/en/media/press-release/wmo-annual-report-highlights-continuous-advance-of-climate-change> (July 15, 2023).
- World Risk Report. 2022. "World Risk Report 2022 - Focus: Digitalization." <https://reliefweb.int/report/world/worldriskreport-2022-focus-digitalization> (November 11, 2023).

Yayasan Hadji Kalla. "About Yayasan Hadji Kalla." *Yayasan Hadji Kalla*.
<https://www.yayasanhadjikalla.or.id/about-us/> (May 21, 2024).

Yeung, Peter. 2023. "The World's Best Rainforest Guardians Already Live There." *Washington Post*.
<https://www.washingtonpost.com/climate-solutions/2023/05/01/indonesia-rain-forest-guardians/> (June 2, 2024).

Dokumen

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam.

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perburuan dan Perdagangan Satwa Liar Menurut Perspektif Syariat Islam.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 001/MUNASIX/MUI/2015 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk Membangun Infrastruktur Sanitasi Masyarakat

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Air Daur Ulang.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 86 Tahun 2023 tentang Hukum Pengendalian Perubahan Iklim Global.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang Seluas + 313,99 (Tiga Ratus Tiga Belas dan Sembilan Puluh Sembilan Per Seratus) Hektar di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan Keuangan Yayasan Hadji Kalla. Tahun Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 LAZ Yayasan Hadji Kalla. *Yayasan Hadji Kalla*. https://is.yayasanhadjikalla.co.id/assets/upload/notisi_audit/64755b65427f6.pdf (May 27, 2024).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2021. "Materi MUNAS & KONBES 2021".

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). 2021. "Rekomendasi Mukhtamar Ke-34 Nahdlatul Ulama Lampung, 23 Desember 2021".

PROFIL PENULIS

Testriono adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta sejak 2008. Selain itu, sejak 2023 ia menjadi pengajar Program Ilmu Politik dan MPP di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Ia meraih gelar Ph.D. dalam Ilmu Politik dengan jurusan Politik Perbandingan dan Administrasi Publik dari Northern Illinois University, AS, pada 2022. Ia adalah Hybl Fellow tahun 2017 di International Foundation for Electoral Systems (IFES), di Virginia, AS. Ia juga peneliti senior di Populi Center. Minat penelitiannya mencakup berbagai subjek termasuk demokrasi, perbandingan politik, dan politik subnasional. Tulisannya telah dipublikasikan di berbagai jurnal, antara lain *Governance* dan *Contemporary Southeast Asia*.

Ismatu Ropi adalah Guru Besar Ilmu Perbandingan Agama di Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menyelesaikan Ph.D. dari Australian National University (ANU) pada 2012 dengan penghargaan Ann Bates untuk disertasi terbaik di ANU dalam Kajian Indonesia. Prof. Ismatu pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta periode 2019-2023 dan saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta. Minat studinya mencakup teori agama, gerakan keagamaan baru, hubungan agama dan kenegaraan di Indonesia, serta heresiologi dalam studi agama-agama. Ia aktif menulis beberapa artikel dan buku tentang agama dan negara, Islam dan masyarakat sipil, serta pendidikan Islam di Indonesia. Tulisannya telah dipublikasikan di berbagai jurnal, antara lain *The Muslim World* dan *Studia Islamika*.

Aldi Nur Fadil Auliya adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta. Ia meraih gelar MA dalam Ilmu Politik dari Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) pada 2023. Tesisnya, *The Political Origins of Religious Rigidity and Flexibility*, memenangkan penghargaan Dean's Prize for Best MA Thesis in Comparative Politics. Selama studinya, ia juga mendapatkan penghargaan Paper Mahasiswa Terbaik. Beberapa karyanya telah dipresentasikan dalam berbagai konferensi akademik baik nasional maupun internasional. Minat penelitiannya meliputi perbandingan politik, politik Indonesia, politik Malaysia, demokratisasi, partai politik, politik elektoral, politik Islam, politik dan lingkungan, dan hubungan internasional di dunia Muslim. Selain itu, ia aktif menulis artikel opini yang terbit di berbagai media seperti *The Jakarta Post*, *Republika*, *TIMES Indonesia*, dan *Islami[dot]co*.

Dedy Ibmar merupakan peneliti di PPIM UIN Jakarta. Ia menyelesaikan pendidikan pasca-sarjana pada Departemen Filsafat Modern, Ural Federal University Russia, melalui beasiswa pemerintah Rusia setelah sebelumnya menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, pada jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. Pada tema-tema seputar Metafisika dan Filsafat Ilmu, ia telah menerbitkan beberapa buku, antara lain, *Tuhan Yang Berpikir* (Pustaka Obor, 2020) dan *Tuhan dan Ruang* (YPM, 2018). Ia juga telah menerjemahkan beberapa buku ke bahasa Indonesia, misalnya seperti *Materialisme dan Empiriokritisisme* (V. Lenin, Mori, 2023) dan *Setelah Keterhinggaan* (Q. Meillassoux, Basa-Basi, 2020). Di luar tema filsafat, Dedy Ibmar memiliki minat lainnya pada isu-isu sosial seputar gerakan sosial dan sosiologi agama.

Savran Billahi adalah peneliti di PPIM UIN Jakarta dengan minat penelitiannya pada pendidikan kelas menengah Muslim, sejarah sains dan pendidikan, hubungan agama-negara, dan politik internasional dunia Muslim. Ia meraih gelar sarjana dari Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia dan gelar master dari Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Türkiye, melalui beasiswa pemerintah Türkiye. Beberapa penelitiannya pernah diterbitkan, antara lain, "Pesantren ve Endonezya Müslüman Orta Sınıfı'nın Kimlik Arayışı" pada *Türkiye'de Endonezya Çalışmaları-I* (Ankara: Ankara University Asia-Pacific Research Center APAM, 2022), *Jalan Perang & Dagang* (Jakarta: Alvabet, 2022), *Bangkitnya Kelas Menengah Santri, Modernisasi Pesantren*

di Indonesia (Jakarta: Prenada, 2018), dan pada *Ensiklopedi Pemuka Agama Nusantara* (Jakarta: Kemenag RI 2016). Ia juga aktif menulis artikel opini yang terbit di berbagai media seperti *Koran Sindo*, *Tirto.id*, *Media Indonesia*, *Harian Kompas*, dan lainnya.

Tati Rohayati merupakan peneliti di PPIM UIN Jakarta sejak 2014. Ia mendapat gelar sarjana dari program Bidikmisi di UIN Jakarta pada 2014 dengan kajian “Kebijakan Turki Utsmani di Hijaz 1512-1566 M”. Pada 2022, ia mendapat gelar magister humaniora dari universitas yang sama dengan kajian “Islam dan Nasionalisme: Sidang *Volksraad* (Dewan Rakyat) 1918-1942”, berkat dukungan dari Azyumardi Azra Scholarship, STF UIN Jakarta. Selain peneliti di PPIM, Tati juga terlibat sebagai peneliti di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta sebagai penulis *Ensiklopedi Sejarah Islam (ESI) Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud*. Minat penelitiannya mencakup sejarah Islam masa kolonial, pendidikan Islam, serta isu-isu kontemporer. Beberapa tulisannya antara lain, “Belajar dari Sejarah Wabah di Cirebon (*Jurnal Lembaran Sejarah*, 2020)”, “Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif (2016)” bersama Amelia Fauzia dkk., “Cross Cultural Educational Exchanges between Indonesia and Japan” (*Studia Islamika*, 2017), “Penguatan Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Memutus Rantai Kekerasan Seksual di Pesantren (2022)”, *Homeschooling Menakar Ketahanan dan Kerentanan (2020)*”.



Menggunakan kerangka teori gerakan sosial, buku ini memotret kemunculan dan kekuatan gerakan lingkungan yang diprakarsai dan dimotori oleh berbagai organisasi dan komunitas Muslim di Indonesia. Menggabungkan data dari *desk research*, diskusi kelompok terarah, wawancara, dan observasi, buku ini menyajikan temuan empiris tentang aktivisme lingkungan tidak hanya di organisasi besar Islam, seperti NU dan Muhammadiyah, tetapi juga dari berbagai inisiatif yang tumbuh di banyak komunitas Muslim di Indonesia, baik yang bergerak dalam skala nasional maupun lokal.

“Buku yang ditulis oleh para peneliti PPIM UIN Jakarta ini memberi wawasan luas dan menawarkan kajian komprehensif tentang “Green Islam” sebagai gerakan sosial yang dinamis di Indonesia. Buku ini adalah bacaan penting bagi mereka yang tertarik pada lingkungan hidup Muslim global, gender dan lingkungan, pemikiran dan praktik lingkungan di *Global South*, dan cara-cara unik berbagai organisasi dan kelompok keagamaan mempengaruhi aktivisme lingkungan.”

– **Prof. Anna M. Gade, Ph.D.**, Vilas Distinguished Achievement Professor, Nelson Institute for Environmental Studies, University of Wisconsin, Amerika Serikat; penulis buku *Muslim Environmentalisms: Religious and Social Foundations* (Columbia University Press, 2019)

“Buku *Gerakan Green Islam di Indonesia* ini karya yang signifikan karena belum pernah ada identifikasi dan *mapping* yang komprehensif mengenai *whose doing what* di Indonesia dalam ruang lingkup Islam dan lingkungan hidup.”

– **Dicky Sofjan**, ICRS-UGM; Vice President of Globethics; dan CEO Nglanggeran Eco-Village

“Buku ini menjadi salah satu kajian terbaik yang mendiskusikan peta dan posisi gerakan lingkungan Muslim yang merepresentasikan kalangan masyarakat madani Green Islam.”

– **Fachruddin M. Mangunjaya**, Ketua Pusat Pengajian Islam, Universitas Nasional; Dekan Fakultas Biologi dan Pertanian, Universitas Nasional

“Hasil riset yang mendalam ini tidak hanya relevan sebagai rujukan ilmiah, tetapi juga sebagai inspirasi bagi komunitas Muslim untuk berperan aktif menghadapi krisis lingkungan dengan semangat keadilan dan keberlanjutan.”

– **Hening Parlan**, Aktivis Lingkungan Perempuan; Koordinator Nasional GreenFaith Indonesia; dan penerima penghargaan “Planet Award” dari Kedutaan Besar Inggris di Jakarta



Kingdom of the Netherlands

ISBN 978-602-346-155-4 (PDF)



9 786023 461554

Kampus: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Kec. Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15412